Asosiasi Pengusaha Indonesia

PENGUSAHA BERSATU
INDONESIA MAJU

Laporan Tahunan

2023

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SAMPOERNA untuk Indonesia

111 Tahun Sampoerna untuk Indonesia: Ciptakan Efek Berganda Inklusif Sepanjang Rantai Nilai

Sejak didirikan pada tahun 1913, PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) terus berkomitmen menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional dan berperan aktif dalam mendorong hilirisasi industri dalam negeri.
Komitmen ini merupakan bentuk kontribusi Sampoerna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan melalui penciptaan dampak nyata bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pemegang saham, mitra usaha, hingga masyarakat luas.

Investasi Berkelanjutan

Sejak tahun 2005, Sampoerna telah **berinvestasi lebih dari US$6,5 miliar** di Indonesia. Investasi berkelanjutan ini merupakan bukti kepercayaan Sampoerna dan perusahaan induknya, Philip Morris International (PMI) akan kepastian iklim investasi dan usaha di Indonesia.

Salah satu investasi terbaru Sampoerna adalah fasilitas produksi untuk produk tembakau inovatif bebas asap bagi IQOS dengan **realisasi investasi senilai lebih dari US$300 juta sampai dengan akhir tahun 2023.** Investasi ini telah memberikan nilai tambah berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas riset, penyerapan tenaga kerja berketerampilan tinggi, pembelian pasokan tembakau lokal, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mencakup dukungan digitalisasi dan peningkatan kapasitas peritel tradisional, pengoperasian pusat layanan digital, serta peningkatan kinerja ekspor.

Investasi di Segmen Padat Karya

Seiring dengan perjalanan transformasinya, Sampoerna tetap memastikan cikal bakal bisnis perusahaan tetap terjaga, yakni segmen sigaret kretek tangan (SKT) yang padat karya. Pada awal tahun 2024, Sampoerna telah memulai **realisasi rencana penyerapan puluhan ribu tenaga kerja** melalui pembukaan fasilitas produksi SKT Sampoerna dan penambahan Mitra Produksi Sigaret (MPS) di berbagai kota/kabupaten di Pulau Jawa. Investasi ini akan memperkuat posisi Sampoerna sebagai salah satu kontributor utama bagi perekonomian Indonesia serta mendukung prioritas pemerintah untuk hilirisasi industri.

Penyerapan puluhan ribu tenaga kerja ini menjadi tambahan bagi **total karyawan Sampoerna yang telah mencapai lebih dari 90.000 tenaga kerja pada awal 2024**, baik langsung maupun tidak langsung, yang 90% di antaranya adalah pekerja fasilitas produksi SKT.

Di samping meningkatkan kesempatan kerja di sektor formal bagi masyarakat setempat, Sampoerna optimistis investasi ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan di wilayah-wilayah tersebut.

Efek Berganda yang Inklusif

Sampoerna percaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif. Oleh karena itu, perusahaan melakukan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekosistem yang lebih luas yang mencakup keseluruhan rantai nilai industri tembakau, mulai dari petani tembakau dan cengkih yang menyediakan bahan baku produksi, komunitas tempat Sampoerna beroperasi, hingga UMKM Indonesia.

Sampoerna mengembangkan UMKM Indonesia melalui dua program utama, yaitu **Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC)** bagi UMKM secara umum yang sudah berjalan sejak 2007, serta **Sampoerna Retail Community (SRC)** khusus untuk pengembangan toko kelontong sejak 2008. Melalui kedua program tersebut, UMKM binaan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha agar lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta dukungan digitalisasi bagi toko kelontong maupun toko grosir melalui ekosistem digital AYO by SRC.

Sejak tahun 2009, Sampoerna konsisten menjalankan **program kemitraan** dengan petani tembakau dan cengkih di Indonesia melalui pemasok. Sampoerna bermitra dengan lebih dari 22.000 petani tembakau dan cengkih pada tahun 2023.

SETC
Sampoerna Entrepreneurship Training Center
>70.000
Peserta Pelatihan

SRC
Toko Kelontong Masa Kini
250.000

Program Kemitraan
>22.000
Petani Mitra

Asosiasi Pengusaha Indonesia

PENGUSAHA BERSATU
INDONESIA MAJU

Laporan Tahunan
2023

DAFTAR ISI

Visi & Misi APINDO iii

Sambutan Ketua Umum APINDO iv

Komposisi dan Personalia DPN APINDO 2023 - 2028 vii

Sekretariat DPN APINDO xiii

Daftar Ketua dan Alamat Sekretariat DPP APINDO xiv

Advokasi & Kebijakan Publik 1

Program Unggulan APINDO 21

Bidang UMKM dan Koperasi 33

Kegiatan Dewan Pimpinan Nasional APINDO 41

Kegiatan Dewan Pimpinan Provinsi APINDO 85

VISI & MISI APINDO

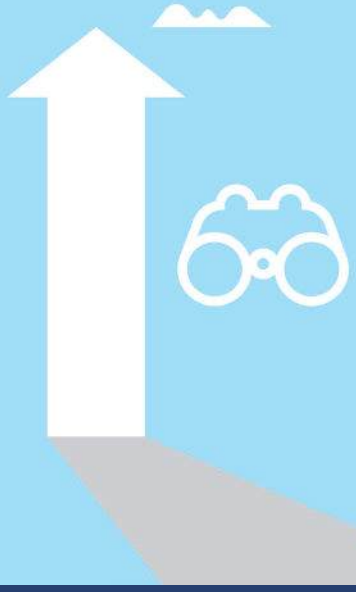

Visi

Mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan kerja.

Misi

1. Mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, produktif dan berkeadilan;
2. Melindungi, memberdayakan dan membela seluruh pelaku usaha termasuk UMKM;
3. Berperan aktif dalam mempertahankan dan meningkatkan investasi;
4. Berperan aktif dalam proses advokasi dan konsultasi penyusunan kebijakan Pemerintah.

SAMBUTAN KETUA UMUM APINDO

Salam hangat untuk semua.

Melihat perjalanan organisasi pengusaha ini setahun ke belakang, kita perlu berbangga telah mengukir sebuah *milestone* baru dalam proses transisi organisasi yang sudah berusia 72 tahun ini. Pertengahan tahun lalu, tonggak kepengurusan APINDO untuk periode tahun 2023 - 2028 telah dikukuhkan, demi meneruskan kepemimpinan luar biasa dari Bapak Hariyadi Sukamdani. Kepemimpinan beliau telah memberi pondasi kuat bagi organisasi ini untuk terus melangkah, memperkuat peranan strategis APINDO sebagai aktor penting dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif untuk penciptaan lapangan kerja. Visi ini tentunya bukan hanya terkait iklim usaha di tingkat nasional, tapi juga iklim usaha di daerah.

Kita perlu secara konsisten menjadi mitra pemerintah yang sudah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun tersebut, kita punya ambisi menjadi negara dengan PDB terbesar ke-5 di dunia. Cita-cita besar itu bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi ideal bisa kita jaga sebesar rata-rata di atas 6% per tahun. Untuk itu, APINDO membulatkan tekad untuk mendukung mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang krusial bagi Indonesia, dengan harapan menjadi lompatan bagi bangsa ini untuk keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju di tengah berbagai tantangan.

Tantangan terbesar makro-ekonomi dan perubahan global yang kita hadapi saat ini adalah: persistensi tren perlambatan pertumbuhan dunia dan Indonesia pasca pandemi COVID-19. Indonesia dan kawasan Asia diperkirakan hanya akan tumbuh 2/3 dari tren pertumbuhan sebelum pandemi. Kita juga menghadapi krisis dan tantangan multi dimensi. Di antaranya yakni ketidakpastian karena konflik dan tensi geopolitik yang terus meningkat; ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok dan fragmentasi rantai pasok global; krisis perubahan iklim; juga peningkatan kompleksitas ekonomi yang didorong percepatan adopsi teknologi, digitalisasi ekonomi sampai dengan intelijensi buatan (AI).

Selain untuk menghadapi tantangan global tersebut, program kerja di kepengurusan baru juga kita canangkan untuk mendukung pencapaian visi besar dalam menyokong target pemerintah Indonesia, yang mencakup Penguatan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan UMKM, Peningkatan Investasi, Peran aktif Advokasi, Penguatan Organisasi, Kemandirian APINDO dan Pengembangan Jejaring. Jangan lupakan juga Program Aksi Unggulan APINDO sebagai langkah nyata mendukung Indonesia Maju, di antaranya melalui transformasi *human capital* sebagai *key enabler*, melalui pengembangan program KIPAS Stunting serta sertifikasi HR-IR. Tak ketinggalan Program Aksi Unggulan kita untuk mendukung transformasi kebijakan demi mewujudkan inklusivitas ekonomi, melalui program UKM Merdeka, serta tentu saja: *Roadmap* Perekonomian APINDO.

Road Map Perekonomian APINDO yang telah secara konsisten disusun setiap lima tahun sejak 2004, adalah *strategic tools* APINDO bagi kepemimpinan nasional dalam menentukan arah dan langkah konkrit yang perlu dilakukan untuk mencapai visi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peta jalan tersebut kemudian kita serahkan kepada seluruh kandidat Calon Presiden sebagai bentuk netralitas organisasi ini, yang kemudian dilanjutkan dengan Dialog APINDO dengan para Calon Presiden yang telah terselenggara pada akhir 2023. Dialog ini tidak hanya menjadi bentuk advokasi kita dengan menyajikan sejumlah isu prioritas yang menjadi rekomendasi dunia usaha, namun juga membahas sejumlah program ekonomi para kandidat yang akan diusung dalam kepemimpinan baru Indonesia.

Tahun 2023 lalu, kita juga sukses menggelar *Indonesia Digital Summit* yang mencerminkan adaptasi dunia usaha dalam transformasi ekonomi Indonesia, *Industrial Relations Conference*, peluncuran UMKM Merdeka, hingga Gerakan Anak Sehat (GAS) Kipas Stunting.

Di samping itu, memperkuat peranan organisasi dan mewujudkan penguatan organisasi internal tentu saja perlu menjadi prioritas APINDO. Bagaimana APINDO bisa menjadi organisasi yang lebih kuat dengan meningkatkan sinergi dengan pengurus dan pemerintah daerah. Bagaimana kita bisa meningkatkan keterwakilan APINDO secara kelembagaan dalam dialog hubungan industrial, khususnya untuk lembaga tripartit pusat dan daerah. Bagaimana kita konsisten menjalankan peran advokasi kebijakan untuk konsistensi implementasi regulasi iklim usaha. Semuanya menjadi pekerjaan rumah bersama.

Untuk itu, kita telah melakukan rapat koordinasi, termasuk pemaparan program kerja setiap bidang dan koordinasi seluruh Indonesia. *Member Gathering* yang mengundang para Anggota Luar Biasa dilaksanakan secara reguler, agar para anggota memiliki info terkini untuk mengembangkan kebijakan, beradaptasi dengan ketentuan baru. Tak ketinggalan, kunjungan kerja ke sejumlah daerah, untuk memperkuat konsolidasi antar seluruh bagian dan anggota organisasi.

Untuk Advokasi dan Kebijakan Publik, di tahun lalu kita telah menyampaikan pandangan kepada pemerintah dan media atas hampir 50 topik, yang mencakup Kebijakan Ketenagakerjaan, Isu Krusial Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Kerjasama Bipartit dan Tripartit, juga kebijakan sektoral seperti Perdagangan dan Kesehatan. Kita juga secara konsisten menyiapkan *holding statement, policy brief,* serta *policy standpoint* yang menjadi rujukan bersama terhadap arah organisasi APINDO. Tak lain untuk memperkuat fungsi menjadi jembatan advokasi kepentingan dunia usaha.

Tantangan 2024 masih mengemuka. Kita perlu tak kenal lelah memberi kontribusi bagi Indonesia tercinta, rumah kita bersama. Kolaborasi adalah kunci, untuk konsisten memberi sumbangsih bagi negeri ini. Pengusaha Bersatu, Indonesia Maju.

Shinta W. Kamdani
Ketua Umum APINDO

Tantangan 2024 masih mengemuka. Kita perlu tak kenal lelah memberi kontribusi bagi Indonesia tercinta, rumah kita bersama. Kolaborasi adalah kunci, untuk konsisten memberi sumbangsih bagi negeri ini. Pengusaha Bersatu, Indonesia Maju.

Shinta W. Kamdani
Ketua Umum APINDO

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2023 - 2028

Dewan Pertimbangan :

KETUA	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS
Sofjan Wanandi	Sudhamek	Hariyadi Sukamdani	Suryadi Sasmita

ANGGOTA :

Anindya Bakrie	Alexander Tedja	Boy Thohir	Budiarsa Sastrawinata
Djohan Emir Setijoso	Djoko Susanto	Eddy Sariatmadja	Eddy Sugianto
Edwin Soeryadjaya	Franky O. Wijaya	Gandi Sulistiyanto	Gunawan Lim

Hamid Awaludin

Harijanto

Hendro Gondokusumo

Husodo Angkosubroto

Johny Darmawan

Kiki Barki

Kuncoro Wibowo

M. Arsjad Rasjid

Mardjoeki Atmadiredja

Martias

Mintardjo Halim

Mucki Tan

Prayogo Pangestu

Prijono Sugiarto

Putri K. Wardani

Raam Punjabi

Robert Budi Hartono

Rosan P. Roeslani

Sri Prakash Lohia

Sugianto Kusuma

Sukanto Tanoto

Theodore P. Rachmat

Dewan Pimpinan Harian :

Shinta W. Kamdani
Ketua Umum

Sanny Iskandar
Wakil Ketua Umum

Eddy Hussy
Wakil Ketua Umum

Franky Sibarani
Wakil Ketua Umum

Aloysius Budi Santoso
Sekretaris Umum

M. Aditya Warman
Wakil Sekretaris Umum

Lucia Karina
Wakil Sekretaris Umum

Hendra Widjaja
Wakil Sekretaris Umum

Anggana Bunawan
Wakil Sekretaris Umum

Rahmad Widjaja Sakti
Wakil Sekretaris Umum

Soegianto Nagaria
Bendahara Umum

Lindrawati Widjojo
Wakil Bendahara Umum

Ang Kok Bin
Wakil Bendahara Umum

Ketenagakerjaan

Bob Azam
Ketua Bidang

Darwoto
Wakil Ketua Bidang

Kebijakan Publik

Sutrisno Iwantono
Ketua Bidang

Danang Girindrawardana
Wakil Ketua Bidang

Investasi

Pandu Sjahrir
Ketua Bidang

Daniel Budiman
Wakil Ketua Bidang

Industri Manufaktur

Bobby Gafur Umar
Ketua Bidang

Rahmat Harsono
Wakil Ketua Bidang

UMKM & Koperasi

Ronald Walla
Ketua Bidang

Arief Budiman
Wakil Ketua Bidang

Hubungan Internasional

Catharina Widjaja
Ketua Bidang

Didit Ratam
Wakil Ketua Bidang

Perdagangan

Anne Patricia Sutanto
Ketua Bidang

Adhi Lukman
Wakil Ketua Bidang

Infrastruktur

Denon Prawiraatmadja
Ketua Bidang

Andre Rahardian
Wakil Ketua Bidang

Perhubungan & Logistik

Carmelita Hartoto
Ketua Bidang

Adrianto Djokosoetono
Wakil Ketua Bidang

Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Maulana Yusran
Ketua Bidang

Yuno Abeta Lahay
Wakil Ketua Bidang

Properti & Kawasan Ekonomi

Haryanto Adikoesoemo
Ketua Bidang

Adrianto P. Adhi
Wakil Ketua Bidang

Perikanan & Peternakan

Hendra Sugandhi
Ketua Bidang

Krissantono
Wakil Ketua Bidang

Perkebunan & Kehutanan

Arif Rahmat
Ketua Bidang

Sihol Aritonang
Wakil Ketua Bidang

Industri Kesehatan

Irawati Setiady
Ketua Bidang

Jonathan Sudharta
Wakil Ketua Bidang

Energi & Sumber Daya Mineral

Eka Satria
Ketua Bidang

Febriany Eddy
Wakil Ketua Bidang

Digital

Neneng Goenadi
Ketua Bidang

Tirza Reinata Munusamy
Wakil Ketua Bidang

Perbankan & Jasa Keuangan

Tigor M. Siahaan
Ketua Bidang

Anika Faisal
Wakil Ketua Bidang

Pendidikan & Keterampilan

Arini Subianto
Ketua Bidang

Jimmy Gani
Wakil Ketua Bidang

Pembangunan Keberlanjutan

Axton Salim
Ketua Bidang

Nurdiana Darus
Wakil Ketua Bidang

Hubungan Antar Lembaga

Sarman Simanjorang
Ketua Bidang

Parlindungan Purba
Wakil Ketua Bidang

Organisasi

Anthony Hilman
Ketua Bidang

Muliawan Margadana
Wakil Ketua Bidang

SEKRETARIAT
DEWAN PIMPINAN NASIONAL APINDO

Direktur Eksekutif : Rudolf Saut
Direktur APINDO Research Institute : P. Agung Pambudhi
Finance Controller : Jemmy Kusnadi
Direktur Operational ISPC : Diana M.Savitri

Dari kiri ke kanan baris I :

Tuti Suharti, Anisa Alfadillah, Iwan Zulkarnain, Septiyan Listiya E. R, Kanthi Widiarti S.

Dari kiri ke kanan baris I :

Rifki Nur Triyanto, M. Setiadi, Jefri Andika P, Nur Andini Auliani, Popy Meilani Erwanti, Artiah Fitri, Gita Asri, Astrie Noviandini, Edi M.S. Silaban, Andri Prasetyo, Tri Adi Prasetyo

Tidak tampak dalam gambar :
Roely Poerwaningtyas, Safira Nur Sabrina, Walid Ananti Dalimunthe

DAFTAR KETUA DAN ALAMAT SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) APINDO

Nanggroe Aceh Darussalam
Ketua : H. Ramli, SE
Jl. Tgk Blang No.78, Kp. Mulia,
Kel. Kp Mulia, Kec. Kuta Alam
Kota Banda Aceh
Telp/Fax: 0761-8656545
E-mail: acehapindo@gmail.com

Sumatera Utara
Ketua : Prof. Dr. Haposan Siallagan
Grand Jati Janction Lt. 25
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 A
Medan, Sumatera Utara 20218
Telp/Fax: 0852 6111 3882
E-mail: apindosu@yahoo.co.id

Riau
Ketua : Wijatmoko Rah Trisno, SE
Ruang Meranti lantai 1 Hotel furaya
Jl. Jend Sudirman No.72 Pekanbaru 28292
T. 0761-7891818
F. 0761-7891818
E-mail: apindo_riau@yahoo.com
riau@apindo.or.id

Kepulauan Riau
Ketua : Cahya
Menara Aria, Office Towet Lt. 7, #08-09,
Harbour Bay, Jalan Duyung, Batu Ampar,
Kota Batam. 29453
T : 0811-7005-758 (Rickie)
E : sekretariat@apindo-kepri.com

Sumatera Barat
Ketua : Rina Pangeran
Jl. Ir. H. Juanda No. 79, Flamboyan Baru,
Sumatera Barat, 25115
T. (0751) 7051333 / 0811661069
E-mail : dppapindosumbar@gmail.com
Website : www.apindosumbar.com

Jambi
Ketua : John Kennedy
Jl. Ismail Malik Blok B No. 28,
Mayang Mengurai, Alam Barajo,
Kota Jambi, Jambi, 36129
T. 0741 - 420 38
F. 0741 - 420 38
E-mail : jambi@apindo.or.id

Sumatera Selatan
Ketua : Sumarjono Saragih
Jl. Brigjend Hasan Kasim
Komplek Jaya Raya Garden No. C-3
Palembang, Sumsel (30116)
T. 0711- 813154
F. 0711- 813154
E-mail : sumsel@apindo.or.id

Bangka Belitung
Ketua : Nuradi Wicaksono
Sparkling Taste No. 03 Citraland
Botanical City, Kel. Bacang,
Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang,
T. 0717 9120 469
HP. 082181513655
E-mail : dppapindobabel@gmail.com

Lampung
Ketua : Ary Meizari Alfian
Jl. Jl. Gajah Mada No. 17 B
Bandar Lampung (35241)
T. 072 -258 614
F. 0721-261 327
E-mail : hariyanto.black75@gmail.com

Banten
Ketua : Yakub F. Ismail, S.E., M.M
Komplek Pemda No. A/29
Kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten
T. (0254) 8483436 / (0254) 914 4849
F. (0254) 8483436 / (0254) 212 741
E-mail : banten@apindo.or.id
Website : www.apindobanten.com

DKI Jakarta
Ketua : Solihin
Jl. Cikini I No. 3 B
Jakarta Pusat
T. 021-7970365 / 797 0323
F. 021-797 0018
E. apindodki@gmail.com

DAFTAR KETUA DAN ALAMAT SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PROPINSI (DPP) APINDO

Jawa Barat
Ketua : Ning Wahyu Astutik
Hotel eL Royale Lt. 2, Ruang 12 C
Jalan Merdeka No.2, Bandung
T. 022-730 3029
F. 022-732 3131
E-mail :apindo.jabar@yahoo.co.id

Jawa Tengah
Ketua : Frans Kongi
Ruko Semarang Indah
Blok E II No. 28. Jl. Madukoro Raya
Semarang (501444)
T. 024 - 766 32990
F. 024 - 766 32989
E-mail : jawatengah@apindo.or.id

DI Yogyakarta
Ketua : Buntoro
Gedung Mega Andalan Kalasan
Jl. Tanjung Tirto No.34-36
Yogyakarta (55571)
T. 0274-496393, 497068, 7838844
F. 0274-496226
E-mail : apindodiy@yahoo.co.id
priharsonodrupa@yahoo.com

Jawa Timur
Ketua : Eddy Widjanarko
Jalan Ir Soekarno Hatta No 31 (MERR)
Surabaya
T. 031-561 5436, 031-5614865
F. 031-561 5436
E-mail : apindo_jtm@yahoo.co.id

Bali
Ketua : Nengah Nurlaba, SH
Jl. Menuh No. 6 Denpasar (80235)
T. 0361-263 243/751 816
F. 0361-263 243/756 647
E-mail : apindobali@dps.centrin.net.id
apindobali_dpp@yahoo.co.id

Nusa Tenggara Barat
Ketua : I Wayan Jaman Saputra
Jl. Kecubung No. 6 Gomong Lama
Mataram
T. 0370-634 680 (Komang),
0370-644 873 (Rika)
F. 0370-634 680
E-mail : ntb@apindo.or.id

Nusa Tenggara Timur
Ketua : Bobby Pitoby
BPR Central Pitoby
Jl. Jenderal Sudirman No. 136
Kupang NTT 85119
T. 081236224141 / 08133826818
E-mail : nttdppapindo@yahoo.co.id

Kalimantan Utara
Ketua : Peter Setiawan
Jalan Kusuma Bangsa RT 7 (Ruko DPP
Apindo Kaltara), Kel. Gunung Lingkas,
Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan,
Kalimantan Utara - 77127
T. +62 8547141692
E-mail : nttdppapindo@yahoo.co.id

Kalimantan Barat
Ketua : Herry Johannes
Jl. Parit Haji Hussein 2 Gang Hidayah 1
No 88, Kel. Bangka Belitung Darat,
Pontianak, Kalbar, 78124.
T. 0561-739 777
F. 0561-739 828
E : ed-pers-ro@timber.lyman.co.id

Kalimantan Tengah
Ketua : Frans Martinus
Gedung Batang Garing L3 Kav. 307
Jl. DI Panjaitan No. 1 Palangkaraya
T. 0536-324 2218
F. 0536-324 2217
E-mail : apindo_kalteng@yahoo.com

Kalimantan Timur
Ketua : M. Slamet Brotosiswojo
Jl. Letkol H. M. Asnawi Arbain No.98 A,
Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kaltim 76114
T. 0542 - 7212466
F. 0542 - 7212488
E-mail : apindokaltim@yahoo.com

Kalimantan Selatan
Ketua : DR. Supriadi, Spd, MM
Jln Perdagangan Ruko HKSN Blok D
Kav 7, Banjar Utara, Banjarmasin
T. 0511 - 4315592
F. 0511 - 4315592
E-mail : kalsel@apindo.or.id
apindo.kalsel@yahoo.com

DAFTAR KETUA DAN ALAMAT SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PROPINSI (DPP) APINDO

Sulawesi Utara
Ketua : Nicho Lieke
Kompleks Bahu Mall, Blok N1,
Jl. Wolter Monginsidi, Manado
HP: 0813-5686-7713 (Bp. Hence)
T. 0431-846457, 0431-51560
F. 0431-866889
E-mail : Nico_Lieke@yahoo.com

Gorontalo
Ketua : Dra. Hj. Marhani Usman, SH
Jl. Taki Niode No.59, Ipilo
Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo 96134
HP: 0812-4106-0001 (Yanuar V)
T. 0435-821678
E-mail :
dppapindoprovinsigorontalo@gmail.com

Sulawesi Barat
Ketua : Andri Prayoga Singkarru, Msc
Jl. Martadinata Kantor LPJKP
Mamuju, Sulbar 9100191
T / F : -

Sulawesi Tengah
Ketua : Achrul Udaya
Jln. RA. Kartini No.10 Palu,
Sulawesi Tengah
T. 081354666781, 0811456 811
F. 0451 - 456 556
E-mail : dpp.apindo.sulteng@gmail.com

Sulawesi Selatan
Ketua : Suhardi
Jl. Opu Daeng Risadju No. 218
(Depan Stadion Mattoanging),
Makassar, Sulsel 90122
HP: 0821-9444-7787 (Andi)
T. 0401 - 3125178, F. 0401 - 3125697
E-mail : dppapindo.ss@gmail.com
Website : apindosulsel.org

Sulawesi Tenggara
Ketua : Ir. Abu Syarif Bafadal, MM
Jl. Bunggasi No.49, Anduonohu,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231
T. 0811-400-336
E: apindosultra@gmail.com

Maluku Utara
Ketua : Ir. Gazali
Jl. Lumba-lumba No. 106 Kel. Toboleu,
Ternate Utara, Maluku Utara. (Renov)
Alternatif: Jl. Bola No. 544 (Samping
PAUD), Kel. Toboleu, Ternate Utara,
Maluku Utara 97726
HP: 0813-4263-6607 (Ir. Gazali Abd. Mutalib)
E-mail : dppapindomalutara@gmail.com

Maluku
Ketua : Robert Tanamal
Jl. Cendrawasih Gg. Vina
SK 3/2 No. 7, Ambon (97123)
T. 0911-341 257
F. 0911-354 952

Papua Barat
Ketua : James Taroreh
Jl. Brawijaya No. 4 Manokwari
Papua Barat (98311)
T. (0986) 211723
F. (0986) 215281
E-mail : apindopabar@ymail.com

Papua
Ketua : Ir. Tulus Sianipar
Jl. Mandala Dok 5 Atas No. 2, Jayapura,
Papua, 99351
E-mail : apindopapua@yahoo.com

01

ADVOKASI & KEBIJAKAN PUBLIK

ADVOKASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN

1. Undang-Undang Cipta Kerja – Klaster Ketenagakerjaan

Fleksibilitas pasar tenaga kerja sebagai respon terhadap rigiditas pasar tenaga kerja Indonesia yang tercermin dalam klaster Ketenagakerjaan di Undang Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 disambut positif oleh dunia usaha. Namun demikian harapan tersebut melemah akibat ketidakpastian hukum sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Ketidakpastian tersebut berlanjut ketika pemerintah merubah substansi klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja melalui penerbitan PERPPU 2/2022 dan kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 yang menimbulkan ketidakpastian usaha. Dua reformasi mendasar dalam klaster ketenagakerjaan yaitu mengenai Upah Minimum (UM) dan Alih Daya *(outsourcing)* kembali ke spirit UU 13/2003. Kenaikan UM tidak lagi hanya mengikuti kenaikan inflasi atau pertumbuhan ekonomi namun menjadi inflasi, pertumbuhan ekonomi dan 'inteks tertentu lainnya'; alih daya yang di UU Cipta Kerja tidak dibatasi kembali dibatasi. Sebelum terbitnya PERPPU hal tersebut didahului dengan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan Undang Undang yang dirujuknya yaitu UU Cipta Kerja dan PP 36/2021, dan kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2023.

2. PP 35 tahun 2021 – Substansi Alih Daya

Alih daya berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja terampil baru khususnya ditengah terjadinya perubahan kebutuhan keterampilan *(shifting skill needs)* dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Data dalam *Future of Jobs Reports* 2018 menunjukkan 65% perusahaan dalam menghadapi terjadinya *shifting skill needs*, butuh untuk mengalihdayakan fungsi atau pekerjaannya ke pada perusahaan lain.

Semangat revisi PP 35 Tahun 2021 mengenai alih daya diharapkan dapat memperkuat paradigma bahwa alih daya merupakan pekerja terampil dan kompeten. Pelindungan terhadap hak-hak pekerja alih daya tetap menjadi hal utama dalam implementasinya, sebagaimana secara normatif telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 6 tahun 2023.

3. PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan

Upah minimum merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja khususnya pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar. Pembayaran selain dari upah minimum merupakan kewenangan pengusaha dan juga pekerja secara bipartit sesuai dengan produktivitas dan kemampuan perusahaan.

Pengupahan menjadi aspek yang krusial dalam pertimbangan investor dalam memutuskan investasi di suatu negara. Aspek penting dalam pengupahan, khususnya dalam penetapan upah minimum adalah terproyeksi, stabil dari segi normatif yang tidak berubah-ubah, dan penetapan dari kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Formula upah minimum tidak lagi hanya mengikuti kenaikan inflasi atau pertumbuhan ekonomi namun menjadi inflasi, pertumbuhan ekonomi dan 'inteks tertentu lainnya' sebagaimana telah diadopsi menjadi PP 51/ 2023 tentang Pengupahan.

4. Omnibus Law RUU Kesehatan

RUU Kesehatan telah disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diperoleh dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada tanggal 14 Februari 2023. RUU Tentang Kesehatan (versi Paripurna) yang terdiri dari 478 pasal ini akan mengubah, menghapus dan/atau menetapkan beberapa pengaturan baru dalam Pasal 424 sampai dengan 425, yang secara substansi akan merubah UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

APINDO senantiasa mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pekerja di dalamnya. Reformasi pelayanan kesehatan melalui Jaminan Sosial khususnya bagi pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan tentu sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu di satu sisi dan kendali biaya di sisi lainnya agar persoalan kesehatan pekerja tertangani dengan baik dengan

beban biaya yang tidak memberatkan. RUU yang disusun dengan metode Omnibus Law yang terkait berbagai Undang Undang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut.

APINDO mengkhawatirkan bahwa pelayanan kesehatan bagi pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan terancam kualitas pelayanannya akibat sejumlah pengaturan dalam RUU. Hal tersebut mengingat BPJS Kesehatan akan diwajibkan untuk menerima kerjasama yang diajukan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang telah memenuhi perizinan sesuai undang-undang yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan prinsip sukarela kerjasama BPJS Kesehatan dengan Faskes (pasal 23 UU SJSN) sehingga membatasi BPJS untuk melakukan seleksi atas Faskes yang memenuhi syarat pelayanan. Akibatnya potensial terjadi Faskes tidak dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik bagi peserta karena terjebak dalam birokrasi pemerintahan.

Dunia usaha juga melihat biaya penyelenggaraan BPJS Kesehatan potensial meningkat yang dapat berujung pada kenaikan iuran peserta yang akan membebani pekerja dan pemberi kerja. Hal ini disebabkan tugas BPJS Kesehatan yang pada dasarnya untuk pelayanan yang bersifat promotif, kuratif dan rehabilitatif harus juga melaksanakan penugasan-penugasan lainnya dari Kementerian yang membidangi Kesehatan, sementara dalam UU BPJS (pasal 13 UU BPJS) tidak terdapat pengaturan tersebut. Penugasan dari Kementrian yang bukan merupakan tugas BPJS Kesehatan potensial membebani Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS. DJS yang merupakan milik peserta dapat tergerus untuk melaksanakan tugas tugas Kementerian yang semestinya dibiayai dari sumber APBN. Akibatnya, peserta yang harus menanggung biaya tugas tersebut melalui iuran yang dibayarkannya. Hal ini bertentangan dengan salah satu dari 9 prinsip SJSN dalam mengelola dana amanat yaitu bahwa DJS yang merupakan dana yang terkumpul dari iuran peserta dan merupakan dana titipan kepada BPJS yang perlu dikelola dan harus digunakan untuk sebesar besarnya kepentingan peserta.

APINDO mengharapkan klaster Jaminan Sosial dikeluarkan dari RUU Kesehatan khususnya pada Pasal 423 s.d Pasal 425, agar lebih dapat menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pekerja/ peserta dan tidak menyebabkan beban biaya tambahan bagi pekerja dan pemberi kerja.

Penyusunan RUU Kesehatan melalui metode *Omnibus Law* (OL) diharapkan fokus pada rumpun bidang yang merupakan lingkup kewenangan Kementerian Kesehatan untuk reformasi kesehatan dan tidak menerabas lingkup bidang lainnya. Jika dimasukan untuk perbaikan kebijakan terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui OL, sebaiknya dilakukan khusus OL Jaminan Sosial.

5. Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan – Substansi Ketenagakerjaan

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 "UU Kesehatan" disahkan pada tanggal 8 Agustus 2023, UU Kesehatan memiliki 458 Pasal dengan jumlah halaman sebanyak 300 lembar. UU Kesehatan mencabut 11 Undang-Undang lainnya yang juga mengatur mengenai Kesehatan. Beberapa ketentuan pidana dari UU Kesehatan ini akan digantikan Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("UU KUHPidana") berlaku efektif.

Untuk menyikapi terbitnya Draft RPP UU Kesehatan, APINDO membuat Daftar Inventarisasi Masalah dari Draft RPP UU Kesehatan yang dikirimkan oleh APINDO pada tanggal 20 September 2023.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah tersebut, APINDO memberikan masukkan terhadap 5 (lima) bagian, yaitu :

a. Kesehatan ibu
b. Kesehatan bayi & anak
c. ASI Ekslusif
d. Kesehatan Remaja
e. Kesehatan Sekolah.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Pelayanan kelas rawat inap standar diharapkan dapat diintegrasikan dengan mekanisme *coordination of benefit* (CoB) secara berkeadilan yang didukung seluruh *stakeholder*. Peserta yang ingin naik kelas dapat memanfaatkan CoB dengan asuransi komersial atau pembayaran pribadi untuk membayar selisih biaya untuk naik kelas – tentu peserta harus menjalani mekanisme rujukan berjenjang. Untuk dapat terlaksananya CoB, diperlukan sinergi kerjasama BPJS, Rumah Sakit dan Asuransi Swasta yang bersepakat untuk menerapkannya secara berkeadilan dan rasional dari sisi kualitas pelayanan dan biaya. Peran Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, Asosiasi Asuransi Komersial dan Kementerian Kesehatan sangat diperlukan.

Dunia usaha mendukung Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan demi keadilan dan kesinambungan program tanpa penambahan iuran. Pelaku usaha pada dasarnya mendukung rencana implementasi kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan karena menyadari perlunya . kesamaan tingkat pelayanan untuk asuransi sosial. Dunia usaha juga paham keterbatasan ketahanan dana BPJS tidak memungkinkan untuk pelayanan di atas pelayanan/kelas standar. Di sisi lain dengan implementasi kelas rawat inap standar diharapkan tidak ada kenaikan iuran peserta yang akan menjadi beban perusahaan dan pekerja.

Pelayanan kelas rawat inap standar harus disertai jaminan standar kualitas layanan kesehatan yang setara. Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) yang ditentukan Kementrian Kesehatan harus diterapkan sama di seluruh fasilitas pelayanan KRIS. Dengan KDK yang mengatur prasyarat fisik ruang rawat inap beserta fasilitasnya (luas ruangan, ventilasi, AC, kasur, kamar mandi, fasilitas medis, dll.) diharapkan memberikan tingkat pelayanan yang setara antar Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Implementasi KDK dapat diterapkan secara bertahap menyesuaikan kemampuan RS dalam melakukan renovasi fisik RS agar sesuai ketentuan KDK.

7. Rancangan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Mengenai rencana pemerintah untuk mengatur ulang iuran program program BPJS Ketenagakerjaan sebagai implementasi UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) perlu penerapan RIA *(Regulatory Impact Assessment)* secara berkualitas agar tidak menyimpang dari tujuan jaminan sosial. *Cost and Benefit Analysis* harus dilakukan dengan baik dengan partisipasi aktif dunia usaha dalam rentang waktu penyusunan kebijakan secara rasional. Harus dihindari pelibatan *stakeholder* yang hanya formalitas dan dalam rentang waktu yang pendek karena tidak akan menghasilkan input yang bermakna.

Secara substansi implementasi UU P2SK agar tidak terlalu jauh masuk dalam ranah pengaturan jaminan sosial karena meskipun terkait wealth management yang perlu dioptimalkan sebagaimana tujuan UU P2SK, namun substansinya mesti masuk dalam rumpun UU Jaminan Sosial, bukan Keuangan. Peraturan turunan UU P2SK semestinya terbatas pada *split account* dan besaran proporsinya untuk dana JHT dimana *account* yang bisa diambil sewaktu-waktu maksimal 30%, untuk *account* utama yang 70% hanya bisa diambil saat peserta memasuki masa pensiun agar memiliki dana untuk masa pensiunnya sebagaimana obyektif dari JHT. Dengan cara demikian, *aging population* diharapkan tidak terlalu menjadi beban bagi peserta produktif yang harus menanggungnya.

8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

Informasi jabatan yang mensyaratkan jenis kelamin, tidak sejalan regulasi yang ada. UU tentang Cipta Kerja di Bagian Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa "setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi. Pengertian diskriminasi termasuk di dalamnya berdasarkan jenis kelamin.

Perusahaan yang telah mengikuti ketentuan Perpres 57/23, apakah dapat memperoleh akses terhadap seluruh hasil pelaporan yang terkumpul. Sebagai upaya untuk membantu Pemerintah memenuhi ketersediaan SDM yang memadai bagi dunia industri, maka seyogyanya kami dunia usaha dapat mengetahui (melalui hasil pelaporan SPIK) tentang *skill* apa yang mendesak perlu diupayakan penyediaannya.

9. Rencana Mogok Nasional menjelang akhir tahun 2023 yang disampaikan oleh Serikat Pekerja / Buruh (SP/SB) terkait dengan tuntutan kenaikan Upah Minimum (UM) 2024

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini tidak memberikan ruang adanya mogok kerja karena ketidaksepakatan atas penetapan upah minimum atau proses yang mendahuluinya. Oleh karena itu, apabila aksi Mogok Nasional tetap dilaksanakan oleh para pekerja baik atas kesadaran sendiri maupun ajakan dari organisasi serikat pekerja, apapun tingkatannya, dan karenanya mengganggu kegiatan perusahaan tempatnya bekerja maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai aksi pelanggaran yang dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau peraturan yang berlaku di perusahaan.

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemangangan di Dalam Negeri junto Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Rekomendasi ILO No. 208, 2023 tentang Pemagangan Berkualitas.

Tantangan di bidang ketengakerjaan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih tingginya angka pengangguran. Menurut data BPS pada Agustus 2023 sebesar 7,86 juta orang atau sebesar 5,32%. Jumlah angka pengangguran tersebut justru didominasi oleh angkatan kerja produktif usia 15-24 tahun, kurang lebih

sebesar 1,3 juta orang (16,46%). Masih tingginya angka pengangguran tersebut disebabkan karena masih tingginya kesenjangan kompetensi *(competency gap)* antara lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Pemagangan merupakan konsep belajar sambil bekerja *(learning by doing)*, dimana selama proses magang para peserta tidak hanya belajar teori dan praktik di *workshop* atau ruang praktik, tetapi praktik langsung di tempat kerja yang sesungguhnya layaknya seorang karyawan. Sehingga melalui proses pembelajaran ini, peserta magang dapat secara langsung memperoleh keterampilan dan memperoleh pengalaman bekerja.

Ketentuan tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri telah diatur terakhir dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, dimana salah satu poin penting adalah bahwa pelatihan vokasi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Dalam proses pendidikan vokasi, baik yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun di tingkat Perguruan Tinggi Vokasi salah satu kruikulumnya adalah magang di industri *(internship)*. Selain itu, sehubungan dengan perkembangan zaman dimana semakin beragamnya masalah serta tantangan pada Implementasi Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, serta aspek-aspek baru yang diperkenalkan pada Rekomendasi ILO tentang Pemagangan Berkualitas, 2023 (No. 208), untuk itu APINDO melakukan pendalaman memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai regulasi nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pemagangan di Indonesia.

11. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

APINDO tidak mewakili para Pemberi Kerja PRT dan juga para penyalur PRT, namun masukan dari APINDO guna memastikan semangat pelindungan PRT ini tercapai dan tidak kontraproduktif, serta tidak tumpang tindih atau disharmonisasi dengan peraturan-peraturan di bidang ketenagakerjaan.

Semangat RUU PPRT ini adalah sebagai upaya menjamin penghormatan dan pemenuhan hak PRT dan untuk memperoleh rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak PRT. Sehingga, harus dipastikan jangan sampai pengaturan yang ada malah kontraproduktif dan membuat pemberi kerja enggan mempekerjaan PRT, yang justru merugikan kesempatan PRT bekerja untuk membantu keuangan keluarga

12. RUU Kesejahteraan Ibu & Anak (KIA)

Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenaga-kerjaan mengatur istirahat melahirkan bagi pekerja perempuan adalah 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan dengan upah penuh. Disamping hak tersebut, suami yang mendampingi istri melahirkan berhak untuk tidak masuk bekerja selama 2 (dua) hari dengan upah penuh.

Terkait dengan gagasan untuk menambah istirahat melahirkan bagi pekerja perempuan menjadi 6 (enam) bulan dan cuti bagi suami untuk mendampingi istri yang melahirkan sampai mencapai 40 (empat puluh) hari, yang dituangkan dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).

Merujuk pada data BPS menunjukkan bahwa TPAK perempuan sebesar 53,34% adalah masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan TPAK laki-laki sebesar 82,27%. Dengan penambahan waktu istirahat melahirkan menjadi 6 (enam) bulan dan kesempatan suami mendampingi istrinya selama 40 (empat puluh) hari, dikhawatirkan akan kontra produktif terhadap upaya perluasan kesempatan kerja perempuan. Menurut hemat kami, masalah ini lebih terkait dengan ketersediaan pelayanan dan fasilitas kesehatan pada umumnya.

Untuk mendukung daya saing dan produktivitas nasional, APINDO mengharapkan agar dilakukan pengkajian kembali terhadap konsep RUU KIA dengan melibatkan sebanyak mungkin *stakeholders* terkait.

13. Strategi Nasional Bisnis & HAM

Kegiatan ekonomi dan bisnis acapkali bersinggungan dengan aspek hak asasi manusia (HAM). Misalnya ketika mendapat izin untuk menggarap lahan konsesi, bisa jadi di tempat tersebut masih ada wilayah yang diklaim masyarakat hukum adat. Tentu saja perlu dilakukan berbagai pendekatan yang tepat sehingga menghasilkan penyelesaian yang memberi solusi bagi semua pihak tanpa harus melakukan tindakan yang berpotensi melanggar HAM.

Sebagai upaya mewujudkan mandat konstitusi yang menyebut prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung tingggi nilai HAM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM). Regulasi tersebut memuat 3 (tiga) pilar Bisnis dan HAM yakni kewajiban negara melindungi HAM, tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan.

Sehubungan dengan hal itu, APINDO secara konsisten menghimbau kepada anggota Perusahaan dapat menyediakan lapangan kerja secara adil dengan menghormati hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak pekerja. Perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, memberdayakan perempuan, dan memupuk budaya keragaman. Namun disisi lain, kami berharap Pemerintah dapat memetakan secara jelas bagian aspek ketenagakerjaan dan BHAM ketika ada pelanggaran agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

14. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Komite K3 bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lingkungan perusahaan. Komite K3 Apindo juga ikut berpartisipasi dengan mengikuti pertemuan berkala, termasuk juga partisipasi aktif dalam:

a. Program *Country Coordination Mechanism* (CCM)
b. Penanganan TB di Tempat Kerja
c. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Kerja tahun 2025-2030
d. Penyusunan Strategi dan Program K3 Nasional periode 2020 – 2024
e. Mainstreaming Occupational Safety and Health in the promotion of Fundamental Principles and Rights at Work Roadmap Kesehatan Kerja – Kesjaor, Kemenkes
f. Peningkatan Kapasitas HIV *E-Learning* tentang Pencegahan HIV/AIDS
g. Kepmenaker 68/2004

15. Konvensi ILO

Bidang Ketenagakerjaan dan Jamsos turut berpartisipasi dalam memberikan masukan aturan-aturan yang hendak di konvensi oleh Indonesia, diantaranya:

a. Konvensi ILO No. 88 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Kerja;
b. Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama;
c. Konvensi ILO No. 100 tentang Upah Yang Sama Bagi Pekerja Laki-Laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya;
d. Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
e. Maritime Labour Convention (MLC, 2006), Konvensi Ketenagakerjaan Maritim.
f. Konvensi ILO No. 29 mengenai Kerja Paksa

ISU-ISU KRUSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN & JAMSOS

1. Peningkatan Penerapan Ketenagakerjaan Inklusif dan Setara Untuk Sektor Swasta

Dunia usaha mendukung implementasi *UN guiding principles on human rights and environments* sebagai salah satu pedoman global, dalam relasi bisnis dengan para partnernya. Dengan modal tersebut dunia usaha bersama pemerintah bisa memperluas kesadaran dan praktik bisnis tersebut ke lingkungan usaha yang luas. Pemerintah perlu menjadikannya sebagai program pemerintah dengan segala dukungan anggarannya agar dapat dilaksanakan secara nyata.

Praktik ketenagakerjaan inklusif kesetaraan gender sangat penting selain sebagai wujud implementasi HAM (Hak Asasi Manusia), juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas. Secara umum kebijakan pemerintah dinilai sudah mengakomodir kesetaraan gender dimana tidak ada perbedaan dalam hak hak normatif pekerja misalnya terkait upah, jam kerja dan jaminan sosial. Bahkan kebijakan pemerintah juga mengakomodir kebutuhan khusus perempuan misalnya yang tercermin dalam *cuti datang bulan*. Perusahaan perusahaan besar yang sadar kebutuhan khusus pekerja akibat perbedaan gender juga menyediakan *day-care* perawatan bayi bagi pekerja perempuan yang memiliki anak balita.

Praktik pekerjaan yang sensitif jender bagi perempuan berkontribusi pada produktivitas. Pekerja perempuan yang mendapatkan akses bekerja di tempat kerja sesuai dengan kebutuhannya seperti misalnya bekerja paruh waktu di saat tidak mengurus rumah tangganya, pekerja perempuan rumahan, yang dilindungi hak hak

normatif ketenagakerjaannya sangat penting untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam produktivitas nasional.

Memiliki lingkungan kerja yang inklusif tanpa membedakan latar belakang ras, agama, jenis kelamin, latar belakang sosial, status kesehatan maupun disabilitas menjadi mimpi para pekerja dan para pengusaha. Banyak dilansir bahwa lingkungan kerja yang aman, nyaman, setara dan inklusif menjadi salah satu faktor utama meningkatnya loyalitas dan produktivitas para pekerja.

Beranjak dari kesadaran untuk merealisasikan tempat kerja yang inklusif, maka APINDO bersama dengan perwakilan perusahaan anggota APINDO, perwakilan pekerja, pemerintah, para ahli dan praktisi melaksanakan kegiatan-kegiatan serta menerbitkan pedoman yang bersentuhan dengan isu perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual, disabilitas maupun ketenagakerjaan.

2. Pelatihan Tim Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa korporasi yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual akan dikenai sanksi pidana denda dan restitusi serta dapat dijatuhi pidana tambahan mulai dari pencabutan izin sampai kepada pembubaran korporasi, kunci penting dalam upaya mencegah pelecehan dan kekerasan seksual adalah pemahaman antara perusahaan pekerja untuk tidak memberikan toleransi terhadap tindakan-tindakan pelecehan seksual.

Menanggapi hal tersebut, APINDO bersama ILO Jakarta telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai petunjuk praktis bagaimana pengusaha atau perusahaan melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual serta bagaimana cara dan prosedur untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi, salah satu caranya ialah dengan menerapkan kebijakan dalam menunjuk / membentuk unit kerja khusus / satuan tugas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja.

Sehubungan dengan hal itu, APINDO mengadakan pelatihan unit kerja khusus / satuan tugas di dalam organ perusahaan untuk membantu para pengusaha dalam melakukan pencegahan dan kekerasan seksual di tempat kerja, menerima dan menangani aduan serta memberikan saran-saran untuk menyelesaikannya. Dengan mewujudkan tempat kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual, artinya kita sebagai pengusaha telah memastikan adanya kesetaraan dan kesejahteraan di tempat kerja.

3. Tenaga Kerja Disabilitas

Perhatian negara terhadap pekerja disabilitas semakin meningkat dimana penyerapan tenaga kerjanya naik sangat signifikan. Dibentuknya KND (Komisi Nasional Disabilitas) di tahun 2021 merupakan langkah maju pemerintah untuk penguatan perhatian pada pekerja disabilitas. Kenaikan pekerja disabilitas sangat tinggi di tahun 2022 sebesar 160,18% dari 277.018 di tahun 2021 menjadi 720.748 di tahun 2022 (BPS). Perkembangan tersebut menggembirakan meskipun baru mencapai 0,53% dari total pekerja, masih setengah dari mandat peraturan perundang undangan.

Dunia usaha mengharapkan pemerintah memperbaiki akses pekerja disabilitas terhadap fasilitas umum transportasi agar memudahkan akses pekerja disabilitas ke tempat kerja. Dengan perbaikan akses publik tersebut akan meyakinkan pelaku usaha atas keseriusan pemerintah mendukung pekerja disabilitas. Dengan kepercayaan itu, diyakini bahwa pelaku usaha akan mendukungnya dengan penyiapan sarana dan prasarananya di lingkungan perusahaannya masing masing.

Cara lain untuk mendorong tingkat partisipasi pelaku usaha untuk menyerap pekerja disabilitas adalah dengan kebijakan insentif. Kebijakan kuota pekerja sebesar 1% dari total pekerja dan penerapan sanksi jika tidak dipenuhi dinilai kurang mendorong kemauan perusahaan untuk mendukungnya. Pendekatan insentif diyakini lebih efektif dimana insentif tidak mesti bersifat fiskal namun penghargaan atas kontribusi perusahaan yang bisa menaikkan citra perusahaan.

Pekerja disabilitas di sektor non formal juga perlu mendapatkan perlindungan negara. Pekerja disabilitas yang bekerja tidak sebagai pegawai/karyawan yaitu yang bekerja mandiri, bekerja di keluarga dan bekerja di sektor ekonomi informal lainnya yang jumlahnya cukup besar (sekitar 65% berdasar data Sakernas) perlu mendapat perlindungan negara dari sisi jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta dukungan kemudahan akses infrastruktur dan program program sosial pemerintah.

4. Pemagangan

Sebagai salah satu bentuk sinergitas program Pemerintah dengan Dunia Usaha, APINDO mendukung upaya Pemerintah dalam menggalangkkan program Pemagangan APINDO berpandangan pemagangan menjadi program pelatihan yang akan meningkatkan ketrampilan teknis dan non-teknis bagi calon pekerja. Sementara itu, dari sisi Dunia Usaha, pemagangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan pekerja terampil.

Keterlibatan APINDO dalam menjalankan program pemagangan dilakukan dengan melakukan kerjasama bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Perguruan Tinggi, ILO dan JJC melaksanakan webinar, sosialisasi, dan penerbitan pedoman pemagangan bagi perusahaan disesuaikan dengan Peraturan Menteri No. 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

5. Peningkatan Ketrampilan Kerja

Pengusaha dan Pekerja secara bersama sama menyiapkan diri dalam menghadapi era industri 4.0. Terdapat peluang besar yang harus segera ditangkap terkait kebutuhan tenaga kerja juntuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dengan cara peningkatan skill pekerja Indonesia.

Salah satu isu faktual yang kerap mengemuka adalah terjadinya kesenjangan dan ketidaksesuaian keterampilan *(skill gaps and mismatches)* antara tenaga kerja yang dibutuhkan industri dengan tenaga kerja yang disiapkan baik oleh lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihan.

Merespon hal diataas, APINDO bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk membantu meningkatkan kapasitas dan produktifitas pekerja dalam berbagai program vokasi, melaksanakan kegiatan *pilot project*, *launching* vokasi pelatihan di tiap provinsi, penerapan *triple skilling (skilling-upskilling-reskilling)*, terdapat pembentukan vokasi di 9 (sembilan) daerah, bekerjasama dengan KADIN dan Kemendikbud, APINDO turut mengembangkan program perkawinan antara vokasi dengan dunia industri.

Serta kunjungan Delegasi Bidang Ketenagakerjaan ke Jepang untuk mendapatkan gambaran implementasi hubungan industrial pelaksanaan Pendidikan Vokasi di Jepang. Berdasarkan hasil temuan, hubungan industrial di Jepang relatif lebih matang dan stabil, di mana perusahan dan pekerja berada dalam tingkat kesadaran yang sama terkait pentingnya produktifitas dalam mewujudkan kesejahteraan.

6. *Traning of Trainer Social Dialog* Bersama KSBSI, PUM & CNV

Pada bulan November 2023, Program ToT Dialog Sosial di Indonesia telah disepakati untuk dilanjutkan untuk program 3 (tiga) tahun kedepan, dimana PUM dan CNV sepakat untuk terus mendukung program ini, dan mitra sosial APINDO dan KSBSI akan tetap berperan sebagai organisasi penting dalam melaksanakan program di Indonesia. Selain itu, Pada tanggal 29-20 November 2023 - lokakarya penyegaran selama dua hari akan diadakan dan akan digunakan untuk mengumpulkan praktik terbaik dialog sosial dari para *ex-trainee* (mantan peserta pelatihan tahap 1 dan 2) - termasuk menggali tantangannya, dan untuk memperluas konsep dialog sosial ke sektor-sektor baru seperti sektor energi-pertambangan, dan kesehatan. Lokakarya pelatihan penyegaran ini juga akan digunakan untuk memberikan masukan untuk fase baru program 3 (tiga) tahun mendatang.

Tujuan dari lokakarya penyegaran Program ToT Dialog Sosial di Indonesia adalah:
- Untuk mengetahui sejauh mana perolehan keterampilan dari Kelompok Pelatih yang telah menerima rangkaian pelatihan dari Program ToT Dialog Sosial ToT. Bagaimana dan apa yang telah dipraktikkan? apa yang telah dicapai, termasuk tantangan dan pembelajarannya. Termasuk untuk mengidentifikasi peluang berdasarkan hasil program dan berbagi praktik terbaik yang dapat dijadikan masukan untuk menyusun strategi kelanjutan program.
- Memperluas promosi Dialog Sosial ke hubungan industrial sektoral lainnya (selain sektor Garment dan Kelapa Sawit).
- Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara APINDO dan KSBSI, PUM dan CNV sebagai komitmen bersama untuk melanjutkan Program Dialog Sosial ToT di Indonesia.

7. ***Green Jobs***

Diperlukan pengembangan *skills* spesifik yaitu ketrampilan untuk *green jobs* sejalan dengan meningkatnya kesadaran untuk menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Hal ini sekaligus sejalan dengan berkembangnya *green business/investment* dimana dunia usaha semakin menyadari bahwa bisnis dapat

berkelanjutan diantaranya jika produk dan praktik bisnisnya mendukung kelestarian lingkungan. Agenda mengurangi emisi karbon dalam skala global sudah terasa mempengaruhi pasar tenaga kerja Indonesia dan diyakini perlu dikembangkan terus di masa depan.

Relasi Kerjasama dalam Hubungan Bipartit dan Tripartit

Pemerintah diharapkan melakukan penguatan relasi bipartit yang lebih diprioritaskan di tingkat perusahaan. Ini merupakan pilihan rasional mengingat pekerja di perusahaan yang paling mengetahui tentang dinamika perusahaannya masing masing, dibandingkan SP/SB afiliasi di tingkat daerah. Dengan demikian, kualitas hubungan bipartit diyakini akan meningkat dalam pemenuhan hak hak normatif pekerja, peningkatan ketrampilan, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan sebagainya.

Pemerintah sebagai bagian dari tripartit bersama pemberi kerja dan pekerja diharapkan bertindak berdasar tujuan obyektif tanpa intervensi politik. Sudah pasti pemerintah tidak bisa lepas dari pengaruh ekonomi politik, namun demikian diharapkan tidak mengorbarkan tujuan untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif agar dapat mencapai tujuan perekonomian nasional. Ketegaram pemerintah untuk konsisten dan tidak terseret kepentingan populis jangka pendek sangat diharapkan dalam peran stratejiknya sebagai pemimpin hubungan tripartit pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Spirit relasi bipartit diperkuat ke arah kerjasama untuk optimalisasi manfaat, bukan negosiasi dalam posisi berhadapan antar pihak. Pendapat tersebut diyakini oleh para pimpinan perusahaan, sejalan dengan *best practices* di beberapa negara maju di Asia seperti Jepang dan Singapore. Dalam budaya Indonesia, penting untuk melakukan penguatan dialog sosial bipartit secara reguler dengan pendekatan humanis. Pertemuan pertemuan berkala secara informal dengan berbagai format unik masing masing perusahaan lebih disarankan daripada pendekatan dengan pertemuan pertemuan formal yang kaku dan kurang mampu mewujudkan kedekatan hubungan emosianal antar pihak.

Keterwakilan APINDO dalam Kelembagaan

1. LKS TRIPARTIT NASIONAL

Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) periode 2018-2023 sudah berakhir dan akan memulai periode baru pada masa jabatan 2023-2026. LKS Tripnas merupakan kelembagaan yang dibentuk pemerintah beranggotakan unsur Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja. Para pengurus APINDO yang duduk dalam LKS Tripnas bersama dengan unsur Pekerja dan Pemerintah membahas dan menentukan berbagai kesepakatan stratejik sebagai arah kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

Pertemuan rutin berkala dilakukan oleh para anggota LKS Tripnas dalam berbagai kebijakan dan persoalan ketenagakerjaan baik melalui rapat bidang maupun sidang pleno. Topik pembahasan diantaranya, penguatan keorganisasian unsur-unsur dalam kelembagaan Tripnas, implementasi dan monitoring kebijakan dari transisi undang-undang ketenagakerjaan dengan undang-undang cipta kerja dan lain-lain yang berhubungan dengan hubungan industrial.

2. DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL

Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) periode 2018-2023 sudah berakhir dan akan memulai periode baru pada masa jabatan 2023-2026. Depenas diisi oleh perwakilan Pengurus DPN APINDO untuk memberikan pemikiran mengenai sistem pengupahan yang adil bagi semua pihak, baik Pekerja maupun Pemberi kerja.

Anggota Depenas unsur APINDO aktif terlibat dalam berbagai upaya untuk melakukan tinjauan bagi kebijakan pengupahan yang ideal di masa depan bagi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Diskusi dengan ILO, perguruan tinggi/lembaga riset, dan unsur pekerja dilakukan APINDO untuk mencari alternatif terbaik bagi kebijakan pengupahan, sekaligus untuk membina hubungan kerjasama yang baik dengan para pihak.

Depenas periode 2018-2023 mengalami dua fase kebijakan yang berbeda terkait formula UM (Upah Minimum) yakni sebelum dan sesudah diterbitkan dan diimplementasikannya PP 36/2021 tentang Pengupahan dan Permenaker 18/ 2022 tentang Upah Minimum tahun 2023, perubahan tersebut menyebabkan Depenas harus melakukan *review* atas eksistensi keberadaan dua kebijakan tersebut.

3. DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (DK3N)

Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga merupakan dewan yang strategis bagi APINDO. Keterlibatan APINDO dalam keanggotaan Dewan K3 memberikan berbagai masukan kepada pemerintah atas upaya-upaya peningkatan kualitas K3 yang dapat meminimalisir kasus-kasus K3, tentunya hal ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas karyawan.

4. KOMITE PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Keterwakilan APINDO dalam keanggotaan Komite Pengawas Ketenagakerjaan memberikan berbagai masukan, saran dan pertimbangan dalam mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan terhadap penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia

5. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN)

DJSN merupakan bagian dari struktur pemerintahan sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang *(state auxiliary organs)* dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional. keanggotaan DJSN berasal dari lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan individu.

Keterwakilan APINDO didalam DJSN berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial; mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional; dan mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

6. DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN & BPJS KETENAGAKERJAAN

Berkaitan dengan rencana diundangkannya (R)UU tentang Kesehatan melalui metode *Omnibus Law*, APINDO turut serta dalam perundingan penyusunan kebijakan tersebut. APINDO pada prinsipnya senantiasa mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pekerja di dalamnya.

Namun disisi lain, kami mencermati beberapa pengaturan dalam kebijakan tersebut dapat merugikan pemberi kerja & pekerja. APINDO mengharapkan agar klaster jaminan sosial dikeluarkan dari RUU agar lebih dapat menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta dan tidak menyebabkan beban tambahan biaya bagi pemberi kerja dan pekerja.

7. HUBUNGAN DENGAN ILO

APINDO merupakan salah satu konstituen *International Labour Organization* (ILO). Di tingkat nasional, kerjasama APINDO dengan ILO selama 2023 pada prinsipnya melanjutkan kerjasama yang selama ini telah dijalani. Kerjasama dalam wujud: pertemuan koordinasi reguler tripartit pemerintah-pengusaha-pekerja, pelaksanaan kerjasama proyek dalam berbagai bidang (*skills development*, pengembangan produktivitas, pelaksanan *jobfair*, gender, disabilitas, dll.), fasilitasi *training* bagi APINDO baik di dalam maupun luar negeri, dan sebagainya.

Di forum internasional ILO, Delegasi APINDO sebagai representasi dunia usaha Indonesia mengikuti *International Labour Conference* (ILC) yang diadakan setiap tahun di Jenewa. ILC merupakan Sidang Tahunan Tripartit antara Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja / Serikat Buruh dari seluruh negara anggota PBB. Forum ini membahas berbagai isu ketenagakerjaan di masing-masing negara, termasuk pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi yang sudah berlaku di setiap negara, dan pengesahan Konvensi serta rekomendasi baru.

ILC ke-111 dilaksanakan pada tanggal 5 - 16 Juni 2023 dimana Delegasi RI Unsur Pengusaha di pimpin oleh Ibu Myra M. Hanartani – Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan DPN APINDO dengan anggota delegasi sejumlah 16 (enam belas) orang. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam ILC ke 111 diantaranya :

- Konvensi 98 tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama
- Kebijakan Upah Minimum
- Defrostasi Lingkungan

Fleksibilitas Jam Kerja Solusi Terbaik Cegah Pengurangan Karyawan

APINDO mengimbau kepada para pengusaha khususnya yang bergerak di bidang padat karya dan berorientasi ekspor, agar patuh dan konsisten dengan pengaturan fleksibilitas waktu kerja yang diatur dalam Permenaker

no. 5/2023, dan karena adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh terkait, sehingga tidak ada pekerja/ buruh yang dirugikan.

Pada 7 Maret 2023, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) no. 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, sebagai respon dari permintaan APINDO sebagai wakil dunia usaha bersama KOGA, KOFA, API dan APRISINDO melalui surat no. 0001/APINDO/KOGA/KOFA/ API/APRISINDO/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 mengenai fleksibilitas jam kerja dan hari kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial APINDO, Anton J. Supit mengungkapkan, permintaan tersebut didasari fakta bahwa dengan krisis perekonomian global, telah menyebabkan berkurangnya secara signifikan permintaan pasokan hasil industri Indonesia yang bersifat padat karya, sejak pertengahan tahun 2022, yang kemungkinan belum akan pulih sampai akhir tahun ini.

Permenaker No. 5/2023 telah dibahas melalui forum LKS Tripartit Nasional, hal ini menunjukan bahwa para *stakeholder* utama ketenagakerjaan, dapat memahami perlunya memberikan landasan hukum bagi dunia usaha di sektor tertentu agar dapat menerapkan fleksibilitas jam / waktu kerja. Permenaker No. 5/2023 berlaku untuk komoditas tertentu seperti garmen dan tekstil yang berorientasi ekspor kepada negara tertentu seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor ke negara tertentu yang terdampak perubahan ekonomi global, dapat melakukan penyesuaian waktu kerja dari 40 jam perminggu menjadi 30 jam per minggu dengan penyesuaian upah.

Implikasi Penerapan RUU Kesehatan Terhadap Penyelenggaraan JKN Akuntabel bagi Pekerja & Pengusaha

APINDO menggelar *Forum Group Discussion* (FGD) terkait RUU Kesehatan, sehubungan dengan APINDO memandang terdapat sejumlah pengaturan dalam draft pasal-pasal RUU Kesehatan dengan muatan 478 pasal yang terdiri atas XX Bab yang berkaitan erat dengan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.

APINDO mencermati beberapa substansi dalam RUU Kesehatan yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial mengalami perubahan. Hal ini tercemin dalam pasal 423 menyebutkan bahwa RUU Kes- ehatan mengubah, menghapus dan/atau menetapkan beberapa pengaturan baru yang diatur dalam Pasal 424-425 mengenai revisi UU SJSN dan UU BPJS.

Perombakan yang fundamental terkait penentuan panitia seleksi direksi, dewan pengawas, pen- gendalian oleh Kementerian Kesehatan melalui Dewas dan sistem pelaporan tugas BPJS kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan dan penugasan kementerian yang harus dilaksanakan BPJS bertentangan dengan:

1. Struktur kelembagaan BPJS dan Tata Kelola dalam UU BPJS sudah sesuai dengan tata Kelola Lembaga negara yang bertanggung jawab langsung pada Presiden
2. BPJSLembagahukumpublik sejajar dengan Kementerian
3. BPJS bukan lembaga birokrasi yang didukung APBN, tetapi lembaga independen yang mewakili kepentingan pemberi dana Amanah.
4. Mudahnya intervensi Kementerian terhadap kebijakan penggunaan DJS yang merupakan dana amanah milik peserta.

Evaluasi APINDO atas Pelarangan Terbatas Impor Bahan Baku dalam Implementasi Permendag No. 36/2023

APINDO menyampaikan masukan terhadap memberlakukan secara efektif Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada Maret 2024, berisi pelarangan terbatas dengan mempertimbangkan sejumlah hal.

1) APINDO khawatir bahwa pelarangan terbatas yang tidak tepat berdasarkan sektoral industri akan menimbulkan gangguan rantai pasok di sejumlah industri dalam negeri. APINDO juga melihat industri hulu lokal (pada sebagian industri) belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri sehingga tetap perlu melakukan impor bahan baku produk tersebut.

2) APINDO memperhatikan kepentingan besar pemerintah untuk meningkatkan industri dalam negeri menjadi landasan terbitnya Permendag No. 36/2023, dan telah dengan baik mengatur tata kelola import yang ditujukan

untuk meningkatkan produktifitas industri intermediate dan hilir. Namun APINDO menemukan, dalam beberapa pasal terkait pembatasan importasi bahan baku dan bahan pembantu terdapat kapasitas domestik industri hulu yang sangat terbatas, maka dalam beberapa butir HS Code ini kebijakan strategis perlu direvisi untuk mempermudah importasi bahan baku atau bahan pembantu.

3) APINDO berharap pengaturan lebih lugas dan penindakan tegas penegakan hukum dalam hal importasi produk jadi yang membanjiri pasar Indonesia secara ilegal. Hal ini sudah sangat mengorbankan produk domestik seperti pakaian, sepatu, furnitur dan produk jadi lainnya yang merupakan hasil industri padat karya. Atas dasar ini APINDO sangat mengapresiasi pemerintah yang telah memberlakukan dengan tegas kembalinya sejumlah HS Code Post Border untuk dikembalikan ke Border.

4) APINDO berharap Permendag 36 tahun 2023 tidak menyulitkan sektor retailer yang mempunyai kegiatan usaha yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, karena sektor retail adalah sektor usaha padat karya juga. Untuk itu harmonisasi industri hulu, intermediate, hilir, dan retail perlu dijalankan mengikuti dinamika pasar sehingga daya saing produk dalam negeri tetap terjaga dan berimbang dengan produk impor. Pengkajian harmonisasi *supply chain* ini perlu dilakukan dari waktu ke waktu untuk menghindari inflasi yang berlebih atau banjirnya produk impor di dalam negeri.

5) Peraturan teknis dalam pemberlakuan permendag 36 tahun 2023 ini diharapkan sudah disosialisasikan kepada seluruh stakeholders terkait sehingga tidak terjadi backlog atas rutinitas supply chain di tiap sektor yang terdampak. APINDO juga menghimbau kepada Pemerintah agar sistem elektronik yang menjadi platform ini juga sudah siap sebelum pelaksanaan peraturan ini dijalankan. Karena diperlukan minimal 3 sampai 6 bulan setelah peraturan pelaksanaan serta infrastruktur pelaksanaan, termasuk sistem elektronik terkait Permendag 36/2023 ini siap mengakomodasi semua permohonan perizinan yang masuk. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terkait dapat lancar menjalankan perubahan rutinitas karena aturan baru.

6) APINDO menilai, Permendag no. 36 tahun 2023 tidak memerlukan penundaan implementasi terkecuali pada bahan baku yang belum dan kurang diproduksi di dalam negeri dan apabila peraturan teknis sudah tersosialisasi dengan baik.

7) APINDO juga memandang perlunya evaluasi kebijakan impor bahan pendukung kebutuhan industri yang strategis dan yang berorientasi ekspor. Ada pun contoh komoditas impor yang dibutuhkan, antara lain:
   - Garam industri untuk kebutuhan produksi ekspor industri kertas dan makanan minuman;
   - Besi baja dan turunannya sebagai bahan baku dan bahan penolong serta suku cadang mesin untuk yang diperlukan dalam proses manufaktur, terutama yang tidak diproduksi di Indonesia;
   - Ban kendaraan berat sebagai bahan penolong produksi terutama pengoperasian alat berat di industri tambang dan sejenis;
   - *Monoethylene Glycole* (MEG) untuk kebutuhan produksi polymerisasi industri Sintetik Filament
   - 12 HS Code komoditas bahan baku plastik yang sudah disampaikan kepada pemerintah.

Pajak Hiburan

APINDO menilai bahwa kenaikan pajak hiburan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) melalui UU No. 1 Tahun 2022, yang meliputi jasa hiburan seperti karaoke, diskotek, bar, klub malam, dan spa, dengan tarif yang naik hingga 40% sampai 75%, seharusnya mempertimbangkan kemampuan masyarakat, namun kenyataannya tarif yang diterapkan jauh melampaui standar ideal sekitar 10%. Oleh karena itu, langkah yang diambil pengusaha adalah melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan harapan kebijakan tersebut direvisi sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut karena khawatir akan dampak negatif seperti penurunan konsumsi hiburan dan daya beli masyarakat.

Hilirisasi

APINDO berpendapat bahwa hilirisasi industri menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 dan di tahun 2023, hilirisasi masih belum optimal, pembatasan ekspor menyebabkan over supply produk di dalam negeri karena tidak semuanya terserap dalam industri smelter.

APINDO berpendapat kebijakan hilirisasi harus dilakukan secara komprehensif, dimana *cost & benefit* dari kebijakan pembatasan ekspor perlu dievaluasi, hasil pajak ekspor dikembalikan ke daerah dan penerapan *Sustainable and inclusive downstreaming* (membawa manfaat yang sebesar-besarnya kepada daerah keberadaan tambang/smelter).

3 (tiga) prioritas hilirisasi sesuai Roadmap Perekonomian APINDO adalah:
- Instrumen kebijakan yang tepat
- Pemilihan jenis komoditas yang menjadi fokus hilirisasi, beserta strategi komprehensif mencakup rencana bisnis yang dilengkapi dengan target pencapaian dan rentang waktu menuju industri mandiri yang berdaya saing domestik dan global, dan
- Peta kelola yang tepat terhadap dampak lingkungan.

Standpoint Sebagai Respon APINDO atas Surat Edaran nomor 1 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja / Buruh saat Pemilu 2024

1) Kita semua, termasuk dunia usaha, pekerja dan buruh, wajib turut mensukseskan Pemilihan Umum (PEMILU) sebagai agenda dan event penting negara untuk masa depan bangsa. Untuk itu, semua komponen masyarakat, termasuk pekerja dan dunia usaha, harus mendapat kesempatan berpartisipasi dalam PEMILU dan menggunakan hak pilih dengan baik.
2) Disadari bahwa tidak semua usaha dapat berhenti beroperasi begitu saja saat Libur PEMILU, karena beberapa pertimbangan, yaitu teknis keharusan operasional 24 jam, memenuhi order yang tidak dapat ditunda, memenuhi kebutuhan konsumen dan jasa di hari libur PEMILU atau kebutuhan khusus lainnya.
3) APINDO berharap agar dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Perusahaan untuk mengatur pekerjaan di perusahaan masing-masing, dengan melibatkan Serikat Pekerja dan pengaturan sesuai koridor ketentuan yang berlaku agar baik PEMILU dan usaha tetap berjalan lancar, agar dapat tetap melayani konsumen dengan baik.

APINDO Tolak Tegas Kenaikan Harga Gas Bumi dengan Pertimbangan Dampak Makro

APINDO menolak dengan tegas kenaikan harga gas bumi pada 1 Oktober 2023, sesuai wacana yang digulirkan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Penolakan kenaikan harga gas bumi disampaikan Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO, Bobby Gafur Umar pada Minggu (3/9/2023) di Jakarta, mengingat kenaikan harga gas bumi akan menurunkan daya saing di sektor industri yang berdampak pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan potensi inflasi karena kenaikan harga di masyarakat.

”Kenaikan harga gas bumi bagi produksi akan berdampak secara makro, dalam hal berikut. Pertama, akan mengurangi atau memotong produksi hingga 30% dari total produksi gas Indonesia. Kedua, mengurangi daya beli industri dan pengurangan tenaga kerja. Ketiga, penurunan ekspor Indonesia dan market share berkurang di pasar global. Keempat, penurunan iklim investasi karena Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Kelima, kenaikan harga gas bumi pada akhirnya berpotensi menyebabkan inflasi yang tentu kita semua hindari,” terang Bobby.

Dampak kenaikan harga gas telah dirasakan sejumlah sektor industri, diantaranya pada Industri Makanan yang menggunakan energi gas sekitar 50% dari biaya produksi sehingga dengan kenaikan tersebut akan menurunkan daya saing baik di dalam negeri maupun ekspor global.

Industri makanan yang telah beralih dari bahan bakar fosil ke gas karena menerapkan prinsip ramah lingkungan. Keluhan yang sama juga disampaikan industri tekstil yang mempekerjakan sekitar 3,5 juta pekerja dan masih dalam pemulihan pasca COVID. Industri ini meminta dibatalkannya kenaikan harga gas untuk Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) oleh PGN demi ketahanan industri tekstil nasional.

“APINDO berpandangan bahwa tidak ada alasan bagi PGN untuk menaikkan harga gas bumi dan dunia usaha meminta agar pihak terkait memberikan informasi transparan mengenai perhitungan bahan baku, transportasi dan lainnya sebelum memutuskan kenaikan harga gas bumi,” terang Wakil Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO Rachmat Harsono.

Arahan Pemerintah dalam Perdagangan Secara Elektronik Ciptakan Persaingan Usaha Sehat dan Adil

APINDO mengapresiasi kebijakan Pemerintah dengan melakukan pemisahan *platform social commerce* dan *e-commerce*, karena dinilai dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat *(level playing field)*, melindungi

UMKM dengan menjadikan produk dalam negeri berdaya saing, dan melindungi data pribadi konsumen. Pandangan APINDO tersebut disampaikan sebagai respon atas Rapat Terbatas (Ratas) terkait pengaturan Perdagangan Secara Elektronik. Sebelumnya, Pemerintah mengelar Ratas dalam rangka revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 50 Tahun 2020 tentang Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani mengatakan, ”Penerapan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tanpa keberpihakan diperlukan. Model bisnis e-commerce telah banyak berevolusi dan berdampak pada kelangsungan UMKM, karena itu pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kualitas pertumbuhan dan iklim industri e-commerce tetap dapat memberikan peluang bagi UMKM Indonesia untuk berusaha dan berkembang serta melayani kebutuhan konsumen dengan baik.”

Lebih lanjut, Wakil Ketua Bidang Digital APINDO, Tirza Reinata Munusamy, mengatakan, ”Seperti halnya perdagangan *offline*, pemisahan model bisnis *marketplace* dan produsen serta media sosial dan *e-commerce* akan memastikan tidak ada *platform* yang menguasai rantai perdagangan online dari hulu ke hilir, sehingga meminimalisir potensi praktik monopoli dan praktik persaingan tidak sehat. Dengan dilarangnya *social commerce* untuk bertransaksi, maka hal ini juga dapat menjaga kedaulatan data pribadi warga negara Indonesia sebagai konsumen.” Ia memaparkan, aktivitas dalam memengaruhi permintaan dan penawaran melalui beragam *platform* merupakan bentuk anti persaingan. Perilaku manipulasi pasar tersebut telah dikategorikan illegal pada pasar komoditas dan keuangan, sehingga APINDO mendorong adanya perbaikan dalam pasar ritel.

Menurutnya, kebijakan pemerintah sudah tepat dengan menerapkan persyaratan perizinan standarisasi pada penjual luar negeri serta ambang batas harga minimum USD 100 pada *marketplace crossborder*. Sehingga, di satu sisi produk UMKM dibawah tetap dapat bersaing dan di sisi lain produk impor yang dijual keamanan dan kualitasnya tetap terjamin.

APINDO juga mendorong Pemerintah untuk mengkaji secara berkala terkait logika harga jual dan logika pasar domestik dan internasional juga diperlukan untuk menghindari illegality dan praktik dumping. Pemerintah juga diharapkan dapat melihat negara-negara produsen yang sudah dan sedang menerapkan insentif dari sisi suku bunga serta komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu dari aturan yang sudah ada, termasuk mengkaji mekanisme algoritma, data, dan transparansi demi persaingan usaha sehat.

E-commerce merupakan bagian dari digitalisasi yang terjadi dengan cepat di Indonesia. Terkait hal itu, Shinta Kamdani mendorong agar pemerintah melakukan langkah terkoordinasi, dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Investasi untuk melindungi konsumen dan mendorong pedagang, terutama UKM, agar selalu kompetitif sehingga dapat memajukan hubungan perdagangan dan investasi Indonesia.

”Kita semua, Pemerintah dan sektor swasta, perlu melakukan akselerasi transformasi digitalisasi industri dalam rangka menguatkan pasar dan produk domestik agar berdaya saing. Terkait penguatan UMKM dari segi kompetitif, kapasitas dan perkembangan, APINDO secara berkala melaksanakan pelatihan dibawah program UMKM Merdeka dan kami mengajak UMKM untuk turut berpartisipasi,” tutup Shinta.

Standpoint APINDO Mengenai Penolakan Mahkamah Konstitusi Atas Gugatan Buruh Terkait UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang diajukan Serikat Pekerja/Buruh pada Senin sore (2/10/2023) dan memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai UU tak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan. Melalui putusan ini, MK juga menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, “tetap berkekuatan hukum mengikat”.

APINDO berpandangan:

- Keputusan MK tersebut merupakan produk hukum yang sesuai dengan konstitusi dan karena itu keputusan MK harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua warga negara.
- Keputusan MK atas UU Cipta Kerja Nomor 6/2023 diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia, mengembangkan investasi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja maupun masyarakat luas.
- Investasi dan penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu cara untuk mengatasi pengangguran terbuka dan tertutup, kemiskinan, angka stunting yang tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana semua itu sejumlah pekerjaan rumah kita semua untuk kita selesaikan bersama.

- Pekerjaan rumah kita semua masih banyak untuk diselesaikan, terutama dalam membuat turunan UU Cipta Kerja berupa peraturan pelaksana agar Undang-Undang tersebut dapat berlaku efektif.
- Landasan ekonomi yang kuat berupa pembangunan infrastruktur yang masif, reformasi Undang-Undang dalam rangka penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, serta hilirisasi industri hulu dapat kita laksanakan serta mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah, akademisi, serikat pekerja, pengusaha serta komponen masyarakat lainnya.

Pandangan APINDO Terhadap Pengetatan Produk Impor

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah berkomitmen memperketat impor komoditas tertentu setelah merespon sejumlah keluhan terkait peningkatan penjualan barang-barang impor melalui *platform (e-Commerce)*.

APINDO berpandangan:

1. Batasan pengetatan impor yang dilakukan oleh Pemerintah perlu dilakukan dengan pertimbangan matang disertai mekanisme yang jelas, khususnya terkait:
   a. Jenis produk yang diperketat, apakah berlaku untuk barang modal, bahan baku/penolong, atau bahan konsumsi. 90% impor yang dilakukan Indonesia setiap tahun adalah untuk jenis impor bahan baku/ penolong dan impor barang modal yang krusial untuk menyokong kebutuhan industri di Indonesia yang berorientasi ekspor dan untuk menunjang produk industri dalam negeri, agar bersaing dalam *global value chain*.
   b. Produk dan mekanisme. Pengetatan impor yang akan dilakukan juga perlu diatur secara jelas terkait akan berlaku produk apa serta bagaimana mekanisme yang akan diberlakukan. Beberapa *concern* dunia usaha terkait pemberlakukan adalah terkait:
      i. Aspek penegakan hukum / *law enforcement* terhadap *illegal importation*;
      ii. Aspek pengaturan praktik kecurangan dagang/dumping, serta impor yang tidak sesuai prosedur;
      iii. Aspek penerapan kebijakan restriktif yang bisa berdampak panjang seperti misalnya sengketa dagang bilateral/internasional.
   c. Dampak risiko konstraksi dan perlambatan kinerja usaha serta kinerja konsumsi masyarakat, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengingat impor didorong oleh diantaranya dorongan permintaan *(demand)* konsumen domestik Indonesia dan dunia usaha itu sendiri.
2. Batasan pengetatan impor perlu diterapkan pemerintah dengan seksama yang tidak hanya bersifat reaktif semata karena desakan dalam negeri meski bertujuan untuk melindungi UMKM dan industri dalam negeri.
3. Jika pengetatan diberlakukan terhadap impor produk konsumsi, hal tersebut bisa berdampak negatif pada kinerja sektor usaha tertentu, khususnya sektor ritel yang memang membutuhkan impor produk konsumsi untuk menciptakan keragaman produk yang ada di pasar. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan terkait aktivitas impor dalam upaya menumbuhkan produksi di dalam negeri.
4. Pengetatan produk impor tidak semata-mata menyebabkan konsumen pasar domestik beralih mengkonsumsi produk dalam negeri. Karena demand pasar yang tinggi terhadap produk impor adalah terkait dengan *competitiveness* yang disebabkan oleh kualitas, desain, standar produk hingga inovasi produk. Pemerintah juga diharapkan mendukung produk lokal melalui kolaborasi riset dan inovasi diantaranya melalui *Comprehensive Economy Partnership Agreement* (CEPA) yang Indonesia bentuk dengan negara lain.
5. *Competitiveness* produk dalam negeri membutuhkan intervensi secara sistemik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dalam mencegah praktik penyelundupan atau impor illegal.
6. Terkait impor illegal yang dijual bebas di pasaran, perlu dilakukan sejumlah langkah terintegrasi yang berkaitan dengan *law enforcement*. Seperti pengetatan bea cukai, razia baik platform *offline* dan *online* hingga penegakan hukum tanpa terkecuali bagi penjual dan distributor barang tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi importir legal yang sudah memenuhi persyaratan import barang.

Pandangan APINDO Tentang Transisi Kepemimpinan Baru di Tahun 2024, *Roadmap* Perekonomian Dan Iklim Dunia Usaha

APINDO menyoroti sejumlah perkembangan isu dan kebijakan dalam transisi kepemimpinan baru di 2024, ditengah disusunnya Roadmap Perekonomian APINDO 2024 - 2029. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, transisi kepemimpinan baru di tahun 2024 akan melahirkan kebijakan bidang sosial, ekonomi, investasi, dan perdagangan yang strategis bagi iklim investasi Indonesia, yang masih menghadapi sejumlah tantangan penanganan pasca pandemi, pemulihan ekonomi dan pengaruh tekanan ekonomi global. Roadmap Perekonomian selalu diperlukan dan merupakan kontribusi dari dunia usaha, dalam hal ini APINDO, untuk Indonesia.

"Roadmap Perekonomian APINDO merupakan intervensi kebijakan dari kami untuk perbaikan lintas sektoral yang mencakup makro ekonomi dan keuangan, pembangunan berkelanjutan perdagangan Internasional, teknologi dan informasi, ketenagakerjaan, perpajakan. Sedangkan intervensi kebijakan untuk agenda perbaikan sektoral meliputi manufaktur, energi dan sumber daya mineral, pertanian dalam pengertian luas, pariwisata, infrastruktur, properti dan Kawasan ekonomi serta IKM dan UMKM. Kami akan meluncurkan Roadmap Perekonomian 2023 - 2028 di kuartal 4 tahun ini," tambah Shinta.

Roadmap Perekonomian APINDO yang disusun dalam periode 5 tahunan dan berkesinambungan sejak tahun 2019, merupakan kontribusi dunia usaha untuk mengawal kebijakan Kepemimpinan Nasional 2024-2029. Roadmap Perekonomian APINDO merupakan *strategic tools* APINDO, yang berfungsi sebagai indikator kontinuitas kebijakan ekonomi dengan fokus pada kebijakan reformasi struktural iklim usaha dan investasi yang berpengaruh pada akselerasi pertumbuhan investasi dan kinerja sektor usaha.

APINDO juga berpendapat di masa transisi kepemimpinan menjelang Pemilu 2024, sejumlah program dan kebijakan di era kepemimpinan Presiden Joko perlu dilanjutkan di kepemimpinan mendatang, yaitu:

1. Reformasi struktural terhadap iklim usaha sektoral dan lintas sektoral, khususnya agar lebih berorientasi pada peningkatan daya saing manufaktur, ekspor dan penciptaan *green/sustainable economy*.
2. Reformasi birokrasi, khususnya untuk menciptakan birokrasi yg lebih efisien, *seamless*, akuntable, profesional dan *business-oriented*.
3. Reformasi SDM, khususnya agar struktur skills set pekerja tidak lagi terkonsentrasi pada unskilled workers tetapi pada *skilled workers* yg dibutuhkan di era industri 4.0 & digitalisasi ekonomi beserta dg iklim ketenagakerjaan yg dibutuhkan.
4. Keterbukaan ekonomi strategis yang disertai dengan penyesuaian domestik untuk peningkatan daya saing ekspor nasional dan inbound investasi.
5. Target Indonesia Maju 2045.
6. Stabilitas Makro Ekonomi.
7. Transisi Energi dan target *National Determined Contribution*.
8. Penguatan akses keuangan dan pemberdayaan bagi UMKM.
9. Memastikan mekanisme riil proyek strategis pemerintah (IKN dan proyek infrastruktur lainnya).

Shinta mengungkapkan, siapa pun yang akan menjadi pemimpim masa depan Indonesia, diharapkan bisa menyempurnakan reformasi SDM yang mampu mendorong bonus demografi sebagai modal Pembangunan, meningkatkan stabiltas makro ekonomi hingga mendorong keterbukaan ekonomi strategis yang disertai penyesuaian kebijakan domestik.

"Untuk mengawal kepemimpinan mendatang, tentunya APINDO sebagai asosiasi yang independent bersikap netral dalam percaturan politik menjelang 2024 dan semangat APINDO adalah dengan mengawal kebijakan strategis nasional melalui advokasi sebagai salah satu prioritas program kerja APINDO di periode baru ini. Untuk itu APINDO siap melakukan pendampingan atas kebijakan- kebijakan strategis secara objektif dengan mengelola sumber daya serta keahlian yang kita miliki," terang Shinta.

Sebagai penutup, Shinta mengatakan bahwa sebagai *membership-based organization*, APINDO mengajak perusahaan yang berlokasi di Ibu Kota Negara dan di daerah untuk bergabung menjadi anggota APINDO dalam rangka memperkuat representasi dunia usaha. "Dengan banyaknya perusahaan yang bergabung sebagai anggota APINDO, maka representasi dunia usaha akan semakin kuat dan diharapkan iklim usaha menjadi lebih baik dan kondusif," tutup Shinta.

Pandangan APINDO Terkait Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA)

Pemerintah melalui Kementerian Perekonomian RI berencana melakukan evaluasi terhadap kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA). Evaluasi terhadap kebijakan DHE SDA didorong oleh cadangan devisa Indonesia yang semakin menurun sejak awal Agustus 2023 yang seiring dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berpandangan:

1. Evaluasi kebijakan retensi DHE SDA sebaiknya melibatkan pelaku usaha eksportir SDA, sebagai salah satu stakeholders dan subjek dari regulasi. Pengusaha perlu diundang *Focus Discussion Group* (FGD) yang komprehensif, agar regulasi retensi DHE ini bisa optimal dan lebih efektif sehingga sasaran retensi DHE SDA tercapai, menghasilkan mitigasi komprehensif, riil dan jangka pendek dan panjang, dan apabila diperlukan adjustment atau waktu transisi, pemerintah perlu segera memitigasi atau membuat aturan transisi.

2. Mencari titik keseimbangan antara menjaga stabilitas rupiah dan diterapkannya kebijakan dana hasil ekspor yang mesti disimpan di dalam negeri merupakan hal yang strategis dan penting, karena mencerminkan keselarasan antara kepentingan makroekonomi dan kepentingan bisnis eksportir.

   Dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih menarik bagi investor asing, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sistem keuangan nasional. Di sisi lain, kebijakan DHE juga penting untuk mengurangi risiko ketergantungan berlebihan pada mata uang asing tertentu. Penyimpanan dana hasil ekspor di dalam negeri mesti diikuti oleh insentif yang setimpal.

   Oleh karena itu, APINDO menilai penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara kedua aspek ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil di Indonesia.

3. Kebijakan retensi DHE SDA untuk sistem keuangan dalam negeri dapat menimbulkan dampak, terutama terkait aspek manajemen keuangan, yaitu:

   a. arus kas pengusaha *(cash flow)* eksportir karena tertahan hingga 3 (tiga) bulan; dampak ini dirasakan terutama oleh para pelaku usaha dengan margin rendah dan / atau yang memiliki keperluan untuk investasi besar / *expansion*
   b. tambahan jam kerja untuk paperwork
   c. tambahan biaya operasional extra man hour
   d. penambahan birokrasi perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi catatan dan laporan dengan Bank Indonesia.
   e. *extra financing cost* karena untuk modal kerja harus dapatkan loan (meskipun memang against simpanan devisa kita).

   Selain dampak di atas, kebijakan ini menjadi kontradiktif dengan upaya pemerintah meningkatkan, investasi dimana salah satu tujuan dari PP 36/2023 ini untuk mendorong pembiayaan dan investasi hilirisasi. Bukan hanya investasi untuk hilirisasi mineral dan batubara yang berpotensi terhambat melainkan rencana investasi perusahaan minyak dan gas bumi juga bakal terdampak.

   Oleh karena itu, APINDO juga mendorong agar kebijakan retensi DHE SDA untuk dikaji dan dievaluasi lebih dalam, khususnya terkait cost structure dan liability structure dari pelaku usaha SDA sehingga implementasi kebijakannya efektif dan tujuan akhir dari peningkatan devisa dari retensi SDA tercapai.

4. Penurunan Nilai Devisa Ekspor disebabkan oleh beberapa faktor, yang tidak hanya disebabkan oleh kebijakan retensi DHE, yaitu:
   a. *Trade balance* dalam global demand dalam 3 bulan terakhir, dimana terdapat kecenderungan kenaikan impor dan penurunan ekspor.
   b. Dunia usaha yang cenderung lesu dan atau turunnya harga komoditas (tambang)
   c. Aturan yang cenderung belum mengakomodasi kesulitan pelaku usaha SDA yang sudah terlanjur memberi komitmen jangka pendek dan menengah sehingga diperlukan waktu untuk mengakomodasi perubahan retensi DHE dan kesulitan ini perlu dipahami lebih lanjut oleh pemerintah sehingga diberikan time to adjust terhadap mekanisme retensi DHE SDA yang direalisasikan.

5. Dalam rangka menjaga kelancaran sumber devisa dari ekspor SDA yang dibutuhkan oleh perekonomian kita, APINDO mengusulkan agar:
   a. Pendekatan yang dilakukan adalah pendalaman kasus per kasus dan sangat prudent terkait sanksi. Sanksi ditunda setelah evaluasi yg mendalam dan hingga kondisi ekonomi membaik.
   b. Sebaiknya diberikan dispensasi bagi yang belum bisa menjalankan dan dengan bukti yang cukup misalnya *agreement* jangka pendek yang sulit diubah dalam waktu yg singkat, dan memberikan waktu yang cukup untuk transisi dalam menjalankan kebijakan retensi DHE SDA.
   c. Harus ada kajian dan evaluasi yang lebih mendalam tentang faktor penyebab utama penurunan devisa ekspor.

Respon Pengusaha Atas Terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan

Pemerintah RI telah menerbitkan Regulasi baru terkait Pengupahan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani mengungkapkan, dunia usaha menghormati regulasi tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia. "Tetapi terkait formula pengupahan yang baru ini, kami berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan, tentu harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut," terang Shinta.

Shinta menegaskan, hal tersebut krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja. "Yang perlu kita semua tekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia. Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," paparnya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam menambahkan, hal yang perlu disepakati dalam upah minimum adalah upah terendah dan menjadi jaring pengaman atau safety nett. Sementara itu, upah aktual ditetapkan melalui bipartit masing-masing perusahaan serta menyesuaikan kondisi masing-masing perusahaan. Bob juga mengajak masyarakat untuk mengakhiri kegaduhan yang selalu muncul bersamaan dengan penetapan upah minimum, demi kondusivitas iklim usaha di Indonesia.

Untuk itu, APINDO menyampaikan usulan kepada Pemerintah:
1. Peningkatan upah minimum dan upah secara umum harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dalam menjaga dan meningkatkan daya saing terutama di pasar global.
2. Politik praktis Pemerintah Pusat dan kepala daerah dalam Pemilihan Umum 2024 tidak memengaruhi penentuan upah minimum.
3. Pemerintah Pusat dapat memastikan kepatuhan dan penegakkan hukum terhadap regulasi terkait upah minimum di seluruh propinsi di Indonesia, termasuk pemberian sanksi jika pelanggaran.
4. Pembenahan dalam penetapan upah minimum untuk mencegah disparitas upah minimum yang dapat melesat tajam dan mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di daerah tertentu karena eksodus tenaga kerja ke daerah dengan upah lebih tinggi.

Sikap APINDO Terkait Boikot Produk Yang Diduga Terkait Israel

Sebagai wakil dari dunia usaha, APINDO mengungkapkan keprihatinan mendalam atas konflik dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah, yang telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dan penderitaan bagi masyarakat di sana.

Meluruskan pemberitaan yang beredar bahwa APINDO akan mengeluarkan data produk/perusahaan yang diduga terhubung dengan Israel, APINDO tengah mengumpulkan informasi terkait dampak terhadap sektor usaha tanah air, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemasok dan tenaga kerja yang terimbas upaya pemboikotan, padahal tidak memiliki keterkaitan dengan Israel. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengungkapkan, "APINDO mengajak semua untuk bersikap bijak menanggapi munculnya imbauan boikot dan mempelajari apa betul produk tersebut terhubung dengan Israel atau tidak."

Setiap tahun APINDO secara rutin melakukan pembaharuan data anggota, termasuk menerima masukan dan informasi dari anggota. "APINDO tentunya juga tanggap melakukan monitoring atas isu boikot yang terus bergulir. Kami memandang informasi komprehensif perlu dikumpulkan, agar kami bisa mengambil langkah tepat guna," ujar Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO. "Gerakan boikot telah terjadi pada sejumlah sektor usaha/perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, menjalankan operasional di Indonesia, serta diproduksi di Indonesia dengan tenaga kerja yang juga warga negara Indonesia. Kita semua perlu bijaksana menyikapi hal ini, untuk kepentingan masyarakat dan dunia usaha secara umum," Shinta menutup.

Outlook Ekonomi dan Bisnis APINDO: Ekonomi diproyeksikan tumbuh 4,80 - 5,20% di tahun 2024

APINDO kembali merilis outlook ekonomi dan bisnis sebagai gambaran perekonomian makro serta iklim bisnis-investasi di akhir tahun 2023 serta menyambut 2024. Secara makro, APINDO memprediksikan kondisi ekonomi relatif resilien di tengah ketidakpastian global, sehingga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% diperkirakan dapat dipertahankan di tahun 2023.

Proyeksi ini berdasarkan analisa data pertumbuhan kuartal yang menunjukkan performa ekonomi yang relatif kuat melampaui 5% pada QI dan Q2, masing-masing sebesar 5,03% dan 5,17%. Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan pada Q3 sebesar 4,94%, pertumbuhan pada kuartal penutup diprediksi akan mampu menopang proyeksi pertumbuhan di atas 5% untuk keseluruhan 2023 (yoy) melalui percepatan belanja pemerintah.

Sementara itu, di tahun 2024, APINDO memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 4,80% (yoy) hingga 5,20% (yoy). "Proyeksi rentang pertumbuhan terendah yang melemah di bawah level 5% disebabkan faktor tren perlambatan ekonomi global akibat situasi geopolitik, inflasi dan suku bunga yang masih tinggi. Suku bunga kredit di Indonesia yang tinggi turut berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan meningkatnya biaya operasional pelaku usaha.

Merujuk survei internal APINDO terhadap sekitar 2000 pelaku usaha lintas sektor dan lintas skala usaha, pertumbuhan 2024 diprediksi ada kisaran 5%," demikian disampaikan Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani. Tahun depan, sektor dengan kontribusi PDB terbesar *(leading sectors)* akan kembali didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan dan konstruksi, dimana setiap sektor tersebut diproyeksikan akan menguasai >10% porsi distribusi dalam PDB tahun 2024. Sektor manufaktur juga masih akan terus berada di level ekspansif, sedangkan transportasi dan pergudangan sektor akomodasi-makan minum akan menjadi sektor dengan laju pertumbuhan terpesat. Sektor pariwisata diprediksi dapat merealisasikan target untuk berkontribusi 4,5% dari PDB nasional seiring dengan peningkatan mobilitas kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Inflasi tahun 2024 diperkirakan akan terjaga di kisaran 3,0%, sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap USD tahun 2024 berada di kisaran 15,100-15,600 per dollar USD. Proyeksi penguatan didasarkan pada perkiraan inflasi yang terkendali dan kebijakan moneter BI tahun 2024 untuk berfokus pada pro-stability. Namun, tren *higher for longer* yang bertahan sampai pertengahan tahun 2024 masih memungkinkan tergerusnya nilai tukar hingga di atas Rp 15,500.

Realisasi APBN menjadi pendorong *(driver)* yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi 2024. Tetapi investasi dan kinerja ekspor tahun 2024 kurang baik yang disebabkan pelemahan realisasi investasi di tahun politik, perkembangan ekspor Indonesia yang turun, perlambatan kinerja perdagangan dan penurunan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar global. Melalui alokasi dana yang tepat pada sektor strategis, APBN dapat menjadi instrumen penting memicu investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja.

Sejumlah tantangan dan kondisi perekonomian yang dihadapi di antaranya disumbangkan faktor total saving (tabungan bruto) hanya 39% dari PDB, dan total kapitalisasi pasar modal hanya 49% dari PDB.

Dengan *Investment Capital Output Ratio* (ICOR) yang tinggi di angka 7,6 (2023), pertumbuhan ekonomi yang jauh melampaui 5% tidak akan dapat tercapai. Jika target pertumbuhan 6%, maka dibutuhkan rasio investasi terhadap PDB sekitar 36%.

Dengan mempertimbangkan kondisi proses peralihan kepemimpinan nasional di tahun depan, investasi asing belum dapat diharapkan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi karena investor cenderung *wait and see* untuk melakukan keputusan investasi di tahun politik.

Meski pemerintah terus memacu investasi dalam beberapa tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja justru turun signifikan dengan kecenderungan penyusutan daya serap tenaga kerja yang tinggal seperempat dalam 9 tahun terakhir. Selain itu, di tengah meningkatnya investasi padat modal yang memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi pencari kerja dengan skills/ keterampilan rendah.

APINDO juga menilai tantangan lain adalah perihal sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) masih menyulitkan dan belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen dari Kementerian dan Lembaga terkait, minimnya sinergi platform teknologi informasi, ketidaksiapan SDM dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Terkait UKM sebagai tulang punggung perekonomian, diprediksikan belum akan ada lompatan yang berarti dari UKM di tahun depan. Hal ini berdasarkan hasil survei APINDO, di mana 45,75% UKM tidak berencana melakukan ekspansi bisnis dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pertimbangan: (1) modal usaha yang terbatas (55,85%), (2) persaingan yang sangat tinggi (22,96%), dan (3) peluang pasar yang terbatas (11,92%). Selain itu, 61,88% pelaku UKM menilai tidak mudah untuk mengakses pinjaman untuk keperluan bisnis.

APINDO juga menilai Pemilu memang menjadi daya dongkrak konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di 2024. Namun, penyelenggaraannya perlu dijaga untuk memastikan stabilitas politik dan ekonomi, agar pesta demokrasi tersebut tidak berpotensi terjadinya sengketa hasil pemilu dan konflik.

"Untuk mencapai target proyeksi pertumbuhan, ada sejumlah agenda strategis yang perlu mendapat prioritas segala sumber daya di tahun 2024. Termasuk di antaranya memastikan kesuksesan penyelenggaraan pemilu, konsistensi reformasi struktural, pengendalian inflasi, hilirisasi, pengembangan SDM dan perlindungan ketenagakerjaan, penguatan ekosistem UKM, melakukan langkah antisipasi *hoax* yang merugikan perekonomian dan pekerja, evaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor, serta memastikan implementasi lima rekomendasi utama yang terangkum dalam Roadmap Perekonomian APINDO," ujar Shinta Widjaja Kamdani.

Lima rekomendasi utama Roadmap Perekonomian APINDO terdiri atas: Pertama, perbaikan kepastian hukum dan kebijakan serta kelembagaan, dan koordinasi dalam implementasi kebijakan. Kedua, kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung lompatan produktivitas yang diperlukan untuk transformasi ekonomi. Ketiga, kebijakan industri, perdagangan, investasi dan persaingan yang sehat *(level playing field)*. Keempat, adopsi konsep berkelanjutan karena perubahan makro dan global yang terjadi menuntut perusahaan untuk memenuhi standard ESG *(Environment, Social and Governance)* dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan industri "hijau". Kelima, perbaikan infrastruktur terkait transportasi, konektivitas dan logistik; transisi sektor energi, dan parasana digital yang efisien dan efektif.

02

PROGRAM UNGGULAN APINDO

ROADMAP PEREKONOMIAN APINDO

1. Diskusi Roadmap Perekonomian APINDO Sektor Otomotif Bersama Mari Elka

Ketua Dewan Pakar APINDO Mari Elka Pangestu memimpin diskusi Roadmap Perekonomian APINDO Sektor Otomotif dan *Electronic Vehicle* bersama Tim Prospera dan Pengurus DPN APINDO terkait, Kamis (26/10/2023) di kantor APINDO.

Diskusi dihadiri juga Tim Penyusun Roadmap Wakil Sekretaris Umum APINDO Rahmad Widjaja Sakti, Direktur APINDO Research Institute Agung Pambudhi, dan Analist APINDO Jefri Andika.

2. Diskusi Roadmap Perekonomian APINDO Sektor Agrobisnis & Perkebunan (Sawit) Bersama Mari Elka

Ketua Dewan Pakar Mari Elka Pangestu memimpin diskusi Roadmap Perekonomian APINDO Sektor Agrobisnis dan Perkebunan (Sawit), Senin (30/10/2023) di kantor APINDO.

Diskusi tersebut diikuti oleh Direktur APINDO Research Institute Agung Pambudhi, Analyst APINDO Jefri Andika, para pelaku usaha, unsur asosiasi perusahaan sawit dan tim peneliti PROSPERA.

Diskusi membahas sejumlah hal diantaranya mengenai pentingnya menekankan food security (kecukupan pangan), produktivitas, penyuluh pertanian, insentif, sumber daya lahan dan sebagainya.

3. Diskusi Roadmap Perekonomian APINDO Sektor ESDM Bersama Mari Elka

Ketua Dewan Pakar Mari Elka Pangestu memimpin diskusi Roadmap Perekonomian APINDO Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (30/10/2023) di kantor APINDO.

Diskusi tersebut diikuti oleh Direktur APINDO Research Institute Agung Pambudhi, para pelaku usaha sektor ESDM tim peneliti PROSPERA.

Diskusi membahas terkait isu mineral dan tambang seperti steel, nikel, copper, dan coal yang mengangkat beberapa hal diantaranya pentingnya kepastian usaha, perijinan usaha, kebijakan DHE, Penambang liar, dan sebagainya.

4. Diskusi Roadmap Perekonomian APINDO Sektor Perikanan Bersama Mari Elka

Ketua Dewan Pakar Mari Elka Pangestu memimpin diskusi Roadmap Perekonomian APINDO Sektor Perikanan Jumat (3/11/2023) di kantor APINDO.

Diskusi tersebut diikuti oleh Hendra Sugandhi selaku Ketua Bidang Perikanan APINDO, Wakil Ketua Bidang Perikanan APINDO Krissantono, para pelaku usaha lainnya, serta tim peneliti PROSPERA. Diskusi membahas terkait isu perikanan yang mengangkat beberapa hal diantaranya *sustainability*, sertifikasi, pentingnya sinkronisasi data, dan sebagainya.

5. Diskusi Roadmap Perekonomian APINDO Sektor Industri Manufaktur Bersama Mari Elka

Ketua Dewan Pakar Mari Elka Pangestu memimpin diskusi Roadmap Perekonomian APINDO Sektor Industri Manufaktur, Jumat (03/11/2023) di kantor APINDO. Diskusi tersebut diikuti oleh Ketua Bidang Industri Manufaktur Bobby Gafur Umar, Pengurus Bidang Industri Manufaktur dan pengurus lainnya.

6. Dialog Roadmap Perekonomian APINDO

APINDO telah menyusun Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 yang diharapkan bisa jadi panduan rekomendasi kebijakan bagi calon presiden (capres) dalam kepemimpinan lima tahun ke depan. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, dalam Dialog APINDO Capres 2024 di Jakarta, Senin (11/12/2023), mengungkapkan peta jalan itu disusun sebagai wujud peran organisasi tersebut dalam menjalankan advokasi atas sejumlah kebijakan strategis untuk mengawal kebijakan dan program kerja dalam kepemimpinan nasional yang baru. “Penyusunan Roadmap Perekonomian APINDO kali ini dilakukan pada titik perubahan penting bagi Indonesia menjelang transisi kepemimpinan dengan mengidentifikasi kendala, menyampaikan rekomendasi perubahan kebijakan, kelembagaan dan tata kelola untuk lima tahun ke depan," kata Shinta.

Shinta mengungkapkan bahwa APINDO telah secara konsisten menyusun Roadmap Perekonomian sejak 2004 sebagai kontribusi dunia usaha bagi kepemimpinan nasional. Peta jalan juga dimaksudkan untuk mengawal transformasi ekonomi yang fundamental bagi Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah situasi global yang menantang dengan menitikberatkan pada investasi yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan diversifikasi sumber pertumbuhan.

Shinta menambahkan, Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi makro dan krisis multidimensi, di mana kinerja perekonomian Indonesia cukup baik namun belum memadai untuk menunjang iklim bisnis yang inklusif serta berkelanjutan. Hal ini menyebabkan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045 masih menghadapi sejumlah kendala untuk akselerasi pencapaian target. "Karena itu, Roadmap Perekonomian APINDO juga menjadi semacam panduan bagi pemerintahan baru dalam agenda transformasi perekonomian, penciptaan keberlanjutan, serta reformasi structural secara sektoral dan lintas sektoral. Sekaligus sebagai respon dunia usaha terhadap dinamika dan tren ekonomi serta bisnis global," tambah Shinta.

Ketua Dewan Pakar APINDO Mari Elka Pangestu, sebagai koordinator penyusunan Roadmap Perekonomian APINDO menerangkan ada lima prioritas kebijakan dalam peta jalan tersebut. Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 disusun berbasis masukan dunia usaha, antara lain lewat survei dunia usaha dilakukan sepanjang Juli-Agustus 2023 di seluruh Indonesia, untuk semua skala usaha, dari anggota dan non anggota APINDO, dengan melibatkan hampir 2.000 responden.

Peta jalan itu juga merangkum hasil FGD dan matriks kebijakan untuk tujuh agenda lintas sektor dan kebijakan sektor serta merangkum masukan dari Dewan Pakar APINDO, sejumlah narasumber dan mitra kerja sama seperti Bank Dunia.

PROGRAM UNGGULAN APINDO
LEMBAGA SERTIFIKASI & HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Peran Dunia Usaha Siapkan SDM Terampil & Kompeten di Bidang Hubungan Industrial dan Manajemen SDM

Perubahan lingkungan global, memaksa sumber daya manusia untuk terus mengembangkan kompetensinya, agar mampu bersaing dan bertahan dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu perlu dilakukan mitigasi resiko dan peningkatan kemampuan bersaing.

Selain itu sebagai pemberi kerja, maka pengusaha selalu berusaha meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan inovasi agar tumbuh dan sustain dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dan dinamis. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani dalam *Grand Launching* Lembaga Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial Indonesia APINDO (LSP HII APINDO) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia APINDO (LSP MSDM APINDO), Kamis (23/2/2023) di kantor APINDO.

Menurutnya, terbitnya kedua lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tersebut merupakan wujud nyata peran serta APINDO dalam menyiapkan SDM yang terampil dan kompeten bidang Hubungan Industrial maupun Manajemen SDM.

"Dapat saya sampaikan bahwa LSP HII APINDO merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi yang langka di Indonesia karena saat ini baru ada dua, bahkan untuk LSP pihak ketiga baru ada satu yakni milik DPN APINDO. Demikian pula untuk LSP MSDM APINDO memiliki kekhususan dalam skema kompetensi, terutama manajemen talenta maupun sistem remunerasi," papar Shinta.

Berdasarkan Data BPS pada Agustus 2022, Kualitas Angkatan Kerja Indonesia masih relatif rendah, di- mana sekitar 54,31% angkatan kerja berpendidikan SMP dan ke bawah. Selain itu, menurut data *Asian Productivity Organization* (APO) Productivity Data-book 2022, tingkat produktivitas per pekerja Indonesia juga masih di bawah rata-rata ASEAN.

Era digitalisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kerja dimana adanya perubahan permintaan jenis keterampilan di pasar kerja, hubungan kerja, waktu dan tempat bekerja yang lebih fleksibel, serta adanya kesenjan- gan digital antar kelompok status sos- ial-ekonomi.

Berdirinya LSP HII APINDO dan LSP MSDM APINDO diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan dapat diserap oleh perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

2. 9th Industrial Relations Conference 2024

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menjadi *keynote speaker* dalam **9th Industrial Relations Conference** yang diselenggarakan APINDO Training Center (ATC), Rabu (8/11/2023) di Jakarta.

Acara yang dibuka Direktur PT PSA Chris S. Suhendra ini berlangsung selama 2 (dua) hari akan diisi dengan diskusi panel dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Hadir juga sebagai *keynote speaker* Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof. Warsito.

Sejumlah pengurus Bidang Ketenagakerjaan APINDO hadir dalam acara tersebut, termasuk anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan dan para tamu undangan diantaranya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.

Dalam paparannya, Shinta memaparkan Peran APINDO dalam membangun Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial, diantaranya dengan implementasi program prioritas APINDO tahun 2024, yaitu dengan menyusun peta jalan *(roadmap)* perekonomian Indonesia untuk periode 2024-2029, pelaksanaan UMKM Merdeka sebagai program pendampingan usaha yang diinisiasi APINDO untuk meng-*scale up* UMKM Indonesia yang juga berfungsi mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja, penurunan stunting, dan penyediaan Lembaga Sertifikasi Profesi.

Prof. Warsito dalam *keynote*nya juga mengapresiasi langkah APINDO dalam bersinergi dengan pemerintah dalam upaya penurunan stunting.

PROGRAM UNGGULAN APINDO
PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

APINDO Bersama Kementerian Kesehatan dan BKKBN Bersinergi Gotong Royong Mencapai Target Prevalensi Stunting Nasional

Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya isu stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk para Pengusaha Indonesia untuk berperan aktif dalam menurunkan stunting, dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait khususnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada pelantikan DPN APINDO Masa Bhakti 2023 - 2028 oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Umum APINDO menerima mandat dari Presiden untuk bersama seluruh Anggota APINDO memerangi stunting di Indonesia melalui Program **Gerakan Anak Sehat - Kolaborasi Inklusif Pengusaha Indonesia Atasi Stunting (GAS KIPAS STUNTING)**.

APINDO bergerak cepat dengan melakukan upaya kolaboratif dengan BKKBN melalui MoU pada 22 Februari 2023, dan MoU APINDO dengan Kementerian Kesehatan pada Tanggal 13 Juli 2023 serta merangkul Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) melalui MoU pada tanggal 25 Juli 2023 sebagai mitra kerja untuk memastikan berjalanannya Program GAS KIPAS STUNTING berjalan dengan efektif dan berdampak bagi penurunan prevalensi stunting.

Stunting dan Iklim Investasi

Stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia di Indonesia dimana dalam jangka panjang akan menurunkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Bank Dunia, dampak stunting berpotensi memberikan kerugian ekonomi sekitar 2-3% dari GDP setiap tahunnya.

Indonesia harus memastikan puncak bonus demografi di tahun 2045 atau Indonesia Emas diisi oleh generasi yang produktif dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi, yang pada akhirnya akan memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional, dan keunggulan di negara-negara global serta kawasan.

Pengusaha, khususnya keluarga besar APINDO memiliki peran yang signifikan dalam upaya mengatasi stunting di Indonesia diantara sebagai berikut:

1. Memberikan Dukungan Teknis: Pengusaha juga dapat memberikan dukungan teknis seperti pendanaan program GAS KIPAS STUNTING maupun akses pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pemangku kepentingan yang terkait seperti Tenaga Kesehatan, Kelompok Masyarakat Berisiko Stunting, dan SDM di Sektor Pangan demi memastikan peningkatkan kualitas nutrisi yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan yang bergizi. Dengan ketersediaan makanan yang berkualitas, maka risiko stunting dapat berkurang di masa depan.
2. Peningkatan Kualitas Fasilitas kesehatan: Pengusaha dapat membantu peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan gizi di wilayah sekitar perusahaan atau di wilayah-wilayah terpencil. Dengan adanya fasilitas kesehatan dan gizi yang mudah dijangkau maka dampak langsung baik secara Kesehatan dan komunitas sekitar dapat diraih secara bersamaan.
3. Membangun Jejaring Kerjasama: Pengusaha dapat membangun jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia. Hal ini dapat membantu mempercepat penanganan stunting dan meningkatkan efektivitas program-program yang ada.

Potensi Bencana Demografi Akibat Stunting

Sekretaris Dewan Pertimbangan APINDO, sekaligus Ketua Dewan Pengarah Pokja Stunting Suryadi Sasmita, menyatakan Stunting di Indonesia berpotensi menjadi bencana demografi karena dampaknya yang luas dan jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, kesehatan masyarakat, dan ekonomi nasional.

Beberapa alasan mengapa stunting dapat dianggap sebagai bencana demografi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Dampak Jangka Panjang: Stunting dapat berdampak jangka panjang terhadap Kesehatan dan kecerdasan anak, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar, bekerja, dan menciptakan kehidupan yang produktif di masa depan. Hal ini berpotensi merusak potensi manusia sebagai sumber daya yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara.
- Beban Ekonomi: Biaya untuk mengatasi stunting dan penyakit yang terkait dengannya dapat sangat tinggi, dan akan menjadi beban ekonomi bagi keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat mengurangi aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan perawatan kesehatan.
- Meningkatkan Ketidaksetaraan Sosial: Stunting cenderung terjadi lebih sering pada keluarga yang kurang mampu atau hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang rendah, sehingga dapat meningkatkan ketimpangan dan ketidaksetaraan sosial di masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada kestabilan sosial dan ekonomi secara keseluruhan

Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional, DR.(HC) dr. Hasto Wardoyo SPOG,(K) menekankan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, sinergi lintas sektor dan keahlian menjadi kunci penting kesuksesan penurunan prevalensi stunting nasional.

“Kami mengapresiasi upaya baik hari ini, APINDO telah mengambil peran untuk bergotong-royong membangun sumber daya manusia yang unggul, dan memastikan bahwa kedepan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang cerdas, unggul, dan berdaya saing”, tutup Kepala BKKBN.

Kick Off - Gerakan Anak Sehat KIPAS Stunting APINDO (Bogor, Jawa Barat)

Wakil Ketua Umum APINDO, Eddy Hussy dalam kegiatan Gerakan Anak Sehat sebagai bagian dari program Kick Off KIPAS Stunting APINDO, Sabtu (9/9/2023) di 3 (tiga) Kota/ Kabupaten: Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Kota Serang, Banten; dan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Hadir juga dalam acara tersebut Wakil Sekretaris Umum, Lucia Karina dan Anggana, Koordinator program Stunting Stefanus Indrayana, dan Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut.

Eddy mengungkapkan, APINDO mengapresiasi pelaksanaan program "GERAKAN ANAK SEHAT - KIPAS STUNTING APINDO". Program tersebut merupakan langkah nyata dari APINDO, bekerja sama dengan AIPGI, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Universitas Jenderal Soedirman, dalam menjawab panggilan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengatasi masalah stunting.

Sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024, APINDO berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting.

Program GERAKAN ANAK SEHAT - KIPAS STUNTING ini telah menyasar hingga 3.600 penerima manfaat, termasuk dalam kelompok Baduta, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui. Program ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2023, dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman, dukungan, dan upaya pencegahan yang efektif kepada mereka yang paling rentan terhadap stunting.

APINDO juga ingin menyampaikan semangat dan komitmen dunia usaha untuk berkelanjutan dalam memastikan bahwa generasi emas Indonesia pada tahun 2045 dapat terwujud. APINDO percaya bahwa Indonesia akan mampu menikmati bonus demografi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk mencapai tujuan ini, APINDO menyadari bahwa ancaman stunting harus diperangi secara serius dengan pendekatan yang ilmiah dan berbasis sains..

Gerakan Anak Sehat (GAS) – KIPAS Stunting APINDO (Serang, Banten)

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam Gerakan 1.000 Pengusaha Gotong Royong untuk Stunting secara kolaboratif mendukung Gerakan Anak Sehat - Kolaborasi Inklusif Pengusaha Indonesia Atasi Stunting (GAS-KIPAS STUNTING APINDO), Selasa (17/10/2023) di Serang.

Program GAS-KIPAS STUNTING merupakan langkah APINDO, bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi (AIPGI) bersama mitra perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), dan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), dengan mengikuti pedoman teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengatasi masalah stunting.

Program GAS-KIPAS STUNTING APINDO dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Ketua Pokja Stunting APINDO & Ketua Bidang Pembangunan Keberlanjutan/SDGs Axton Salim, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), Prof. Hardinsyah, dan 1.000 perwakilan penerima manfaat yang berada di Kota Serang. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam Gerakan 1.000 Pengusaha Gotong Royong untuk Stunting secara kolaboratif mendukung Gerakan Anak Sehat - Kolaborasi Inklusif Pengusaha Indonesia Atasi Stunting (GAS-KIPAS STUNTING APINDO)

Program GAS-KIPAS STUNTING merupakan langkah APINDO, bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi (AIPGI) bersama mitra perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), dan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), dengan mengikuti pedoman teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengatasi masalah stunting.

Peninjauan Program GAS-KIPAS STUNTING APINDO dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT., Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, Sekretaris Dewan Pertimbangan

APINDO Suryadi Sasmita, Ketua Pokja Stunting APINDO & Ketua Bidang Pembangunan Keberlanjutan/SDGs Axton Salim, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), Prof. Hardinsyah, dan 1.000 perwakilan penerima manfaat yang berada di Kota Serang.

Penyerahan Simbolis Donasi Program Pengentasan Stunting

Ketua Dewan Pengarah Pokja Stunting APINDO yang juga Sekretaris Dewan Pertimbangan APINDO Suryadi Sasmita menerima secara simbolis Donasi Program Pengentasan Stunting yang dihimpun dari sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Emiten INDONESIA (AEI), Rabu (13/12/2023) di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Penyerahan dilakukan oleh Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono. Hadir juga sejumlah perwakilan donatur dan tamu undangan, diantaranya Fransiskus Welirang, Johnny Darmawan, Gunawan Tjokro, dan anggota AEI lainnya.

Penyerahan simbolis donasi pengentasan Stunting yang dilakukan bersamaan dengan HUT AEI ke-35 juga diisi dengan Dialog Integrasi ESG dalam Rencana Dekarbonisasi yang dimoderatori oleh Wakil Sekretaris Umum APINDO, sekaligus Sekretaris Pokja Stunting Anggana Bunawan, dengan Narasumber Stefanus Indrayana (Indofood) dan Lucius Dinto (Unilever Indonesia)

APINDO mengucapkan terima kasih dan apresias setinggi-tingginya bagi segenap Pendukung Program GAS - KIPAS STUNTING APINDO sebagai berikut :

1. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
2. Asosiasi Emiten Indonesia
3. PT Batam Lumbung Rezeki
4. PT Djarum
5. PT Ekamas Mandiri
6. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
7. PT Indofood Sukses Makmur Tbk
8. PT Mayora Indah Tbk
9. PT Nusaraya Putramandiri
10. PT Sampoerna Agro Tbk
11. PT Unimitra Kharisma
12. PT Wacoal Indonesia
13. PT Widjajatunggal Sejahtera

Kami menantikan partisipasi anggota APINDO lainnya, dan dapat menghubungi Sekretaris Pokja Stunting Bapak Stefanus Indrayana atau Bapak Anggana Bunawan untuk informasi selengkapnya.

PURE LUXURY

NEOREST®

Visionary technology.
Exquisitely designed for
comfort and well-being.

Born of science and our belief
in everyday wellness to
rejuvenate body and mind.

NEOREST®.
The only one.
A new form of pure luxury brought to life.

NEOREST
LS

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

TECHNOLOGY

- EWATER+ FOR BOWL,WAND, UNDERSEAT
- CEFIONTECT
- PREMIST
- TORNADO FLUSH
- RIMLESS
- AIR IN WONDERWAVE
- AUTO OPEN/CLOSE LID
- HEATED SEAT
- DEODORIZER
- AUTO FLUSH

03

BIDANG UMKM DAN KOPERASI

LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG UMKM DAN KOPERASI TAHUN 2023

APINDO memperkuat 5 (lima) pilar untuk UKM Indonesia yang Merdeka melalui:

1. Peningkatan kapasitas UKM melalui rangkaian pendampingan profesional, diantaranya bekerjasama dengan akademia melalui program Kampus Merdeka
2. Memperkuat basis data dan narasi pengembangan UKM menjadi pembuka lapangan pekerjaan layak dan berdaya saing melalui digitalisasi berbagai aspek kelembagaan
3. Pembangunan dan penguatan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* pemungkin, dari DPP, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, swasta, dalam dan luar negeri
4. Dorongan meningkatkan kemudahan melakukan usaha bagi UKM dan hubungan investasi melalui rangkaian masukan kebijakan, kajian, dan advokasi dengan kementerian dan lembaga terkait
5. Memperkuat ekosistem usaha inklusif dan lestari (sustainable) dengan mengacu kepada SDGs dan metrik-metrik keberlanjutan yang berstandar global.

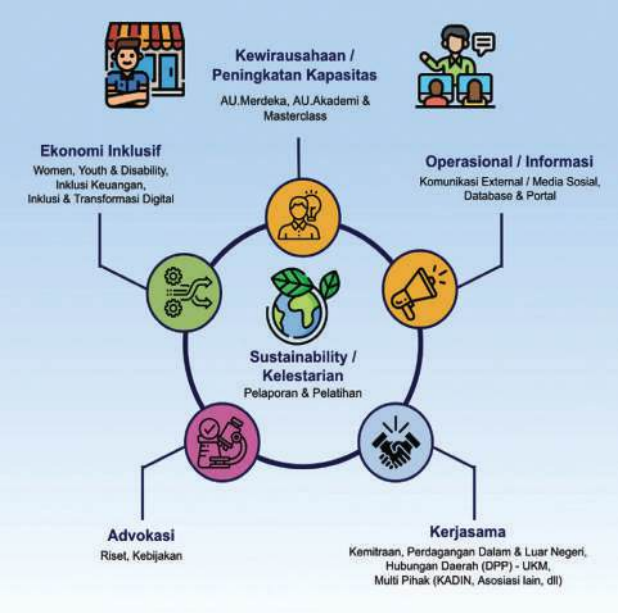

Program pendampingan yang dilakukan di APINDO Bidang UMKM dan Koperasi di tahun 2023 ini antara lain:

1. Pendampingan Bebas

Pendampingan UMKM, dimana setiap hari Rabu (mingguan) ada webinar gratis bernuansa podcast, dimana pelaku usaha saling berbagi cerita, tantangan dan pengalaman dalam menjalankan usaha, para ahli hadir untuk berbagi tips dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro dan kecil; dimana pada tahun 2023 ini lebih ke Webinar Series, dimulai tanggal 5 April dengan tema:

Series 1 : AUA MELATI - F&B *(Food & Beverages)*, 5 series
Series 2 : AUA MELATI - SCF *(Supply Chain Finance)*, 6 series
Series 3 : AUA MELATI - *Sustainable Business*, 4 series
Special Session : AUA MELATI - *Meet The Giants*, 2 series
Series 4 : AUA MELATI - *Seri Lifestyle & Wellbeing*, 2 series

2. Pendampingan Bertema Ekonomi Inklusif, Program APINDO UMKM MERDEKA (AUM)

Pendampingan UMKM, dimana bersama mitra pembangunan yang lain APINDO UMKM-IKM berpartisipasi dalam memfasilitasi pengetahuan, akses pasar, digitalisasi, akses permodalan dan rangkaian peningkatan kapasitas. Pendampingan ini diwujudkan dalam Program APINDO UMKM MERDEKA (AUM), yaitu suatu Platform Kolaborasi pentahelix, diminta setiap pemangku kepentingan dapat bergabung mendukung inisiatif ini.

Program UMKM Merdeka ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mempraktekkan keilmuannya secara penuh, meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan sekaligus membantu pengembangan UMKM agar naik kelas secara cepat dengan didukung oleh perusahaan industri melalui mentor-mentor bisnis yang telah berpengalaman. Mahasiswa tersebut berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di daerah perwakilan APINDO, UMKM dari mitra-mitra binaan APINDO dan mentor-mentor bisnis berasal dari perusahaan-perusahaan industri yang menjadi anggota APINDO. Nantinya setiap UMKM akan didampingi oleh 5-6 mahasiswa dengan multidisiplin ilmu dan dipandu oleh mentor professional dari sejumlah perusahaan yang terdaftar di APINDO

Setiap kegiatan di Program APINDO UMKM Merdeka akan diberikan *Key Performance Indicator* untuk dapat mengukur kesuksesan program-program yang telah dijalankan. Indikator-indikator pencapaian kinerjanya adalah berasal dari Akses Permodalan, Peningkatan Kapasitas Produksi, Perluasan Akses Pasar dan Implementasi UMKM Go Modern dan Go Digital.

Berikut capaian AUM di tahun 2023 :

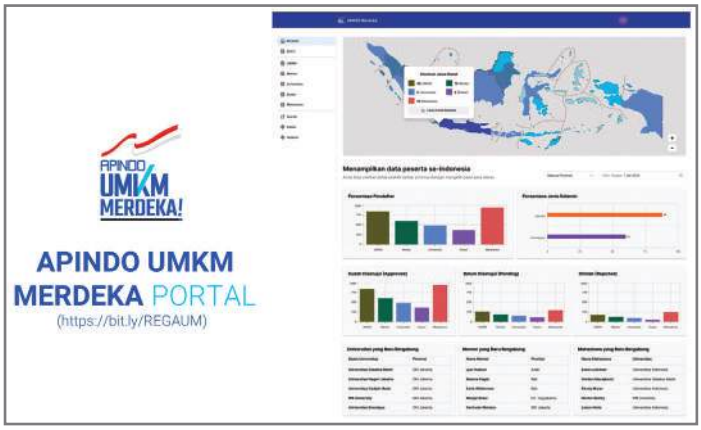

3. Penguatan Basis Data UMKM - Webportal APINDO UMKM

Webportal UMKM sebagai alat bantu atau media untuk mendukung UMKM mitra APINDO di seluruh Indonesia dalam hal promosi dan informasi secara *online*, dengan tujuan: Sebagai media untuk *network/ business matching*; media promosi dari produk-produk UMKM yang dihasilkan; Untuk mengetahui potensi UMKM Indonesia dan perkembangannya; Mengetahui Profil UMKM Indonesia; Sebagai forum online antar para pelaku usaha UMKM serta *update* kegiatan di bidang UMKM APINDO.

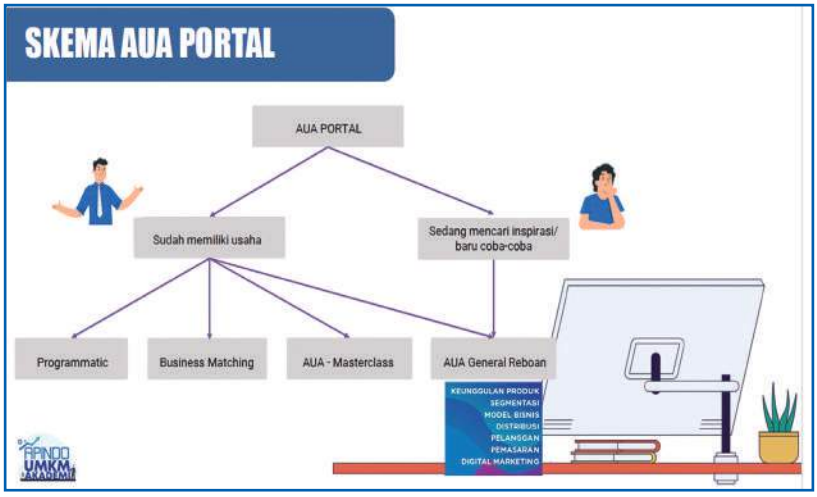

Website ini berisi berbagai jenis informasi tentang UMKM meliputi posisi / daerah di mana UMKM berada, produk UMKM dan nama UMKM. Dengan media ini dapat menggambarkan distribusi paparan UMKM, posisi, produk dan nama-nama di bawah naungan APINDO.

DASHBOARD APINDO UMKM AKADEMI

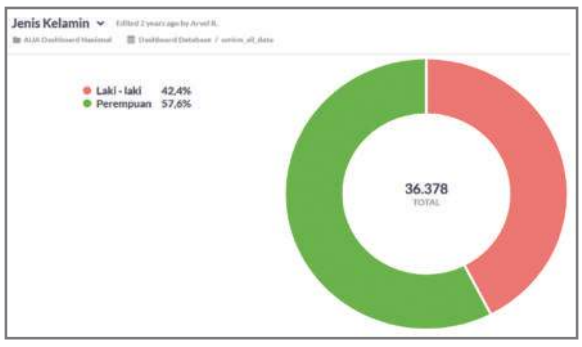

4. APINDO UMKM MERDEKA Festival – AUM FEST

AUM FEST adalah kegiatan yang mendukung kolaborasi pengusaha khususnya UMKM, untuk menjual produknya serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mendukung dan membeli produk produk UMKM Indonesia.

Program ini merupakan salah satu rangkaian dalam acara MUNAS APINDO 2023 pada 28 Juli - 1 Agustus 2023, dan merupakan kegiatan pertama yang dilakukan APINDO dalam pengenalan para pelaku usaha dan industri kecil menengah ke masyarakat luas dengan milestones sebagai berikut:

Traffic pengunjung selama AUM Fest sebagai berikut :

Media Monitoring dan Total PRV:

5. Communication Program, Media Sosial – Instagram APINDOUMKM PROGRAM (@apindoumkm)

Selain adanya Portal websiter, APINDO UMKM juga mensosialisasikan program kerjanya juga lewat media sosial Instagram (@apindoumkm), yang mana konten nya berisikan: memperkenalkan APINDO UMKM, Edukasi *Thematic Content*, Acara Terprogram dan juga Reel Kupas Bisnis

6. Mata Kuliah Pengembangan Bisnis Lestari di Program FUTURE SKILLS - UGM

APINDO UMKM AKADEMI (AUA) – *Future Skills* adalah program kuliah *online* terbuka yang digagas oleh Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Gadjah Mada.

Pada tahun 2023, APINDO UMKM Akademi (AUA) menyambut baik undangan Future Skills Fisipol UGM dengan menawarkan Mata Kuliah Mengembangkan Bisnis Lestari dengan Perencanaan untuk Sukses. Mata Kuliah ini dirancang untuk memberikan gambaran praktis terkait tahapan memulai bisnis dengan perencanaan untuk sukses, namun tidak hanya secara profit, namun juga sesuai dengan prinsip-prinsip Bisnis Lestari yang mempedulikan kinerja dampak sosial (people) dan dampak lingkungan (planet).

Program Mata Kuliah UGM *Future Skills* ini sudah berjalan selama 2 (dua) semester ini, masing-masing semester menerima pendaftaran 200 mahasiswa di semester genap dan 287 mahasiswa di semester ganjil dari seluruh Indonesia (Pontianak, Tabalong, Makasar, Medan, Lampung, Yogyakarta, Kendari, Palembang, Sidoarjo, Purwokerto, Gresik, Surabaya, Garut, Sumedang, Bandung dll). Untuk peserta mahasiswa minimal tingkat 3 semester 5, memiliki pengalaman organisasi, atau kepanitiaan. Kuliah ini berlangsung 14 kali pertemuan, yang dilaksanakan mingguan setiap Kamis Malam jam 19.00 - 21.00 WIB.

7. Program Strategis Digitalisasi Upah dan Eksplorasi Inklusi Keuangan Pekerja, Efektifitas Kasbon *(Early Wage Access)* dalam mendukung kesejahteraan pekerja

Salah satu kesulitan pelaku UMKM dan IKM adalah dalam hal manajemen arus kas dimana upaya pelaku usaha untuk menyeimbangkan kebutuhan kas operasional, investasi, dan juga pengembangan usaha terkait dengan stabilitas kebutuhan modal untuk pengupahan.

Tidak semua perusahaan memiliki ukuran maupun kapasitas memadai untuk adanya koperasi karyawan, yang berfungsi juga memitigasi kebutuhan likuiditas karyawan di saat-saat darurat seperti anggota keluarga sakit, atau biaya uang pangkal sekolah, dsb. Akses terhadap likuiditas di kategori ini juga memiliki berbagai aspek yang perlu diperkuat antara lain keterlibatan regulator, penyedia jasa keuangan, dan juga penyedia jasa keuangan, dan juga penyedia manajemen SDM secara digital.

Dampak dari tidak adanya elemen-elemen ini seringkali adalah terjeratnya pekerja di dalam hutang yang berbunga tinggi dari penyedia jasa keuangan informal. APINDO dalam hal ini bekerjasama dengan *ILO's Global Centre on*

Digital Wages for Decent Work dalam rangka meningkatkan digitalisasi pembayaran upah secara bertanggung jawab, dimana salah satu manfaat yang dapat diperoleh adalah kemudahan pelaku usaha dan pekerja untuk menyelesaikan masalah kebutuhan likuiditas mendadak. Isu mengenai kasbon menjadi area studi dan juga area kolaborasi yang dijajaki lebih lanjut ke masa depan.

Di bulan Juni 2023 ini, APINDO meresmikan kerjasama ini secara formal bersama dengan pimpinan ILO di Indonesia. Program Strategis Digitalisasi Upah dan Eksplorasi Inklusi Keuangan Pekerja, Efektifitas Kasbon *(Early Wage Access)* dalam mendukung kesejahteraan pekerja. Beberapa Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah:

1. Pada tanggal 24 - 25 Agustus 2023 dilaksanakan TOT Pelatihan Digitalisasi Upah yang Bertanggung Jawab Bagi UKM dengan 15 peserta
2. Pada tanggal 28 - 29 Agustus 2023 dilaksanakan piloting dengan 30 pelaku usaha UKM.
3. Pada tanggal 4 Desember mengundang team APINDO utk berdiskusi di kantor ILO Jakarta membahas rencana tahun 2024 dan yang berjalan hingga des 2023.
4. Pada tanggal 6 Desember, mengadakan *workshop* dan *group dicussion co host* by OJK KR01 di hotel Pullman Thamrin *(fullday)* mengundang sebagian besar IJK, dengan Wakil Ketua Bidang UMKM dan Koperasi DPN APINDO sebagai Narsum.
5. Pada tanggal 7 Desember, diadakan refresher training kepada trainer dari APINDO dan BDS untuk topik training wage digitization untuk SME. Pelaksanaannya setengah hari di kantor ILO Jakarta. Sorenya berangkat ke Bandung untuk jalankan training RO kedua di Hotel Santika Bandung.
6. Pada tanggal 8 Desember, RO II kepada 20 - 25 pelaku UKM yang sebagian besar masih membayarkan upah secara tunai kepada pekerjanya. Training di *deliver* oleh Ibu Rini (BDS yg ILO hire) dengan Bapak Fahmi Kewirausahaan Bidang UMKM dan Koperasi DPN APINDO sebagai CO-Trainer dari APINDO.
7. Pada tanggal 18 desember, *interview Best Practice* Ibu Mira Sonia, pengurus Komite Regulasi Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO yang sudah menjalankan praktek EWA *(Early Wage Acess)* di perusahaannya

8. Digitalisasi Bisnis UKM kerjasama APINDO UMKM - UOB FINLAB

UOB FinLab adalah program akselerator inovasi bisnis yang menyatukan ekosistem untuk bersama-sama berinovasi dan mengkatalisasi pertumbuhan dan transformasi bisnis UMKM, yang mana program ini diluncurkan pada tanggal 19 September, oleh UOB Indonesia untuk mengembangkan dan mendigitalisasi bisnis UKM di Indonesia, yang di selenggarakan di Smesco Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Peluncuran di Indonesia merupakan tonggak penting bagi UOB FinLab karena hal ini menandai regionalisasi UOB di lima pasar utama UOB di ASEAN. Hal ini juga merupakan upaya menumbuhkan jaringan ekosistem regional yang kuat untuk pengembangan kapasitas lintas negara guna dalam rangka mendigitalkan dan meningkatkan keterampilan bisnis.

Ketua Umum APINDO Shinta W Kamdani mengatakan, visi APINDO adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, berkelanjutan dan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Untuk itu, APINDO mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.

Meskipun demikian, hal ini disadari bahwa penciptaan lapangan pekerjaan melalui industri dan perusahaan-perusahaan besar tidak cukup. Oleh karenanya, dunia usaha mendorong penciptaan lapangan kerja melalui penciptaan UMKM-UMKM.

Selain memfokuskan pada isu ketenagakerjaan, investasi dan advokasi kebijakan, APINDO juga mendorong pengembangan UMKM sehingga apa yang dilakukan APINDO menjadi ekosistem *enabler* untuk UMKM.

9. Mendorong Implementasi Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi oleh Industri dan UMKM untuk Mendukung Transisi Energi di Indonesia

Dalam upaya pemerintah mensinergikan isu-isu efisiensi dan Energi Baru Terbarukan (EBT), tentunya diperlukan adanya sinergi antara pemerintah dan swasta yang menjadi kunci kesuksesan dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar dalam sambutannya pada *Focus Group Discussion* (FGD) terkait penjaringan isu Efisiensi Energi dan EBT untuk Penyusunan RPJMN Tahun 2025 – 2029, Selasa (24/10/2023) di Jakarta.

Lebih lanjut Sanny mengungkapkan jika APINDO merupakan wadah perwakilan para pengusaha di seluruh Indonesia tentunya menyambut baik adanya inisiatif/upaya kolaboratif yang dilakukan melalui konsultasi aktif dengan perwakilan dari sektor swasta termasuk organisasi bisnis, asosiasi industri, untuk mendapatkan masukan/saran terkait prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, diharapkan juga adanya kemudahan regulasi dan pemberian insentif khususnya bagi pelaku usaha untuk mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor-sektor industri nasional baik yang berskala besar maupun UMKM.

FGD tersebut merupakan program dari Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/ BAPPENAS, APINDO, KADIN bekerjasama dengan GIZ dengan para pembicara APINDO dari Bidang UMKM dan Koperasi: Lishia Erza, Arief Budiman, Antony Harsono, Nur Maliki Arifiandi dan Bidang ESDM: Antony Utomo.

Kegiatan yang diselenggarakan pada Oktober 2023 di Jakarta tersebut bertujuan untuk:

1. Menjaring masukan yang dapat ditindaklanjuti dari para pemangku kepentingan di sektor industri dan UMKM terkait penerapan ekonomi hijau di Indonesia sekaligus agenda transisi energi nasional untuk mendukung pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta visi nasional Indonesia Emas di tahun 2045.
2. Memfasilitasi diskusi mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di sektor industri dan UMKM, dalam mendukung penerapan ekonomi hijau dan transisi energi melalui teknologi energi bersih di seluruh rantai nilai produksi.
3. Mengidentifikasi secara komprehensif setiap hambatan regulasi, teknis, serta keuangan yang menghambat implementasi ET yang terjangkau dan langkah-langkah efisiensi energi di sektor industri dan UMKM yang mendukung pergeseran kegiatan ekonomi menuju kegiatan ekonomi yang dapat memprioritaskan penciptaan nilai *(value creation)*.
4. Mengumpulkan masukan dari para pemangku kepentingan industri pengolahan dan manufaktur, UMKM, lembaga keuangan, para ahli, dan pemangku kepentingan terkait lainnya tentang bagaimana dan apa saja yang diperlukan untuk mempercepat penyediaan investasi hijau.
5. Mendorong kemitraan yang kuat di antara para pemangku kepentingan yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan skema pembiayaan inovatif dan mobilisasi investasi hijau, termasuk potensi perdagangan karbon, untuk mendukung efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

10. Mendukung Promosi Produk Lokal dengan REVOLUSI LOKAL

Pertemuan informal terbatas untuk membahas tindak lanjut upaya perlindungan, strategi promosi dan pengembangan UMKM Lokal yang dihadiri oleh 1) Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki; 2) Sofyan Djalil; 3) Rudiantara; 4) Metta Dharmasaputra (Katadata); 5) Ronald Walla (APINDO); 6) Leonard Theosabrata (SMESCO); 7) Raymond Chin; 8) Lutpi Ginanjar (Smeshub); 9) Ade Wahyudi (Katadata); Ibu Chrisma Albanjar (KADIN); Cahyo Rahardian (Dirjen AHU Kumham); Joshua Krisekputra (APINDO); Siti Azizah (Deputi bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM); Temmy S (Asisten Deputi bidang pembiayaan dan investasi UMKM); 15) Developer platform digital HABS

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga peluncuran inisiatif bertajuk Revolusi Lokal. Dalam program ini, mengajak seluruh lapisan Masyarakat, mencakup para produsen, konsumen, jajaran pemerintah dan para pelaku bisnis terkait, seperti manufaktur, hingga *e-commerce* untuk mendukung produk lokal, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam event ini mengajak artis Luna Maya sebagai pelaku UKM Produk Kecantikan Lokal

Gerakan ini berupaya untuk membangkitkan industri lokal agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sehingga bisa bersaing dengan merek global.

04

KEGIATAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL APINDO

HIGHLIGHT JANUARI 2023

1. Kolaborasi Pentahelix Memajukan UMKM - ILO, APINDO Provinsi, SMESCO, KADIN & Universitas Merancang Program Inkubasi UMKM

APINDO bidang UMKM/IKM mengadakan beberapa *meeting* dengan para Penggerak Masyarakat Tulen (PMT), komunitas UMKM Leader, Universitas, UN, Pemerintah dan *stakeholder* terkait lainnya, untuk meningkatkan kualitas implementasi Roadmap Perekonomian APINDO – khususnya Bidang UMKM/IKM - yang telah diserahkan kepada Presiden RI.

Diskusi Pengembangan UMKM dengan para leader komunitas UMKM (Penggerak Masyarakat Tulen – PMT) di Surabaya, pada bulan Desember, antara Ketua Bidang UMKM/IKM APINDO Ronald Walla, Ketua KADINDA Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Ketum CEO Business Forum Indonesia Jahja Soenardjo, Bawa Indonesia Global (BIG) Eka Sari Lorena, Perwakilan DPP APINDO Jawa Timur, GP Jamu, EO- East, Rektor/ perwakilan UBAYA dan Universitas Ciputra.

Bersama dengan ITH-KADIN dan SMESCO mengadakan sosialisasi International Portal *Buyers RangMe* di Los Angeles untuk meningkatkan ekspor UMKM di bulan Desember, dilanjutkan kunjungan kolaborasi dengan APINDO Lampung untuk UMKM Merdeka, yang merupakan kolaborasi beberapa asosiasi/ perkumpulan IMA, AMA, TDA, IBF, DPD, untuk Mewujudkan UMKM Merdeka Sumatra connect dengan DPP di Sumatra dan menjadi Program Nasional AUA UMKM Merdeka.

2. Rapat Koordinasi *stakeholders* UMKM

Pertemuan awal tahun, dihadiri oleh Ketua Bidang UMKM APINDO Ronald Walla, tim Bidang UMKM/IKM, Tim SKSG UI, Dewan Pertimbangan APINDO Anne Patricia dan Katya Kamdani dari Melati Nusantara sebagai observer, meeting untuk merumuskan hasil dari *roadshow* tentang UMMKM dilaksanakan di Ruang Serba Guna APINDO, Kamis (19/1/2023), yang. Hadir pula secara daring, Ketua DPP APINDO Lampung Ary Meizari Alfian, Handoko Hendroyono salah satu co-founder MBLOK Market, Yongky Susilo dari team Perdagangan APINDO dan ITH–KADIN dan diakhiri dengan audiensi dari UNS – Solo.

KEGIATAN JANUARI 2023

1. APINDO - Invest Hong Kong Business Luncheon: Eksplorasi Peluang Bisnis di Hong Kong

APINDO dan International Strategic Partnership Center (ISPC Indonesia) bekerjasama dengan Pemerintah Hong Kong Special Administrative Region mengadakan "APINDO – Invest Hong Kong Business Luncheon: Hong Kong a leading Hub for Family Offices", di kantor APINDO, Selasa (10/1/2023).

Hadiri dalam acara ini Director General Invest Hongkong, Stephen Phillips dan sejumlah Pengurus APINDO. Bagi Indonesia, meskipun volume ekspor ke Hong Kong tidak sebesar volume ekspor beberapa negara anggota ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, kinerja ekspor perdagangan Indonesia ke Hong Kong menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA) diharapkan akan memperkuat kemitraan ekonomi antara kedua Pihak (ASEAN dan Hong Kong, RRC), dan menjadi landasan penting menuju ekonomi regional integrasi dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Dampak Kondisi Ekonomi Terhadap Minat Masukan Investasi ke Indonesia

APINDO Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi mengadakan Sharing Session dengan tema "Dampak Kondisi Ekonomi ter- hadap Minat Masuknya Investasi ke Indonesia", Kamis (12/1/2023) dengan menghadirkan pembicara Ketua Tim Asistensi/Tim Ahli Menko Perekonomian sekaligus Pengamat Ekonomi, Raden Pardede. Dalam sesi tersebut dipaparkan meskipun dihadapkan pada tantangan untuk dapat beradaptasi dengan hal baru sejak menghadapi Pandemi Covid-19, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2022 berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional (IMF) mampu tumbuh di angka 5,3% dan diproyeksikan di tahun 2023 ini tetap mampu tumbuh di angka 5%.

3. Pemanfaatan *Blockchain* untuk Bisnis

APINDO beserta Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) menyelenggarakan Webinar bertajuk "Pemanfaatan Blockchain untuk Bisnis", Rabu (18/1/2023), dengan menghadirkan narasumber: *Country Manager* LUNO Indonesia Jayawijaya ningtiyas (Jay), Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Thufaili, serta *Chairwoman* dari Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) Asih Karnengsih, dan turut dihadiri oleh Ketua Komite International Trade APINDO Yos Adiguna Ginting dan Pengurus Bidang Ekonomi Digital APINDO Apung Sumengkar sebagai moderator. Tingkat eksplorasi dan inklusi blockchain di Indonesia juga

dinilai cukup baik, ditambah dengan ketertarikan masyarakat yang tinggi sehingga memiliki potensi untuk dapat bersaing dengan negara lainnya di ASEAN, demikian disampaikan oleh Thufaili.

4. Peran Keterampilan Digital dalam Industri Manufaktur & Industri 4.0

ISD Council bersama dengan APINDO dan KATALIS telah menyelenggarakan diskusi tentang "Keterampilan Digital dalam Industri Manufaktur dan Industri 4.0", Senin (30/1/2023) di Jakarta, dengan tujuan memetakan pasokan yang tersedia di pasar tenaga kerja Indonesia serta mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan di sektor manufaktur. Dibuka oleh Ketua Bidang Industri APINDO, Johnny Dharmawan, dan Direktur Eksekutif ISD Council, Devi Ariyani, turut memberikan pidato kunci Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia In dustri, Kementerian Perindustrian Indonesia, Arus Gunawan. Hasil dialog menunjukkan bahwa para pihak sepakat akan pentingnya teknologi bagi peningkatan produktifitas dan efisiensi, yang perlu disertai dengan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai. Transformasi digital juga seyogyanya dilakukan sesuai kebutuhan dan memastikan transisi menuju industri 4.0 yang humanis.

HIGHLIGHT FEBRUARI 2023

1. Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO & KADIN

Bidang Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial DPN APINDO menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Bidang Ketenagakerjaan KADIN, Jumat (17/2/2023) di Bogor, dengan tujuan mengefektifkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara KADIN & APINDO tanggal 7 Juli 2022. Hadir dalam kesempatan ini Wakil Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani; Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan KADIN, Adi Mahfudz Wuhadji; Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial DPN APINDO, Anton J. Supit dan Pengurus Bidang Ketenagakerjaan APINDO & KADIN.

Dalam pesan yang disampaikan melalui video, Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan pesan bahwa melalui rapat koordinasi ini diharapkan melahirkan kerja sama yang harmonis antar bidang ketenagakerjaan APINDO dan KADIN serta suara dunia usaha memiliki kesamaan persepsi terhadap isu Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan agar mitra sosial kita terutama Pemerintah dan serikat pekerja/ serikat buruh dapat memperoleh masukan yang sama sehingga mereka dapat meresponsnya dengan tepat.

Beberapa kesimpulan dalam Rapat Koordinasi tersebut adalah:
Pertama, LKS Tripartit Nasi- onal dan Dewan Pengupahan Nasional periode 2023 -2026 yang akan segera memulai tugasnya, sehubungan dengan hal itu diharapkan wakil-wakil KADIN & APINDO yang duduk dalam kelembagaan TRIPNAS & DEPENAS agar berkordinasi dengan wakil-wakil KADIN Daerah dan DPP/ DPKab/ DPKot yang duduk di kedua lembaga tersebut sesuai tingkatannya.
Kedua, rencana Pemerintah yang akan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan Perppu nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja khususnya yang terkait dengan Alih Daya dan Pengupahan.

Perppu 2/ 2022 memberi batasan dalam alih daya, sehingga APINDO menyikapi dengan menyampaikan secara resmi tanggapan atas konsep rancangan PP pelaksanaan Perppu tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada 2 Februari 2023.

5 (lima) aspek substansi alih daya yang sekiranya akan diubah adalah:
1. Kriteria Pekerjaan yang dapar dialihdayakan
2. Perjanjian Alih Daya
3. Persyaratan Administratif
4. Larangan; dan
5. Sanksi Administratif

Pengupahan menjadi aspek yang krusial dalam pertimbangan investor dalam memutuskan investasi di suatu negara. Aspek penting dalam pengupahan, khususnya dalam penetapan upah minimum adalah terproyeksi, stabil dari segi normatif yang tidak berubah-ubah, maka sehubungan dengan hal ini diharapkan KADIN dan APINDO dapat terlibat secara bermakna dalam penyusunan aturan pelaksana sebagaimana diamanatkan dalam PERPPU 2/ 2022.

2. Bedah Buku Bidang Perdagangan APINDO: Peran Ekspor Nasional di Pasar Impor Negara Mitra Free Trade Agreement (FTA)

Ketua Umum APINDO Hariyadi B. Sukamdani memberikan sambutan dalam Bedah Buku yang disusun oleh tim Bidang Perdagangan APINDO

APINDO menyelenggarakan Bedah Buku Bidang Perdagangan APINDO "Perdagangan Bebas & Perkembangan Ekspor Nasional: Peran Produk Nasional di Pasar Impor Negara Mitra *Free Trade Agreement* (FTA)" yang diselenggarakan secara hybrid di kantor APINDO dan via daring, Kamis (2/2/2023).

Paparan bedah buku ini dilakukan oleh Ketua Bidang Perdagangan Benny Soetrisno dan menghadirkan para Penanggap yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Perekonomian Edi P. Pambudi, Direktur Pengembangan Pasar & Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan Marolop Nainggolan, Ketua Komite FTA APINDO Wahyuni Bahar, dan Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri. Diskusi ini dimoderatori oleh Pengurus Bidang Perdagangan APINDO Taufik Mappanre.

Buku ini menguraikan perkembangan ekspor produk nasional ke sejumlah negara FTA, Komposisi impor dan peran produk nasional pada impor negara-negara mitra FTA, serta Peluang ekspor ke sejumlah negara mitra FTA. Uraian di dalam buku tersebut diharapkan menggambarkan peluang ekspor produk nasional yang ekspornya dapat ditingkatkan ke sejumlah negara mitra FTA.

Hadir sejumlah pengurus APINDO diantaranya Anggota Dewan Pertimbangan APINDO Anne Patricia, Ketua Industrsi Manufaktur Johnny Darmawan, Pengurus Bidang Perbankan, Jasa Keuangan, Pasar Modal dan Perpajakan Henry Chevalier, Pengurus Bidang Perdagangan Ratna Loppies, dan Pengurus Bidang Hubungan Internasional & Investasi APINDO, Selo Winardi dan Gautam Naraindas.

3. *Launching* Kerjasama ABILEC (APINDO *Business and Industry Learning Center*) & Institut IBIMA

APINDO dan IBIMA pada Senin (13/2/2023) di kantor APINDO meluncurkan ABILEC yang diharapkan menjadi agregator bisnis dan industri serta berperan aktif dan menjadi solusi atas tantangan kebutuhan pengembangan SDM 4in1, program link & match dunia usaha dunia industri, serta berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan berbagai pihak.

APINDO terus mendorong perbaikan sektor industri manufaktur melalui kebijakan untuk sinergi hulu - hilir industri yang mesti konsisten dijalankan dengan berbagai skema insentif, dukungan perdagangan internasional FTA-CEPA, akses lahan serta perijinan, ketenagakerjaan dan sebagainya, seperti disampaikan oleh Ketua Umum APINDO periode kepengurusan 2018 - 2023, Hariyadi B. Sukamdani.

Program Kerjasama ABILEC & Institut IBIMA mengusulkan sejumlah kegiatan riil, yaitu:

1. Membangun Kerjasama dan membuka kesempatan serta akses untuk pengembangan organisasi/perusahaan melalui *Connected ecosystem* & *technology*.
2. Memberikan akses lebih luas untuk *networking* & *pilot project* dalam upaya percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi bisnis & industri nasional
3. Memberikan kesempatan untuk melakukan peningkatan penjualan dan penggunaan produk & karya anak bangsa dan menjalin hubungan serta aksesibilitas dengan berbagai *stakeholders*
4. Memberikan services dari program-program ABILEC & Institut IBIMA yang sangat solutif, konstruktif, kooperatif dan integratif untuk pemulihan bisnis/industri dan pengembangan SDM nasional
5. Memberikan akses dan dukungan penuh dalam pengembangan *Research* & *Commercialization* serta pengembangan *Enterpreneurship* & *Incubator Center*

Launching program ini juga didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital, Kreatifitas dan Sumber Daya Manusia Rizal Edwin.

4. APINDO – Hong Kong Economic & Trade Office

APINDO menjalin kerjasama dengan Hong Kong Economic & Trade Office sebagai *Supporting Organization* dalam acara *Chinese New Year Reception* yang diadakan Selasa (7/2/2023) di Jakarta. Sejumlah Pimpinan APINDO dan Perusahaan Anggota APINDO turut menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek ini. Dalam *Toast Ceremony*, APINDO diwakili oleh Sekretaris Umum APINDO, Eddy Hussy.

5. ACE Dialog Bersama Bahas Migrasi Tenaga Kerja

The ASEAN confederation of Employers (ACE) and the ASEAN Trade Union Council (ATUC) mengadakan Dialog Bersama ke-3 mengenai Migrasi Tenaga Kerja, pada Jumat (24/2/2023) di Jepang.

Sekretaris Jenderal ACE, Danang Girindrawardana memimpin dialog ACE-ATUC, sementara Pengurus APINDO, Dani Handajani juga hadir dalam acara tersebut.

Acara ini diselenggarakan oleh ACE dengan dukungan dari program TRIANGLE ILO di ASEAN yang dikolaborasikan dengan Bureau for Employers' Activities (ACTEMP) dan Bureau of Workers Activities (ACTRAV). Dialog ini bertujuan untuk:

1. Meninjau hasil dari dialog bersama pertama (2016) dan kedua (2019) antara ACE dan ATUC dan meninjau perkembangan di bidang yang diidentifikasi menjadi perhatian dan prioritas bersama.
2. Membagikan contoh tindakan pengusaha dan pekerja di tingkat negara dalam memajukan perekrutan dan pekerjaan pekerja migran yang adil dan memberikan layanan kepada mereka.
3. Mendiskusikan dan menyepakati area prioritas untuk advokasi dan aksi ACE dan ATUC bersama dalam migrasi tenaga kerja.

APINDO merupakan Sekretariat ACE, dimana Ketua Umum APINDO terpilih sebagai Presiden ACE periode 2021 - 2023.

HIGHLIGHT MARET 2023

1. APINDO dan ILO Mendorong Digitalisasi untuk UMKM

Ketua Bidang UMKM/ IKM APINDO, Ronald Walla menjadi salah satu pembicara dalam FGD bertema "Inklusi dan daya saing keuangan: Membangun UKM yang kuat dan kokoh dalam perekonomian yang terdigitalisasi", Kamis (2/3/2023) di Jakarta. Partisipasi APINDO dalam FGD ini merupakan Kerjasama APINDO UMKM dan ILO untuk mendukung pengembangan sektor UKM yang berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, ILO meluncurkan Proyek PROMISE IMPACT ILO tahap kedua (PROMISE II IMPACT) yang merupakan proyek mengupayakan pemberdayaan UKM melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital, sebagai kolaborasi ILO, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Dalam pandangan kami, digitalisasi upah sangat penting dilakukan. Hal ini mengarah pada kesejahteraan finansial pekerja yang lebih baik, memungkinkan rekam jejak keuangan individu yang lebih baik dan akan memungkinkan mereka membangun kelayakan kredit, bertransaksi lebih efisien, dan mengelola keuangan dengan kuat, sehingga meningkatkan akses ke berbagai layanan keuangan. Kondisi tersebut bisa diperoleh jika, diberikan alat pemberdayaan yang tepat", ujar Arief Budiman.

Perwakilan narasumber diantaranya Direktur Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta Arlyana Abubakar, Chief of ILO's Social Finance Programme / ILO's Global Centre on Digital Wages for Decent Work Craig Churchill, dan Southeast Asia Lead at UN Based Better Than Cash Alliance Isvary Sivaligam.

Craig Churchill dari ILO menjelaskan dua aspek penting dalam program ini yaitu upah atau gaji dan tanggung jawab, di mana upah erat kaitannya dengan institusi keuangan, dompet keuangan digital, dan kartu prabayar (a pre-paid card). Sementara tanggung jawab berkenaan dengan regulasi dan aturan suatu negara yang diakui secara internasional tentang prinsip-prinsip dan hak-hak pekerja, dan tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar PBB tentang inklusi keuangan dan perlind- ungan konsumen.

"Pembayaran upah secara digital tentunya membawa manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan pemerintah. Perusahaan dapat memiliki payroll yang efisien, transparansi dan akurasi dalam pembayaran, serta akses layanan yang lebih baik kepada pasar. Di sisi lain karyawan pun merasakan keuntungan melalui akurasi pembayaran upah, timeliness, aman dan cepat, dan adanya fasilitasi manajemen penghasilan. Kemudian pemerintah, memperoleh akses terhadap inklusi keuangan, digitalisasi, literasi keuangan, dan hak-hak pekerja yang dapat diimplementasikan kedalam kebijakan", tutur Craig dalam presentasinya.

2. Keterpaduan Konsep Kawasan Industri Modern & Smart Logistic dalam Peningkatan Investasi

Kebangkitan dan pemulihan ekonomi nasional Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19 diharapkan mampu terus tumbuh melalui beberapa strategi yang telah disiapkan oleh pemerintah yaitu peningkatan nilai tambah sektor industri, percepatan pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, peningkatan dan pemerataan infrastruktur serta kualitas layanan digital, juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang inovatif.

Salah satu upaya dalam meningkatkan nilai tambah sektor industri dilakukan melalui pengembangan Kawasan Industri, yang saat ini telah memasuki generasi ke-4 (Smart-Eco Industrial Park) melalui penerapan smart system dan penambahan konsep ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang ada di dalam Kawasan Industri.

Untuk itu, APINDO Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi bekerjasama dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) dan Kadin Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Keterpaduan Konsep Kawasan Industri Modern dengan Smart Logistic dalam Meningkatkan Investasi" bertempat di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi APINDO Sanny Iskandar memberikan ucapan selamat datang

Hadir memberikan sambutan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S.A Cahyanto mewakili Menteri Perindustrian

Keterpaduan pengembangan konsep Smart Eco Industrial Park dengan Smart Logistic sangat diperlukan karena diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi. Hal tersebut akan membawa perubahan yang sangat strategis dimana industri manufaktur dan logistik saling membutuhkan khususnya dalam rangka menekan efisiensi biaya dan waktu.

KEGIATAN MARET 2023

1. Pelatihan Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Sesuai komitmen APINDO untuk menciptakan dunia kerja yang aman dan bebas dari tindak kekerasan seksual, pada tanggal 7 Desember 2022, bekerja sama dengan Kantor ILO Jakarta, meluncurkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pelecehan & Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. APINDO memandang perlu melakukan pelatihan singkat untuk membekali pihak manajemen yang bertanggung jawab menangani isu kekerasan seksual di tempat kerja, Pelatihan ini akan melengkapi penerapan buku Pedoman tersebut dan diadakan Jumat (17/3/2023) bekerjasama dan didukung oleh PT. HM Sampoerna, Tbk. para peserta yang hadir

mendengarkan best practice penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja yang diterapkan di lingkungan PT HM Sampoerna Tbk.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempelajari dan memahami bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang zero tolerance terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, memberikan ruang aman dan nyaman bagi korban hingga korban merasa pulih baik secara fisik maupun mental, dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual di tempat kerja.

2. APINDO Berpartisipasi dalam 10th High-Level Tripartite Regional Seminar on Industrial Relations

Pengurus Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Dani Handajani, dalam 10th High-Level Tripartite Regional Seminar on Industrial Relations in Southeast Asian Countries pada Rabu – Jumat (22 – 24/2/2023) di Tokyo, Jepang, menyampaikan Country Report yang berisi:

- pemaparan hubungan industrial di Indonesia terkini
- penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- kontribusi dunia usaha dalam upaya dialog sosial tripartit di Indonesia dengan keterlibatan dunia usaha melalui Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, serta Dewan Jaminan Sosial.
- Perkembangan Omnibus Law, termasuk perubahan peraturan mengenai Upah Minimum, diskusi pergantian kepengurusan ASEAN Confederation of Employers (ACE), dimana presidency ACE sejak tahun 2021 dipegang oleh APINDO dengan Ketua Umum APINDO Hariyadi B. Sukamdani menjadi Presiden ACE dan Pengurus Bidang Kebijakan Publik APINDO, Danang Girindrawardana sebagai Sekretaris Jenderal ACE.

HIGHLIGHT APRIL 2023

1. APINDO Gelar Buka Puasa Bersama Mengundang Para Stakeholders. Mengangkat tema "Menebar Kebaikan, Bersihkan Hati Meraih Rahmat Ramadhan", buka puasa bersama APINDO dilaksanakan pada Selasa, 4 April 2023 di Jakarta

APINDO menggelar Buka Puasa Bersama dengan para stakeholders, Selasa (4/4/2023) di Jakarta. Buka puasa kali ini mengangkat tema "Menebar Kebaikan, Bersihkan Hati Meraih Rahmat Ramadhan". Tamu undangan yang hadir diantaranya Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki, perwakilan anggota APINDO, sejumlah asosiasi, mitra internasional, dan serikat buruh/ pekerja.

Dalam buka puasa bersama tersebut APINDO memberi santunan kepada anak yatim piatu, diserahkan oleh Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani dan Wakil Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani dan Suryadi Sasmita. Hariyadi menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya buka puasa bersama pada tahun ini mengingat kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan selama tahun 2020 - 2022 karena pandemi COVID-19.

Ia juga mengungkapkan kondisi korporasi yang tidak lagi maksimal dalam hal penciptaan lapangan kerja karena sejumlah kondisi yang mengharuskan korporasi melakukan efisiensi. Untuk itu, APINDO saat ini juga berperan aktif dalam upaya penguatan UMKM, termasuk diantaranya dengan menginisiasi APINDO UMKM Merdeka yang bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi. Program ini telah dilakukan pilot project di Lampung.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menyoroti sejumlah isu dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan Ominibus Law. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada APINDO atas kontribusinya dalam menyukseskan pelaksanaan vaksin sebanyak 450 juta dosis yang telah diberikan kepada 205 juta penduduk Indonesia. Budi menjelaskan bahwa ada 6 (enam) arahan Presiden RI untuk reformasi di Bidang Kesehatan, yaitu:
(1) Reformasi layanan dasar kesehatan (primer) puskesma
(2) Reformasi pada rumah sakit
(3) Reformasi terkait obat-obatan dan alat Kesehatan
(4) Reformasi mengenai pembiayaan Kesehatan
(5) Reformasi pada sumberdaya manusia
(6) Reformasi teknologi kesehatan.

Hariyadi menyampaikan bahwa dunia usaha akan semakin berat, namun semua harus tetap berjuang. "Saya selalu menyemangati semuanya untuk berani memperjuangkan apa yang bapak ibu sekalian yakini, karena masa bakti kita sebagai pengusaha akan jauh melampaui dari masa bakti para penyelenggara negara. Ini yang harus kita ingat. Jadi, kita mempunyai kepentingan, mempunyai peran yang juga diharapkan oleh masyarakat untuk terus bisa mengawal jalannya pembangunan di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya," kata Hariyadi.

2. APINDO Lepas Pekerja Mudik Bersama 2023 Bersama Menteri Ketenagakerjaan

Ketua Umum APINDO Hariyadi B. Sukamdani bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah melepas keberangkatan para pekerja/buruh Mudik Bersama, Selasa (18/4/2023). APINDO turut berpartisipasi dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk memfasilitasi sejumlah bus dalam kegiatan "Mudik Bersama Aman Nyaman 2023" guna meminimalisir pemudik dengan roda dua dan kepadatan lalu lintas dengan angkutan individu.

HIGHLIGHT MEI 2023

1. Serah Terima Presidensi ACE Dari APINDO Ke Singapore National Employers' Federation (SNEF)

Presidensi ASEAN Confederation of Employers (ACE), yang dijabat oleh Hariyadi B. Sukamdani pada periode 2021 – 2023 diberikan kepada dan dillanjutkan oleh Robert Yap dari Singapore National Employers Federation (SNEF). Serah terima bersama Robert yap sebagao Presiden ACE baru dilaksanakan pada Annual CEO & BOD Meeting di Jakarta, 11 Mei 2023.

"Saya yakin di bawah kepemimpinan SNEF, konfederasi kita akan terus maju secara regional dan global. APINDO siap mendukung dan mensukseskan Presidensi SNEF 2023-2025 dengan melanjutkan semangat kolaborasi di tahun-tahun mendatang, untuk masa depan yang lebih kuat dan ASEAN yang lebih baik," kata Hariyadi Sukamdani.

KEGIATAN MEI 2023

1. Peringatan Mayday Bersama Unsur Tripartit (Pemerintah dan Pekerja) .

Ketua Umum APINDO 2018-2023 Hariyadi B. Sukamdani dan Wakil Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday), Senin (1/5/2023) di PT Panasonic Manufacturing Indonesia, yang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan RI @ idafauziyahnu . Bertema "Merajut Kebersamaan Di Hari Yang Fitri", peringatan Hari Buruh juga sekaligus merupakan Halal Bihalal bersama para pekerja/buruh, pengusaha, dan stakeholders Ketenagakerjaan. Pengurus APINDO turut hadir dan sejumlah perusahaan anggota APINDO berpartisipasi dengan menampilkan produk dan program kolaborasi perusahaan dan pekerja di perusahaan pada booth perayaan May Day 2023.

2. Expert Talk Bersama BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan dan APINDO menggelar Expert Talk, Kamis (11/5/2023) di Jakarta, dengan menghadirkan topik dan pembicara: Welcome Speech Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan H. Yayat Syariful Hidayat, Opening Speech oleh Ketua Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan M. Zuhri Bahri, Special Speech oleh Ketua Umum APINDO Hariyadi B. Sukamdani serta CEO Sintesa Grup, Shinta W. Kamdani dan Keynote Speech Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo. Acara digagas oleh Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan M. Aditya Warman.

3. Ketua Umum APINDO Bahas Penguatan Industri Kelapa Sawit Nasional

Ketua Umum APINDO 2018 - 2023, Hariyadi B. Sukamdani, berperan sebagai narasumber dalam acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Inventor Indonesia (AII), pada Selasa 16/05/2023). Mengangkat tema "Invensi Siap Komersialisasi Hasil Riset Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)", AII berharap mendapat pandangan dari kalangan industri terhadap peran pelaku usaha dalam penguatan industri kelapa sawit nasional berbasis teknologi dalam negeri.

4. APINDO Terima Courtesy Meeting Duta Besar Singapura

Ketua Umum APINDO 2018 - 2023, Hariyadi B. Sukamdani, menerima Courtesy Meeting Duta Besar Singapura untuk Indonesia Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng dan Sekretaris Satu Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, Jonathan Seng, Senin (22/5/2023) di kantor APINDO. Dalam Courtesy Call tersebut, Hariyadi didampingi oleh Ketua Bidang Industri dan Manufaktur APINDO Jhonny Darmawan, Operations Director The International Strategic Partnership Centre (ISPC Indonesia) Diana M. Savitri, dan Sekretariat DPN APINDO Rudolf Saut.

HIGHLIGHT JUNI 2023

1. Shinta W. Kamdani Terpilih Sebagai Perempuan Pertama Ketua Umum APINDO

Musyawarah Nasional (MUNAS) XI APINDO, Kamis (15/6/2023) di Jakarta menetapkan terpilihnya Shinta W. Kamdani terpilih sebagai Ketua Umum APINDO Periode 2023 - 2028 di organisasi berusia 72 tahun ini.

Shinta mengatakan: "Merupakan kehormatan menerima amanah sebagai Ketua Umum APINDO periode 2023 – 2028. Amanah ini bagi saya adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar. Untuk itu, kami sudah menyusun dan mengembangkan sejumlah program kerja dan program unggulan yang fokus pada isu Roadmap Perekonomian, pengarusutamaan sertifikasi HR-IR, UMKM Merdeka, serta pengentasan stunting."

Ketua Umum APINDO periode 2018 - 2023, Hariyadi B. Sukamdani mengharapkan, terpilihnya Shinta W. Kamdani sebagai Ketua Umum APINDO akan memberi warna baru bagi APINDO dengan pengalaman yang beragam di level global dan menilai bahwa program kerja yang diusung Shinta relevan dengan konteks nasional serta mampu menggerakkan APINDO untuk berperan lebih besar.

"Seluruh program kerja yang diusung dalam periode ini menyentuh isu-isu krusial yang membutuhkan kolaborasi para pemangku kepentingan, khususnya dari sektor usaha, dalam meningkatkan ketahanan ekonomi kita. Saya optimis, dengan program kerja serta program aksi unggulan yang diusung di periode baru ini, APINDO dapat meningkatkan kontribusi sebagai bagian dari solusi untuk mengakselerasi momentum pemulihan nasional," Hariyadi mengatakan.

Terdapat tujuh program kerja dengan empat program aksi unggulan yang akan dijalankan pada periode kepemimpinan baru di bawah Shinta W. Kamdani sebagai Ketua Umum, di mana Roadmap Perekonomian APINDO 2024-2029 akan menjadi program aksi unggulan yang melanjutkan dan menyempurnakan prioritas rekomendasi kebijakan yang diusung pada periode kepemimpinan sebelumnya.

2. Penguatan Organisasi DPN Dan DPP APINDO Bersama Sofjan Wanandi

APINDO mengadakan Gathering Penguatan Organisasi DPN APINDO - DPP APINDO dan silaturahmi bersama Ketua Dewan Pertimbangan APINDO, Sofjan Wanandi, Jumat (16/6/2023) di Cisarua, Bogor. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, Ketua DPP APINDO, dan jajaran pengurus.

KEGIATAN JUNI 2023

1. Launching KEPMENAKER No.88/2023 dan Deklarasi Tripartit Pencegahan Penangan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Stakeholders ketenagakerjaan (pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh) mendeklarasikan komitmen bersama untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, di Kantor DPP APINDO, Jakarta, Kamis (1/6/2023).

"Deklarasi Tripartit ini sangat penting karena keberhasilan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja dapat terwujud apabila adanya komitmen dan persepsi yang sama dari pelaku Hubungan Industrial. deklarasi ini diperlukan untuk mendukung implementasi aturan terbaru tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, yakni Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Ketua Umum APINDO 2018 - 2023, Hariyadi B. Sukamdani, meyampaikan: "APINDO sebagai wadah dunia usaha mengapresiasi dan menyambut baik atas terbitnya Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. APINDO sudah sejak lama berkomitmen untuk membangun dunia kerja yang aman dan bebas dari pelecehan dan tindak kekerasan seksual, diantaranya APINDO telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Pelecehan Seksual Bagi Pengusaha yang telah diperbaharui dan penerbitan tersebut bekerjasama dengan Kemnaker, Kemenpppa, Komnas Perempuan, dan ILO Jakarta pada Desember 2022. APINDO berprinsip, tempat kerja yang bebas dari pelecehan dan tindak kekerasan seksual merupakan salah satu persyaratan untuk membangun lingkungan yang setara dan tidak diskriminatif.

2. Grand Launching Perusahaan di Kawasan Industri Wiraraja

Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi APINDO, @sannyiskandar dalam Grand Launching Enam Perusahaan di Kawasan Industri Wiraraja, Senin (5/6/2023) di Batam. Keenam perusahaan tersebut, yaitu: PT. Apollo Solar Indonesia, PT. Marubeni Global Indonesia, PT. Tyergy Technology Group, PT. Wiraraa Yunan International, PT. Alpha Solar Indonesia, PT. Jaya Electrical Energy. Turut hadir Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau Cahya, Ketua APINDO Kota Batam Rafki Rasyid dan Mantan Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau Periode 2004-2009 Abidin Hasibuan.

3. Kontribusi APINDO dalam International Labour Conference 111

Ketua Umum APINDO 2018-2023, Hariyadi B. Sukamdani selaku Employer Titular Delegate Indonesia menyampaikan pidato-nya pada International Labour Conference (ILC) 111 – Geneva Plenary Meeting, Rabu (7/6/2023) di Jenewa. Beliau menyebutkan beberapa pandangan APINDO terhadap permasalahan yang dibahas dalam ILC 111, sebagai berikut: Memajukan Keadilan Sosial, Kesetaraan Gender di Tempat Kerja, Membangun Perlindungan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Transisi yang Adil, Teknologi Berkelanjutan, Reskilling, dan Upskilling, serta Magang, dimana APINDO:

- mendorong koalisi dan itikad baik antara Pemerintah Indonesia dan Serikat Buruh, dengan tujuan membuka akses terhadap pekerjaan layak mempunyai peran yang sangat penting, oleh karena itu, APINDO. Koalisi skala nasional akan secara efektif meningkatkan produktivitas yang akan berdampak pada pengurangan kesenjangan dan peningkatan inklusi.
- melihat pentingnya memberikan inisiatif yang tepat sasaran bagi semua, khususnya segmen rentan untuk memasuki atau kembali memasuki dunia kerja melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas. Segmen tersebut mencakup penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, wiraswasta, dan pekerja mandiri.
- mendukung penerapan kepatuhan terhadap norma standar ILO dan mendorong resolusi yang mencakup penyertaan kondisi kerja yang aman dan sehat, untuk menciptakan keberlanjutan perusahaan dan meningkatkan kesempatan kerja.
- meyakini penerapan reskilling dan upskilling harus diselaraskan dengan hubungan tripartit yang kuat.
- berkomitmen untuk terus berpartisipasi dan berperan aktif bersama mitra sosial untuk mencari bentuk dan solusi terbaik bagi perekonomian Indonesia yang lebih baik, termasuk penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan karyawan yang lebih baik di masa depan.

4. APINDO Dorong Pembayaran Upah Digital bagi UMKM

Kemitraan APINDO dan ILO ditanya dengan penyerahan plakat kemitraan Promoting Responsible Digital Wage Payments in Indonesia 2023 - 2024, pada Senin (12/6/2023) di kantor APINDO. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum APINDO 2018 - 2023 Hariyadi B. Sukamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Ketua Bidang UMKM APINDO Ronald Walla, Perwakilan ILO Arief Umar, Pengurus Bidang UMKM APINDO Lizhia Erza dan Arief Budiman. Hadir juga secara daring diantaranya Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Michiko Miyamoto.

Di Maret 2023, ILO menyelenggarakan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk mempromosikan transisi ke upah digital di kalangan UKM di garmen dan

sektor terpilih lainnya di mana banyak perempuan dipekerjakan, serta mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama termasuk pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja, penyedia layanan keuangan/penggajian, dan mitra lainnya.

5. APINDO Fasilitasi Pelaku Usaha Rumah Sakit Melalui Diskusi Bersama Menteri Kesehatan

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani dalam diskusi bersama para pelaku usaha Rumah Sakit, alat kesehatan, dan perusahaan farmasi terkait RUU Kesehatan, Selasa (20/6/2023) di kantor APINDO.

6. APINDO Terima Audiensi PIC Hubungan Industrial Grup Astra

24 PIC Industrial Relations dari Grup Astra dengan masa kerja 3-5 tahun atau Middle-Senior Analyst mengunjungi kantor DPN APINDO, Jumat, (23/6/2023), sebagai bagian dari Industrial Relations Management Development Program (IRMDP) Intermediate 2023 yang merupakan training berjenjang Industrial Relations yang dilaksanakan oleh Corporate Industrial Relations PT Astra International Tbk. Executive Director APINDO, Rudolf Saut Butarbutar dan Tim Ahli Hubungan Industrial APINDO, Myra Maria Hanartani menyampaikan tentang APINDO, perkembangan kondisi ketenagakerjaan, dan perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

HIGHLIGHT JULI 2023

Awal semester dua tahun 2023 ditandai oleh **Pengukuhan Kepengurusan DPN APINDO 2023 – 2028**, pada tanggal 31 Juli 2023 di bawah pimpinan Shinta W. Kamdani sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional yang terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 14 dan 15 Juni 2023.

Dilaksanakan di Hotel Kempinski, Jakarta, Pengukuhan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju para duta besar negara sahabat, kepala daerah, Pengukuhan juga dihadiri oleh seribu pengusaha dari beragam sektor.

Generasi baru APINDO Kepengurusan DPN APINDO 2023 – 2028 memadukan komposisi kalangan pengusaha serta profesional senior, diantaranya Sofjan Wanandi sebagai Ketua Dewan Petimbangan APINDO dan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu sebagai Ketua Dewan Pakar. Selain itu, kepengurusan juga menciptakan inisiatif baru:

- Pembentukan Dewan Kewirausahaan sebagai next generation APINDO yang terdiri atas pemimpin-pemimpin muda tanah air, diantaranya Luki Wanandi, Putri Tanjung.
- Program kerja aksi unggulan, secara khusus program pengentasan stunting yakni Kolaborasi Inklusif

"Kepemimpinan APINDO menjadi tonggak sejarah transformasi APINDO dengan menghasilkan sejumlah program unggulan akselerasi pemulihan ekonomi untuk pembangunan nasional. Selain bersinergi secara pentahelix dengan pemerintah, akademisi, badan/pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, serta media, kami harapkan kepengurusan baru yang inklusif ini pun akan semakin memperkuat relasi APINDO dengan konfederasi, demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan berlandaskan spirit kolaboratif," Shinta W. Kamdani menyampaikan dalam sambutannya.

KEGIATAN JULI 2023

- Audiensi DPN dengan Delegasi Jepang Forum 21. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Audiensi Delegasi Jepang FORUM 21, di Kementerian ESDM pada Senin, 17 Juli 2023. Turut hadir Duta Besar Jepang Untuk Indonesia beserta perwakilan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Kadin Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dalam sambutannya Shinta W. Kamdani mengungkapkan Indonesia dan Jepang telah memiliki hubungan baik yang kuat dalam waktu yang tidak singkat, dan dunia usaha perlu bersinergi dengan pemerintah, khususnya di sektor energi, mengupayakan pencapaian target net zero emission pada tahun 2060, dimana dukungan pemerintah diprioritaskan dalam: teknologi, pendanaan, dan talenta serta keterampilan.

- Sosialisasi PMK No. 66 Tahun 2023 & Update Reformasi Perpajakan, Selasa, 18 Juli 2023. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Suryadi Sasmita dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memberikan sambutan dalam Sosialisasi PMK No. 66 Tahun 2023 & Update Reformasi Perpajakan.

- Kunjungan Ketua Umum APINDO ke Sentra UMKM. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani mengunjungi salah satu sentra UMKM, Up Plus, di sela - sela acara Rakerkonprov DPP APINDO Sulawesi Selatan, Kamis (20/7/2023) di Makassar.

- Ketua Umum APINDO Meresmikan Kantor Baru DPP APINDO Sulsel. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani meresmikan kantor baru DPP APINDO Sulawesi Selatan, Kamis (20/7/2023) di Makassar, Bersama PJ Sekda Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang dan Pangdam XIV Hasanudin, Mayjen TNI H. Totok Imam Santoso.

- Konsolidasi & Gala Dinner dengan Para Pengurus DPP/DPK APINDO Jawa Timur Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani dan Ketua DPP APINDO Jawa Timur Eddy Widjanarko hadir Bersama dalam gala dinner para pengurus DPP/DPK APINDO Jawa Timur, Kamis (20/7/2023) di Surabaya.
- MoU APINDO & AIPGI Sebagai Upaya Penurunan Prevalensi Stunting Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) Prof. Hardinsyah menandatangani Nota Kesepahaman antara APINDO dan AIPGI untuk berkerjasama dalam upaya penurunan prevalensi Stunting Nasional pada Selasa (25/7/2023) di kantor APINDO. Nota Kesepahaman bertujuan membangun kolaborasi para pihak khususnya Pengusaha Indonesia dalam menyambut bonus demografi yang diisi oleh SDM yang unggul dan berdaya saing sehingga secara berkelanjutan memajukan Bangsa Indonesia.
- Audiensi Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL) ke APINDO. Spesialis Hubungan Internasional Senior dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL) mengunjungi APINDO pada 26 Juli 2023 dan bertemu dengan Pengurus APINDO Bidang Internasional, Bidang Ketenagakerjaan, serta Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Perwakilan USDOL mengapresiasi peran aktif APINDO dalam proyek Peningkatkan Hak Pekerja di Sektor Rural Indo–Pasifik dengan fokus pada Perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau dan Kalimantan Timur, dan sektor pengolahan perikanan di provinsi Sulawesi Utara dan Maluku. Proyek ini juga menjadi bagian dari visi Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) sejak Desember 2020.
- Audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Sanny Iskandar, Bob Azzam dan Darwoto menerima Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai beserta jajaran dalam audiensi KSPSI, Kamis (27/7/2023).
- Belajaraya 2023 Sesi Ngobrol Publik: Semua Punya Peran Nyata untuk Pendidikan Indonesia. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani menjadi narasumber dan menyampaikan "Semua Punya Peran Nyata untuk Pendidikan Indonesia", Sabtu (29/7/2023) di Jakarta. Hadir juga sebagai narasumber Nadiem Makarim, Ganjar Pranowo, Salman Subakat, Budi Setyarso, dan William Utomo. "Dari kacamata pelaku usaha, saya memandang permasalahan utama yang kita hadapi saat ini adalah ketidaksesuaian outcome pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Belum lagi dengan pergeseran kebutuhan skill kerja akibat transisi menuju revolusi industri 4.0, yang menuntut pengembangan skill set yang sangat berbeda dari yang tersedia saat ini," Shinta menyampaikan.

KEANGGOTAAN

Member Gathering DPP APINDO Jawa Timur. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani menyampaikan paparan Program DPN APINDO bersama DPP dan DPK APINDO Jawa Timur serta 150 UMKM binaan APINDO, Jumat (21/7/2023) di Surabaya. Kegiatan ini merupakan rangkaian Member Gathering DPP APINDO Jawa Timur yang mengangkat tema: Menjawab Tantangan Dunia Usaha & UMKM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Manusia. Selain itu, Ketua Bidang UMKM APINDO, Ronald Walla memberikan paparan UMKM Merdeka dalam sharing session Member Gathering DPP APINDO Jawa Timur, Jumat (21/7/2023) di Surabaya.

HIGHLIGHT AGUSTUS 2023

Kick Off Meeting Dewan Pimpinan Harian APINDO (DPH) Masa Bakti 2023 – 2028 merupakan salah satu milestone bulan Agustus 2023. Dilaksanakan di kantor APINDO dan dihadiri para pengurus bidang, Ketua Umum Shinta W. Kamdani menyampaikan pemaparan Visi dan Misi program APINDO, update framework Roadmap Perekonomian APINDO, APINDO Management System, penyerahan Surat Keputusan (SK) Tata Kelola dan Pembagian Tugas Pengurus APINDO.

KEGIATAN AGUSTUS 2023

- **Sosialisasi Regulasi Kepemilikan Hunian untuk Orang Asing Ketua Umum APINDO**. Shinta W. Kamdani memberikan sambutan dalam Sosialisasi Regulasi Kepemilikan Hunian untuk Orang Asing, yang diselenggarakan DPP Real Estate Indonesia (REI), Kamis (3/8/2023) di Jakarta. Shinta mengatakan: "APINDO mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menggulirkan regulasi dan agenda relaksasi yang mendukung kesetaraan hunian asing. Melalui UU Cipta Kerja dan aturan turunan dibawahnya, pemerintah sejatinya telah progresif menjalankan kebijakan pembangunan sektor property demi mewujudkan pertumbuhan positif."
- **Audiensi Universitas Pertamina Dengan Bidang Pendidikan & Keterampilan APINDO**. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Keterampilan APINDO Jimmy Gani bersama Direktur APINDO Research Institute Agung Pambudhi menerima perwakilan Pimpinan Universitas Pertamina, Kamis (10/8/2023) di kantor APINDO. Kunjungan ditujukan untuk menjajaki potensi Kerjasama dan Universitas Pertamina mengharapkan input pengembangan kurikulum bidang Manajemen.
- **Funbike & Funwalk Bersama Menteri Ketenagakerjaan RI**. Wakil Sekretaris Umum APINDO Lucia Karina bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beserta jajarannya mengikuti Funbike dan Funwalk, untuk memperingati HUT Kemenaker ke-76 dan HUT RI ke-78, Minggu (13/8/2023) di kantor Kemenaker.
- **Indonesia Retail Summit 2023 - ASEAN Edition: Epicentrum of Growth**. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi pembicara Indonesia Retail Summit 2023 - ASEAN Edition: Epicentrum of Growth, Selasa (15/8/2023) di Jakarta. Shinta mengatakan, terdapat sejumlah tantangan dunia usaha dalam mendukung daya saing sektor ritel, diantaranya faktor ketenagakerjaan dan kemudahan berusaha, skill mismatch yang berdampak pada rendahnya efisiensi perdagangan dan kinerja ritel, sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik dan digital.
- **Audiensi PT Biofarma & Sharing Experience DPP APINDO Kalimantan Timur**. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menerima perwakilan PT Bio Farma dan sharing pengalaman DPP Kalimantan Timur oleh Ketua DPP APINDO Kalimantan Timur Slamet Brotosiswoyo dalam kerjasama vaksinasi Hepatitis B dengan anggota, Selasa (15/8/2023) di kantor APINDO. Turut hadir Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Subchan Gatot dan M. Aditya Warman serta Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut.
- **Audiensi APINDO kepada Menteri Ketenagakerjaan**. Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima Pengurus APINDO, Senin (21/8/2023) di kantor Kemnaker. Pengurus APINDO yang hadir adalah Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy dan Sanny Iskandar, Sekretaris Umum APINDO Aloysius Budi S, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azzam, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Darwoto beserta Pengurus Bidang Ketenagakerjaan APINDO. Audiensi membahas isu ketenagakerjaan dan Ida menyampaikan:
  - APINDO diharap bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
  - Perusahaan anggota APINDO selalu kerja sama dengan mediator hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
  - APINDO untuk mendorong perusahaan-perusahaan anggotanya dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.
  - APINDO terlibat aktif dalam forum forum dialog sosial, seperti Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional (Deppenas).
  - Pengusaha anggota APINDO yang tengah tumbuh positif untuk turut memperhatikan para pekerja berstatus pemutusan hubungan kerja (PHK).

- **Diskusi Bersama Badan Keahlian DPR RI Terkait UU Perikanan**. Ketua Bidang Perikananan dan Peternakan APINDO Hendra Sugandhi beserta jajaran pengurusnya dan pengurus Bidang Hubungan Antar Lembaga APINDO menghadiri undangan Badan Keahlian DPR RI, Selasa (22/8/2023) di Jakarta. APINDO hadir memberikan masukan serta diskusi pengumpulan data dan informasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan Undanga Undanga Nomor 31/2004 Tentang Perikanan dan UU no. 63/2023. UU ini masuk dalam Prolegnas no.130. PERTEMUAN PENGURUS DEWAN PERTIMBANGAN APINDO Pertemuan Pengurus Dewan Pertimbangan APINDO pada Agustus 2023. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Sofjan Wanandi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Hariyadi B. Sukamdani, Sekretaris Depertim APINDO Suryadi Sasmita dan anggota Depertim APINDO.
- **Talkshow Global Human Capital Summit 2023**. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani memberikan opening remarks dan narasumber Talkshow dalam Global Human Capital Summit 2023 yang diselenggarakan Global Indonesia Professionals' Association (GIPA), Selasa (22/8/2023) di Jakarta.
- **Audiensi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)**. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Sekretaris Umum APINDO Aloysius Budi S., Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Darwoto, dan Ketua Komite Regulasi & Hubungan Kelembagaan APINDO Myra M.Hanartani menerima menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan jajaran, Selasa (22/8/2023) di kantor APINDO.
- **Courtesy Meeting Innovation Business Association (INNOBIZ)**. APINDO menerima Courtesy Meeting Innovation Business Association (INNOBIZ), Rabu (23/8/2023) di kantor APINDO. Asosiasi INNOBIZ adalah organisasi yang berfokus pada inovasi teknologi, pengelolaan sertifikasi UKM inovatif di bawah Kementerian UKM dan Startup Korea (MSS) di Republik Korea. Berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop UMKM RI), INNOBIZ melaksanakan Proyek Official Development Assistance (ODA) Mendukung Transformasi Factory Sharing Indonesia dengan Mengadopsi Konsep Smart Factory dan Pelatihan Industri Tenaga Kerja Khusus di Indonesia pada tahun 2023 – 2026. Proyek ini bertujuan untuk mendorong kebangkitan ekonomi baru Indonesia melalui dukungan digitalisasi dan otomasi manufaktur Indonesia dengan Smart Factory untuk perusahaan-perusahaan Indonesia. Delegasi INNOBIZ bertemu dengan Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Catharina Widjaja, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Didit Ratam, Ketua Bidang UMKM dan Koperasi APINDO Ronald Walla, dan Direktur Operasional International Strategic Partnership Center (ISPC) APINDO Diana M. Savitri.
- **Courtesy Meeting dengan Normes (International Labour Standards Department)**. APINDO menerima Kunjungan Tim De Meyer, Special Advisor NORMES (International Labor Standards Department) pada Rabu (23/8/2023) di kantor APINDO. De Meyer bertugas mendukung komite ahli dalam menerima laporan ILS untuk negara-negara anggota. Pengurus APINDO dari Hubungan Internasional dan Ketenagakerjaan serta Direktur Eksekutif APINDO hadir dan berdiskusi dengan De Meyer dan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Michiko Miyamoto, dengan tujuan melanjutkan penerapan standar ketenagakerjaan internasional di Indonesia.
- **International Organization of Employers (IOE) - Deloitte - CII Business Impact Summit**. Ketua APINDO Shinta W. Kamdani memberi keynote address pada International Organization of Employers (IOE)-Deloitte-CII Business Impact Summit pada Kamis (24/8/2023) di New Delhi, India, yang bertema Transforming B20 Recommendation into Policy Action. Shinta mengungkapkan munculnya kebutuhan mengenai reskilling dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan perubahan dalam dunia kerja di masa depan dan memaparkan cara meningkatkan keunggulan kompetitif bisnis untuk menarik dan mempertahankan pekerja terampil.
- **Audiensi Forum QHSE BUMN ke APINDO**. APINDO menerima Audiensi Pengurus Forum QHSE BUMN Konstruksi Indonesia, Kamis (24/8/2023) di kantor APINDO, untuk menyelaraskan program Forum QHSE BUMN Konstruksi Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem manajemen mutu dan keselamatan kerja dengan good quality, keselamatan, keamanan kesehatan dan keberlanjutan sebagai salah satu daya saing nasional.
- **Penghargaan Perempuan Berpengaruh Influential in Business Community**. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mendapatkan Penghargaan dan Apresiasi Kategori Influential in Business Community oleh Dream.co.id, Senin (28/8/2023) di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Ibu Negara Presiden RI ke-4 Sinta Nuriyah Wahid dan tokoh lainnya. Penerima penghargaan lainnya, diantaranya Presiden Direktur Unilever Indonesia, Ira Noviarti (Influential in Workplace), Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Influential in Female Leadership), Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi (Influential in Female Leadership), Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Alexandra Iskandar (Influential in Corporate Banking), Public Figure Prilly Latuconsina (Influencing Young Generation), dan Seniman serta aktivis Inayah Wahid (Influential in Positive Movement).

- **Launching UMKM La Moringa**. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani di La Moringa Indonesia, Senin (28/8/2023) di Kemang, Jakarta. La Moringa Indonesia merupakan restoran berbasis healthy food dengan menyajikan makanan sehat dan salah satu bahan dasar makanannya terbuat dari daun kelor. Shinta mengapresiasi adanya La Moringa yang dinilai sejalan dengan program unggulan APINDO dalam memajukan produk lokal dan UMKM Indonesia serta upaya penurunan prevelensi stunting di Indonesia. Selain itu, produk lokal dengan bahan daun kelor ini juga salah satu bentuk ekonomi kreatif yang diharapkan dapat bersaing di pasar global. Hadir dalam acara tersebut diantaranya perwakilan Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Restog Krisna Kusuma, Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy, Ketua Bidang UMKM APINDO Ronald Walla, Ketua DPP APINDO NTT Bobby Pitoby, Pengurus Bidang Perdagangan Jahja B Soenarjo.
- **Pelatihan Digitalisasi & Pembayaran Upah Bertanggung Jawab Program Digital Wages for Decent Work**. APINDO bersama International Labour Organization (ILO) menggelar Pelatihan Digitalisasi dan Pembayaran Upah yang Bertanggung Jawab, Senin -Selasa (28-29/8/2023) di kantor APINDO. Pelatihan ini merupakan bagian dari Program "Global Centre on Digital Wages for Decent Work" di Indonesia untuk meningkatkan literasi digital dan praktik hubungan kerja yang baik, juga dan memberi gambaran akan manfaat pembayaran digital oleh usaha kecil, dengan perhatian khusus pada pembayaran upah digital.
- **Serap Aspirasi Perkembangan Rencana Implementasi Koordinasi Manfaat (COB) Program JKN dengan Asuransi Komersial Tambahan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO**. Bob Azzam pada Kamis (31/8/2023) di kantor APINDO mengungkapkan acara Serap Aspirasi bekerjasama dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan guna mendapatkan masukan dari para stakeholder terkait dengan manfaat, peluang, tantangan dan kendala implementasi program Koordinasi Manfaat (CoB) Program JKN dengan asuransi komersil tambahan.

KEANGGOTAAN

- **Company Visit ke Perusahaan Anggota, PT Acer Indonesia**. Kunjungan rutin kepada anggota, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan juga mempererat hubungan dengan anggota. APINDO menyampaikan upaya yang telah dan sedang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misinya, sementara Acer menyampaikan tantangan dan peluang yang sedang dihadapi serta harapannya terhadap APINDO dalam mendukung keberlangsungan perusahaan. Hadir perwakilan Perwakilan Acer: Herbet Ang, President Director; Lenny Ng, CEO; Donny Ramdhon, Legal Manager. Perwakilan APINDO Rudolf Saut, Direktur Eksekutif; Iwan Zulkarnaen, Office Manager APINDO; Anie S, Kepala Departemen Informasi & Layanan Anggota; Anisa Alfadillah, Staf Departemen Informasi & Layanan Anggota.
- **Members Gathering & Seminar Nasional DPP APINDO Kalimantan Selatan**. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan Keynote Speech dalam Member Gathering dan Seminar Nasional DPP APINDO Kalimantan Selatan bertema "Prospek Ekonomi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Menjelang Pemilu dan Tahun Politik 2024", Kamis (31/8/2023) di Banjarmasin. Ketua DPP APINDO Kalimantan Selatan Supriadi juga memberikan sambutan dalam acara tersebut. Shinta memaparkan sejumlah update perekonomian Indonesia, Tantangan Reformasi Ekonomi Struktural yang dihadapi Indonesia dankontribusi APINDO dalam menyikapi pesta demokrasi kepemimpinan 2024 dengan menyusun Roadmap Perekonomian APINDO 2024 - 2029. Shinta juga membuka dan mengunjungi APINDO UMKM Festival 2023 yang diikuti sekitar 200 pelaku usaha UMKM Kalimantan Selatan.

APINDO TENTANG CURRENT AFFAIRS

- Ketua Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, membahas Rupiah dan sentiment negative global dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 21/08/2023), https://www.youtube.com/watch?v=NG40-EZlHzc
- Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam menyebutkan persoalan upah seharusnya tidak menjadi isu yang dipolitisisasi, sehingga perhitungan kenaikan Upah Minimun ini seharusnya tidak diperdebatkan jika sudah mengikuti aturan yang berlaku. Profit, CNBC Indonesia (Selasa, 22/08/2023) https://www.cnbcindonesia.com/ne ws/20230822110832-8 465007/buruh- tuntut-upah-buruh naik-15-pengusaha-bisa-penuhi\

HIGHLIGHT SEPTEMBER 2023

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan pandangan APINDO tentang KTT ASEAN 2023 dalam wawancara Bersama CNBC Indonesia "Special Report – KTT ASEAN Indonesia 2023", Rabu (6/9/2023) di Jakarta. Pandangan yang disampaikan adalah:

- Dukungan sektor swasta kepada KTT ASEAN Indonesia 2023.
- Demand pasar domestik dari masing-masing negara ASEAN menopang perekonomian kawasan.
- Chairmanship ASEAN yang diemban Indonesia tahun 2023 diharapkan menjadi peluang mengawal hasil kerja G20-B20 ke tataran regional melalui kerjasama multilateral untuk mempercepat ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia untuk menjadi jangkar pemulihan dan stabilitas perekonomian dunia.
- Perubahan tatanan pertumbuhan ekonomi global diharapkan bisa dimulai dari ASEAN sebagai episentrum transformasi ekonomi lewat legacy dan deliverables inovatif.
- Lewat semangat kerjasama ASEAN dan politik bebas aktif Indonesia, perlu memanfaatkan momentum kepemimpinan Indonesia tahun ini, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah pasca G20 secara berkesinambungan.

Pertemuan perdana Dewan Pakar APINDO diadakan pada Selasa (19/9/2023) malam di Jakarta, dihadiri oleh 19 anggota Dewan Pakar termasuk 4 mantan menteri, yaitu Mari Elka Pangestu, Sofyan Djalil, Agus Martowardojo, dan Hanif Dhakiri. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani hadir didampingi Wakil Ketua Umum Sanny Iskandar dan Eddy Hussy, Direktur APINDO Research Institute yang juga Tim Penyusun Roadmap Perekonomian Agung Pambudhi dan Staf ARI, Jefri Andika Pakpahan. Para anggota Dewan Pakar memberikan input substantif terkait draft awal Roadmap Perekonomian APINDO 2024 -2029 , dimana isu mencakup isu sektoral dan lintas sectoral, termasuk mapping keterampiilan di masa depan untuk masing - masing industri, isu green jobs serta environmental, social, and governance (ESG), kebijakan makro ekonomi, dan sebagainya.

KEGIATAN SEPTEMBER 2023

- **ASEAN Woman CEO Forum**. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan digitalisasi merupakan kunci untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan lantaran selama ini perempuan, baik di Indonesia maupun di ASEAN, masih mengalami kendala untuk mendapatkan akses pembiayaan yang setara. Digitalisasi bersifat penting sekarang untuk mempermudah pemberdayaan perempuan. Digitalisasi ini kunci," kata Shinta dalam diskusi panel di ASEAN Woman CEO Forum di Jakarta.

- **Audiensi Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN)**. APINDO menerima Audiensi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa (12/9/2023) di kantor APINDO, dengan diwakili oleh Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Sekretaris Umum Anggana Bunawan, Wakil Ketua Bidang Digital APINDO Tirza Munusamy, Ketua Komite Pendidikan Tinggi & Riset APINDO Gatot Soemartono dan Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut. Audiensi membahas permohonan masukan analisa pasokan dan kebutuhan talenta digital di Indonesia, dimana perubahan tren global saat ini menuntut sumberdaya manusia yang unggul dan tangkas dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional yang tumbuh secara eksponensial serta komitmen APINDO dan BRIN dalam membangun sinergi produktif untuk penguatan daya saing talenta digital serta kolaborasi riset dan pengembangan inovasi.

- **FGD Industri Rancangan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Perhitungan Tarif Layanan Berbasis Permintaan oleh Penyelenggara Pos**. Momentum pemulihan ekonomi sangat penting untuk dikelola dengan maksimal, dan disaat yang sama jutaan pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya bergantung pada layanan berbasis permintaan (On-Demand) yang ada di dalam ekosistem digital, Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tentang Pedoman Perhitungan Tarif Layanan Berbasis Permintaan oleh Penyelenggara Pos dapat berpotensi berdampak signifikan terhadap seluruh pihak yang terlibat. APINDO menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Industri "Rancangan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Perhitungan Tarif Layanan Berbasis Permintaan oleh Penyelenggara Pos" Selasa (12/9/2023) di kantor APINDO, diwakili oleh Wakil Sekretaris Umum Anggana Bunawan.

- **Audiensi Presiden Direktur Samsung**. Presiden Direktur Samsung, Selasa (12/9/2023) berkunjung ke kantor APINDO dan berdiskusi dengan Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy, Ketua Komite Bidang Advokasi APINDO Agus Dwiyanto, Direktur Eksekutif Rudolf Saut. Diskusi membahas sejumlah, isu, diantaranya terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), perbandingan kemudahan usaha yang dialami Samsung di sejumlah negara di ASEAN, serta isu ketenagakerjaan.

- **The Cooler Earth Sustainability in Action: Opportunities For A Better Tomorrow in Indonesia**. Ketua Bidang ESDM APINDO, Eka Satria menyampaikan paparan terkait komitmen dunia usaha dalam mendukung aksi keberlanjutan (sustainability) dalam acara The Cooler Earth Sustainablity in Action: Opportunities for a Better Tomorrow in Indonesia yang digelar oleh CIMB Niaga, Rabu (13/9/2023) di Jakarta. Ia menyampaikan bahwa dunia usaha mendukung komitmen ekonomi hijau pemerintah dan terdapat tantangan dan perlu kesiapan dunia usaha yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam formulasi sistem dan kebijakan komprehensif.

- **Courtesy Meeting dengan ILO**. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menerima Courtesy Meeting dengan ILO, Selasa (19/9/2023) di kantor APINDO. Turut hadir Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy dan Sanny Iskandar, Sekretaris Umum APINDO Aloysius Budi Santoso, Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Catharina Widjaja, Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut dan Operational Director of International Strategic Partnership Center (ISPC) APINDO Diana M. Savitri. Dari ILO hadir Deputy Director, Bureau for Employers' Activities ILO Adam Greene, Principal Officer for Asia and Arab States, Bureau for Employers' Activities ILO Sanchir Tugschmeg and Senior Employer Specialist ILO Bangkok, Dong Eung Lee.

- **UOB Finlab**. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menandatangani UOB FinLab Indonesia, Selasa (19/9/2023) di Jakarta, yang merupakan program unggulan akselerator inovasi bisnis untuk mengembangkan dan mendigitalisasi bisnis di Indonesia. Peluncuran di Indonesia merupakan tonggak penting bagi UOB FinLab karena hal ini menandai regionalisasi UOB di lima pasar utama UOB di ASEAN dan upaya menumbuhkan jaringan ekosistem regional yang kuat untuk pengembangan kapasitas lintas negara guna dalam rangka mendigitalkan keterampilan bisnis.

- **Danish Business Delegation Visit to Indonesia**. Ketua Hubungan Internasional APINDO Catharina Widjaja mewakili Ketua APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan sambutannya pada Kunjungan Delegasi Bisnis Denmark ke Indonesia, khususnya pada isu pertanian dan peternakan, Senin (25/9/2023) di Jakarta. Turut hadir Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Didit Ratam. Catharina menyebutkan rekam jejak neraca perdagangan Indonesia dan Denmark dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dalam tren positif.

- **Audiensi Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan RI APINDO**. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD, Selasa (26/9/2023) di kantor Kemenpolhukam menerima Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dan sejumlah Pengurus APINDO yaitu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Sudhamek, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar dan Eddy Hussy, Sekretaris Umum APINDO Aloysius Budi Santoso, Ketua Bidang Perbankan & Jasa Keuangan Tigor M.Siahaan, Ketua Bidang UMKM APINDO Ronald Walla, Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO Bobby Gafur Umar, dan Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut. APINDO melaporkan hasil MUNAS dan Pengukuhan beserta 4 Program Aksi Unggulan kepempimpinan APINDO 2023 -2028, dan berdiskusi tentang konsistensi program dan kepastian hukum serta kondusifitas ekonomi menuju tahun politik 2024, kebelanjutan program investasi bagi investor di daerah, keamanan dan kenyamanan berusaha bagi investor.

KEANGGOTAAN

- **Workshop Rencana Strategis APINDO untuk Peningkatan Keanggotaan & Layanan serta Penguatan Jaringan Kelembagaan antar DPN, DPP, DPK & Asosiasi Sektoral**. Hari Kedua Workshop Rencana Strategis APINDO Untuk Peningkatan Keanggotaan & Layanan Serta Penguatan Jaringan Kelembagaan Antar DPN, DPP, DPK dan Asosiasi Sektoral, Selasa (19/9/2023) di Jakarta. Hadir memberikan pengantar dalam acara tersebut: Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy, Sekretaris Umum APINDO Aloysius Budi Santoso, Country Director of ILO for Indonesia & Timor Leste Michiko Miyamoto, Principal Officer for Asia and Arab States Bureau for Employers' Activities ILO Sanchir Tugschmeg. Hadir pula Ketua Bidang Organisasi Anthony Hilman dan Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut.

- **Kunjungan ke Perusahaan Anggota, PT Nikomas Gemilang, 14 September 2023**. Hadir menemui APINDO: Eddie Tseng, Head of Public Affairs Department; Tim Public Affairs Department; dan Tim HR Department. Perwakilan APINDO adalah Rudolf Saut, Direktur Eksekutif; Iwan Zulkarnaen, Office Manager; Anie S, Kepala Departemen Informasi & Layanan Anggota dan Anisa Alfadillah, Staf Departemen Informasi & Layanan Anggota

- **Members Gathering**. KUPAS TUNTAS PMK 66/2023 - Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dg Jasa yg diterima atau diperoleh dalam bentuk Natura dan/ Kenikmatan diselenggarakan bagi para anggota APINDO, Rabu (27/9/2023) di Kantor APINDO. Gathering yang dimoderatori oleh Ketua Komite Perpajakan APINDO Siddhi Widyaprathama tersebut dibuka oleh Ketua Bidang Perbankan & Jasa Keuangan Tigor M.Siahaan.

MEDIA TOP ISSUE

- Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APINDO, Sarman Simanjorang menilai libur panjang bisa meningkatkan produktivitas industri sektor pariwisata hingga transportasi, namun bagi industri padat karya justru libur yang lama bisa menurunkan produktivitas dalam https://www.youtube.com/watch?v=8KZ6nbl3_PA

- Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dalam wawancara bertema "Digitalisasi Kunci Pemberdayaan Ekonomi Perempuan ASEAN" di Market Review IDX Channel mengungkapkan bahwa UMKM, termasuk di dalamnya UMKM perempuan, telah berperan besar dalam menggerakkan perekonomian di roda negara-negara ASEAN. Shinta berpandangan bahwa akses digital perlu ditingkatkan, terkhusus bagi perempuan, sebagai wirausahawan katalisator dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Shinta juga mempromosikan program UMKM Merdeka yang diinisiasi APINDO, yang hadir untuk mengembangkan sistem kolaboratif yang diharapkan dapat mengakselerasi UMKM untuk naik kelas.

- Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, melihat prospek The Fed untuk kembali mengerek bunga acuan guna mencapai target inflasi di 2% dan dampak kebijakan bank sentral dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 18/09/2023) di https://www.youtube.com/watch?v=g5tvChzLTsw

SETC
Sampoerna Entrepreneurship Training Center

SAMPOERNA untuk Indonesia

Sampoerna Entrepreneurship Training Center

Di bawah payung program keberlanjutan **"Sampoerna Untuk Indonesia"**, Sampoerna berkomitmen mengembangkan kapabilitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui fasilitas pelatihan dan program **Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC)** yang yang dilaksanakan sejak tahun 2007.

- Telah memberikan pelatihan kepada **>72.000** peserta program pelatihan
- Sebanyak **>153.000** pengunjung dari seluruh Indonesia
- Telah membina ribuan UMKM dari **>106 kota/kabupaten** yang tersebar di seluruh Indonesia
- **>100 riset terapan** yang teruji di bidang pertanian terpadu
- SETC memiliki fasilitas pendukung seluas **27 hektare** di Pasuruan, Jawa Timur

SETC bertujuan untuk mengembangkan pelaku UMKM, mendorong pemanfaatan potensi lokal, dan memberdayakan komunitas di berbagai daerah agar lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing. Dalam menjalankan programnya, SETC berkolaborasi dan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti akademisi, bisnis dan masyarakat

Para pelaku UMKM binaan SETC mendapatkan pelatihan, pembinaan, konsultasi, pembinaan untuk ekspor hingga *business matching* dan *networking* untuk berbagai bidang usaha seperti kuliner, pertanian, peternakan, kerajinan, dan lainnya. Kegiatan SETC juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya di masing-masing daerah.

JENIS PELATIHAN

- Budidaya Pertanian
- Pengolahan Produk Pertanian
- *Soft Skill* (Pelatihan non-teknis keterampilan komunikasi penjualan dan marketing, dll.)
- Pertamanan
- Perikanan
- Peternakan
- Membatik & Bordir
- Pengolahan Hasil Limbah

Melalui Paktukang, kami ingin membantu masyarakat agar dapat lebih mudah terhubung dengan tukang yang handal. Di saat yang sama, para tukang juga memiliki akses lebih mudah untuk mendapat pekerjaan yang berkelanjutan.

Berawal dari menurunnya lapangan kerja saat pandemi tahun 2020 lalu, Paktukang berdiri sebagai wadah yang menyediakan berbagai layanan pertukangan. Selain mudah diakses, Paktukang juga memberikan konsultasi dan laporan pekerjaan tukang dengan garansi bagi konsumen.

Layanan Paktukang diawali di beberapa kota di Jawa Timur. Aktivitas yang kami lakukan mengantarkan ribuan masyarakat Jawa Timur, khususnya di Malang dan Surabaya, mendapatkan layanan tukang yang terpercaya, serta menaikkan kelas ekonomi para tukang yang tergabung sebagai mitra Paktukang. Di samping itu, keberadaan Paktukang juga memberi kesempatan bagi kami untuk mengikuti program-program pemberdayaan kewirausahaan yang didukung oleh SETC.

SETC membantu kami dalam mengembangkan jaringan (*network*) dan pasar, mendapatkan fasilitas kewirausahaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, dan inkubasi bersama UMKM-UMKM Indonesia lainnya.

M. Rozaqul Anam
UMKM Paktukang
Malang, Jawa Timur

Bisa bertemu dan belajar dengan para *coach* hebat serta bisa berbagi pengalaman bisnis dengan teman-teman dari daerah membantu saya mengembangkan produk donat dari labu kuning.

Nur Zahidah - UMKM Latela
Aceh Besar, Aceh

SETC memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pameran *Food Wellness Japan*. Dari situ, kesempatan pemasaran hingga luar negeri terbuka dan kini sudah berhasil mengirim produk VCO ke Jepang.

I Ketut Sumayana - UMKM Bali Pure
Buleleng, Bali

HIGHLIGHT OKTOBER 2023

1. Kick Off Rapat Pleno APINDO Perdana Kepengurusan 2023 - 2028

APINDO menggelar Rapat Pleno Perdana Kepengurusan 2023 – 2028 pada Rabu (11/10/2023) di Menara ASTRA, dimana setiap pengurus Bidang memaparkan Program Kerja untuk diimplementasi dan disinergikan dengan Program Unggulan APINDO selama 5 tahun ke depan. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan poin khusus yaitu:

- Program Kerja 1 tahun ke depan yang ditetapkan dalam rapat Pleno Pengurus menjadi pondasi agenda kerja selama 5 tahun
- Kolaborasi dengan para pengurus daerah dari DPP adalah krusial sebagai wujud konsolidasi APINDO
- Komunikasi internal dan engagement dengan pengurus daerah perlu dijaga dan ditingkatkan untuk membuka ruang luas bagi DPP dalam berpartisipasi mendorong program kerja DPN.

2. Konferensi Pers Apindo: Update Isu Strategis APINDO & Pandangan Dunia Usaha di Masa Transisi Tahun Politik 2024 APINDO

Ditengah isu dan kebijakan dalam transisi kepemimpinan baru di 2024 dan penyusunan Roadmap Perekonomian APINDO 2024 – 2029, APINDO menyampaikan:

- sejumlah program dan kebijakan di era kepemimpinan Presiden Joko perlu dilanjutkan di kepemimpinan mendatang.
- APINDO sebagai asosiasi yang independen bersikap netral dalam percaturan politik menjelang 2024 dan semangat APINDO adalah dengan mengawal kebijakan strategis nasional melalui advokasi sebagai salah satu prioritas program kerja APINDO di periode baru ini.
- sebagai membership-based organization, APINDO mengajak perusahaan yang berlokasi di Ibu Kota Negara dan di daerah untuk bergabung menjadi anggota APINDO dalam rangka memperkuat representasi dunia usaha.

KEGIATAN OKTOBER 2023

1. Audiensi Misi Investasi Singapore Healthcare Business Mission to Indonesia

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani didampingi Pengurus Bidang Hubungan Internasional dan Bidang Kesehatan APINDO dan perwakilan dari International Strategic Partnership Centre (ISPC) APINDO menerima audiensi IIPC Singapura dan Enterprise Singapore sebagai Misi Investasi Singapore Healthcare Business Mission to Indonesia, Senin (2/10/2023) di Jakarta. Kunjungan ditujukan untuk melihat langsung lanskap pelayanan kesehatan di Indonesia, implementasi regulasi terbaru di bidang kesehatan serta mendapatkan gambaran peluang dan kerjasama investasi. dari perwakilan perusahaan kesehatan Singapura, termasuk rumah sakit, klinik, dan produsen alat-alat medis, termasuk juga pemerintah, pakar industri dan juga profesional kesehatan Singapura.

2. Perayaan Hari Bea dan Cukai Ke-77

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Suryadi Sasmita hadir dalam Perayaan Hari Bea dan Cukai ke 77, Rabu (4/10/2023) di Jakarta. HUT ke-77 Bea dan Cukai ini mengusung tema "Pelayanan Semakin Mudah" yang mencerminkan arah perubahan positif dalam penyediaan layanan, dengan fokus pada efisiensi, aksesibilitas, dan pelayanan lebih baik.

3. ISPC APINDO Gelar Business Luncheon "Driving Business Growth in Hong Kong & The Greater Bay Area"

International Strategic Partnership Center (ISPC) APINDO berkolaborasi dengan Hong Kong Economic and Trade Offiice, InvestHK dan Office for Attracting Strategic Enterprises (OASES) menyelenggarakan Business Luncheon Event berjudul "Driving Business Growth in Hong Kong and The Greater Bay Area," pada Kamis

(5/10/2023) di kantorr APINDO. Business luncheon dihadiri oleh para Pengurus APINDO, diantaranya dari Bidang Hubungan Internasional, Perdagangan, dan anggota APINDO. Dalam sambutannya, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani memaparkan, kegiatan ini akan mengelaborasi dukungan pemerintah dan investasi layanan bagi kantor keluarga Hong Kong dan pusat finansial internasional termasuk mendiskusikan peluang bisnis bagi perkembangan the Greater Bay Area (GBA). Director-General of Hong Kong Economic and Trade Office in Jakarta Sheung-Yuen Lee juga menyampaikan sambutannya dan mendorong para pelaku usaha dari Indonesia untuk datang ke Hong Kong karena Hong Kong memiliki sistem manajemen kekayaan lalu lintas terbesar kedua.

4. APINDO Pertemuan Bersama Asosiasi Inventor Indonesia

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy dan Sanny Iskandar menerima Asosiasi Inventor Indonesia, Selasa (10/10/2023) APINDO.

5. Audiensi APINDO Bersama Menteri Perindustrian RI

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani didampingi jajaran Pengurus APINDO melakukan audiensi bersama Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (10/10/2023) di Jakarta. Pengurus APINDO yang hadir, diantaranya Wakil Ketua Umum Sanny Iskandar, Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO Bobby Gafur Umar, Wakil Sekretaris Umum APINDO Rahmad Widjaja Sakti, Wakil Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO Rachmat Harsono, dan Anggota Komite Industri Logam & Transportasi APINDO Selo Winardi. APINDO menyampaikan dukungan dalam program pertumbuhan industri dan menyoroti sejumlah isu, diantaranya:

- rendahnya belanja dalam negeri terhadap barang produksi dalam negeri
- kebijakan hilirisasi industri yang bergerak lambat
- transformasi otomatisasi dan digitalisasi revolusi industri 4.0 yang belum merata dari sisi sektoral dan industri
- tindak lanjut kebijakan Kemenperin atas direvisinya PP 28/2021 menjadi PP 46/2023.

6. Knowledge Forum XII 2023 “Eco Creation: Empower Sustainability Through Partnership & Digitalization

Ketua Umum APINDO Shinta W.Kamdani menjadi narasumber dalam Indonesia Knowledge Forum XII 2023 "Eco-Creation: Empower Sustainability through Partnerships and Digitalization", Rabu (11/10/2023) di Jakarta, Bersama Wakil Presiden Direktur PT BCA, Tbk Armand Hartono dan aktris Christine Hakim. Shinta memaparkan pembangunan manusia dengan penguasaan iptek dan dunia usaha mendorong pemerintah memiliki kurikulum pendidikan yang menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan berinovasi.

7. Audiensi Duta Besar Indonesia Untuk Perancis Ke APINDO

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani beserta jajaran Pengurus Hubungan Internasional APINDO dan International Strategic Partnership Center (ISPC) APINDO menerima courtesy meeting Duta Besar Indonesia untuk Perancis, Mohamad Oemar, Rabu (18/10/2023) di kantor APINDO. Turut hadir Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Catharina Widjaja, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Didit Ratam dan pengurus Bidang Hubungan Internasional lainnya, serta Operations Director ISPC APINDO Diana M. Savitri. Diskusi membahas berbagai topik, diantaranya potensi dan upaya kerjasama yang dapat ditingkatkan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.

8. Audiensi APINDO Bersama Menteri ESDM RI

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani didampingi jajaran Pengurus APINDO melakukan audiensi bersama Menteri ESDM RI Arifin Tasrif, Rabu (18/10/2023) di Jakarta yang didampingi oleh Menteri ESDM, Sekjen ESDM Dadan Kusdiana, Staf Khusus ESDM Triharyo Indrawan Soesilo dan Staf Khusus Irwandy Arief. Pengurus APINDO hadir, diantaranya Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, Sekretaris Umum APINDO Aloysius Budi Santoso, Ketua Bidang ESDM APINDO Eka Satria, Ketua Komite Listrik dan EBT APINDO Dharma Djojonegoro, Ketua Komite Minerba APINDO Hendra Sinadia, beserta pengurus lain Widiyanto Saputro dan Rosar Mamara. APINDO menyampaikan dukungan dalam program ESDM terutama energi transisi, hilirisasi Mineral, penyediaan energi yang just dan affordable, upskilling dan reskiling tenaga kerja, kesiapan UMKM untuk bisnis hijau, advokasi RUU EBT dan Migas dan kritikal mineral.

9. Audiensi APINDO Bersama Menteri SosiaL RI

Pengurus DPN APINDO mengadakan Audiensi bersama Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, Kamis (19/10/2023) di kantor Kementerian Sosial RI. Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani didampingi oleh jajaran Pengurus APINDO diantaranya Sekretaris Dewan Pertimbangan APINDO Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, Wakil Sekretaris Umum APINDO Anggana Bunawan, Ketua Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan APINDO Tigor M. Siahaan, Ketua Bidang UMKM APINDO Ronald Walla, dan Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut. APINDO menyampaikan program-program utama yang menjadi prioritas termasuk Gerakan 1.000 Pengusaha Gotong Royong untuk pencegahan Stunting, yaitu Gerakan Anak Sehat – Kolaborasi Inklusif Pengusaha Indonesia Atasi Stunting (GAS – KIPAS STUNTING APINDO). Menteri Sosial mendukung antusiasme pengusaha yang dengan semangat menciptakan kemandirian bagi kelompok penerima manfaat, dan mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrim di Indonesia.

10. Bahar Workshop Cyber Security

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menjadi narasumber dalam Bahar Workshop Cyber Security, Kamis (12/10/2023) di Jakarta dan menyampaikan mengenai pentingnya perlindungan data personal dan keamanan siber bagi sektor swasta.

11. Pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI)

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menghadiri pembukaan TEI 2023 bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Rabu (18/10/2023) di Tangerang.

12. Pertemuan dengan International Business Chambers untuk Masukan Roadmap Ekonomi APINDO

Pertemuan dengan International Bussiness Chambers untuk mendapatkan masukan Roadmap Perekonomian APINDO, Kamis (19/10/2023) di kantor APINDO.

13. US – Indonesia Investment Summit: Mapping The Legacy, Navigating The Future

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan sejumlah isu termasuk iklim investasi Indonesia yang menunjukkan fundamental kuat bagi pertumbuhan. APINDO juga menunjukkan kontribusi bagi sejumlah inisiatif pemerintah diantaranya IKN, Hilirisasi dan Transisi Energi.

14. FGD Penjaringan Isu Efisiensi Energi & EBT dalam Penyusunan RPJMN 2025 – 2029

Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar menyampaikan perlukan sinergi antara pemerintah dan swasta yang menjadi kunci kesuksesan dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dalam dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) terkait penjaringan isu Efisiensi Energi dan EBT untuk Penyusunan RPJMN Tahun 2025 – 2029, Selasa (24/10/2023) di Jakarta. Sanny juga mengungkapkan APINDO menyambut baik adanya inisiatif/ upaya kolaboratif yang dilakukan melalui konsultasi aktif dengan perwakilan dari sektor swasta termasuk organisasi bisnis, asosiasi industri, untuk mendapatkan masukan/saran terkait prioritas pembangunan nasional, dan kemudahan regulasi dan pemberian insentif khususnya bagi pelaku usaha untuk mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor-sektor industri nasional baik yang berskala besar maupun UMKM. FGD merupakan program dari Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/ Bappenas, APINDO, Kadin bekerjasama dengan GIZ.

KEANGGOTAAN

1. Courtesy Meeting dengan Perusahaan Anggota APINDO (L'oreal Group)

APINDO mengadakan Courtesy Meeting dengan L'OREAL Group (perusahaan Anggota APINDO) pada Kamis (5/10/2023) di Jakarta. Hadir Perwakilan L'Oreal: Cynthia Sanfillipo, Global Public Affairs Director L'Oreal Group; Hanh Nguyen, Head of Corporate Affairs & Engagement L'Oreal South Asia Pacific, Middle

East dan North Africa; dan Junaid Murtaza, President Director L'Oreal Indonesia. Perwakilan APINDO, hadir Shinta W. Kamdani, Ketua Umum APINDO; Rahmad Widjaja Sakti, Wakil Sekretaris Umum APINDO Rudolf Saut, dan Direktur Eksekutif.

2. Pelatihan Anggota APINDO: Diversity & Inclusion in The World of Work

APINDO menggelar Pelatihan Diversity and Inclusion in the World of Work bagi manajemen PT Asuransi Multi Artha Guna,Tbk (Asuransi MAG), salah satu anggota dari APINDO, pada Rabu (18/10/2023) di Kantor APINDO dan mengundang sejumlah Pengurus Bidang Ketenagakerjaan APINDO sebagai fasilitator, yaitu Head of Corporate IR Astra International Gama A. Yogotomo, Direktor People &Culture PT. HM Sampoerna, Tbk Ripy Mangkoesoebroto, Head of P&C BP and IER PT HM Sampoerna, Tbk Cicilia Tri Sulistyawati dan HR Manager PT. Kalbe Farma Tbk Jessica. Acara dibuka oleh Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan APINDO Myra M. Hanartani dan President Director Asuransi MAG Pankaj Oberoi.

3. Members Gathering APINDO: Polusi Udara, Dampak Bagi Kesehatan & Peran Industri dalam Pengendaliannya

Dilaksanakan pada 12 Oktober 2023, dengan narasumber yaitu: • Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes. - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementrian Kesehatan • Prof. Dr. Muchtaruddin Mansyur, Sp.Ok, Subsp. ToksiKO (K), Ph.D - Ketua program studi spesialis kedokteran okupasi, universitas Indonesia • dr I Putu Gede Panca Wiadnyana, MKK – Vice President Marketing Bluebird Group. Acara dibuka oleh Darwoto, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO dan dimoderatori oleh dr Rima Melati, MKK, SpAk (K), SpOk (K), Ketua Komite K3 APINDO.

APINDO DAN CURRENT AFFAIRS DI MEDIA

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, masih optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi RI 2023 masih bisa tumbuh 5%, namun APINDO mewaspadai dampak gejolak global yang masih sangat besar di tahun 20024, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk menekan efek tekanan eksternal ke ekonomi domestic dan dibutuhkan langkah menjaga stabilitas politik memasuki pesta demokrasi agar tidak mengganggu iklim investasi Tanah Air. Shinta menyampaikan kkebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang meminta eksportir menahan hasil ekspor hingga 3 bulan yang cukup memberatkan pengusaha sehingga pengusaha mengusulkan agar DHE yang sudah dikonversi ke Rupiah tidak perlu di tahan selama 3 bulan, dalam POWER LUNCH CNBC INDONESIA: PENGUSAHA BAHAS DHE DAN SUKU BUNGA TINGGI Senin, 23/10/2023 di https://www.youtube.com/watch?v=So6nOQXrIo4

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani melihat kenaikan suku bunga sebagai bagian dari langkah BI menekan pelemahan Rupiah dan Apindo masih optimistis terhadap kondisi domestik RI yang masih tumbuh positif dan inflasi yang terkendali dan ada dampak kenaikan suku bunga dan pelemahan Rupiah ke sektor usaha. Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 23/10/2023) https://www.youtube.com/watch?v=62chzTVQScQ di 11th.

HIGHLIGHT NOVEMBER 2023

1. Indonesia Digital Summit 2023

Bidang Digital APINDO menyelenggarakan Indonesia Digital Summit 2023 di Jakarta pada Selasa, 28 November 2023, dengan dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Ari sebagai pemapar. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani hadir dengan memberikan remarks sementara Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar turut hadir dan Ketua Bidang Digital APINDO Neneng Goenadi menjadi moderator dalam tema Indonesia's Digital Economy bersama perwakilan OJK dan Kementerian Ketenagakerjaan R. Wakil Bidang Digital APINDO Tirza R. Munusamy menjadi penanggap dalam Dialog Visi Misi bersama Tim Capres yang diwakili oleh Samirin Wijayanto, Budiman Sudjatmiko dan Renard Widarto.

2. Pertemuan Regional Tripartit ILO Asia Pasifik

Ketua Komite Jaminan Sosial APINDO Gama Anom Yogotomo menjadi representatif APINDO dalam Pertemuan Regional Tripartit bertema "Dampak Digitalisasi terhadap Perlindungan Sosial di Asia", diselenggarakan oleh ILO Regional Asia Pasifik, Selasa – Rabu (7 – 8/11/2023), di Bangkok, Thailand. Hadir juga peserta yang mewakili organisasi tripartit dari Kamboja, Laos, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Pertemuan bertujuan meningkatkan pertukaran pengalaman antar pakar nasional, perwakilan tripartit, mengenai status dan masa depan perlindungan sosial di kawasan Asia, serta pertemuan ini juga mendorong refleksi tripartit regional mengenai pentingnya penguatan perlindungan sosial yang disampaikan melalui digital sebagai sarana untuk memperluas cakupan perlindungan sosial. APINDO memandang bahwa digitalisasi telah membawa beberapa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan Perlindungan Sosial di Indonesia, dimana dengan jumlah penduduk sebanyak 262, 74 juta jiwa, digitalisasi jaminan sosial sangat diperlukan untuk penyelenggaraan Jamsos yang lebih efisien dan akses lebih mudah.Keterlibatan APINDO dalam membantu Pemerintah mengembangkan dan menyusun kebijakan serta prosedur Jaminan Sosial khususnya terkait digitalisasi sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan masukan dari pengusaha dipertimbangkan.

KEGIATAN NOVEMBER 2023

1. Peluncuran "Kota Masa Depan Chapter Balikpapan"

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani membuka Peluncuran "Kota Masa Depan chapter Balikpapan", Senin (6/11/2023) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dihadiri oleh Country Managing Director Grab Indonesia yang juga Ketua Bidang Digital APINDO Neneng Goenadi, Wakil Ketua Ketua Digital APINDO Tirza Reinata, DPP APINDO Kalimantan Timur Slamet Brotosiswoyo, perwakilan Walikota dan Otorita IKN. Shinta mengungkapkan, Balikpapan memiliki peranan strategis karena menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Program Kota Masa Depan Berani Digital merupakan kolaborasi Grab Indonesia dengan APINDO yang diharapkan mengakomodasi UMKM dalam mengadopsi solusi digital untuk menangkap peluang pengembangan ekonomi digital. Dalam acara tersebut, dilakukan juga Nota Kesepahaman (MoU) antara DPP APINDO Kalimantan Timur dengan PT Indosat Tbk.

2. Disability Awareness Workshop

DPN APINDO, Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan Yayasan Koneksi Indonesia (KONEKIN) Inklusif mengadakan Disability Awareness Workshop, Senin (6/11/2023) di Jakarta, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan praktisi HR di Perusahaan mengenai pekerja disabilitas. Workshop merupakan tindak lanjut MoU DPN APINDO dan Komisi Nasional Disabilitas dalam mengakselerasi tempat kerja inklusif bagi para penyandang disabilitas. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto mengungkapkan kolaborasi APINDO dengan KND dan KONEKIN menunjukkan komitmen dunia usaha dalam menciptakan tempat kerja inklusif, menciptakan hubungan industrial harmonis dan produktif serta menerapkan ketenagakerjaan inklusif dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Decent Work Country Program (DWCP) Tripartite Consultation Meeting

Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan APINDO, Myra M. Hanartan mengikuti Decent Work Country Program (DWCP) Tripartite Consultation Meeting, Senin (6/11/2023) di Jakarta, yang diselenggarakan oleh ILO dan membahas implementasi DWCP 2020 - 2025 dengan fokus pada:

1) Dialog Sosial Efektif yang mempromosikan bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja
2) Penciptaan lapangan kerja dan pekerja muda, dan
3) Peningkatan perlindungan bagi pekerja rentan.

4. HxGN Live Indonesia 2023

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani memberi keynote speech dalam HxGN Live Indonesia 2023, Selasa (7/11/2023) yang diselenggarakan oleh Leica Geosystems Indonesia dan Hexagon Group di Jakarta. Shinta menyampaikan perspektif dunia usaha terkait peran data, informasi, dan teknologi digital dalam mendukung sustainability dan tantangan masa depan, dimana data dan informasi memiliki peranan penting dalam bisnis, diantaranya sebagai manajemen risiko, pengambilan keputusan, analisis kinerja, ekspansi bisnis, dsb. Adopsi inovasi teknologi digital juga menghemat biaya produksi, peningkatan competitive advantage dalam persaingan pasar karena inovasi dan kualitas produk, serta menurunkan risiko usaha, investasi dan risiko produksi.

5. Farewell Director ILO Country Office for Indonesia and Timor Leste

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani beserta jajaran pengurus APINDO pada Kamis (9/11/2023) mengadakan farewell Director ILO Country Office for Indonesia and Timor Leste, Michiko Miyamoto yang Akan bertugas di New Delhi India. Turut hadir Sekretaris Umum APINDO Aloysius Budi Santos, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Darwoto, Ketua Bidang Perikanan APINDO Hendra Sugandhi, Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan APINDO Myra M. Hanartani, Pengurus Bidang Ketenagakerjaan Komite Pelatihan & Pengembangan APINDO Antonius Saptorahardjo, dan Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut.

6. Konferensi Pers Makassar Leadership Summit 2023

Wakil Ketua Umum APINDO, Sanny Iskandar menjadi narasumber dalam Konferensi Pers Makassar Leadership Summit 2023 (MLS 2023): Empowering and Shaping Future Leaders for a Transformative and Sustainable Indonesia, Kamis (16/11/2023) di Jakarta. “Melalui Makassar Leadership Summit, diharapkan Makassar akan semakin banyak melahirkan pemimpin berkualitas dan berdaya saing dalam menjalankan peran aktifnya bagi perekonomian Indonesia Timur dan nasional, seiring dengan peran strategis Makassar sebagai poros pertumbuhan perekonomian di Indonesia Timur yang memerlukan para pemimpin potensial,” kata Sanny. MLS 2023 akan digelar di Makassar pada 27 – 28 November 2023 dengan menghadirkan puluhan pemimpin nasional di Makassar. Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, H. M. Jusuf Kalla, akan menjadi keynote speaker hari pertama.

7. Orasi Ilmiah Perekonomian Berkelanjutan Melalui Investasi Hijau

Wakil Sekretaris Umum APINDO, Lucia Karina memberikan Orasi Ilmiah bertema "Mencapai Perekonomian Berkelanjutan Melalui Investasi Hijau", dalam Wisuda XVI STIE Indonesia Banking School, Sabtu (18/11/2023) di Jakarta. Karina menyampaikan sektor swasta mengidentifikasi 4 tantangan utama dalam mewujudkan perekonomian berkelanjutan melalui investasi hijau, yaitu: 1) pengetahuan dan kesadaran akan SDGs masih terbatas tentang risiko dan peluang pembiayaan SDGs di antara pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan besar; 2) regulasi yang tidak efisien serta insentif fiskal dan keuangan yang tidak memadai untuk mendorong investasi keuangan berkelanjutan; 3) terbatasnya infrastruktur dasar, pemerataan serta kurangnya pengalaman, kapasitas dan replikasi di tingkat daerah terhadap implementasi SDGs; dan 4) kurangnya integrasi dan kolaborasi antara stakeholders.

8. Audiensi Bersama KEMENDIKBUD RISTEK RI

Pengurus APINDO beserta jajaran melakukan audiensi Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, Selasa (21/11/2023) di kantor Kemendikbudristek. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani didampingi Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, Wakil Sekretaris Umum APINDO M. Aditya Warman, Ketua Bidang Pendidikan dan Keterampilan APINDO Arini Subianto, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Darwoto, Ketua Komite Pendidikan Luar Sekolah/Berbasis Masyarakat APINDO Johnwei Muljono, dan Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut. Shinta menyampaikan peran dan fokus APINDO untuk mendorong kolaborasi aktif dengan dunia Pendidikan dalam job creation dan menciptakan daya saing dengan meningkatkan kualitas SDM untuk memasuki dunia kerja melalui program APINDO UMKM Merdeka, serta menciptakan kualitas Kesehatan melalui program pengentasan Stunting oleh dunia usaha.

9. BCA Research Forum 2023 "Resiliensi Perekonomian Domestik Hadapi Pasang Surut Global"

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menjadi pembicara dalam BCA Economic Research Forum III 2023 bertema Resiliensi Perekonomian Domestik Dalam Menghadapi Pasang Surut Global, Kamis (23/11/2023) di Jakarta. Shinta memaparkan

lanskap sektor usaha Indonesia di Tengah persaingan Pemilu dan perlambatan ekonomi regional, dimana di tahun 2024 perlambatan ekonomi global masih akan terus terjadi dan berdampak pada dunia usaha, sehingga perekonomian domestik dan kecepatan serta ketepatan realisasi APBN diharapkan menjadi tumpuan ekonomi domestik.

10. Diskusi Pengurus Kebijakan Publik APINDO & Pelaku Industri Hasil Tembakau

Pertemuan Bidang Kebijakan Publik APINDO dengan Pelaku Industri Hasil Tembakau dipimpin oleh Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Sutrisno Iwantono, Kamis (23/11/2023) di Kantor APINDO. Membahas RPP Kesehatan sebagai Aturan Turunan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 terkait aturan yang berdampak kepada Industri Hasil Tembakau.

11. Makassar Leadership Summit 2023

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan Keynote Speech dan membuka Makassar Leadership Summit 2023, Senin (27/11/2023) di Makassar. Hadir dalam gelaran tersebut Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Ketua GMKM Baso Alim Bahri, Ketua Panitia Makassar Leadership Summit 2023 Disa Novianty, dan Ketua PMSM Indonesia Heriyanto Agung Putra. Dalam keynote nya, Shinta memaparkan tentang Women Leadership dimana APINDO, sebagai ecosystem enabler bagi pemberdayaan perempuan, berkomitmen mendukung peluang dan kesempatan setara bagi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, serta mendorong penerapan inklusivitas dan pemberdayaan Perempuan dalam dunia usaha Indonesia serta melakukan advokasi untuk mempromosikan gender main-streaming.

APINDO juga telah Menyusun Panduan Kesetaraan dan Inklusivitas di Tempat Kerja yang disertai dengan Buku Modul Pelatihan Tim Fasilitator Penerapan Kesetaraan dan Inklusivitas di Tempat Kerja dan menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pelecehan Seksual, termasuk dukungan melalui program UMKM Merdeka yang menerapkan prinsip gender lens investing.

12. APINDO & BKKBN Kolaborasi Sediakan Layanan KB Gratis di Perusahaan

APINDO berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyediakan layanan kontrasepsi atau ke luarga berencana (KB) gratis di perusahaan, Senin (27/11/2023) di Jakarta. Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy menyatakan bahwa keluarga memegang peranan besar dan penting dalam mendukung penurunan stunting demi keluarga berkualitas, salah satunya dengan peningkatan kualitas layanan KB.

13. APINDO Terima Duta Besar Ukraina

APINDO menerima Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia, Vasyl Hamianin, Selasa (28/11/2023) di kantor DPN APINDO

14. Program Penyegaran ToT Dialog Sosial

APINDO Bersama PUM, CNV dan KSBSI menyelenggarakan Program Penyegaran ToT Dialog Sosial pada Rabu– Kamis (29-30/11/2023) di kantor APINDO, sebagai implementasi dari penandatanganan Letter of Intent (LOI) oleh APINDO, PUM, CNV dan KSBSI yang rencananya dijalankan selama 3 tahun mendatang. Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan APINDO Myra M. Hanartani menyampaikan, dengan pelatihan dialog sosial yang efektif, dunia usaha berharap perwakilan manajemen dan serikat pekerja dapat mengembangkan pemahaman bersama di tempat kerja dengan mengedepankan komunikasi yang efektif dan sehat demi mewujudkan tujuan bersama, diantaranya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Hadir memberikan sambutan dalam acara tersebut Ketua Komite Jaminan Sosial APINDO Gama Anom Yogotomo, perwakilan PUM Ton Voortman, perwakilan CNV Suzan Cornelissen, perwakilan Kementerian Luar Negeri Belanda Maartje Smitshuysen, dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.

Pelatihan hari pertama dipimpin oleh perwakilan PUM, APINDO dan KSBSI dengan melibatkan pelaku usaha dan pekerja dari sejumlah sektor, diantaranya garmen, farmasi & mining. Hari Kedua Program Penyegaran Training of Trainers (ToT) Dialog Sosial yang diselenggarakan APINDO bekerjasama dengan PUM, CNV dan KSBSI, Kamis (30/11/2023) di kantor APINDO.

KEANGGOTAAN

Members Gathering - Norma 100”

APINDO menggelar Members’ Gathering “Sosialisasi Pengisian Norma Ketenagakerjaan - Norma 100” secara hybrid (online dan di kantor APINDO), Kamis (2/11/2023). Norma 100 merupakan fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website yang diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dan terintegrasi dengan www.kemnaker.go.id. Melalui fitur tersebut, setiap perusahaan yang diwakili oleh pihak pengusaha dan perwakilan pekerja melakukan pengisian kepatuhan secara mandiri dengan menjawab Daftar Periksa yang memuat 100 pertanyaan untuk selanjutnya diverifikasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Hadir sebagai narasumber Direktur Bina Pemeriksanaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Yuli Adiratna, Sub Koordinator Riksa Norma Ergonomi Lingkungan kerja, Bahan Berbahaya & Kesehatan Kerja Kemenaker RI Muhammad Fertiaz dengan moderator Ketua Komite K3 Bidang Ketenagakerjaan APINDO dr. Rima Melati.

HIGHLIGHT DESEMBER 2023

1. Outlook Ekonomi & Bisnis APINDO 2024

APINDO menggelar Outlook Ekonomi dan Bisnis 2024, Kamis (21/12/2023) di kantor APINDO. APINDO memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dapat dipertahankan di tahun 2023 dan di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 4,80% (yoy) hingga 5,20% (yoy).

2. Year - End Gathering & Welcoming New Ambassador

Bidang Hubungan Internasional APINDO mengadakan Year-End Gathering and Welcoming New Ambassadors to Indonesia, Kamis (14/12/2023) di kediaman Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani. Dalam sambutannya, Shinta mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Duta Besar dan perwakilan Kementerian Luar Negeri yang merupakan stakeholder internasional APINDO dan juga memaparkan program Unggulan APINDO, salah satunya penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

Hadir Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Sofjan Wanandi, Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy dan Sanny Iskandar, Wakil Sekretaris Umum Hendra Widjaja dan Anggana Bunawan, Ketua Dewan Pakar APINDO Mari Elka Pangestu, Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Catharina Widjaja, Ketua Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Tigor M. Siahaan, Ketua Bidang Organisasi APINDO Anthony Hilman, Ketua Bidang UMKM APINDO Ronald Walla, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO Didit Ratam beserta jajaran Pengurus Bidang HI, serta sejumlah undangan Duta Besar dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI.

KEGIATAN DESEMBER 2023

Audiensi Bersama Kementerian Perdagangan RI

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani berserta jajaran Pengurus APINDO melakukan Audiensi Bersama Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Rabu (6/12/2023) di Kantor Kementerian Perdagangan RI. Hadir mendampingi Shinta, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Perdagangan APINDO Anne Patricia Sutanto, Wakil Ketua Bidang Pembangunan Berkelanjutan APINDO Nurdiana Darus, Ketua Komite Perdagangan Luar Negeri/Pengembangan Ekspor APINDO Budihardjo Iduansjah, Ketua Komite Perdagangan Dalam Negeri APINDO Handaka Santosa, Ketua Komite Standarisasi dan Perlindungan Konsumen APINDO Hardianto Atmadja, Wakil Sekretaris Umum Anggana Bunawan, Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut. Dalam audiensi tersebut, Shinta menyampaikan hasil Upah Minimum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyerahkan buku 70 tahun kontribusi APINDO.

APP

Innovating Today For a Sustainable Tomorrow

APP serves as the holding company for multiple Indonesia pulp and paper manufacturing as well as forestry entities, catering to the increasing global need for high-quality tissue, packaging, and paper. Our products reach over 150 countries spanning six continents. APP Group serves as group name of pulp, paper and forestry entities under APP and its affiliates including the pulp and paper and forestry operation in China.

Driven by a dedication to sustainability and ethical practices, we prioritize the well-being of our employees, society, and environment.

Our approach involves harnessing technological advancements and fostering innovation, collaborating closely with communities, and upholding internationally recognized business and operational standards throughout our production and supply chain.

Aligned with the Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, our Sustainability Roadmap Vision 2030 steers our actions toward safeguarding environment, bolstering local communities, preserving biodiversity, and striving for carbon neutrality in all our endeavors.

Growing Our Tomorrow

SRV2030
Sustainability Roadmap Vision

FOLLOW US AT APP GROUP

www.app.co.id

05

KEGIATAN DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO

DPP APINDO SUMATERA UTARA

Ketua	: Prof. Dr. Haposan Siallagan, SH, MH
Sekretaris	: Endy Kartono, SE
Dewan Pimpinan Kab/Kota	: 15 Kabupaten / Kota

Sehubungan dengan permintaan DPN APINDO tanggal 7 Desember 2023 berikut ini dapat kami laporkan pokok-pokok kegiatan DPP APINDO Sumatera Utara yang dilaksanakan dalam tahun 2023:

1. ***Coffee Morning***

   Coffee Morning merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh para pengurus APINDO Sumut untuk melakukan diskusi terkait isu-isu yang terjadi. *Coffee morning* ini juga dilakukan untuk berdiskusi dengan pemerintah yang ada di Sumatera Utara.

2. **Kunjungan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers**

   Kunjungan Ketua Komisi Pengadun dan Penegakan Dewan Pers Bapak Yadi Hendriana ke kantor DPP APINDO Sumut. Dalam pertemuan ini diharapkan, APINDO sumut dapat mendukung pemberitaan yang ada di media agar transpran dan jelas tidak memihak kepada siapapun. Dan berharap I News TV yang merupakan anggota APINDO Sumut dapat berkolaborasi untuk menyampaikan berita yang berimbang dan sesuai fakta.

3. **Kunjungan Kerja ke Kabupaten Langkat dan Kota Binjai**

   DPP APINDO Sumut melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat dan Kota Binjai untuk melakukan giat untuk merencanakan pembentukan DPK APINDO yang ada di daerah tersebut.

4. **Sosialisasi Teknis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan**

   Apindo Sumatera Utara melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi Manfaat Layanan bagi Para Kerja yang menggunakan BPJS Ketenagakerjaan

5. **Seminar Strategi Menghadapai Resiko dan Peluang dalam Implementasi *Carbon Tax* dn Mengatasi Emisi di Sektor Industrial**

   APINDO sumut mengadakan seminar Strategi Menghadapai Resiko dan Peluang dalam Implementasi *Carbon Tax* dn Mengatasi Emisi di Sektor Industrial yang diadakan di Kantor APINDO Sumut.

6. Mengadakan Sosialisasi PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

APINDO Sumut mengadakan bincang PPH bekerjasama dengan Direktorat Pajak Provinsi Sumatera Utara 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

7. Audiensi PT. PLN UPT 3 ke Kantor DPP APINDO Sumatera Utara

PT. PLN UPT 3 berkunjung ke kantor DPP APINDO Sumatera Utara dalam rangka silaturahmi untuk mempercepat layanan, kehandalan listrik dan mendukung kelancaran kegiatan usaha industri.

8. MoU APINDO Sumut dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BTN

APINDO Sumatera Utara siapkan 5000 - 10.000 rumah untuk pekerja. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Utara Dr. Haposan Siallagan melalui Wakil Ketua APINDO Sumut bidang Properti Tomi Wistan menyampaikan bahwa selain *backlog* rumah sekitar 12,7 juta unit, di Indonesia kebutuhan rumah setiap tahun permintaannya cukup besar yaitu sebesar 600 ribu sampai dengan 800 ribu rumah untuk keluarga baru.

9. Kunjungan ke Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara

Rapat pengurus APINDO Sumut dengan Pemerintah Provinsi Sumut melalaui Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindag Sumut. Kegiatan ini dilakukan unttuk berkolaborasi dalam peningkatan pertumbuhan di Sumut.

10. Narasumber dalam Seminar *Start Up Business*

H. Palacheta Subianto menajdi narasumber dalam seminar yang diadakan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul dalam seminar menjadikan mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda yang bisa berkembang dengan menggunakan media sosial yang ada.

11. Sosialisasi Pengisian SIINAS

APINDO Sumut mengadakan Sosialisasi Pengisian Sistem Informasi Industri Nasional dengan Narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

12. Pengukuhan DPK APINDO Mandailing Natal

DPK APINDO Mandailing Natal baru terbtnuk di awal tahun 2023. Dengan dikukuhkannya DPK APINDO Mandailing Natal harapannya dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan harmonisasi dan investasi yang akan memajukan Kabupaten Mandailing Natal.

13. Kunjungan USAID PADU ke Kantor APINDO Sumut

USAID Partnership for Productivity berkunjung ke APINDO Sumut untuk memperkenalkan program USAID PADU dan ingin bekerjasama untuk melakukan pelatihan vokasi melalui kemitran dengan dunia usaha dan industri.

14. Wawancara Seleksi Calon Hakim AD-Hoc PHI

APINDO Sumatera Utara melakukan wawancara kepada para calon Hakim Ad-Hoc PHI yang mewakili Unsur APINDO Sumater Utara. Wawancara ini dilakukan sebagai langkah untuk menyaring para pendaftar untuk dapat berkomitmen dan menjaga integritas diri dan membawa nama baik APINDO khususnya Sumatera Utara ke depannya.

15. Kunjungan Perusahaan Inggris ke Kantor APINDO Sumatera Utara

Perusahaan Inggris berkunjung ke kantor APINDO Sumatera Utara untuk bekerja sama dalam penggunaan panel surya yang ada di perusahaan yang tergabung dengan APINDO Sumatera Utara.

16. Seminar Ketenagakerjaan

APINDO Sumatera Utara mngadakan Semianr Ketenagakerjaan dengan tema "Implementasi UU No 6 Tahun 2023" dengan mengundang narasumber dari pakar ahli hubungan industrial dan Hakim Ad Hoc PHI PN Medan.

17. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama

DPP APINDO Sumatera Utara dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Universitas Prima Indonesia, Universitas HKBP Nommensen terkait program APINDO UMKM Merdeka

APINDO Sumatera Utara melakukan perjanjian Kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Universitas Prima Indonesia, Universitas HKBP Nommensen terkait program APINDO UMKM Merdeka. APINDO berharap dengan menjalin kerjasama ini dapat mendukung program magang kepada mahasiswa yang ingin menjadi enterpreneur yang bisa berkembang di dunia usaha dan APINDO akan membantu untuk perkembangannya.

Penandatanganan MoU dengan Universitas HKBP Nommensen

Penandatanganan MoU dengan Universitas Prima Indonesia

Penandatanganan MoU dengan Dinas Koperasi dan UKM

18. Pengukuhan DPK APINDO Langkat dan DPK APINDO Karo

APINDO Sumatera Utara telah membentuk DPK APINDO di Provinsi Sumatera Utara yang baru yaitu DPK APINDO Langkat dan DPK APINDO Karo. APINDO sumut berharap dengan bertambahnya DPK yang ada di daerah tersebut dapat berkolaborasi dengan stake holder yang ada didaerah dan dapat mengembangakn pertumbuhan ekonomi masing – masing daerah.

Pengukuhan DPK APINDO Kab. Langkat

Pengukuhan DPK APINDO Kab. Karo

19. Rapat Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit untuk Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023

Pada rapat perumusan Upah Minimum yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat buruh/pekerja dan pengusaha yang diwakili oleh APINDO dan KADIN.

Sidang Penetapan UMK Kab. Asahan

Sidang Penetapan UMK Kab. Mandailing Natal

Sidang Penetapan UMK Kota Gunung Sitoli

Sidang Penetapan UMK Kota Tebing Tinggi

Sidang Penetapan UMK Provinsi Sumatera Utara

DPP APINDO SUMATERA BARAT

Ketua	: Rina Pangeran
Sekretaris	: Dra. Yusni Elma
Dewan Pimpinan Kab/Kota	: 10 Kabupaten / Kota

Sehubungan dengan permintaan DPN APINDO, pada tanggal 7 Desember 202, berikut ini dapat kami laporkan pokok-pokok kegiatan DPP APINDO Sumatera Barat yang dilaksanakan dalam tahun 2023 :

1. **Konsultasi Teknis Penyelesaian dan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah agung**

   Pada Hari Rabu, 30 Agustus 2023, bertempat di hotel Mercure Padang. Telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Teknis Penyelesaian dan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrian Mahkamah agung, yang dihadiri oleh 6 pengurus DPP APINDO Sumatera Barat, Adapun topik pembahasan dalam kegiatan ini adalah penanganan sengketa ketenagakerjaan, Prinsip Kunci ILO untuk pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial, tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian non litigasi, Kondisi Yang Harus Dipersiapkan – Lembaga, Kondisi Yang Harus Dipersiapkan – Individu, Tantangan Hakim PHI, Kompetensi Inti untuk Hakim PHI, Kompetensi Inti untuk Hakim PHI Selama persidangan hakim harus mampu, Topik-topik yang disarankan, dan diskusi permasalahan antara pengusaha dan tenagakerja.

2. **Dialog Serap Aspirasi Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2023**

   Pada Hari Kamis, 31 Agustus 2023. Bertempat di Hotel Mercure Padang DPP APINDO Sumatera Barat mengikuti kegiatan Dialog Serap Aspirasi PElaksanaan UU No.6 Tahun 2023 dengan narasumber Bapak Ir. Afriansyah Noor, M.Si. (Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI). Pembahasan dalam dialog ini adalah mengenai Revisi PP 35/2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat serta pemutusan hubungan kerja.

3. **Sosialisasi dan Pengenalan APINDO UMKM Merdeka di Universitas Negeri Padang**

   Dalam rangka merealisasikan program dari Dewan Pimpinan Nasional APINDO mengenai UMKM Merdeka, pada 4 September 2023 DPP APINDO Sumatera Barat, melakukan kegiatan sosialisasi dan mentoring APINDO UMKM Merdeka kepada mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Tujuan sosialisasi dan mentoring ini adalah agar mahasiswa dapat mengenal apa yang dimaksud dengan APINDO UMKM Merdeka dan menumbuhkan minat serta rasa tanggung jawab pada mahasiswa dalam membantu perkembangan UMKM yang ada di daerah Sumatera Barat. Adapun yang menjadi pemateri dalam kegiatan ini adalah anggota dari DPP APINDO Sumatera Barat sesuai dengan bidangnya.

4. **Sosialisasi dan Pengenalan APINDO UMKM Merdeka di Universitas Andalas**

   Pada 12 September 2023, DPP APINDO Sumatera Barat juga membuat program yang sama yaitu

sosialisasi dan mentoring APINDO UMKM MERDEKA kepada mahasiswa di Universitas Andalas, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan DPP APINDO Sumatera Barat menfokuskan kegiatan ini pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, agar financial dari UMKM tersebut lebih terstrukur, karena setelah DPP APINDO Sumatera Barat melakukan riset dilapangan dengan para pelaku UMKM, 75% UMKM di Sumatera Barat tidak memiliki pengaturan keuangan yang baik dalam berbisnis, sehingga mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan lebih bisa membantu mengajarkan pelaku UMKM tersebut dalam pengelolaan keuangan.

5. Akurasi UMKM Binaan APINDO Sumatera Barat

Pada Selasa, 5 September2023. Bertempat di PLUT Sumbar DPP APINDO Sumatera Barat melakukan riset terhadap UMKM yang ada di Sumatera Barat. Setelah di riset, ditemukan bahwa permasalahan yang ada disetiap UMKM juga berbeda-beda. Maka DPP APINDO Sumatera Barat membantu memecahkan permasalahan yang ada pada UMKM tersebut dan meningkatkan penjualannya dengan memberikan wadah berjualan, dan mengedukasi pelaku UMKM agar produknya mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. DPP APINDO Sumatera Barat, bekerjasama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk bersama-sama membina UMKM yang ada di Sumatera Barat. Terdapat 25 UMKM yang berada dibawah binaan APINDO berdasarkan hasil kurasi yang telah dilakukan oleh ketua DPP APINDO Sumatera Barat. Sehingga DPP APINDO Sumatera Barat dapat membantu menyelesaikan permasalahan UMKM yang ada di Sumatera Barat dan meningkatkan perekomoniam masyarakat Sumatera Barat.

6. *Matchup* dan Magang UMKM Merdeka

Pada Hari Rabu, Tanggal 20 September 2023, DPP APINDO Sumatera Barat melakukan Match Up dan UMKM Merdeka untuk persiapan program Magang APINDO UMKM Merdeka, Setiap Kelompok magang diberikan 1 mentor yang berasalh dari pengurus DPP APINDO Sumbar untuk membimbing mahasiswa dalam membantu pengembangan UMKM tersebut, dan 5 mahasiswa akan membimbing 1 UMKM. Program magang dilaksanakan selama 3 bulan, dengan monthly report yang dilakukan setiap bulannya.

7. APINDO Sumatera Barat mensukseskan acara *World Islamic Entrepeneur Summit (WIES)*

DPP APINDO Sumatera Barat membantu Provinsi Sumatera Barat dalam mensukseskan acara internasional yang sangat bergengsi, yaitu *World Islamic Entrepreneur Summit (WIES)* yang berlangsung pada tanggal 6 - 9 September 2023. Acara ini dihadiri oleh 10 negara di Dunia, dan APINDO Sumatera Barat diberikan 2 *booth* oleh pemerintah untuk menampilkan UMKM binaan APINDO Sumatera Barat serta melakukan Bisnis *Matching* dengan turis dari negara tersebut. Dalam kegiatan WIES 2023 ini, eksistensi APINDO Sumatera Barat lebih ditonjolkan dalam berbagai kegiatan, sehingga APINDO lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat memperluas jaringan keanggotaan serta bisnisnya.

8. DPP APINDO Sumatera Barat menjadi mitra kerjasama Pemerintah Provinsi dalam pendampingan bagi petani millenial APINDO dalam meningkatkan produksi jagung wilayah

Pada hari Senin, 2 Oktober 2023 DPP APINDO Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pendampingan dan pelatihan bagi para petani yang ada di Sumatera Barat. Petani Millenial APINDO mempresentasikan program yang akan dilakukan DPP APINDO Sumatera Barat membantu pemerintah dalam sektor pertanian, khususnya petani millenials. DPP APINDO Sumatera Barat juga mengembangkan bakat petani millenial, salah satunya adalah industri jagung, karena berdasarkan data yang DPP APINDO dapatkan dari Dinas Pertanian Sumatera Barat, setiap bulannya Provinsi Sumatera Barat membutuhkan 853 Ton jagung untuk konsumsi serta pakan ternak. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat tidak mampu memenuhi 835 Ton jagung untuk kebutuhan provinsi sendiri, sehingga DPP APINDO Sumatera Barat membuat program untuk menciptakan petani muda millenial yang fokus dalam pengembangan sektor pertanian jagung, dan bisa memunculkan pengusahapengusaha baru untuk bisa memajukan Provinsi Sumatera Barat.

9. Pameran UMKM Binaan APINDO di Bandara Soekarno Hatta

Pada tanggal 1 - 31 Oktober 2023, APINDO Sumbar mendapatkan kesempatan untuk menjual produk UMKM binaan pada Bandara Soekarno Hatta, dalam hal ini UMKM yang terlibat sebanyak 10 UMKM, berupa UMKM makanan, pakaian, dan accecories asal Minangkabau, pada kegiatan ini UMKM APINDO Sumbar mendapatkan penjualan tertinggi disbanding UMKM lainnya. Selain itu pada tanggal 14 - 21 Oktober 2023 secara bersamaan UMKM Binaan APINDO Sumbar juga mengikuti bazar UMKM yang dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta yang diikuti oleh 7 UMKM binaan APINDO Sumbar.

10. Mensosialisasikan Program Stunting APINDO Kepada Masyarakat Kabupaten Kep. Mentawai

Pada Hari Minggu, 8 Oktober 2023, DPP APINDO Sumbar, Bersama Wakil Gubernur Sumbar serta Pemkab Mentawai, mensosialisasikan program stunting yang dicanangkan oleh DPN APINDO. Pada kegiatan ini APINDO Sumbar memberikan sosialisasi pada tiga sekolah dasar (SD), dan satu sekolah pesantren, dan anak-anak diperdesaan pelosok, selain itu, DPP APINDO Sumbar juga meninjau langsung lokasi pembangunan mini market untuk tempat berjualan UMKM yang diproduksi di Kabupaten Mentawai.

11. *Monthly Report* Magang UMKM Merdeka

Berdasarkan kesepakatan DPP APINDO Sumatera Barat dengan Mahasiswa Magang UMKM Merdeka, setiap bulannya mahasiswa akan melaporkan program kerja yang telah mahasiswa lakukan, berikut juga hasil serta kendala yang terjadi, sehingga DPP APINDO Sumatera Barat dapat memberikan masukan, saran serta solusi dalam permasalahan tersebut. Pada presentasi pertama yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023, program terdekat yang dilakukan mahasiswa

adalah membantu pemasaran dan digital marketing dari UMKM tersebut. Pemasaran awal dilakukan dengan berjualan pada acara *CAR FREE DAY* yang diadakan di sepanjang jalan Gor Haji Agus Salim menuju ke jalan Khatib Sulaiman. Berdasarkan laporan yang DPP APINDO Sumatera Barat, produk hari 1 terjual habis, dan kedepannya kegiatan ini akan menjadi program mingguan yang harus dilaksanakan oleh Mahasiswa dan UMKM.

12. Talkshow Nasional APINDO mengenai Hubungan Industrial

Pada hari Senin, 6 November 2024 DPP APINDO Sumatera Barat melaksanakan kegiatan nasional yaitu *Talkshow* Hubungan Industrial dengan tema "Strategi Pencegahan Perselisihan Menuju Hubungan Industrial yang Harmonis" dengan narasumber yang berasal dari Kementrian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan Hakim Pengadilan Negeri, yaitu antara lain :

- Dra. Anggoro Putri, M.Bus (Direktur Jenderal PEmbinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker)
- Agatha Widianawati. S.H.,M.H (Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker)
- Retna Pratiwi,S.H.,M.Hum (Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker)
- Heru Widianto,SE.,MM (Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker)
- M. Aditya Warman (Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan)
- Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat)
- Eko Pramono,S.H (Hakim ad-Hoc PHI Pengadilan Negeri Padang)
- Abdul Rahman Lubis, S.P (Hakim Ad-Hoc PHI Pengadilan Negeri Padang)

Pada Talkshow ini juga dilakukan MoU antara SPSI Sumatera Barat dan APINDO Sumatera Barat, selain itu juga dilaksanakan kegiatan Bisnis Matching antar pengusaha didalam kepengurusan DPP APINDO Sumbar dan Bazar UMKM yang diisi oleh UMKM Binaan APINDO.

Kegiatan ini dihadiri oleh 200 perusahaan dari Sumatera Barat.

13. Penyerahan Bantuan dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan UMKM Mini Market

Pada Hari Senin, 13 November 2023. APINDO Sumatera Barat menyerahkan bantuan untuk UMKM yang ada di Kabupaten Kep. Mentawai, diantaranya yaitu 100 rumah kepiting dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000, serta peletakan batu pertama Pembangunan Mini Market untuk Pesantren Islamic Centre. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membantu pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kep. Mentawai.

Selanjutnya, berkenaan dengan keanggotaan APINDO Sumbar, DPP APINDO Sumbar tetap senantiasa mencoba merangkul tambahan anggota terhadap badan-badan usaha yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

DPP APINDO RIAU

Ketua	: Wijatmoko Rah Trisno, SE
Sekretaris	: Edi Darmawi
Dewan Pimpinan Kab/Kota	: 7 Kabupaten / Kota

Berikut ini pokok-pokok kegiatan DPP APINDO Riau yang dilaksanakan dalam tahun 2023 :

Januari

1. Undangan dari BPD Abujapi Riau perihal HUT Satpam ke 42 tahun 2023 Propinsi Riau pada tanggal 30 Januari 2023 di Lapangan Apel Mapolda Riau Jl. Pattimura Pekanbaru, dihadiri oleh Agus Setiawan

2. Undangan dari DPN Apindo untuk mengulas lebih komperensif terkait FTA dan bagaimana Indonesia mengambil peluang terhadap sejumlah mitra FTA, Apindo bidang Perdagangan bermaksud menyelenggarakan Bedah Buku Perdagangan Bebas dan Perkembangan Ekspor Nasional Peran Produk Nasional di Pasar Impor Negara Mitra FTA bagi para pelaku usaha digelar pada tanggal 2 Februari 2023 di Kantor APINDO Gedung Permata Kuningan Jakarta.

Februari

1. Undangan dari BKKBN Riau perihal Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tenaga Kerja Provinsi Riau dan Rakerda Program Bangga Kencana Tahun 2023 pada tanggal 9 Februari 2023 di Hotel Pangeran Pekanbaru dihadiri oleh Edi Darmawi (Sekretaris DPP APINDO Riau).

2. Undangan dari BKKBN perihal Pancasila dalam Tindakan gerakan semesta berencana mencegah stunting, kekerasan seksual pada anak dan Perempuan, kekerasan dalam rumah tangga serta mengantisipasi bencana dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023 via *Zoom* di ikuti oleh Elvira

3. Undangan Gubernur Riau Pemilihan Kandidat Paritrana Award Provinsi Riau Tahun 2022 pada tanggal 17 Februari 2023 dihadiri Wijatmoko Rah Trisno

4. Undangan dari DPN APINDO perihal Penanda-tanganan MOU APINDO dengan BKKBN serta Diskusi "Sinergi BKKBN dan Dunia Usaha Dalam Upaya Penurunan Prevalensi Stunting di Indonesia" yang akan dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 22 Februari 2023 dihadiri oleh Edi Darmawi

5. DPP APINDO Riau ngopi bareng *Cosulate General Of The Republic of Singapure* pada tanggal 22 Februari 2023 di Istana Kopi King Jl. Riau Pekanbaru

6. Undangan HUT IWAPI ke 48 pada tanggal 24 Februari 2023 di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah Jl. Jendral Sudirman No. 462 Pekanbaru dihadiri oleh Nila, Tifani dan Elvira

Maret

1. Undangan *virtual zoom* dengan topik Sosialisasi Regulasi Konsiliasi dan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI tanggal 2 Maret 2023 di Ikuti Calon Hakim Ad Hoc dari DPP APINDO Riau

2. Undangan calon Hakim Ad Hoc PHI dengan agenda Silaturahmi dan perkenalan dengan Pengurus DPP APINDO Riau pada tanggal 7 Maret 2023 di Sekretariat DPP APINDO Riau Hotel Furaya Pekanbaru dihadiri oleh seluruh calon Hakim Ad Hoc PHI dari Riau

3. Undangan dan *link zoom* dialog dan sosialisasi regulasi konsolidasi HI dan Hakim Ad Hoc PHI dan Kemenaker RI pada tanggal 8 - 9 Maret 2023

4. Undangan dari Universitas Lancang Kuning Fakultas Ekonomi dan Bisnis acara Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning ke 66 pada tanggal 11 Maret 2023 di Nazir Ballroom Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru

5. Pemateri Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga kerja Mikro Tahun 2023 pada tanggal 16 Maret 2023 dihadiri Elwan Jumandri

6. Undangan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja perihal sosialisasi seleksi Hakin Ad Hoc PHI pada tanggal 21 Maret 2023 via *zoom*

April

1. Undangan DPN APINDO dalam acara Buka Puasa Bersama pada tanggal 4 April 2023 Jam 16.30 Wib di Puri Ratna, Hotel Grand Sahid Jaya

2. Mewakili APINDO Riau penyerahan juara III hadiah Kejuaraan Futsal se Riau antar perusahaan dalam rangka May Day 2023 pada tanggal 9 April 2023 dihadiri Wijatmoko Rah Trisno dan Elwan Jumandri

3. Undangan Sosialisasi seleksi calon Hakim Ad Hoc PHI dari Kemenaker pada tanggal 12 April 2023 via zoom di ikuti calon Hakim Ad Hoc unsur Apindo

4. Undangan LKS Tripartit Riau acara penyerahan Sembako kepada Serikat Pekerja/serikat buruh dalam rangka Hari Buruh Internasional *(May Day)* Tahun 2023 pada tanggal 18 April 2023

5. Undangan dari KOREM 031/Wirabima acara syukuran dalam rangka HUT ke 64 KOREM 031/ Wirabima pada tanggal tanggal 18 April 2023 di Balai Serindit Aula Gubernuran Riau

Mei

1. Undangan DPN Apindo acara Sosialisasi Pendaftaran Seleksi Administratif Hakim Ad Hoc PHI tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023 via Zoom Meeting dihadiri calon hakim Ad Hoc usur Apindo

2. Audiensi DPP Apindo Riau dengan Management PHR pada tanggal 15 Mei 2023 di Rumah Makan Sultan Resto Ronggowarsito Pekanbaru dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Edi Darmawi dan Herlan

3. Acara Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc pada tanggal 16 Mei 2023 di Sekretariat DPP Apindo Riau Hotel Furaya dihadiri oleh Calon Hakim Ad Hoc dan Edi Darmawi

4. Silaturahmi DPK APINDO Dumai dengan DPP Apindo Riau pada tanggal 17 Mei 2023 di Teras Kopi Sumatera dihadiri Wijatmoko, Edi Darmawi dan pengurus DPK Dumai

5. Undangan menghadiri Hari HAKIN Nasional pada tanggal 17 Mei 2023 di Hotel Labersa di hadiri oleh Wijatmoko, Elwan Jumandri dan Agus Setiawan

6. Undangan Rapat dengan agenda Finalisasi usulan nama – nama Anggota Dewan Pengupahan Kota Dumai dari unsur Apindo pada tanggal 25 Mei 2023 di Kong Tjie Coffee

7. Undangan dari Sekretariat Daerah Propinsi Riau secara Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Tahun 202 kepada Pelaku Usaha dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Propinsi Riau pada tanggal 31 Mei 2023 di ruang Melati lantai 3 Kantor Gubernur Riau Jl. Sudirman no. 460 Pekanbaru dihadiri Wijatmoko Rah Trisno, Edi Darmawi, Elwan Jumandri, Huiniati, Herlan, Bob Novitriansyah dan Fuady Noor

Juni

1. Undangan Pengukuhan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Propinsi Riau Periode 2022 – 2027 dan Rapat Pimpinan Propinsi (RAPIMNAS) Tahun 2023 pada tanggal 2 Juni 2023 di Balairung Room, Hotel Pangeran Pekanbaru dihadiri oleh Edi Darmawi, Wijatmoko, Agus Setiawan

2. Undangan anggota LKS Tripartit Propinsi Riau dengan agenda peningkatan kapasitas Anggota LKS Tripartit se Propinsi Riau serta Pemahaman UU nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang pada tanggal 6-7 Juni 2023 di Hotel Grand Central Pekanbaru dihadiri oleh Anggota LKS Tripartit Unsur APINDO Riau

3. Undangan dari BKKBN Propinsi Riau perihal Rapat Persiapan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) pada tanggal 9 Juni 2023 di Ruang MPC, Kantor Perwakilan BKKBN Propinsi Riau dihadiri oleh Elvira

4. Undangan dari DPN Apindo perihal Undangan & TOR – Launch Session Digital Wages Accsess pada Tanggal 12 Juni 2023 via Zoom dengan agenda Penandatanganan Perjanjian Kemitraan antara APINDO dan ILO Penjelasan Program *Promoting Responsible Digital Wage Payments in Indonesia* 2023 - 2024

5. Undangan MUNAS XI DPN Apindo dijakarta pada tanggal 14 s/d 15 Juni 2023 dihadiri oleh Edi Darmawi, Wijatmok, Elwan Jumandri, Ediyanus Herman Halim, Muhammad Herwan, Estika

6. Undangan dari Bank Indonesia perihal Undangan Diseminasi Perekonomian Propinsi Riau Terkini Semester I tahun 2023 dan Sosialisasi Implementasi *Local Currency Settlement* (LCS) pada tanggal 27 Juni 2023 di Aula Public Interest Gedung A lantai 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno

Juli

1. Undangan *Coffee Morning* DPP APINDO Riau dengan Management Pertamina Hulu Rokanpada tanggal 14 Juli 2023 di *coffee shop* Hotel Furaya dihadiri oleh Edi Darmawi, Wijatmoko, Budi Agustono, Antonius, Harry Hutagalung dan Perusahaan Migas Anggota Apindo Riau

2. Undangan diskusi public dari ISEI Riau dengan tema "Optimalisasi Peran Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Riau" pada tanggal 18 Juli 2023 di Ruang Serbaguna Lt.3 kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Jl. Jendral Sudirman dihadiri Wijatmoko, Fahrial

3. Undangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau perihal acara Pembentukan Dewan K3 Provinsi Riau dan Pembentukan Forum Tripartit pada tanggal 18 Juli 2023 di Swiss Bell Hotel Pekanbaru dihadiri oleh Edi Darmawi

Agustus

1. Undangan dari Forum CSR Riau perihal Undangan Pembukaan Rakor dan Raker Forum CSR pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 jam 08.00 Wib di Hotel Furaya Pekanbaru dihadiri Wijatmoko, Edi Darmawi, Elwan Jumandri

2. Undangan Pelantikan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahaan Klining Service Indonesia Propinsi Riau (DPP APKLINDO Riau) periode 2023 - 2028 dan Sosialisasi Disnakertrans bersama BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau pada tanggal 3 Agustus 2023 di Hotel Royal Asnof Pekanbaru dihadiri oleh

3. Undangan dari Gubernur Riau perihal acara Apel Peringatan Hari Jadi ke 66 Propinsi Riau Tahun 2023 pada tanggal 9 Agustus 2023 di Halaman Kantor Gubernur Riau Jl. Jendral Sudirman dihadiri oleh Edi Darmawi

4. Kunjungan Kerja UMKM Disabilitas HIDIMU Mandiri ke DPP APINDO Riau pada tanggal 11 Agustus 2023 di Sekretariat Apindo Riau dihadiri Fahrial, Tifany dan Estika

5. Undangan FGD Diversifikasi Ekonomi Daerah Berbasis Ekonomi Hijau pada tanggal 15 Agustus 2023 di Hotel Premiere Pekanbaru dihadiri oleh Edi Darmawi

6. Pertemuan persiapan APINDO UMKM Merdeka (AUM) tanggal 15 Agustus 2023 di Sekretariat Apindo Riau Hotel Furaya Pekanbaru dihadiri Wijatmoko, Edi Darmawi, Fahrial, Estika, Rini Fatriani

7. Undangan dari Gubernur Riau Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke 78 Kemerdekaan RI tahun 2023 pada 17 Agustus 2023 di Halaman Kantor Gubernur Riau dan undangan Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke 78 Kemerdekaan RI tahun 2023 di Halaman Kantor Gubernur Riau dihadiri oleh Edi Darmawi dan Agus Setiawan

8. Undangan dari Sekretariat Daerah Riau Perihal Acara Malam Anugerah Paritrana Award Propinsi Riau Tahun 2023 pada tanggal 31 Agustus 2023 di Hotel Novotel jl. Riau no. 59 Pekanbaru dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno

September

1. Pertemuan Tim Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja di Provinsi Riau pada tanggal 1 September 2023 di Ruang Auditorium Lantai 8, Gedung menara Lancang Kuning Pemerintah Provinsi Riau dihadiri Wijatmoko Rah Trisno

2. Undangan dari Sekretariat Daerah perihal Undangan Konsultasi Publik KLHS RTRW Propinsi Riau pada tanggal 7 September 2023 di Hotel Batiqa Jl. Jendral Sudirman No. 17 Simpang Tiga Pekanbaru dihadiri oleh Edi Darmawi

3. Undangan dari DPN APINDO Jakarta perihal Penguatan Kesekretariatan APINDO pada tanggal 18 dan 19 September 2023 di Hotel Menara Paninsula Jakarta Barat di hadiri oleh Elvira

4. Undangan Acara Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Ahli Perdagangan Ekspor dan Impor Indonesia Propinsi Riau dan Dialog Bisnis pada tanggal 20 September 2023 di Menara Dang Merdu Bank Riau Syariah di hadiri oleh Edi Darmawi

5. Undangan dari DPN APINDO mengenai Pemberlakuan UMP/UMK di masing-masing daerah dimana sekiranya ada perubahan dalam rumusan formula upah minimum yang akan diadakan pada tanggal 22 September 2023 via *zoom* di ikuti oleh Pak Agus Setiawan

6. Undangan perihal Pemantapan Persiapan kegiatan APINDO UMKM Merdeka (AUM) DPP APINDO Riau diadakan pada tanggal 22 September 2023 di Sekretariat Apindo Riau di Hotel Furaya Pekanbaru

7. Undangan Rapat Koordinasi UMK yang akan diadakan pada tanggal 26 September 2023 di Ruang Cendana Hotel Furaya di Pekanbaru dihadiri oleh Wijatmoko, Edi Darmawi, Elwan Jumandri dan seluruh DPK Apindo Riau

8. Undangan dari KADIN Riau perihal undangan menghadiri acara puncak Peringatan HUT ke 55 KADIN pada tanggal 24 September 2023 di Jl. Cut Nyak Dien II (belakang MPP Pekanbaru) dihadiri oleh Edi Darmawi dan Elwan Jumandri

Oktober

1. Undangan Peringatan HUT TNI ke-78 tahun 2023 dan parade & defile dalam rangka Peringatan HUT ke-78 TNI Tahun 2023 pada tanggal 5 Oktober 2023 di halaman Kantor Gubernur Riau dihadiri oleh Edi Darmawi

2. Undangan dari Dinas Kesehatan Propinsi Riau perihal undangan peserta pertemuan kemitraan Dinas Kesehatan, Dinas terkait, Kecamatan, Kelurahan dan Swasta dalam upaya PP ATM di Propinsi Riau (Kota Pekanbaru dan Kota Dumai) pada tanggal 5 - 6 Oktober 2023 di Room Meeting Grand Suka Hotel Jl. Soekarno Hatta Kav. 148 Pekanbaru dihadiri Nurasiah

3. Undangan dari Bank Indonesia perihal Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Riau dan Sosialisasi Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia Terkini yang akan diadakan pada tanggal 17 Oktober 2023 di Aula Public Interest, Gedung A Lt. 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Riau dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno

4. Silaturahmi DPP APINDO Riau dengan Ketua DPP APINDO Sumatera Barat pada tanggal 23 Oktober 2023 di Hotel Pangeran dihadiri Wijatmoko Rah Trisno, Fahrial, Estika dan Rini Fatriani

5. Kunjungan Kerja DPP APINDO Riau ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2023 di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dihadiri Elwan Jumandri dan Tim AUM Riau

6. Undangan Gubernur Riau acara Penganugerahan Riau Investment Award Tahun 2023 pada tanggal 31 Oktober 2023 di Ballroom Prime Park Hotel Pekanbaru dihadiri Kurniadi

7. Undangan dari Dinas Kesehatan Propinsi Riau perihal Rapat Koordinasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) pada tanggal 31 Oktober 2023 di Aula Dinas Kesehatan Propinsi Riau dihadiri oleh Tifany

November

1. Acara *launching*, MoU dan *match up* UMKM Merdeka di Riau, pada tanggal 1 November 2023 di Gedung Daerah Balai Srindit Aula Gubernuran Riau. Hadir pada kegiatan itu Gubernur Riau, Syamsuar, Komite Kerjasama, Bidang UMKM dan Koperasi DPN APINDO, Edric Chandra, Kepala LLDIKTI Wilayah X, Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau, Kepala Cabang BPJS Pekanbaru Kota, Forkompinda Riau, kepala-kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau, jajaran pengurus DPP dan DPK APINDO Riau, Rektor, dosen dan mahasiswa dari Universitas Riau (UNRI), Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska), Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Politeknik Caltex Riau (PCR).

2. Undangan dari Sekdaprov perihal acara pisah sambut Pemerintah Propinsi Riau dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (lama) Bapak DR. Supardi, SH, MH dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (baru) Bapak Akmal Abbas, SH, MH pada tanggal 1 November 2023 di Balai Serindit Aula Gubernuran di hadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Elwan Jumandri

3. Undangan dari Sekretariat Daerah acara Silaturahmi dalam rangka pelepas Tugas Gubernur Riau Bapak Drs. Syamsuar, Msi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 jam 20.00 WIB di Balai Serindit Aula Gubernuran Jl. Diponegoro no. 23 Pekanbaru dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno dan Edi Darmawi

4. Undangan dari DPN APINDO perihal Rapat Koordinasi Upah Minimum 2024 pada tanggal 6 November 2023 via Zoom di ikuti oleh Edi Darmawi dan Agus Setiawan

5. Undangan dari DPK APINDO Dumai mengenai Penyelenggara Muskot DPK APINDO Dumai tahun 2023 dakan pada tanggal 15 November 2023 di Hj Café Jl. Ombak Dumai dihadiri oleh Bukhari dan Moh. Aminullah

6. Undangan dari DPN APINDO perihal Rapat Koordinasi Pasca Diterbitkannya PP 51/2023 yang akan diadakan pada tanggal 15 November 2023 Via Zoom diikuti oleh Agus Setiawan

7. Undangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau acara sosialisasi aturan Upah Minimum tahun 2024 dan pemberdayaan penerapan struktur dan skala upah Perusahaan pada tanggal 15 November 2023 di Hotel Grand Central Pekanbaru dihadiri Dewan Pengupahan dan Tim LKS Tripartit dari unsur APINDO

8. Undangan Dewan Pengupahan Provinsi Riau, Sidang Pembahasan Rekomendasi Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2024 pada tanggal 16 November 2023 di Aula Disnakertrans Riau dihadiri Dewan Pengupahan APINDO Riau

9. Kunjungan kerja DPP APINDO Riau ke Perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper pada tanggal 17 November 2023 di hadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Agus Setiawan dan Elvira

10. kunjungan kerja DPP APINDO Riau ke PT. Arara Abadi pada tanggal 17 November 2023 di hadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Agus Setiawan dan Elvira

11. Silaturahmi DPP APINDO Riau dengan Bapak Yana Patriana, PIsang Kipas Kuantan pada tanggal 17 November 2023 dihadiri Wijatmoko Rah Trisno, Agus Setiawan

12. Undangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau perihal Permohonan Bantuan Narasumber dalam Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri secara Daring pada tanggal 20 November 2023 Via Zoom di ikuti Elwan Jumandri

13. Undangan dari BKKBN Riau perihal undangan rapat Persiapan Pelayanan KB Pencanangan Program Gerai Yansus, KB Perusahaan dan Peringatan Hari Ibu pada tanggal 20 November 2023 di Ruang MPC, Kantor Perrwakilan BKKBN Provisi Riau dihadiri oleh Rini Fatriani

14. Musyawarah Kota DPK APINDO Dumai pada tanggal 21 November 2023 di Hj Coffee Dumai dihadiri Bukhari dan Mohd. Aminullah. Terpilih kembali secara Aklamasi bapak Ruslan sebagai Ketua DPK APINDO Dumai masa bakti 2023 – 2028.

15. Undangan dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Propinsi Riau perihal sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pada tanggal 22 November 2023 di Hotel Grand Jatra Jl. Tengku Zainal Abidin No. 1 Pekanbaru dihadiri oleh Edi Darmawi dan Elwan Jumandri

16. Kunjungan Kerja ke Universitas Riau pada tanggal 27 November 2023 di Rektorat Universitas Riau dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Fahrial, Estika dan Elvira

17. Undangan Dewan Pengupahan Provinsi Riau Pembahasan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2023 di Ruang Aula Disnakertrans Provinsi Riau dihadiri Tim Dewan Pengupahan APINDO Riau.

18. Undangan dari KOREM 031/Wirabima acara penyelenggaraan Komunikasi Sosial dengan komponen masyarakat pada tanggal 28 November 2023 di Aula Makodim 031/Pbr Jl. Ahmad Yani no. 138 Pekanbaru dihadiri oleh Edi Darmawi

19. Undangan dari Sekretariat Daerah Propinsi Riau perihal Undangan Konsultasi Publik KLHS RPJPD Propinsi Riau tahun 2025 – 2045 pada tanggal 28 November 2023 di Hotel Grand Zuri

20. Undangan dari Bank Indonesia perihal Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 dengan tema Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional pada tanggal 29 November 2023 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau di hadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno

21. Kunjungan Bapak Yayan, PT. Coca Cola pada tanggal 29 November 2023 di Sekretariat DPP Apindo Riau dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Fahrial, Estika dan Elvira

22. Kunjungan Kerja ke PT. Bumi Siak Pusako pada tanggal 29 November 2023 di Gedung Surya Dumai Pekanbaru dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Fahrial, Estika dan Elvira

Desember

1. Undangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Riau perihal permintaan Peserta Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan bencana tahun 2023 pada tanggal 4-5 Desember 2023 di Gedung Aula Dinas Kesehatan Propinsi Riau dihadiri oleh Edi Darmawi

2. Pertemuan dengan PT. Astra Agro Lestari pada tanggal 4 Desember 2023 di Sekretariat Apindo Riau dihadiri Wijatmoko Rah Trisno, Elwan Jumandri

3. Kunjungan Kerja DPP APINDO Riau dengan Eka Prima, Ibu Iliyana pada tanggal 5 Desember 2023 di kantor Eka Prima dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Estika, Elvira

4. Kunjungan Kerja DPP APINDO Riau dengan Bank Indonesia Perwakilan Wilayah Riau pada tanggal 6 Desember 2023 di kantor Bank Indonesia Perwakilan Wilayah Riau di Jl. Jendral Sudirman dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Estika, Elvira

5. Undangan dari BKKBN perihal undangan Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan KB di Perusahaan pada tanggal 11 Desember 2023 via zoom diikuti Fahrial

6. Kunjungan DPK APINDO Dumai dan Penyerahan Susunan Kepengurusan DPK APINDO Dumai ke Sekretariat DPP APINDO Riau pada tanggal 11 November 2023 di Hotel Furaya Pekanbaru di hadiri Edi Darmawi, Elvira dan Pengurus DPK APINDO Dumai

7. Pertemuan DPP Apindo Riau dengan Rumah BUMN Kota Pekanbaru pada tanggal 7 Desember 2023 dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno

8. Kunjungan Kerja Rumah BUMN Kota Pekanbaru ke Sekretariat DPP APINDO Riau pada tanggal 8 Desember 2023 dihadiri Wijatmoko Rah Trisno, Estika dan Elvira

9. Narasumber pelatihan Training Soft Skill bagi mahasiswa LP3I Pekanbaru di Kampus Politeknik LP3i Pekanbaru pada tanggal 9 Desember 2023 dihadiri Fahrial

10. Kunjungan Kerja DPP APINDO Riau ke Bank Riau Syariah pada tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Kantor Bank Riau Syariah Menara Dang Merdu Jl. Jendral Sudirman dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Estika dan Elvira

11. Undangan dari Dewan Pengurus Daerah Riau Ikatan Keluarga Alumni LEMHANAS perihal acara Pelantikan Pengurus DPD IKAL LEMHANAS Riau Periode 2021 - 2026 pada tanggal 13 Desember 2023 di Balai Serindit Aula Gubernuran Riau di hadiri oleh Edi Darmawi

12. Undangan dari Politeknik LP3I Pekanbaru Acara Wisuda Politeknik LP3I Pekanbaru tahun ajaran 2022 - 2023 pada tanggal 16 Desember 2023 di Hotel Labersa Pekanbaru sekaligus Penandatanganan MoU antara APINDO Riau dengan LP3I Pekanbaru dihadiri oleh Edi Darmawi, Fahrial

13. Undangan dari DPK APINDO INHIL perihal Musyawarah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 17 Desember 2023 di Aula Harmoni Hotel Tembilahan dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno, Elvira. Terpilih kembali secara Aklamasi Bapak Yusuf Said sebagai Ketua DPK APINDO Indragiri Hilir masa bakti 2023 - 2028

14. Kunjungan Kerja DPP APINDO Riau ke SKK Migas dan Perusahaan KKKS Wilayah Riau pada tanggal 19 Desember 2023 di Ruang Rapat Minyak SKK Migas Perwakilan Sumbagut Jl. Jendral Sudirman dihadiri oleh Wijatmoko Rah Trisno dan TIM AUM Riau

15. Kunjungan Kerja DPP APINDO Riau ke PT. PLN Unit Induk Wlayah Riau dan Kepulauan Riau pada tanggal 20 Desember 2023 di Kantor PLN UPT Pekanbaru dihadiri Wijatmoko Rah Trisno dan Elvira

16. Kunjungan Kerja DPP APINDO Riau ke Universitas Muhammadiyah Riau pada tanggal 20 Desember 2023 di Gedung Rektorat UMRI dihadiri Wijatmoko Rah Trisno dan Tim AUM Riau

17. Kunjungan Kerja DPP APINDO Riau ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau pada tanggal 21 Desember 2023 di Gedung Rektorat UIN SUSKA RIAU dihadiri Wijatmoko Rah Trisno dan Tim AUM Riau

18. Kunjungan Kerja DPP APINDO Riau ke Politeknik Caltex Riau pada tanggal 22 Desember 2023 di Gedung Rektorat PCR Riau dihadiri Wijatmoko Rah Trisno dan Tim AUM Riau

DPP APINDO KEPULAUAN RIAU

Ketua	**: Ir. Cahya**
Sekretaris	**: Salam Jong Tek**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 6 Kabupaten / Kota**

Program Pencegahan *Stunting* dan APINDO UMKM Merdeka DPP APINDO Kepulauan Riau :

1. Program Pencegahan Stunting

Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau Ir. Cahya bersama dengan Deputi Bidang Advokasi, Penggerak, dan Informasi BKKBN pusat, Kepala BKKBN Kepri, Dinkes Batam, dan seluruh kepala Puskesmas di Batam, meluncurkan program pencegahan anak stunting di DPP APINDO Kepri pada 8 September 2023.

Program pencegahan stunting DPP APINDO Kepulauan Riau didukung oleh berbagai pihak dan berkolaborasi untuk memberi manfaat bagi berbagai pihak :

- Saat peluncuran, DPP APINDO Kepulauan Riau menyatakan bahwa 200 anak di bawah 2 (dua) tahun yang berisiko stunting akan dijamin gizinya oleh DPP APINDO Kepulauan Riau selama 6 (enam) bulan ke depan.
- Tingginya pendaftaran oleh para pengusaha anggota APINDO Kepri menjadi orang tua asuh anak-anak berisiko stunting tersebut, selain bantuan dana dan pangan.
- Keterlibatan UMKM disekitar keluarga yang anaknya berisiko stunting. Keluarga yang masuk dalam program ini untuk berbelanja kebutuhan hariannya ke warung-warung terdekat dan DPP APINDO Kepulauan Riau menyediakan kupon atau *voucher* yang dapat ditukarkan dengan bahan makanan yang dibutuhkan, ke warung-warung yang telah ditentukan. Dengan demikian, program pencegahan stunting ini sekaligus akan menimbulkan dampak positif terhadap hidupnya bisnis para pengusaha warung di Provinsi Kepulauan Riau.
- DPP APINDO Kepulauan Riau bekerjasama dengan Kimia Farma untuk menyediakan vitamin yang dibutuhkan ibu hamil agar anak yang dikandungnya tidak berisiko stunting.
- Sebelumnya, di bulan September tahun 2023, DPP APINDO Kepulauan Riau juga sudah meminta kepada seluruh perusahaan anggota APINDO Kepri untuk memberikan jaminan gizi dan vitamin kepada para karyawan dan keluarganya yang hamil.

2. Program APINDO UMKM Merdeka

Program APINDO UMKM Merdeka (AUM) di DPP APINDO Kepulauan Riau diluncurkan pada tanggal 26 September 2023, ditandai dengan penandatanganan MoU dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kepulauan Riau, antara lain Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Universitas Internasional Batam (UIB), Politeknik Negeri Batam, dan Institut Indobaru Nasional Batam. Perguruan tinggi tersebut menyatakan dukungannya dan kesiapan untuk menyertakan para mahasiswa yang akan mengikuti program magang mandiri, untuk ikut serta dalam program AUM DPP APINDO Kepulauan Riau ini. Peluncuran Program AUM Di Kepulauan Riau APINDO Kepri ini dilakukan oleh Ketua APINDO Kota Batam Bapak Dr. Rafki Rasyid yang dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPN APINDO Bapak Eddy Hussy.

Program AUM di DPP APINDO Kepulauan Riau konsisten berproses, dimana padal 17 - 19 Oktober 2023 dilakukan pembekalan terhadap para mentor, DPL, pemilik UMKM dan mahasiswa yang akan terjun mendampingi UMKM di Provinsi Kepri. Pembekalan diberikan oleh pengurus DPP APINDO Lampung sekaligus Regional Corporate Affair Manager PT Coca-Cola Europacific Partners Indonesia, Bapak Yayan Sopian. Pembekalan kemudian dilanjutkan oleh tim Daya Makara Universitas Indonesia yang menyampaikan modul yang aplikatif untuk pendampingan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini Program AUM di DPP APINDO Kepulauan Riau telah memasuki masa pendampingan UMKM oleh para mahasiswa dan akan berakhir sekitar bulan Februari 2024.

Selamat kepada Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau periode 2024 - 2029 :

- Ketua : Stanly Rocky, SH, MH
- Alamat sekretariat : Menara Aria, Office Tower Lt.7, #08-09, Harbour Bay, Jalan Duyung, Kota Batam (29453),
- Email : sekretariat@apindo-kepri.com.

DPP APINDO JAMBI

Ketua	**: John Kennedy**
Sekretaris	**: Alizar**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 4 Kabupaten / Kota**

Kegiatan DPP APINDO Jambi adalah sebagai berikut :

1. *Job Fair*

DPP APINDO Jambi dan Universitas Jambi bekerjasama mengadakan *Job Fair* di Kampus Universitas Jambi pada 15 Desember 2023 dan dikunjungi banyak pencari kerja termasuk dari luar Kota Jambi. *Job Fair* memaparkan kesempatan kerja berikut persyaratan yang diminta.

2. APINDO Peduli

DPP APINDO memberi bantuan sembako kepada keluarga korban banjir akibat curah hujan yang tinggi pada beberapa titik di penghujung November 2023 lalu, sebagai bentuk rasa prihatin DPP APINDO Jambi.

3. Penghijauan Lingkungan

DPP APINDO Jambi sebagai bagian dari masyarakat peduli Karhutla bekerja sama dengan kerjasama Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi menanam pohon pada Oktober 2023, sebagai kegiatan penghijauan pohon pengganti di area bekas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Upah Minimum

Pada rapat perumusan Upah Minimum yang terdiri dari unsur Tripartit, dimana pengusaha diwakili oleh APINDO dan KADINDA, juga ahli dari Universitas telah disepakati besaran Upah Minimum Provinsi Jambi dengan berpedoman sepenuhnya pada PP No.51 Tahun 2023. Untuk Upah Minimum beberapa Kabupaten dan Kota Jambi yang sudah dapat ditetapkan Upah Minimumnya ternyata besaran Upah Minimum masing-masingnya ditingkatkan besarannya didalam Keputusan Gubernur Jambi yakni masing-masingnya

ditambah Lima Puluh Ribu. DPP APINDO Jambi melalui surat kepada Gubernur Jambi tertanggal 4 Desember 2023 yakni Nomor : 063/DPP-APINDO/Jbi/XII/2023. Peningkatan UMK tersebut diminta untuk ditutupi dengan APBD Provinsi Jambi, satu dan lainnya mengingat Keputusan Gubernur tersebut telah mengabaikan PP No.51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sidang Pleno Penetapan UMK Kota Jambi

Sidang Pleno Penetapan UMK Kab. Tanjabtim

Sidang Pleno Penetapan UMK Kab. Muaro Jambi

Sidang Pleno Penetapan UMK Kab. Batanghari

Sidang Pleno Penetapan UMK Kab. Tanjabbar

Sidang Pleno Penetapan UMP Provinsi Jambi

Rapat LKS TRIPARTIT 2023

DPP APINDO BANGKA BELITUNG

Ketua	: Nuradi Wicaksono
Sekretaris	: Basit Sucipto
Dewan Pimpinan Kab/Kota	: 4 Kabupaten / Kota

JANUARI

1. Paritrana Award 2022

Setiap pekerja mendapatkan hak untuk diikutsertakan dalam program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker), dan menjadi kewajiban dari setiap perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya. Bagi setiap perusahaan yang telah menenuhi kewajibannya, BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk penghargaan yang diberi nama "Paritrana Award". Untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima penghargaan tersebut, BPJS Naker melibatkan berbagai unsur sebagai tim penilaian diantaranya ahli kebijakan publik, ahli hukum, ahli ekonomi, dan ahli jaminan sosial. Selain itu, penilaian juga melibatkan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), maupun APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). "Tim penilai ini bekerja sesuai kompetensi di bidang masing-masing untuk menilai secara transparan, akuntabel terhadap perusahaan, apakah melalui observasi langsung, atau wawancara langsung dengan owner perusahaan, maupun pekerjanya. Dari situ akan dilihat apakah ada kemajuan perusahaan dari tahun ke tahun, stagnan, menanjak, atau menurun," kata Sekda Naziarto usai rapat persiapan pelaksanaan, dan sosialisasi penyelenggaraan penghargaan dan sosialisasi Paritrana Award 2022, di Warkop Papa. Sebagai regulator, Sekda Naziarto menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, maupun penghargaan Paritrana Award yang akan dilaksanakan pada Maret dan April 2023 mendatang. Paritrana Award ini juga dikatakannya, bertujuan untuk meningkatkan etos kerja para pekerja, dan menjadi bukti hadirnya pemerintah untuk rakyat.

2. Konferda IV KSPSI Prov. Kep. Bangka Belitung

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Konferda IV dalam rangka pemilihan kader dan memperjuangkan hak pekerja. Ketua SPSI Babel Darusman Aswan mengatakan Konferda adalah amanat konstitusi organisasi setiap pekerja yang diadakan setiap lima tahun sekali dan bukan seremoni saja tapi diwajibkan setiap perda lima tahun masa bakti. Ia menambahkan kegiatan Konferda kedepan tidak hanya sekedar seremoni untuk menghasilkan struktur kepengurusan tapi juga menyelesaikan masalah yang telah lalu. Menurut dia dengan terbentuknya kepengurusan yang baru bisa melakukan upaya yang lebih tajam lagi sehingga KSPSI bisa memberikan manfaat besar terhadap kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan. Ia mengharapkan dukungan pemerintah bisa diimplementasikan dan dilaksanakan secara bersama, tidak bisa secara sepihak. "Ada APINDO, Pemerintah dan Serikat Pekerja. Dengan tiga tripartit ini mampu mengatasi kesulitan," katanya.

3. MUSDA BPD PHRI Provinsi Kep. Babel

Pangkalpinang - Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nuradi Wicaksono, S.H., M.B.A., mengadiri acara Musyawarah Daerah (Musda) Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bangka Belitung (BPD PHRI Babel) periode 2022 - 2027 bertempat di Hotel Manunggal, Pangkalpinang, Selasa (31/01/2023). Musyawarah Daerah (Musda) Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bangka Belitung (BPD PHRI Babel) periode 2022 - 2027 dihadiri oleh Ketua Umum PHRI pusat Hariyadi Sukamdani, serta para seluruh pengusaha perhotelan dan rumah makan yang ada di Babel.

FEBRUARI

1. Menghadiri Gathering BPD ABUJAPI Provinsi Kep. Babel

Bangka Tengah - Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nuradi Wicaksono, S.H., M.B.A., menghadiri undangan Gathering BPD ABUJAPI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dilaksankaan dalam rangka HUT

ABUJAPI ke -17. Gathering yang bertepatan dengan hari Sabtu ini dihadiri oleh ketua umum beserta jajaran BPD ABUJAPI, Ditbinmas POLDA Kep. Babel dan anggota-anggota satpam.

APRIL

1. Silahturahmi & Audiensi

Pangkalpinang - Kehadiran Nuradi wicaksono, S.H., M.B.A, selaku ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan para pengurus disambut baik oleh PJ Gubernur Bangka Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu pada hari Jum'at (14/04/2023) di kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silahturahmi dan audiensi ini yaitu dalam rangka sinergisitas pengusaha, pekerja dan pemerintah guna terciptanya harmonisasi dalam hubungan industrial.

2. Penutupan Futsal Competition Dalam Rangka May Day 2023

Disnaker Pemprov Babel di Kota Pangkalpinang menyelenggarakan Futsal Competition dalam rangka menyambut Hari Buruh Nasional tahun 2023. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Babel Naziarto membuka secara resmi pelaksanaan Futsal Kompetisi, Happy May Day Tahun 2023 berlokasi di Wakawaka Futsal Pangkalpinang, mulai Rabu 26 April 2023. Acara turut dihadiri Kadisnaker Babel Sunardi, Ketua SPSI Babel Darusman A dan Senior Manager Teknik PLN Babel Moses Allo.

MEI

1. Peringatan Hari Buruh Internasional

Pangkalpinang - Ribuan buruh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memadati Wihelmina Park atau Taman Sari Kota Pangkalpinang, Senin (1/5/2023). Ribuan orang tersebut berbondong-bondong mendatangi titik kumpul di kawasan itu untuk melakukan aksi orasi dalam rangka peringatan Hari Buruh atau May Day 2023. Tak ayal, aksi orasi tersebut disambut baik oleh Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil. Di mana Maulan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemui ribuan massa aksi dari elemen buruh tersebut. "Saya ingin Bangka Belitung ini bangkit. Ayo buang sifat iri dengki, mari kita bersatu untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Saya bukan siapa-siapa, jadi saya merasakan apa yang bapak ibu rasakan," ungkap Molen sapaan akrab Wali Kota tersebut. Nuradi Wicaksono, S.H., M.B.A., selaku Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga turut hadir di Wihelmina Park untuk memperingati Hari Buruh Internasional tersebut.

2. Silahturahmi Nasional Jelang Munas Apindo XI Tahun 2023

Jakarta - Dengan akan dilaksanakannya kegiatan MUNAS XI, seluruh ketua DPP APINDO diundang untuk menghadiri kegiatan makan siang bersama sekaligus koordinasi dalam rangka persiapan MUNAS XI. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Fairmont Jakarta Selatan (31/05/2023). Agenda lainnya yanitu para ketua DPP APINDO silahturahmi dengan Menaker RI di kantor DPN APINDO.

JUNI

1. Launching Kepmenaker No. 88 Tahun 2023

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 serta Penandatanganan Deklarasi Triartit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Tempat Kerja. "Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI hadir untuk melindungi Pekerja dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditempat kerja yang pengaturannya diatur dalam Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023" ujar Menaker. Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nuradi Wicaksono, S.H., M.B.A., mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 serta Penandatanganan Deklarasi Tripartit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Ida melanjutkan, keberhasilan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja dapat terwujud apabila adanya komitmen dan persepsi yang sama dari pelaku Hubungan Industrial. Untuk itu pada momen sosialisasi Kepmenaker No.88 Tahun 2023 ini, diselenggarakan juga Penandatanganan Deklarasi Tripartit tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Dalam deklarasi tersebut pihak yang bertandatangan diantaranya Ketua Apindo, Ketua Kadin, Para Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Menteri Ketenagakerjaan sebagai pihak pemerintah.

2. MUNAS XI DPP APINDO

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kembali menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-11 pada tanggal 14 dan 15 Juni 2023 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. MUNAS yang bertemakan "Pengusaha Bersatu, Indonesia Maju" ini menetapkan Shinta

W Kamdani sebagai Ketua Umum DPN APINDO periode 2023-2028 secara aklamasi. Penetapan Shinta W Kamdani sebagai Ketua Umum APINDO ini juga menjadikan ia sebagai ketua perempuan pertama di organisasi yang sudah berdiri selama 71 tahun. "Saya merasa terhormat dengan terpilih sebagai ketua umum perempuan pertama di organisasi yang sudah berusia 71 tahun ini. Amanah ini bagi saya adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar," ujar Shinta. Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum APINDO periode 2018-2023 juga memiliki harapan atas terpilihnya Shinta melihat program kerja yang diusung Shinta sejalan dengan konteks nasional dan memiliki potensi membawa APINDO berperan lebih besar lagi. Selain menetapkan Shinta W Kamdani sebagai Ketua Umum yang baru, MUNAS XI APINDO juga menetapkan Sofjan Wanandi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan periode 2023-2028. Munas XI APINDO juga menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah. APINDO memandang kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam 8 (delapan) aspek sebagai hal yang penting untuk mencapai kemajuan Indonesia.

JULI

1. Pengukuhan Pengurus DPN APINDO 2023 - 2028

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyelenggarakan pengukuhan pengurus masa bakti 2023-2028, yang digelar 31 Juli 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta. Pengukuhan adalah untuk menindaklanjuti hasil keputusan Musyawarah Nasional XI pada tanggal 14 dan 15 Juni 2023 lalu. Pengukuhan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Kepala BKKBN, Dewan Pertimbangan Presiden, duta-duta besar negara sahabat, kepala daerah, serta lebih dari seribu pengusaha dari beragam sektor. Pengurus APINDO masa bakti 2023 – 2028 ini menandai era baru APINDO untuk melanjutkan program kerja kepengurusan APINDO sebelumnya. Dipimpin oleh Shinta W. Kamdani selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, generasi baru APINDO yang mengusung semangat inklusivitas ini memadukan komposisi kalangan pengusaha serta profesional yang diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal APINDO sebagai organisasi yang sudah berdiri sejak 71 tahun lalu. Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani yang terpilih secara aklamasi dalam Munas XI APINDO Juni lalu mengatakan, APINDO sebagai wadah pengusaha berkomitmen untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat program-program unggulan. "Kita memasuki era baru kepemimpinan APINDO, yang akan menjadi tonggak sejarah transformasi APINDO dengan menghasilkan sejumlah program unggulan sebagai upaya kami mengakselerasi pemulihan ekonomi untuk pembangunan nasional," ujar Shinta. "Selain bersinergi secara pentahelix dengan pemerintah, akademisi, badan/pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, serta media, kami harapkan kepengurusan baru yang inklusif ini pun akan semakin memperkuat relasi APINDO dengan konfederasi, demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan berlandaskan spirit kolaboratif." Acara pengukuhan pengurus baru ini juga sekaligus dalam rangka meluncurkan sejumlah program kerja unggulan, secara khusus program pengentasan stunting yakni Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting (KIPAS Stunting) dan UMKM Merdeka. Ini merupakan komitmen nyata APINDO untuk tidak hanya berfokus mengatasi tantangan multi-dimensional yang dihadapi pelaku usaha dalam rangka mendorong percepatan transformasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga untuk menyiapkan generasi emas tanah air yang unggul agar siap menjadi tenaga kerja handal di masa yang akan datang. Program UMKM Merdeka adalah kontribusi APINDO untuk membekali lulusan perguruan tinggi dengan kemampuan kerja dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan mahasiswa, serta mensinergikannya dengan kebutuhan UMKM akan pendampingan usaha dengan tujuan scaling-up UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

AGUSTUS

1. Rapat Pengurus Lengkap - 1

Dengan telah selesai nya penyusunan struktur pengurus DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Bakti 2022-2027 dan perlunya pembahasan dan penetapan program - program kerja kebidangan, maka Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengagendakan RPL1. Agenda pembahasan pada RPL - 1 antara lain pembahasan DPK Bangka Induk & Belitung Timur, pembahasan persiapan Rakerprov DPP APINDO Kep. Bangka Belitung tahun 2023, pembahasan kepersonaliaan unsur APINDO (Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, dan Pemagangan).

SEPTEMBER

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kadin Babel, Inkindo Prov. Kep. Babel, Unmuh Babel, DPP APINDO Prov. Kep. Babel Dan Unper

Atas dasar bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing - masing maka pada hari Kamis (07/09/2023) di Bangka City Hotel telah di tandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya antara Kadin Bangka Belitung, Inkindo Provinsi Bangka Belitung, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Universitas Pertiba. Selain itu, dilaksanakan pula penandatangan MoU antara DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Universitas Pertiba tentang pelaksanaan PRogram APINDO UMKM Merdeka.

OKTOBER

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Antara DPP APINDO Prov. Kep. Babel Dengan Universitas Bangka Belitung Tentang APINDO UMKM Merdeka

Kamis (26/10/2023) di Soll Marina Hotel Bangka Tengah telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman & perjanjian kerja sama antara DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Universitas Bangka Belitung tentang APINDO UMKM Merdeka. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Nuradi Wicaksono, S. H., M. B. A., selaku Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prof. Dr. Ibrahim, M. Si, selaku rektor UNiversitas Bangka Belitung. Kehadiran Ketua Dewan Pembina dan pengurus DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta para dosen Universitas Bangka Belitung meningkatkan semangat dalam kegiatan tersebut. Penandatanganan ini menjadi langkah awal DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Universitas Bangka Belitung dalam menjalankan Program APINDO UMKM Merdeka yang akan dilaksanakan pada semester ganjil bersama mahasiswa/mahasiwi Universitas Bangka Belitung ini. “Melalui program ini para mahasiswa/mahasiswi berkesempatan melakukan pendampingan di UMKM yang masih sangat terbuka menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menumbuhkan minat kewirausahaan dalam diri para mahasiswa/mahasiswi.” Ungkap Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nuradi Wicaksono, S. H., M. B. A.

NOVEMBER

1. Rapat Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024

Jum’at, (17/11/2023), bertempat di ruang pertemuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nuradi Wicaksono, S. H., M. B. A., selaku Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut hadir dalam kegiatan penetapan upah minimum provinsi tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elius Gani SP.

DESEMBER

1. Pertemuan FKLPI-D Prov. Kep. Bangka Belitung

Dengan akan berakhirnya masa tugas kepengurusan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) Balai Pelatihan Vokasi yang merupakan kolaborasi BPVP Belitung dengan takeholder, maka diadakannya pertemuan untuk membahas rencana maupun program kerja dan usulan kepengurusan baru. Salah satu susunan acara dalam kegiatan yaitu pemilihan kepengurusan FKLPID Periode 2024 - 2027. Dalam hasil keputusan Fajar Kawolu lah yang terpilih menjadi Ketua FKLPID Periode 2024 - 2027.

DPP APINDO LAMPUNG

Ketua	**: Ary Meizari Alfian, S.E., M.B.A.**
Sekretaris	**: Yanuar Irawan**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 12 Kabupaten / Kota**

KEGIATAN INTERNAL

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1.	02-01-2023	Rapat bersama Pengurus dalam rangka pembahasan persiapan pembuatan Laporan Kegiatan Tahun 2022 bagi Pengurus DPP dan DPK APINDO Lampung	Kantor Sekretariat DPP APINDO Lampung
2.	04-01-2023	Mengundang Mahasiswa Peserta Program Magang UMKM Merdeka Bacth II Tahun 2022, dalam rangka Kegiatan Monthly Review Program Magang UMKM Merdeka Bacth II Tahun 2022	Kampus IIB Darmajaya
3.	09-01-2023	Rapat bersama Tim UMKM Merdeka dalam rangka kunjungan ke LLDIKTI Wilayah II Palembang dengan agenda "Persentasi Program Magang UMKM Merdeka", dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023	Kantor Sekretariat DPP APINDO Lampung
4.	13-01-2023	Menerima kunjungan Ketua Bidang UMKM DPN APINDO Bapak Ronald Walla, dalam rangka Silaturahmi dan Ramah Tamah	Cafe Rindu Alam dan Kantor Sekretariat DPP APINDO Lampung
5.	18-01-2023	Manfaat dan Kegunaan BLOCKCHAIN untuk Dunia Usaha dengan Tema "Pemanfaatan Blockchain untuk Bisnis, peserta Pengurus dan Anggota APINDO Lampung	Zoom Meeting dari DPN APINDO
6.	20-01-2023	Menerima Kunjungan TIM LLDIKTI Wilayah II Palembang dalam rangka Studi Tiru untuk Pemantapan Pelaksanaan Program UMKM Merdeka yang diinisiasi oleh DPP APINDO Lampung dan terkait Pelaksanaan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Program UMKM Merdeka	Kantor Sekretariat DPP APINDO Lampung
7.	30-01-2023	Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema "Keterampilan Digital dalam Industri Manufaktur dab Industri 4.0"	Zoom Meeting dari DPN APINDO
8.	01-02-2023	"Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke 71"	Kantor Sekretariat DPP APINDO Lampung
9.	02-02-2023	BEDAH BUKU Berjudul "Perdagangan Bebas dan Perkembangan Ekspor Nasional" : Peran Produk Nasional di Pasar Impor Negara Mitra FTA	Zoom Meeting dari DPN APINDO
10.	13-02-2023	Launching APINDO Business & Industry Learning Center (ABILEC), dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi, membangun "The Best Industry & Business Way"	Zoom Meeting dari DPN APINDO
11.	22-02-2023	Kegiatan DPN APINDO bersama dengan BKKBN Dalam Upaya Pravalensi Stunting di Indonesia dan "Penandatanganan MOU APINDO dengan BKKBN serta Diskusi "Sinergi BKKBN dan Dunia Usaha Dalam Upaya Penurunan Prevalensi Stunting Di Indonesia"	Zoom Meeting dari DPN APINDO
12.	23-02-2023	Grand Launching LSP HII & LSP MSDM APINDO serta Members Gathering High Level Up Skill & Update, dalam rangka terbitnya SK Lisensi Lembaga Sertifikasi Manajemen Sumber Daya Manusia (LSP MSDM APINDO) No.: KEP. 0804/BNSP/IV/2022 tertanggal 18 April 2022 dan SK Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Hubungan Industrial Indonesia (LSP HII APINDO) No.KEP.2364/BNSP/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 yang kemudian dilanjutkan uji witness dalam beberapa waktu yang lalu, maka saat ini APINDO telah memiliki 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Profesi yang sah dari BNSP	Zoom Meeting dari DPN APINDO
13.	02-03-2023	"Peran Higiene Industri Dalam Peraturan Perundangan Untuk Pencegahan Penyakit Akibat Kerja" melalui Media Daring Online	Media Zoom dari DPN APINDO
14.	01-02-2023	"Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke 71"	Kantor Sekretariat DPP APINDO Lampung

15.	04-04-2023	Pelatihan Magang UMKM Merdeka Batch 3 di Gedung Universitas Islam Negeri (UIN), oleh Mahasiswa dan Tim MBKM	Kampus UIN Lampung
16.	05-04-2023	Penutupan Pelatihan UMKM Merdeka Batch 3 dilaksanakan di AULA IIB Darmajaya	Kampus IIB DARMAJAYA
17.	13-05-2023	HALAL BI HALAL APINDO Lampung Tahun 2023 dan APRESIASI APINDO Lampung	Hotel Horison Lampung
18.	16-05-2023	Seminar Sosialisasi Invensi Layak Komersialisasi dari Riset GRS BPDPKS	Media Zoom dari DPN APINDO
19.	20-05-2023	Kunjungan dari Universitas Malahayati, terkait "Evaluasi Kurikulum S2 Akuntansi"	
20.	31-05-2023	Menghadiri undangan dari DPN APINDO dalam rangka Persiapan Munas ke XI dan Silaturahmi dengan Menteri Tenaga Kerja RI	House of Yuen, Hotel Fairmont Lantai 3 Jakarta Selatan
21.	14-06-2023	Pertemuan Khusus menjelang SIDANG MUNAS ke XI antara seluruh Ketua DPP APINDO dengan Pimpinan DPN APINDO	Hotel Luwansa Jakarta
22.	15-06-2023	Pelaksanaan SIDANG MUNAS ke XI antara seluruh Ketua DPP APINDO dengan Pimpinan DPN APINDO	Hotel Luwansa Jakarta
23.	31-07-2023	Menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Ketua Umum APINDO Periode 2023 - 2028	Hotel Indonesia Jakarta
24.	07-09-2023	Dengan akan dimulainya pemberlakuan UMP/UMK 2024 di masing-masing daerah,dimana sekiranya akan ada perubahan dalam rumusan formula upah minimum, untuk membahas hal tersebut agar memiliki pandangan/ policy yang sama di Dewan Pengupahan	Zoom Meeting dari DPN APINDO
25.	22-09-2023	"Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau", Tujuan dari PRPL adalah membantu Karyawan/Karyawati yang akan menempuh pendidikan S1 dan S2 dengan Kuliah 50% tatap muka di akhir pekan (Jum'at – Sabtu) dan 50% melalui online, dengan masa pendidikan 1 tahun.	Ruang Rapat Lantai 1 Gedung Rektort IIB Darmajaya
26.	05-10-2023	DPP APINDO Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menyelenggarakan "PEKAN RAYA LAMPUNG 2023"	PKOR Way Halim – Bandar Lampung
27.	02-11-2023	Menghadiri Member's Gathering "Sosialisasi Pengisian Norma Ketenagakerjaan - Norma 100"	Media Zoom dari DPN APINDO
28.	06-11-2023	Dalam rangka "Penyusunan strategi UMP/UMK, Memahami 2 jenis Formula Pengupahan dan Strategi advokasi penetapan besaran Angka Alpha"	Media Zoom dari DPN APINDO
29.	20-11-2023	APINDO dalam rangka Rapat Koordinasi Pengusaha Mengajar, guna meningkatkan Kompetensi yang link and match dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), serta menghasilkan SDM yang berkompetensi dan berkualitas sebelum masuk dalam dunia kerja	Media Zoom dari DPN APINDO
30.	22-11-2023	"Sharing Knowledge dan Pengalaman Berwirausaha", DPN APINDO meminta: 1. Data Pengusaha yang berminat turut mengajar / sharing pengalaman sebanyak 10 orang per DPP APINDO, dan 2. Indentifikasi rencana tujuan sosialisasi / sharing berapa SMU/ SMK/ MA dan Perguruan Tinggi	Media Zoom dari DPN APINDO
31.	11-12-2023	Dalam rangka "DIALOG CAPRES – APINDO", dengan 3 (Tiga) calon Calon Presiden (Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo), Calon Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir	Menara Bank Mega Jakarta dan Media Zoom dari DPN APINDO

KEGIATAN UMKM BINAAN APINDO

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1.	04-01-2023	Kegiatan Monthly Review Program Magang UMKM Merdeka Bacth II Tahun 2022	Kampus IIB Darmajaya
2.	13-01-2023	Menerima silaturahmi Ketua Bidang UMKM DPN APINDO Bapak Ronald Walla, dalam rangka Silaturahmi dan Ramah Tamah	Cafe Rindu Alam dan Kantor Sekretariat DPP APINDO Lampung
3.	20-01-2023	Menerima kunjungan ke 2 TIM LLDIKTI Wilayah II Palembang dalam rangka Studi Tiru untuk Pemantapan Pelaksanaan Program UMKM Merdeka terkait Pelaksanaan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Program UMKM Merdeka	Kantor Sekretariat DPP APINDO Lampung
4.	28-03-2023	Pemaparan Program UMKM MBKM APINDO dihadapan Gubernur Provindsi Lampung beserta Jajarannya	Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
5.	04-04-2023	Pelatihan Magang UMKM Merdeka Batch 3	Kampus Universitas Islam Negeri Lampung
6.	05-04-2023	Penutupan Pelatihan UMKM Merdeka Batch 3 dilaksanakan di AULA IIB Darmajaya	Kampus IIB Darmajaya

Diskusi Program APINDO UMKM Merdeka Bersama DPN

Sosialisasi Program AUM ke Politeknik Negeri Lampung

Sosialisasi Program AUM Bersama UMKM Binaan

Monthly Review Laporan Mahasiswa Program AUM

MoU APINDO Lampung dan *Kickoff* Program AUM Batch 3

Sosialisasi Program AUM ke UBL

DPP APINDO SUMATERA SELATAN

Ketua	**: Sumarjono Saragih**
Sekretaris	**: Achmad Faisal**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 8 Kabupaten / Kota**

Beberapa kegiatan penting DPP APINDO Sumatera Selatan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. APINDO Mendukung UMKM

1.1 Pertemuan dengan L2 Dikti membahas acara UMKM Merdeka

Pertemuan DPP APINDO Sumsel di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) membahas acara UMKM Merdeka.

1.2 Sosialisasi UMKM Merdeka di Universitas MDP Palembang

1.3 *Monthy Review* UMKM Merdeka dengan Ketua L2 Dikti

1.4 *Graduation* UMKM Merdeka *Batch* 1 dan *Launching Batch* 2

DPP APINDO menghadiri Pembukaan dan Penghargaan UMKM Merdeka *Batch* 1 dan *Launching Batch* 2 di Palembang Indah Mall.

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)

Penandatanganan MoU Dengan Telkom Sumsel

DPP APINDO Sumsel bersama GM Telkom Sumsel melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait UMKM Merdeka.

3. Dialog Bisnis

Pertemuan/dialog bisnis dengan ILO di Bangkok mengenai *Trade, Investment and Decent Work*.

4. APINDO Bagian Tim Paritrana Award 2023

DPP APINDO Sumsel menjadi bagian dalam Tim Panitia PARITRANA Award 2023

5. APINDO Mendukung Program Perkebunan Bersih Narkoba

DPP APINDO Sumsel berpartisipasi dalam kegiatan BNN dalam Program P4GN pada kegiatan Penyuluhan dan Tes Urine bersama GAPKI Sumsel Menuju Perkebunan Bersinar di Kantor Sekretariat DPP APINDO Sumsel.

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) APINDO di Sumatera Selatan :

1. DPK Kota Palembang
2. DPK Kota Prabumulih
3. DPK Kabupaten Banyuasin
4. DPK Kabupaten Musi Banyuasin
5. DPK Kabupaten Ogan Komering Ilir
6. DPK Kabupaten Muara Enim
7. DPK Kabupaten Musi Rawas
8. DPK Kabupaten Musi Rawas Utara

PERUSAHAAN ANGGOTA DPP APINDO SUMATERA SELATAN

No.	Nama Perusahaan
1	PT Aburahmi
2	PT Agro Palindo Sakti
3	PT Andira Agro
4	PT Banyu Kahuripan Indonesia
5	PT Berkat Sawit Sejati
6	PT Bina Sains Cemerlang (MINAMAS)
7	PT Buluh Cawang Plantation
8	PT Bumi Sawindo Permai
9	PT Cipta Futura
10	PT Dendymaker Indahlestari
11	PT Golden Blossom Sumatera
12	PT Gunung Meraksa Jaya
13	PT Guthrie Pecconina Indonesia
14	PT Hanuraba Sawit Kencana
15	PT Hindoli
16	PT Kelantan Sakti (Greenco)
17	PT Laras Astra Kartika
18	PT Mahkota Andalan Sawit
19	PT Mandiri Utama Jaya
20	PT Mentari Subur Abadi
21	PT Musi Banyuasin Indah
22	PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia
23	PT Perkebunan Minanga Ogan
24	PT Perkebunan Mitra Ogan
25	PT Perkebunan Nusantara VII
26	PT Pinago Utama
27	PT PP London Sumatera Indonesia Tbk
28	PT Proteksindo Utama Mulia
29	PT Rambang Agro Jaya
30	PT Roempoen Enam Bersaudara
31	PT Sampoerna Agro Tbk
32	PT Sawit Mas Sejahtera (Sinar Mas Group)
33	PT Sentosa Mulia Bahagia
34	PT Sinar Sasongko
35	PT Surya Bumi Agro Langgeng
36	PT Swadaya IndoPalma

No.	Nama Perusahaan
37	PT Tania Selatan
38	Wana Karya Mulia Kahuripan
39	Waimusi Agroindah
40	PT Pinang Witmas Sejati
41	PT Tanjung Enim Lestari
42	PT Bumi Rambang Kramajaya
43	PT Star Solusi Indonesia
44	PT Sinarbaru Wijaya Perkasa
45	PT Musi Hutan Persada
46	PT Interbis Sejahtera Food Industry
47	PT Inti Bumi Mas
48	PT Kesuma Maju Sejahtera
49	PT Lubuk Lancang Kuning
50	Paguyuban Pedagang Pasar Kuto PLG
51	PT Roesli Taher
52	CV Sinar Subur Abadi
53	PT Central Proteinaprima
54	PT Berlian Maju Motor
55	PT Studio Kreasindo
56	PT Dexa Medica
57	PT Inertia Utama
58	PT Sawit Agro Lestari
59	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
60	PT Hijau Lestari Raya Fibreboard
61	PT Ciputra Plantation
62	PT Cahaya Murni Sriwindo
63	PT Citra Sembawa
64	Politeknik Darussalam
65	CV Berjuang
66	PT Bumi Andalas Permai
67	PT Bintang Sriwijaya
68	PT Pamapersada Nusantara
69	PT Ginting Jaya Energi
70	PT Berjuang Sukses Service
71	PT Taman Mandiri (Arista Hotel)

DPP APINDO DKI JAKARTA

Ketua	**: Solihin**
Sekretaris	**: Prayudi Yoedodarmo**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 5 Kabupaten / Kota**

I. Kondisi Perekonomian Jakarta tahun 2023 dan Perkiraan di tahun 2024

A. Kondisi Perekonomian Jakarta Tahun 2023

Perekonomian Jakarta secara tahunan pada triwulan III-2023 tumbuh sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan ini ditopang kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi proyek strategis baik pemerintah maupun swasta. Pertumbuhan ekonomi tersebut masih solid meskipun pada triwulan II-2023 tumbuh 5,13 persen dan triwulan I-2023 tumbuh 4,95.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik dan berdaya tahan. Pada triwulan III-2023, pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 4,94 persen. Angka itu melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,17 persen yang ditopang permintaan domestik.

Inflasi tahunan Jakarta pada Oktober sebesar 2,08 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,56 persen tekanan inflasi bersumber dari kelompok makanan seiring dengan kenaikan harga beras dan daging ayam ras, serta kenaikan harga rokok. Namun, inflasi terjaga karena hasil konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah.

Memasuki triwulan IV 2023, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan masih akan tetap tumbuh tinggi meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh melambatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian perekonomian global. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang masih cukup baik diperkirakan ditopang oleh baiknya kinerja investasi, konsumsi Pemerintah, yang masing-masing didorong oleh akselerasi penyelesaian proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta, penyerapan belanja Pemerintah pada akhir tahun, serta peningkatan aktivitas jelang pemilu 2024.

B. Perkiraan Perekonomian Jakarta di tahun 2024

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diprakirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,6% (yoy) sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik dan masih baiknya permintaan eksternal. Meningkatnya perekonomian domestik didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi serta masih baiknya permintaan eksternal sejalan dengan perbaikan ekonomi negara-negara ASEAN dan Timur Tengah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh meningkatnya 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu berlanjutnya tensi geopolitik, tertahannya pemulihan ekonomi Tiongkok, dan keberlanjutan stance moneter ketat AS.

Pada 2024, inflasi Jakarta juga diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah sebesar 2,5±1% (yoy). Perkiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya El-Nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pertumbuhan perekonomian Jakarta tahun 2024 tumbuh didorong mobilitas warga, aktivitas pariwisata, dan berbagai proyek infrastruktur strategis. Namun, prospek dan laju pemulihan ekonomi Jakarta masih dibayangi tingginya risiko global dan domestik. Mulai dari masih berlanjutnya ketegangan geopolitik, berlanjutnya kenaikan suku bunga, dan perlambatan global dan tertahannya perekonomian China.

Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain, menjaga daya beli dan keberlangsungan konsumsi rumah tangga selama Natal dan Tahun Baru, serta pemilu, akselerasi realisasi belanja pemerintah, termasuk peningkatan elektronifikasi, pelaksanaan proyek strategis sesuai rencana, perbaikan iklim investasi, dan promosi investasi, digitalisasi UMKM untuk ekonomi lebih inklusif, dan mengoptimalkan sektor utama dan mengembangkan sektor potensial untuk pertumbuhan ekonomi. *(Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, BPS Provinsi DKI Jakarta)*.

II. Kegiatan DPP APINDO DKI Jakarta tahun 2023

A. Laporan Kegiatan

a) Kepengurusan Baru DPP APINDO DKI Jakarta periode 2022 - 2027, pada bulan Februari 2023 diadakan rapat koordinasi dan konsolidasi kepengurusan yang baru serta menyusun rencana

program. Selain itu kami juga mengadakan audiensi memperkenalkan pengurus baru kepada Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan, serta dengan Kadisnakertransgi Provinsi DKI Jakarta.

b) Perayaan *Mayday* 2023. Sesuai kesepakatan dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Trirpartit, Ketua Panitia Perayaan *Mayday* dipilih secara bergilir. Di tahun 2023, DPP APINDO DKI mendapatkan giliran sebagai Ketua Panitia. Pada perayaan *Mayday* ini, di Provinsi DKI Jakarta ada kegiatan pertandingan futsal yang digabungkan dengan kegiatan *Mayday* Nasional oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Secara umum, dalam *review* kegiatan di rapat LKS Tripartit, pelaksanaan *Mayday* 2023 berjalan baik dan semakin mendekatkan hubungan dan komunikasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Perayaan Mayday juga dirayakan juga di 5 wilayah kota Jakarta, di mana DPK APINDO di 5 wilayah tersebut juga ikut aktif berpartisipasi membantu pelaksanaan perayaannya.

c) APINDO UMKM MERDEKA. Merupakan program DPN APINDO yang akan diimplementasikan di DKI Jakarta. Kami sangat antusias melaksanakan program ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang sangat signifikan. Persiapan yang dilakukan adalah:
- pendekatan kepada para pemangku kepentingan, seperti Pemda DKI Jakarta melalui Asisten Gubernur Bidang Perekonomian dan Keuangan, asosiasi terkait, Perguruan Tinggi, BPJSTK dan tentu saja dengan UMKM.
- menghadiri undangan Pemda DKI Jakarta dalam acara Kolaborasi Kegiatan Expo TKM Merdeka pada Senin, 9 Oktober 2023 di Kantor Pos Bloc Pasar Baru, Jakarta Pusat.
- mengadakan seleksi UMKM yang berasal dari binaan Disnakertransgi/Jakpreuneur, dan binaan DPP APINDO DKI Jakarta;
- menandatangani MOU dengan Mitra Perguruan Tinggi dan BPJSTK (untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak lain yang terlibat, dengan biaya yang sangat terjangkau);
- melakukan seleksi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, melalui aplikasi MSIB dari Kementerian Pendidikan Nasional, di bawah koordinasi DPN APINDO;

d) Undang-undang Cipta Kerja No.6, tahun 2023. UUCK No.11/2020, kemudian diganti dengan Perpu No.2/2022 dan terakhir Perpu tersebut ditetapkan dengan UU No.6/2023. UU ini belum dapat diterima oleh serikat pekerja/buruh, yang ditunjukkan dalam berbagai unjuk rasa besar yang sempat mengganggu kegiatan usaha dan masyarakat. Selain itu implementasinya dalam peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah) belum ada revisinya. DPP APINDO DKI menyelenggarakan kegiatan seminar membahas *issue* ini dan membagi undangan sosialisasi dari Kemenaker maupun Disnakertrans kepada perusahaan anggota;

e) Rapat Kerja dan Koordinasi Provinsi (Rakerkonprov) 2023. Diselenggarakan pada hari Kamis, 9 November 2023 di hotel Aryaduta Jakarta, yang didahului dengan Members' Gathering berupa Seminar Tentang Pengupahan, dengan pembicara Pak Darwoto (Deppenas) dan Kakanwil BPJSTK Jakarta, dihadiri oleh Kadisnaketransgi dan Bapak Antoni Hilman dari DPN.

f) Musyawarah Kota (MUSKOT) 2023. Mencakup 4 DPK yaitu DPK Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. DPK Jakarta Timur sudah melakukan Muskot pada tahun 2022. Dalam proses pemilihan berhasil memilih Ketua baru untuk DPK Jakarta Pusat, Barat dan Utara, selain itu juga muncul wajah-wajah muda di kepengurusan di 4 DPK tersebut.

g) PT LSP MSDM APINDO JAYA. Sebagai badan usaha LSP Manajemen Sumber Daya Manusia, melalui kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi, bertujuan untuk mendukung kegiatan DPP APINDO DKI Jakarta. Selama tahun 2023 telah memberikan pelatihan dan pengujian kepada 475 asesi dari target 500 asesi, untuk skema Staf, Supervisor dan Manager. Kami menargetkan peningkatan peserta di tahun 2024 agar kompetensi para pelaku manajemen SDM dapat terus disebarkan seluas-luasnya.

h) Dewan Pengupahan DKI. Dalam proses penetapan UMP DKI Jakarta, anggota Dewan Pengupahan dari APINDO berpegang pada Peraturan Pemerintah No.51/2023 tentang Pengupahan, sebagai perubahan dari PP 36/2021. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta:
- DPP APINDO: menggunakan nilai à pengali 0.2 dari Pertumbuhan Ekonomi (PE) DKI Jakarta, sehingga UMP DKI Jakarta 2024 menjadi Rp.5.043.068,-.
- Pemerintah: menggunakan nilai pengali 0.3 dari PE menjadi Rp. 5.067.381,-.
- Serikat Pekerja: tidak mengacu pada PP 51/2023, namun mengusulkan kenaikan sebesar 15% menjadi Rp.5.637.068,-.

i) Kegiatan lainnya.
- Seminar, workshop, sosialisasi yang diselenggarakan oleh DPP, DPK, Disnaker, Kemenaker dan sebagainya,termasuk yang bekerjasama dengan perusahaan pelatihan dari Jepang (Precena);
- Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, dengan Tim Lawyernya berhasil memenangkan 4 kasus di perusahaan anggota yang digugat di pengadilan hubungan industrial;
- Kegiatan pembinaan UMKM secara regular juga tetap dilakukan;

B. List Kegiatan DPP APINDO DKI Tahun 2023

1. Rapat Kerja DPP APINDO DKI Jakarta tanggal 25-26 Februari 2023 di Puncak Bogor.
2. Audiensi Pengurus DPP APINDO DKI Jakarta dengan Pj. Gubernur DKI Jakarta tanggal 2 Maret 2023.
3. Buka Puasa Bersama tanggal 14 April 2023 di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta.
4. Peringatan Hari Mayday DPK APINDO Jakarta Selatan tanggal 14 April 2023.
5. Peringatan Hari Mayday DPK APINDO Jakarta Timur tanggal 1 Mei 2023.
6. Peringatan Hari Mayday DPK APINDO Jakarta Utara tanggal 1 Mei 2023.
7. Audiensi Pengurus DPP APINDO DKI Jakarta dengan Kadisnakertrans Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Mei 2023.
8. Seminar Ketenagakerjaan 2023 – DPK APINDO Jakarta Pusat dengan tema "Implementasi UU Cipta Kerja No. 6 2023" tanggal 9 Agustus 2023 di Hotel Holiday Inn, Jakarta Pusat.
9. Rekomendasi dan Pembekalan Calon Hakim Ad Hoc PHI tanggal 8 September 2023
   - Ade Darusalam
   - Masykur Isnan
10. Halal bi halal dan penutupan kegiatan *Mayday* Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023.
11. Berpartisipasi mengisi acara Kolaborasi kegiatan Expo TKM Merdeka Disnakertrans hari Senin, 9 Oktober 2023 di Kantor Pos Bloc Pasar Baru Jakarta Pusat.
12. Workshop APINDO DKI Jakarta bekerjasama dengan PT Precena JAC Strategic Partners
    - Sesi Pertama tanggal 12 Juli 2023 di Sekretariat APINDO DKI Jakarta
    - Sesi Kedua tanggal 21 September 2023 di Hotel Sofyan Jakarta Pusat
    - Sesi Ketiga tanggal 22 November di Hotel Harper Cawang Jakarta Timur
13. *Members' Gathering* "Sosialisasi Program BPJSTK dan Kebijakan UMP 2024" dilanjutkan dengan Rapat Kerja dan Konsultasi (RAKERKONPROV) DKI Jakarta Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan tema "Optimalisasi Program Kerja Organisasi dan Penyelarasan Kebijakan UMP 2024 bagi Pelaku Usaha"
14. Pelaksanaan Musyawarah Kota (MUSKOT) Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta dengan tema "Optimalisasi Program Kerja Organisasi dan Penyelarasan Kebijakan UMP 2024 bagi Pelaku Usaha". Telah terpilih Ketua baru untuk masa jabatan 2023-2028, sebagai berikut:
    - Ketua DPK APINDO Jakarta Pusat : Nugroho Sisbintoro
    - Ketua DPK APINDO Jakarta Selatan : Ferry Sugito
    - Ketua DPK APINDO Jakarta Barat : Hindra C Kurniawan
    - Ketua DPK APINDO Jakarta Utara : Rudy Andriyanto
15. Bersamaan dengan waktu yang sama telah terlaksana Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) DPP APINDO DKI Jakarta dengan Mitra Perguruan Tinggi dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta dalam Program kolaborasi antara APINDO UMKM Merdeka (AUM) dengan Program Kemenakertrans yaitu Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Tahun 2024
16. KunjunganKerja LKS Tripartit DKI Jakarta ke LKS Tripartit Jawa Tengah tanggal 4 - 6 Oktober 2023 di Semarang.
17. Senantiasa aktif dalam kegiatan rutin Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit DKI Jakarta.
18. Mendampingi anggota dalam pembelaan Sidang Perselisihan Hubungan Industrial PT Asia Madya Selaras (4 kasus) dan telah dimenangkan oleh Tim Advokasi DPP APINDO DKI Jakarta.
19. 25 Januari 2023 Member Gathering Tema "Sistem Pengupahan 2023 Dan Sekilas Perpu No.2 Tahun 2022 – Cipta Kerja"
20. 30 Mei 2023 Member Gathering Tema "Harmoni & Kompeten"
21. Peran aktif dalam Koordinasi dan Perundingan di LKS Tripartit Kota Jakarta Timur
22. Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi yang bekerjasama dengan PT LSP Apindo Jaya
23. 5 April 2023 Rapat Pengurus per Triwulan 1 Januari s/d April 2023 DPK APINDO JAKARTA TIMUR
24. Selasa, 30 Mei 2023 bertempat di Aula Gelora Bung Karno, PT. TRANSPORTASI JAKARTA dengan Tema "PERTEMUAN ANGGOTA DAN DISKUSI KETENAGAKERJAAN"
25. Rabu, 13 September 2023 bertempat di *Meeting Room* 1.11, PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg dengan Tema "Highlight Rancangan PP Tentang Ketenggakerjaan"
26. Rabu, 11 Oktober 2023 Tempat : Grya Syukur, Jl. Budi Murni II No.24, Cipayung diadakan kegiatan *Cooking Class* bagi UMKM
27. Rabu, 13 Desember 2023 bertempat di Ruang Pertemuan Gd. Graha Daya Guna, PT.JIEP PERSERO dengan Tema "Implementasi Kebijakan dan Peraturan Baru Tentang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Bagi Pelaku Usaha"

DOKUMENTASI

Rapat Kerja tanggal 25-26/02/23

Audiensi tanggal 2/3/223

Buka Puasa tanggal 14/4/23

Penutupan *Mayday* tanggal 15/5/23

Even AUM tanggal 9/10/23

Precena Sesi I

Precena Sesi II

Precena Sesi III

Workshop Jakpus tanggal 9/10/23

Kunjungan Kerja LKS Tripartit DKI Jakarta tanggal 4-6/10/23 di Jawa Tengah

Member Gathering DPK Jaktim tanggal 25/01/2023

May Day DPK Jaktim tanggal 1/05/23

Rapat Pengurus DPK Jaktim per Triwulan tanggal 5/04/23

Cooking Calss bagi UMKM DPK Jaktim tanggal 11/10/23

Pelatihan Sertifikasi bekerjasama dengan PT LSP MSDM APINDO Jaya

Pertemuan Anggota DPK Jaktim tanggal 30/5/23

III. Keanggotaan

- DPP APINDO terdiri dari 5 (lima) DPK yaitu :
  1. DPK APINDO Jakarta Pusat
  2. DPK APINDO Jakarta Selatan
  3. DPK APINDO Jakarta Barat
  4. DPK APINDO Jakarta Utara
  5. DPK APINDO Jakarta Timur
- Kantor Kesekretariatan Bersama 4 (empat) DPK Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Utara berlokasi di Jl. Cikini I No. 3-B, Menteng Jakarta Pusat sedangkan untuk DPK Jakarta Timur berlokasi di Jl. Raya Bekasi KM. 17 No. 5-7, Jatinegara Jakarta.
- Keanggotaan aktif DPP APINDO DKI Jakarta (Pusat, Selatan, Barat dan Utara) +/- 140 perusahaan
- Keanggotaan aktif DPK APINDO Jakarta Timur +/- 94 perusahaan

DPP APINDO JAWA BARAT

Ketua	**: Ning Wahyu Astutik**
Sekretaris	**: Ade Tjakralaksana**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 27 Kabupaten / Kota**

Kegiatan DPP APINDO Jawa Barat yang telah diselenggarakan selama tahun 2023 :

1. Audiensi APINDO Jawa Barat dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, Bapak Ir. Afriansyah Noor, M.Si.,IPU beserta jajaran di Gedung BTV Media, Jakarta tanggal 18 Januari 2023.

   Pada audiensi tersebut APINDO Jawa Barat menyampaikan beberapa hal seperti mengusulkan adanya pengaturan upah untuk industri padat karya; keinginan pengusaha memberlakukan sistem no work no pay dalam menghadapi tidak stabilnya ekonomi yang menimbulkan adanya penurunan order; terbitnya Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Barat tentang Struktur dan Skala Upah (SUSU) yang mana bertentangan dengan hukum; pandangan mengenai Permenaker No 18 Tahun 2022 yang mana menciptakan disparitas upah yang tinggi; serta pandangan atas rilis data PHK oleh Kemnaker yang nilainya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data di lapangan.

2. Ketua APINDO Jawa Barat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi LKS Tripartit se-Jawa Barat yang diselenggarakan pada 20 Maret 2023 dan menyampaikan tentang langkah meningkatkan perlindungan investasi dan tenaga kerja di Jawa Barat di tengah krisis ekonomi global, seperti perlu adanya kebijakan yang ramah investasi; peningkatan fasilitas infrastruktur; jaminan keamanan berusaha; kemudahan ijin; harmonisasi pengusaha dan pekerja, serta *link and match* dunia pendidikan dan industri.

3. Ketua APINDO Jawa Barat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Implementasi Perpres No 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan pada 15 Agustus 2023.

4. Ditandatanganinya MoU antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 4 dengan APINDO Jawa Barat pada 16 Februari 2023 tentang pengembangan kompetensi sumber daya manusasi melalui implementasi Merdek Belajar-Kampus Merdeka.

5. Ketua APINDO Jawa Barat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Peluang dan Potensi Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 4, pada 10 Mei 2023 yang dihadiri oleh Rektor/Perwakilan dari 83 Universitas.

6. Rangkaian *Roadshow* APINDO Jawa Barat Goes To Campus untuk bersilaturahmi dengan Rektor beserta Jajaran, memperkenalkan organisasi APINDO ke dunia akademis, serta melakukan dialog dan penjajakan kerjasama yang dapat dilakukan ke depan.
   a. Kunjungan APINDO Jawa Barat ke Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada 24 Mei 2023.

   b. Kunjungan APINDO Jawa Barat ke Universitas Sanggabuana pada 25 Mei 2023.

   c. Kunjungan APINDO Jawa Barat ke Universitas Indonesia Membangun (INABA) 25 Mei 2023.

   d. Kunjungan APINDO Jawa Barat ke Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) pada 29 Mei 2023.

7. Ketua APINDO Jawa Barat menjadi narasumber dalam acara Business Matching dengan tema membangaun sinergi dan kolaborasi ekonomi kreatif yang diselengagrakan pada 15 Juli 2023 di Universitas Widyatama. Pada acara tersebut ditandatangani pula MoU antara APINDO Jawa Barat dengan Universitas Widyatama tentang tridhama perguruan tinggi.

8. Ketua APINDO Jawa Barat menjadi narasumber di Universitas Muhammadiyah Cirebon, 26 Agustus 2023 dalam acara Seminar Nasional Supply Chain Management dengan topik Peran, Tantangan, dan Transportasi Supply Chain di Era Disrupsi.

9. Ketua APINDO Jawa Barat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menjadi narasumber

dalam acara Seminar Nasional di Universitas Negeri Malang pada 9 September 2023 tentang peluang dan tantangan pendidikan kewirausahaan di era merdeka belajar.

10. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (RAKERKONPROV) ke-22 dan Halal Bi Halal APINDO Jawa Barat diselenggarakan pada 15 Mei 2023 bertempat di Hotel El Royale Bandung. Kegiatan Halal Bi Halal dihadiri oleh perwakilan DPN APINDO, pengurus APINDO Jawa Barat dan DPK APINDO Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta para tamu undangan dari mulai Forkopimda, akademisi, partai politik, media, hingga serikat pekerja.

11. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota DPK APINDO di beberapa daerah untuk meneruskan roda kepengurusan APINDO dengan melakukan pemilihan ketua baru untuk periode 2023-2028.
    a. Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) DPK APINDO Kabupaten Bogor, 20 Februari 2023.

    b. Musyawarah Kota (MUSKOT) DPK APINDO Kota Bogor, 5 Juni 2023

    c. Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) DPK APINDO Kabupaten Cirebon, 27 Juni 2023.

    d. Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) DPK APINDO Kabupaten Bandung, 6 Juli 2023

    e. Musyawarah Kota (MUSKOT) Kota Depok, 26 Juli 2023

    f. Musyawarah Kota (MUSKOT) Ke-V DPK APINDO Kota Bandung, 8 September 2023

    g. Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) DPK APINDO Kabupaten Bandung Barat, 10 Agustus 2023

h. Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) DPK APINDO Kabupaten Cianjur, 14 November 2023

12. Selama Tahun 2023 telah dilaksanakan Pengukuhan Kepengurusan DPK APINDO dari berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk periode 2023-2024.

a. Pengukuhan Kepengurusan DPK APINDO Kabupaten Bogor, 21 Maret 2023

b. Pengukuhan Kepengurusan DPK Kabupaten Cirebon Periode 2023-2028, 12 Oktober 2023

c. Pengukuhan Kepengurusan DPK APINDO Kabupaten Bandung Barat Periode 2023-2028, 15 Desember 2023.

13. Ketua APINDO Jawa Barat menerima kunjungan dari *Taipei Economic Trade Office* (TETO) pada 26 Mei 2023 di kantor sekretariat APINDO Jawa Barat dan menyampaikan potensi serta iklim investasi di Jawa Barat dengan harapan dapat meningkatkan jumlah investasi dan menjadikan Jawa Barat sebagai prioritas investasi.

14. APINDO Jawa Barat menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Impor pada 26 Juli 2023 melalui zoom dengan menghadirkan 2 (dua) narasumber: Kepala Seksi Impor II Kantor Pusat DJBC, Sugeng Hariyanto serta Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Arif Sulistiyo.

15. *Mentorship* Mahasiswa Universitas Islam Bandung (UNISBA).
Sebanyak 28 mahasiswa Program Studi Manajemen UNISBA terpilih untuk mengikuti *mentorship* ini, yang dibagi ke dalam 4 kelompok. *Mentorship* ini bertujuan untuk memberikan panduan dan pembimbingan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan kompetensi dan wawasan yang relevan dengan dunia industri.

16. Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) Jawa Barat unsur pengusaha saat memperjuangkan upah minimum dan menghasilkan keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMP dan UMK yang besarannya sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni PP No 51 Tahun 2023.

17. Ketua APINDO Jawa Barat menghadirkan dan mempertemukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Investasi RI, Bpk. Bahlil Lahadalia dengan para investor, owner dan pemasok industri alas kaki *brand New Balance* dari berbagai negara yang diselenggarakan pada tanggal 8 - 9 Mei 2023. Hadirnya Menko Marves dan Menteri Investasi RI mampu meyakinkan para investor dan pelaku dunia usaha industri alas kaki untuk tetap berinvestasi dan meningkatkan nilai investasinya di Indonesia.

18. Ketua APINDO Jawa Barat menjadi narasumber pada West Java Economic Society (WJES) Bank Indonesia Jawa Barat yang diselenggarakan pada 11 Mei 2023 dengan tema meningkatkan ketahanan ekonomi melalui penguatan ekonomi domestik dan percepatan serta perluasan digitilaisasi.

19. Ketua APINDO Jawa Barat menjadi narasumber pada acara Kondolidasi Kegiatan Direktorat Statistik Industri 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada 28 November 2023 dengan topik Implikasi Penetapan Upah Minimum dalam Keputusan Investasi Usaha. Kegiatan dihadiri oleh Jajaran BPS Pusat dan perwakilan BPS Provinsi se-Indonesia, serta hadir pula Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jabar selaku narasumber.

20. Ketua APINDO Jawa Barat menjadi narasumber pada acara Bisnis Indonesia West Java Economic Outlook 2024 pada 8 Desember 2023 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia dengan topik Peluang dan Tantangan Menjaga Laju Ekonomi Jawa Barat 2024. Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Bappeda Jabar, para Kepala Dinas, Kepala Bank Indonesia Jabar, perusahaan perbankan, BUMN, BUMD, sektor Industri dan lainnya.

21. APINDO Jawa Barat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat yeng membahas tentang Draft Perda Kepariwisataan pada 31 Oktober 2023

22. APINDO Jawa Barat menandatangani komitmen keberperanan unsur Pentahelix untuk keberlanjutan Citarum Harum 13 Desember 2023

Data Jumlah DPK/DPKot yang sudah terbentuk

Selanjutnya berkenaan dengan keanggotaan APINDO Wilayah Jawa Barat, DPP APINDO Jawa Barat tetap senantiasa mencoba merangkul tambahan anggota terhadap badan-badan usaha yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Adapun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) di wilayah Provinsi Jawa Barat yang sudah terbentuk sampai saat ini adalah:

1. Bandung - Kabupaten: 108 Perusahaan
2. Bandung Barat - Kabupaten: 86 Perusahaan
3. Bandung - Kota: 57 Perusahaan
4. Banjar - Kota: 6 Perusahaan
5. Bekasi - Kota: 88 Perusahaan
6. Bekasi - Kabupaten: 380 Perusahaan
7. Bogor - Kabupaten: 249 Perusahaan
8. Bogor - Kota: 35 Perusahaan
9. Ciamis - Kabupaten: 19 Perusahaan
10. Cianjur - Kabupaten: 17 Perusahaan
11. Cimahi - Kota: 45 Perusahaan
12. Cirebon - Kabupaten: 11 Perusahaan
13. Cirebon - Kota: 10 Perusahaan
14. Depok - Kota: 49 Perusahaan
15. Garut - Kabupaten: 39 Perusahaan
16. Indramayu - Kabupaten: 12 Perusahaan
17. Karawang - Kabupaten: 246 Perusahaan
18. Kuningan - Kabupaten: 15 Perusahaan
19. Majalengka - Kabupaten: 20 Perusahaan
20. Purwakarta - Kabupaten: 65 Perusahaan
21. Pangandaran - Kabupaten: 24 Perusahaan
22. Subang - Kabupaten: 79 Perusahaan
23. Sukabumi - Kabupaten: 58 Perusahaan
24. Sukabumi - Kota: 27 Perusahaan
25. Sumedang - Kabupaten: 22 Perusahaan
26. Tasikmalaya - Kabupaten: 10 Perusahaan
27. Tasikmalaya - Kota: 10 Perusahaan

Jumlah Perusahaan : 1787

Kemudian, Anggota Luar Biasa Dewan Pimpinan Provinsi Jawa Barat sampai saat ini berjumlah 85 perusahaan. Demikianlah laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DPP APINDO JAWA TENGAH

Ketua	: Frans Kongi
Sekretaris	: Drs. Royke Joenan
Dewan Pimpinan Kab/Kota	: 33 Kabupaten / Kota

HR Meet & Talk PMSM Indonesia

Kegiatan dilaksanakan pada 21 Januari 2023, bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, APINDO Jateng menjadi salah satu Narasumber.

Seminar Hubungan Industrial

Kegiatan ini diselenggarakan oleh PHRD Kota Pekalongan dan DPP APINDO Jawa Tengah menjadi Narasumber, kegiatan dilaksanakan pada Hari Jumat, 17 Februari 2023, bertempat di The Sidji Hotel, Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.66, Kota Pekalongan.

Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (RAKERKON-PROV) DPP APINDO Jawa Tengah Tahun 2023

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Kamis, 9 Maret 2023, bertempat di Patra Hotel & Convention Semarang, Jl. Sisingamangaraja Semarang.

Pembubaran Panitia RAKERKONPROV DPP APINDO Jawa Tengah dan Buka Puasa Bersama

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 5 April 2023, Bertempat di Hotel Santika Premiere, Jl. Pandanaran No 116-120, Semarang

Pelantikan DPK APINDO Kab. Tegal

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Mei 2023, bertempat di Pendopo Kab. Tegal.

Musyawarah Nasional APINDO

DPP APINDO Jawa Tengah turut serta dalam kegiatan MUNAS yang dilaksanakan 14-16 Juni 2023 bertempat di Hotel JS Luwansa Jl. HR Rasuna Said – Jakarta Selatan

Dialog Mitra Menjaring Aspirasi *Stakeholder*

Kegiatan di laksanakan pada 17 Juni 2023, bertempat di Gedung Sasono Mangunsuko, Jl. Slamet Riyadi No. 261, Sriwedari, Laweyan, Surakarta, DPP APINDO Jateng menjadi salah satu narasumber.

Pelatihan Aplikasi *Fair Price*

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Kamis, 13 Juli 2023, bertempat di Hotel Aruss Semarang, Jl. Dr. Wahidin/116, Semarang.

Seminar Nasional DPK APINDO Demak

Kegiatan dilakasanakan pada Hari Kamis, 20 Juli 2023, bertempat di Ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak.

Pelantikan DPN APINDO

DPP APINDO Jawa Tengah turut serta dalam kegiatan Pelantikan DPN APINDO yang dilaksanakan 31 Juli 2023 bertempat di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta

Rapat Koordinasi Pengupahan

Rapat koordinasi Pengupahan di Jawa Tengah dilakukan secara intens untuk menentukan sikap dan memberikan masukan serta saran.

Kupas Tuntas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 66 Tahun 2023

Kegiatan dilaksanakan pada 10 Agustus 2023 bertempat di Hotel Grasia Semarang, Jl. S. Parman No.29, Gajahmungkur, Semarang.

Kolaborasi Akselerasi Digitalisasi Pedagang Pasar Rakyat dan UMKM

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 bertempat di Plaza Hotel Tegal, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 2 Kota Tegal.

Penghargaan Mitra Bhakti Husada Tahun 2023

Kegiatan dilaksanakan 30 Agustus s/d 7 September 2023, di 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Silaturahmi dan Mohon Diri Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 5 September 2023 di GOR Jatidiri, Jl. Karangrejo Asrama Atlit Semarang.

Penerimaan Kunjungan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tekstil Bandung

Kunjungan diterima pada hari Jumat, 8 September 2023 di Kantor Sekretariat APINDO Jawa Tengah, Ruko Semarang Indah Blok E2 No. 28 Semarang.

Penerimaan Kunjungan dari Universitas Tidar

Kunjungan diterima pada hari Kamis, 14 September 2023 di Kantor Sekretariat APINDO Jawa Tengah, Ruko Semarang Indah Blok E2 No. 28 Semarang.

Penguatan Kesekretariatan APINDO

Kegiatan dilaksanakan pada 18-19 September 2023, bertempat di hotel Menara Peninsula. Kegiatan diselenggarakan oleh DPN APINDO, dan DPP APINDO Jawa Tengah menjadi salah satu peserta.

Seleksi Calon Hakim Adhoc PHI Tahun 2023

Dari APINDO Jawa Tengah mengirimkan 9 orang perwakilan calon Hakim Adhoc PHI.

Musyawarah DPK APINDO Kab. Cilacap

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 September 2023 bertempat di Hotel Aston, jl. Budi Utomo No. 38 Cilacap. Terpilih kembali Bapak Bambang Sri Wahono, SH, SP.N, MH Sebagai Ketua DPK APINDO Kabupaten Cilacap Masa Bakti 2023-2028.

***Fun Walk* KADIN Jawa Tengah**

Berpartisipasi pada kegiatan Fun Walk Kadin Jateng yang diselenggarakan pada hari Minggu, 24 September 2023 di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Musyawarah DPK APINDO Kota Surakarta

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Senin, 9 Oktober 2023 bertempat di Tumurun Private Museum, Jl. Kebangkitan Nasional No. 2 Surakarta. Terpilih kembali Bapak Iwan Kurniawan Lukminto sebagai Ketua DPK APINDO Kota Surakarta Masa Bakti 2023-2028.

Rapat Koordinasi APINDO UMKM Merdeka dengan LLDIKTI Wilayah VI

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 bertempat di Kantor LLDIKTI VI, Jl. Pawiyatan Luhur I No. 1 Bendan Duwur, Gajahmungkur, Semarang.

Audiensi Kepada PJ Gubernur Jawa Tengah

Kegiatan Audiensi di terima Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah pada hari Rabu, 1 November 2023 bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.

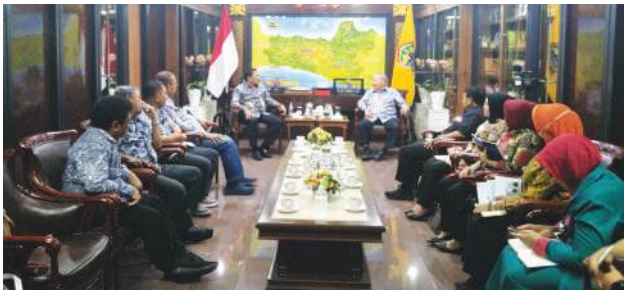

Inhouse Training Hubungan Industrial PT. SAMI

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2023 di Ruang Taining PT. SAMI.

Pembekalan Sensitivitas Disabilitas

Kegiatan dilaksanakan pada 4-6 Desember 2023, bertempat di Hotel Grand Mercure Yogyakarta. Dari DPP APINDO Jawa Tengah mengirimkan 9 orang utusan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Sosialisasi UMK Kota Tegal Tahun 2024

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2023, bertempat di Hotel BaHari Inn Tegal, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 1 Tegal.

APINDO Jateng Peduli *Stunting*

Kegiatan dilaksanakan pada 13-15 Desember 2023, di Kabupaten Kudus.

Diskusi Tentang *Human Rights Due Diligence*

Kegiatan dilaksanakan pada 13 Desember 2023, bertempat di Hotel Ibis Styles Semarang Simpang Lima. Kegiatan ini merupakan kerjasama APINDO Jateng dengan *Fair Wear*.

Penerimaan Kunjungan KPPOD

Kunjungan diterima pada hari Jumat, 15 Desember 2023 di Kantor Sekretariat APINDO Jawa Tengah, Ruko Semarang Indah Blok E2 No. 28 Semarang.

RAKERWIL DPW FKSPN Provinsi Jawa Tengah

APINDO Jawa Tengah hadir pada kegiatan RAKERWIL FKSPN yang Dilaksanakan pada 23 Desember 2023 di Hotel Siliwangi Semarang.

Potensi dan Peluang Investasi di Jawa Tengah
https://cjip.jatengprov.go.id/

Alamat kantor DPP APINDO Jateng :
Ruko Semarang Indah Blok E2/28,
Jl. Madukoro Raya Semarang 50144
Telp : 024 76632990, Fax. : 024 76632989
WA : 081 31 001 1952
Email : jawatengah@apindo.or.id

DPP APINDO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua	**: Buntoro**
Sekretaris	**: Supri Harsono**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 5 Kabupaten / Kota**

RAKERKONPROP DPP APINDO DIY Tahun 2023

RAKERKONPROP DPP APINDO DIY Tahun 2023 diselenggarakan pada hari Kamis, 16 Februari 2023 di Gedung Training Center PT.YPTI Kalasan Sleman Yogyakarta dengan tema **"UMKM Kuat, Yogyakarta Hebat"**.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP APINDO DIY, Bapak Albertus Ardi memberikan pengarahan mengenai Program Penguatan UMKM yang akan diselenggarakan

Workshop UMKM di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

RAKERKONPROP DPP APINDO DIY dihadiri oleh 5 (lima) Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota APINDO DIY untuk menerima mandat dari Ketua DPP APINDO DIY, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP APINDO DIY agar melaksanakan tugas penyelenggaraan Workshop UMKM di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan KEAPINDOAN / APINDO Nasional Tahun 2023

1. MUNAS APINDO

Musyawarah Nasional (MUNAS) XI APINDO tahun 2023 dengan tema **"Pengusaha Bersatu, Indonesia Maju"**. Diselenggarakan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 14-15 Juni 2023 bertempat di Hotel Indonesia Kemplinski Lt.11 Jakarta.

Ketua DPP APINDO DIY, Bapak Buntoro ; Ketua DPK APINDO Sleman, Bapak Petrus Tedja Hapsoro; Sekretaris 1 DPP APINDO DIY, Bapak Supri Harsono

turut hadir dalam acara Munas XI APINDO serta acara Pengukuhan Pengurus DPN APINDO Masa Bakti tahun 2023-2028 dimana Ibu Shinta Khamdani terpilih sebagai Ketua Umum DPN APINDO.

2. Penguatan Sekretariat

Sekretaris 2 DPP APINDO DIY Bapak Imam Nawawi turut aktif dalam kegiatan Penguatan Sekretariat Keapindoan yang diselenggarakan oleh DPN APINDO sebagai Rencana Strategis APINDO untuk peningkatan keanggotaan dan layanan serta penguatan jaringan kelembagaan antara DPN, DPP, DPK dan Asosiasi Sektoral.

Kegiatan Bidang Diklat & UKEA DPP APINDO DIY Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan cita-cita RAKERKONPROP DPP APINDO DIY Tahun 2022&2023 dengan tujuan pengarusutamaan UMKM, sesuai dengan tema "UMKM KUAT, YOGYAKARTA HEBAT" maka Bidang Diklat berkolaborasi dengan Bidang UKEA DPP APINDO DIY mengadakan Workshop UMKM yang diselenggarakan di 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengawali kegiatan tersebut, Bidang Diklat & UKEA DPP APINDO DIY telah mengikuti *Training of Trainers* (ToT) selama 4 kali pertemuan pada bulan Oktober 2022 dalam Program Melati Nusantara yang bekerjasama dengan DPN APINDO.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan Tim Workshop UMKM DPP APINDO DIY meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Trainer, Trainer, OC & SC

1. Workshop UMKM Bantul

Dilaksanakan pada tanggal 9-10 Februari 2023, bertempat di RM. Pondok Ndeso, Jl. Imogiri Timur, Giwangan, Yogyakarta dengan dihadiri oleh 20 peserta UMKM binaan DPK APINDO Bantul.

2. Workshop UMKM Sleman

Dikarenakan begitu tingginya antusias peserta, maka atas kebijakan Ketua DPK APINDO Sleman, Workshop diselenggarakan 3 tahap.

- Workshop APINDO Sleman Tahap 1
  Dilaksanakan pada tanggal 16-17 Februari 2023, bertempat di Gedung Training Center PT. YPTI Kalasan Sleman Yogyakarta, dihadiri oleh 25 peserta UMKM binaan DPK APINDO Sleman.

- Workshop APINDO Sleman Tahap 2
  Dilaksanakan pada tanggal 9-10 Maret 2023, bertempat di Gedung Training Center PT. YPTI Kalasan Sleman Yogyakarta, dihadiri oleh 25 peserta UMKM binaan DPK APINDO Sleman.

- Workshop APINDO Sleman Tahap 3
  Dilaksanakan pada tanggal 16 - 17 Maret 2023, bertempat di Gedung Training Center PT. YPTI Kalasan Sleman Yogyakarta, dihadiri oleh 22 peserta UMKM binaan DPK APINDO Sleman.

3. Workshop UMKM Kota Yogyakarta

Dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2023, bertempat di Gedung JTCC, Patangpuluhan, Kota Yogyakarta. Dihadiri oleh 20 peserta UMKM binaan DPK APINDO Kota Yogyakarta.

4. Workshop UMKM Kulon Progo

Workshop UMKM DPK APINDO Kulon Progo diselenggarakan pada tanggal 13 September 2023. Bertempat di Tabebuya Cafe, Jl. Sanun, Area Sawah, Wates, Kulon Progo DIY dan dihadiri oleh 25 peserta UMKM Binaan DPK Kulon Progo.

Dunia Ketenagakerjaan

1. Undang-Undang Cipta Kerja

- Kupas Tuntas Perppu Cipta Kerja
  Bidang Ketenagakerjaan DPP APINDO DIY, diwakili oleh Bp. Slamet Raharjo, turut aktif dalam kegiatan Kupas Tuntas Perppu Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) yang diselenggarakan oleh Disnakertrans DIY pada hari Kamis, 2 Maret 2023 di Royal Ambarukmo Yoyakarta.

- FGD Quo Vadis UU Cipta Kerja
  DPP APINDO DIY juga turut aktif dalam mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* "Quo Vadis Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PPU-XXI/2023".
  Kegiatan ini diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di Swiss-Belboutique Yogyakarta Hotel, Jl. Jend.Sudirman No.69, Terban, Kec. Gondokusuman Yogyakarta.

2. Pengupahan

- Kunjungan Kerja Pusat Penelitian Sekretaris Jenderal DPR RI
  DPP APINDO DIY menerima kunjungan dari Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari Kamis, 23 Februari 2023 membahas perihal "Sistem Pengupahan Yang Berkeadilan dan Berdaya Saing".

- *Zoom Meeting* dengan DPN APINDO
  Dewan Pengupahan DPP dan DPK APINDO DIY turut mengikuti acara *Zoom Meeting* "Rapat Koordinasi Upah Minimum 2024" yang diselenggarakan oleh

DPN APINDO pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 Pukul 14.30 s/d 15.30 WIB.

- Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan Provinsi DIY
  Dewan Pengupahan Provinsi DIY melaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan pada hari Kamis, 9 November 2023 bertempat di JEC.

- Konferensi Pers Dewan Pengupahan Provinsi DIY
  Dewan Pengupahan DIY menyelenggarakan Konferensi Pers, perihal Sikap Pengusaha DIY menghadapi Penentuan Upah Minimum 2024. Acara tersebut diselenggarakan di Kantor KADIN DIY pada hari Senin, 13 November 2023.
- Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi DIY
  Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi DIY dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum DIY Tahun 2024

3. Tripartit

- Deteksi Dini Ke Perusahaan- Perusahaan dalam rangka Persiapan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023.

DPP APINDO DIY juga turut aktif dalam Tripatit. Salah satu kegiatannya melakukan deteksi dini ke Perusahaan-perusahaan dalam rangka persiapan Pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2023.

- Deteksi Dini ke Perusahaan dalam rangka Persiapan Penentuan UMP/UMK 2024

- Narasumber Wakil LKS Tripartit DIY Unsur Asosiasi Pengusaha

  DPP APINDO DIY juga turut aktif menjadi Narasumber Wakil LKS Tripartit DIY unsur Asosiasi Pengusaha pada acara Sosialisasi Konvensi ILO No.144 tentang Konsultasi Tripartit yang diselenggarakan oleh Disnakertrans DIY pada Hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 Pkl. 09.00 WIB - selesai bertempat di The Atrium Hotel and Resort Yogyakarta.

4. *May Day*

DPP & DPK APINDO DIY turut aktif dalam peringatan *May Day* (Hari Buruh Nasional) tanggal 1 Mei 2023

5. K3

- DPP APINDO DIY turut hadir dalam Puncak Peringatan Bulan K3 yang diselenggarakan oleh Disnakertrans DIY.
- Perwakilan Bidang Diklat DPP APINDO DIY juga menjadi Narasumber acara Workshop Penyusunan Kurikulum Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Akademi Keperawatan "YKY" yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 AKPER YKY Yogyakarta, dengan materi "Tantangan dan Peluang Pendidikan Sarjana K3 dalam Dunia Kerja Saat Ini dan Masa Mendatang".

6. Pasar Modal

DPP & DPK APINDO DIY turut hadir dalam acara Bincang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Direktur Akses Pembiayaan Kemeterian Pariwisata & Ekonomi Kreatif.

7. Forum Ketenagakerjaan

- Wakil Ketua Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan DPP APINDO DIY, Bapak Timotius Apriyanto turut aktif menjadi Narasumber dalam acara Forum Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Disnakertrans Kabupaten Bantul, pada tanggal 7 Maret 2023 bertempat di Sekar Mataram Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.
- Wakil Ketua Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan DPP APINDO DIY, Bapak Timotius Apriyanto juga turut menghadiri undangan dari BPJS Kesehatan dalam kegiatan pemberian penghargaan terhadap pemberi kerja yang patuh dalam ketepatan waktu membayar iuran. Acara ini diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Ruang Jasmine 3, Hotel Grand Rohan Jogja, Jl. Gedongkuning No.336, Modalan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

8. Peningkatan Ekspor

- DPP APINDO DIY turut hadir dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Ekspor DIY, yang diselenggarakan oleh Disperindag DIY pada tanggal 19 Mei 2023
- DPP APINDO DIY juga turut hadir dalam acara upaya peningkatan kinerja ekspor dan investasi yang diselenggarakan oleh KADIN Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Hubungan Internasional dan Investasi, yang juga mengundang *Indonesia Trade* and *Promotion Center* (ITPC) di Budapest untuk menyampaikan peluang produk dan jasa dari Yogyakarta memasuki pasar Eropa Tengah Serta Timur yang menjangkau 22 negara.

  Acara ini diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di Ruang Hanoman Lt. 2, Jogja Expo Center Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Dengan Tema : Mengembangkan Ekspor dan Membangun "*Trading Hub*" DIY di Kawasan Eropa Tengah, Timur.

- Bapak Albertus Ardi, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP APINDO DIY turut aktif dalam kegiatan Forum Diskusi "Isu Strategis Perdagangan Domestik Tahun 2024" pada hari Selasa, 21 November 2023 di di Hotel Santika.

Kegiatan DPP APINDO DIY dengan *Stakeholder*

1. Pertemuan DPP APINDO DIY dengan *Hongkong Economic & Trade Office*

DPP APINDO DIY mendapatkan undangan pertemuan dengan *Hongkong Economic & Trade Office* pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di Resto Sekar Kedhaton Yogyakarta.

2. CEO Insight 2023 - 2024

DPP APINDO DIY mendapatkan undangan dari Warta Ekonomi untuk menghadiri acara CEO INSIGHT 2023-2024 *"In Conjunction with CEO Achievement Awards 2023"* pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta. Hadir dalam acara tersebut Ibu Inka dari DPN APINDO.

3. Pelantikan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri

Ibu Nurul Indah Khasanah, Bidang UMKM DPP APINDO DIY dilatik menjadi Ketua Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) DIY pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 di Hotel Alana Yogyakarta.

DPP APINDO JAWA TIMUR

Ketua	: Eddy Widjanarko
Sekretaris	: Dwi Ken Hendrawanto, S.H.
Dewan Pimpinan Kab/Kota	: 33 Kabupaten / Kota

Temu Konsultasi

DPK APINDO Kabupaten/Kota Malang menyelenggarakan temu konsultasi dengan tema Meningkatkan SDM Pada Struktur dan Skala Upah dengan narasumber Bapak Ir Haryanto (Wakil Ketua DPP APINDO Jatim, Bidang Diklat, Litbang & Sertikasi) di Hotel Grand Cakra Malang, 13/07/2023.

APINDO dalam Menjawab Tantangan Dunia Usaha

Member Gathering DPP APINDO Jawa timur di hari kedua, Ketua Umum DPN APINDO Ibu Shinta W. Kamdani hadir dalam *sharing session* **"APINDO dalam Menjawab Tantangan Dunia Usaha"**.

Konsolidasi bersama DPP APINDO Jatim dengan para Ketua DPK APINDO se Jawa Timur dan para pelaku usaha kecil menengah (UMKM/IKM). Bapak Ronald Walla, Ketua UKM DPN APINDO pada sesi kedua dengan materi **"Ekosistem Penguatan UMKM/IKM"** (21/07/2023).

Pengurus DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur mengadakan audiensi ke Kanwil DJP Jawa Timur I, Senin (24/7/2023)

Selain perkenalan pengurus DPP APINDO Jatim, audiensi ini sekaligus melanjutkan kerja sama yang telah terjalin baik antara Kanwil DJP Jawa Timur I dengan APINDO Jatim selama ini. Hadir dalam kesempatan kali ini Ketua DPP APINDO Jatim Eddy Widjanarko, Sekretaris Dwi Ken Hendrawanto, Bendahara Soejanto Widjaya dan Dewan Pertimbangan Aaron Yongky. Sedangkan dari Kanwil DJP Jatim I yaitu Kepala Kanwil Sigit Danang Joyo.

Pengukuhan dan Pelantikan DPK APINDO Kabupaten Pasuruan Masa Bakti 2023 - 2028

Pengukuhan dan Pelantikan DPK APINDO Kabupaten Pasuruan Masa Bakti 2023 - 2028 oleh DPP APINDO Jawa Timur, Eddy Widjanarko selaku Ketua DPP, didampingi Dwi Ken Hendrawanto, Sekretaris DPP dan Johnson M Simanjuntak, Wakil Ketua DPP Bidang Organisasi & Pembinaan Daerah.

Penandatanganan berita acara pengukuhan disaksikan oleh Muhammad Nur Kholis, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Nurul Huda, Ketua DPK APINDO Kabupaten Pasuruan terpilih.

Selamat, semoga terus berkembang kedepannya (Hotel Surya & Cottage Prigen - 09082023).

Pelatihan dan Uji Kompetensi

Pelatihan dan Uji Kompetensi, Human Resources Staff bagi Dunia Usaha, 12-13 Sep 2023, Hotel Amaris Darmo Surabaya. Kegiatan Ini dilaksanakan Oleh DPP APINDO Jatim Bidang Diklat Litbang & Sertifikasi

Workshop APINDO *Strategy Plan*

APINDO *Strategy Plan for Membership Reinforcement and Services & Strengthening* Institution Networks - DPN, DPP, DPK. 2 (two) days conducting in workshop, placed in Menara Peninsula Hotel, 18 - 19 September 2023. DPP APINDO Jatim as part of National APINDO to support, big appreciate to this meeting.

Courtesy Visit, DPP APINDO Jatim to Taipei Economic and Trade Office in Surabaya

Courtesy visit, silaturahmi DPP APINDO Jatim ke kantor TETO (Taipei Economic and Trade Office) di Jalan Indragiri No 49 Surabaya.
Pertemuan diwakili Maxixe Mantofa, Wakil Ketua DPP APINDO Jatim, Bidang Hubungan Luar Negeri & Pengembangan Tenaga Kerja, Saiful Mashud, Hubungan Luar Negeri, Totok Supriyono, Bidang UKM dan Sosial, Aslakhul Umam, Sekretaris Eksekutif diterima langsung oleh Isaac C. Chiu, Director General TETO Surabaya didampingi William C Jiang, Deputy Director General dan Zhang Chen, Secretary. Pertemuan membahas kerjasama bidang ekonomi, UKM, sosial, manpower dan bidang lainnya (22/09/2023)

Pembukaan Bursa Kerja

Pembukaan Bursa Kerja Terbuka Provinsi Jawa Timur bertempat di Galaxy Exhibition Center Surabaya
DPP APINDO Jatim diwakili oleh Bapak Bambang Darundriyo, SH - Bidang Diklat Litbang dan Sertifikasi, 19 Sep 2023

Studi Banding

Studi Banding Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, diwakili dari unsur Pengusaha (APINDO Jatim), Pemerintah & Serikat Pekerja ke Negara Dubai & Turki, 26 September - 3 Oktober 2023

Sarasehan Nasional

Sarasehan Nasional Ekosistem Pertembakauan bersama KADIN Jatim, GAPPRI, GAPRINDO, DPP APINDO Jatim, bertempat di Leedon Hotel Surabaya, 29 September 2023 dengan narasumber Bapak M. Misbakhun, Komisi XI DPR RI

Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional

Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Lebih Setara Gender, di wakili Bapak Haryanto DPP APINDO Jatim, Aslakhul Umam, Sekretaris Eksekutif, di Vasa Hotel Surabaya, 3 Oktober 2023 - ILO - Kemenaker - Kemen PPA

Pelatihan & Uji Kompetensi Human Resources Supervisor bagi Dunia Usaha

DPP APINDO Jatim bekerjasama dengan DPK APINDO Malang, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan & Uji Kompetensi HR Supervisor bagi Dunia Usaha, bertempat di Atria Hotel Malang, Jalan Letjen S. Parman No. 87 - 89 Malang, selama dua hari dari tanggal 10 - 11 Oktober 2023

DPP APINDO Jatim - HKETO

Pertemuan DPP APINDO Jatim dengan Hongkong Economic & Trade Office di JW Marriot Surabaya. Sharing bersama dengan Director General HKETO, Mr. Lee Sheung Yuen (10/10/2023)

Dialog Multi *Stakeholder*

Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi bersama LLDIKTI Wilayah 7 menyelenggarakan Multi Stakeholder Dialogue, tema Akselerasi Implementasi MBKM Mandiri, diikuti dari akademi, bisnis, industri, pemerintah, masyarakat. Diwakili Bapak Bambang Darundriyo, DPP APINDO Jatim, Bidang Diklat, Litbang & Sertifikasi, bertempat di Universitas Ciputra, Surabaya (18/10/2023)

Konsultasi Publik

Konsultasi Publik terhadap Rancangan PP tentang Perubahan atas PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan di Surabaya Suite Hotel, (23/10/2023)

Konsolidasi LKS Tripartit

Konsolidasi LKS Tripartit Nasional dan LKS Tripartit Daerah oleh Kemenaker dan Disnaker Provinsi Jatim dengan Peserta Tripartit Provinsi Jatim (Unsur Pengusaha) dan Tripartit Provinsi Jatim (Unsur Pekerja), di Grand Darmo Suite by Amithya (26/10/2023)

Kunjungan

Kunjungan DPP APINDO Kaltim ke Surabaya, bersama Ketua DPP APINDO Jawa Timur, tukar informasi menjelang putusan UMP (25/10/2023)

Penempatan Kantor Baru DPP APINDO Jatim

Tasyakuran, dihadiri pengurus DPP & DPK APINDO Jatim, acara potong tumpeng oleh Ketua DPP APINDO Jatim, Bapak Eddy Widjanarko kepada Bapak Alim Markus sebagai Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Jatim. Mengucapkan selamat dan semoga bermanfaat bagi semuanya; anggota, masyarakat. (27/10/2023)
Alamat baru DPP Apindo Jatim : Jalan Ir Soekarno No. 31 (MERR), Surabaya 60116, Phone : 62 31 58284210, Email : Info@apindojatim.com

Konferensi, Kongres dan Talkshow

Konferensi, Kongres dan Talkshow dengan "Gerakan untuk Mendukung Keterlibatan Perempuan dan Anak Muda dalam Mengelola Hutan di Indonesia" dengan narasumber Imelda Harsono (Wakil Ketua DPP APINDO Jatim, Bidang Nakerwan dan Gender) di Santika Hotel Premier, Gubeng (07/11/2023)

APINDO Talks

DPP APINDO Jatim *Invite you* #APINDOTALKS, Bidang Perundang Undangan & Advokasi dengan narasumber Dr. Hari Purnama, SH, MH, Wakil Ketua DPP APINDO Jatim, Bapak Dr. Atmari, SH, MH, moderator Bapak Ngadi, SH, MH (DPP APINDO Jatim). Dengan peserta sebagian dari anggota DPP APINDO Jatim, sharing juga tentang ATC Jawa Timur, di kantor DPP APINDO Jatim (16/11/2023)

Penandatanganan MoU kerjasama DPP APINDO Jawa Timur dengan Universitas Surabaya (UBAYA)

Bertempat di Universitas Surabaya, penandatanganan MoU kerjasama DPP APINDO Jawa Timur diwakili langsung dengan Ketua Bapak Eddy Widjanarko dengan Universitas Surabaya (UBAYA) diwakili Rektor Bapak Benny Lianto. MoU berkaitan dengan Program Magang dan Pengembangan Apindo UMKM Merdeka (21/11/2023)

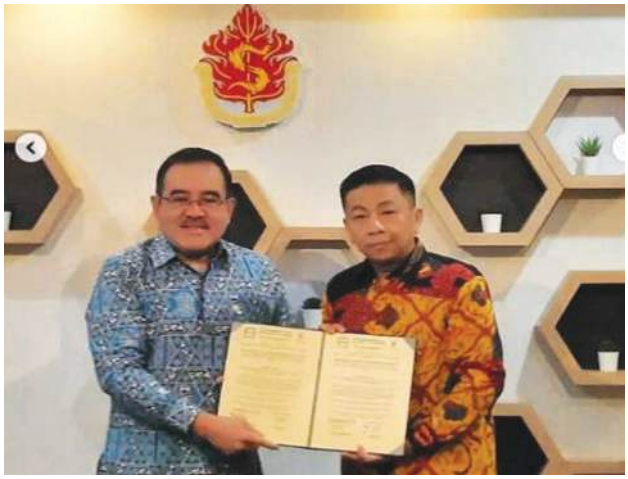

Courtesy Meeting

Courtesy meeting by dinner together, DPP APINDO Jatim with United States Consulate General for Surabaya, Mr. Jonathan Alan. Discussing, sharing about social, economical relevant by update issues. Hope being good partnership in year ahead (29/11/2023)

Pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur

Pertemuan DPP APINDO Jawa Timur dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, perihal UMK 2024 (30/11/2023)

Talkshow JTV

Talkshow JTV dengan tema "Upah Minimum 2024 dan Keberlangsungan Usaha di Jawa Timur" dengan narasumber dari Disnaker Provinsi Jawa Timur, Bapak Imam Hidayat, Serikat Pekerja SPSI, Bapak Ahmad Fauzi dan Bapak Johnson M. Simanjuntak mewakili DPP APINDO Jawa Timur di studio JTV (04/12/2023)

DPP APINDO BANTEN

Ketua	**: Yakub F. Ismail, S.E., M.M**
Sekretaris	**: Tomy Rachmatullah, S.E.**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 8 Kabupaten / Kota**

Kegiatan DPP APINDO Banten yang telah di-selenggarakan selama tahun 2023 :

1. Sosialisasi Pembinaan Tata Cara Pengesahan PP & Pendaftaran PKB Secara Online di Provinsi Banten

Dalam rangka meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan, DPP APINDO Provinsi Banten bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten telah menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (e-PP) pada 23 Februari 2023 di Aula BLKI Provinsi Banten, Serpong – Kota Tangerang Selatan. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 80 peserta perwakilan perusahaan anggota APINDO Se-Banten.

2. Musyawarah Kota Ke-V DPK APINDO Kota Cilegon

Musyawarah Kota Ke-V DPK APINDO Kota Cilegon telah diselenggarakan pada 19 Januari 2023 di Ballroom Hotel Royal Krakatau, Cilegon. Muskot V DPK APINDO Kota Cilegon guna pembentukan Kepengurusan DPK APINDO Kota Cilegon Masa Bakti 2023 - 2028. Dalam Musyawarah Kota DPK APINDO Kota Cilegon ini, terpilih secara aklamasi Bapak Tomy Rachmatullah, S.E., sebagai Ketua DPK APINDO Kota Cilegon Masa Bakti 2023 - 2028 dan telah resmi dilantik oleh Bapak Eddy Mursalim, S.E., M.M., Ph.D. selaku Ketua DPP APINDO Provinsi Banten.

3. Halal Bihalal APINDO Banten Tahun 2023

DPP APINDO Banten menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H dalam rangka mempererat silaturahmi antara pengurus DPP APINDO Banten dengan DPK APINDO se-Banten dan juga saling berkoordinasi menyampaikan situasi dan isu ter-*update* terkait ketenagakerjaan di wilayah DPK masing-masing. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada 11 Mei 2023 di Remaja Kuring Resto – Kota Tangerang, dihadiri oleh pengurus DPP APINDO Banten serta perwakilan Pengurus Inti DPK APINDO Se-Banten.

4. Kegiatan Edukasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan Swasta

Dalam rangka meningkatkan kemampuan para pelaku HI dalam pelaksanaan PPHI, penyamaan persepsi mengenai implementasi PPHI dan meningkatkan efektivitas PPHI di luar dan di dalam Pengadilan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang didukung oleh APINDO telah menyelenggarakan Kegiatan Edukasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan Swasta pada 14 s.d. 15 Juni 2023 di Le Dian Hotel & Cottages – Serang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 15 perusahaan anggota APINDO Banten, dengan total 30 peserta (1 perwakilan dari HRD dan 1 perwakilan dari PUK SP/SB).

Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Dr. Reytman Aruan, S.H., M.Hum. selaku Kasubdit Penyelesaian Hubungan Industrial Kemnaker RI, Diana Ardhianty Utami, S.H., M.H., selaku Kadisnakertrans Kabupaten Serang, dan Afif Johan selaku Praktisi Hubungan Industrial.

5. Rapat Konsolidasi DPP dan DPK APINDO Se-Banten

DPP APINDO Provinsi Banten telah menyelenggarakan Rapat Konsolidasi DPP APINDO Banten bersama dengan DPK APINDO Se-Banten pada 11 Oktober 2023 di Horison Grand Serpong Hotel Tangerang. Adapun dalam rapat tersebut membahas terkait rencana kegiatan APINDO serta persiapan terkait penetapan upah minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus inti APINDO Banten dan perwakilan pengurus inti dari DPK APINDO Kabupaten/Kota Se-Banten.

6. Banten Business Forum dan Investment Awards 2023

Banten Business Forum & Investment Awards 2023 merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Provinsi Banten yang diselenggarakan DPMPTSP Provinsi Banten dan didukung oleh APINDO Banten. Sebanyak 70 perusahaan anggota APINDO Se-Banten bersama dengan pengurus APINDO Banten dan perwakilan dari pengurus DPK APINDO Se-Banten hadir pada kegiatan ini yang telah diselenggarakan pada 19 Oktober 2023 di ICE BSD – Tangerang, Banten. Turut hadir juga Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah dan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Penyerahan Investment Awards 2023 merupakan salah satu rangkaian utama pada kegiatan ini. sebanyak 3 perusahaan anggota APINDO berhasil memenangkan kontestasi dan menerima penghargaan dari DPMPTSP Provinsi Banten dengan kategori Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. (Kota Cilegon), dan kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu PT Mayora Indah, Tbk. (Kabupaten Tangerang) dan PT Followme Indonesia (Kota Tangerang Selatan).

7. Rapat Koordinasi Pengupahan APINDO Banten

Menindaklanjuti surat DPN APINDO Nomor 478/DPN/1.4/2D/X/23 perihal Undangan Rapat Koordinasi Upah Minimum Tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring pada 6 November 2023 dengan tujuan agar APINDO di seluruh Indonesia perlu memiliki pandangan yang sama terkait isu-isu mengenai pengupahan.
DPP APINDO Provinsi Banten bersama dengan anggota Dewan Pengupahan dan anggota LKS Tripartit Provinsi Banten unsur APINDO telah menghadiri Rapat Koordinasi Upah Minimum Tahun 2024 tersebut secara daring bersama-sama dari Le Dian Hotel & Cottages – Serang dan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengupahan APINDO Banten.

8. Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Banten unsur APINDO telah menghadiri Rapat Pleno Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2024 pada 16 November 2023 di Aula Disnakertrans Provinsi Banten, Serang. Turut hadir juga pada rapat pleno ini anggota Depeprov Banten unsur Pemerintah, unsur Serikat Pekerja/Buruh, unsur pakar dan Perguruan Tinggi.

9. Bimbingan Teknis Bernegosiasi bagi Pelaku Hubungan Industrial

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya penguasaan teknik-teknik negosiasi dalam hubungan industrial, Disnakertrans Provinsi Banten yang didukung oleh APINDO Banten telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Bernegosiasi bagi Pelaku Hubungan Industrial pada 7 Desember 2023 di Aula Disnakertrans Provinsi Banten – Kota Serang. Sebanyak 75 peserta hadir dalam kegiatan bimtek tersebut, yang merupakan perwakilan dari HRD perusahaan anggota APINDO Banten, perwakilan dari unsur pemerintah Disnaker Kabupaten/Kota Se-Banten dan perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh se-Banten.

Adapun narasumber pada kegiatan bernegosiasi ini yaitu M. Zamhari selaku PPSDM Ketenagakerjaan Kemnaker RI dan Afif Johan selaku Praktisi Hubungan Industrial.

DPP APINDO BALI

Ketua	**: Nengah Nurlaba, SH**
Sekretaris	**: Ni Putu Shinta Sutami, S.H.**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 9 Kabupaten / Kota**

Kegiatan penting yang telah dilaksanakan DPP APINDO Bali selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rapat LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, tanggal 11 Januari 2023

2. Rapat Persiapan HUT APINDO ke-71 di Wartam, tanggal 20 Januari 2023

3. Sosialisasi UMK dan Meningkatkan Hubungan Industrial Kota Denpasar dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar di Gedung Santhi Graha, tanggal 24 Januari 2023

4. Tirta Yatra dalam rangkaian acara HUT APINDO ke-71 di Pura Goa Lawah, tanggal 27 Januari 2023

5.Tirta Yatra dalam rangkaian acara HUT APINDO ke-71 di Pura Besakih, tanggal 27 Januari 2023

6. Rapat dan turun langsung ke perusahaan-perusahaan dalam rangka penilaian sarana hubungan industrial yang diwakili unsur APINDO, unsur serikat pekerja dan Dinas Tenaga Kerja serta sertifikasi kompetensi kota Denpasar persiapan acara May Day (Hari Buruh) pada tanggal 1 Mei 2023

7. Rapat dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan tanggal 28 Februari 2023

8. Rapat dengan Seluruh Pengurus DPP APINDO Bali, tanggal 17 Februari 2023

9. Menghadiri undangan Chinese New Year Reception bersama Hong Kong Trade Development Council dan Invest Hong Kong, tanggal 07 Maret 2023

10. Menghadiri undangan Kupas Tuntas PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan), Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort, tanggal 09 Maret 2023

11. Menerima kedatangan dari perusahaan Shipper sebagai calon member APINDO, tanggal 27 Maret 2023

12. Kunjungan Wakil Ketua Umum DPN APINDO Ibu Shinta W. Kamdani di Kantor Sekretariat DPP APINDO Bali, tanggal 27 Maret 2023

13. Memberikan *self love* dalam acara *May Day* (Hari Buruh), tanggal 1 Mei 2023

14. Menghadiri Undangan Trans Studio Mall, tanggal 13 Mei 2023

15. Audensi KSPSI versi Yorrys Raweydi dengan DPP APINDO di Kantor Sekretariat DPP APINDO Bal,i tanggal 23 Mei 2023

16. Dialog Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Fox Hotel Jimbaran, tanggal 23 Mei 2023

17. Musyawarah Nasional (MUNAS) XI 2023 di Jakarta, tanggal 15 Juni 2023

18. Seminar DPK APINDO se-Bali dengan topik "Lika-liku UU Cipta Kerja" di Quest San Hotel, tanggal 28 Juni 2023

19. Rapat Seputar MUNAS XI APINDO Bali di Kantor Sekretariat DPP APINDO Bali , tanggal 11 Juli 2023

20. Rapat Bersama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Wilayah Bali di Kantor Sekretariat DPP APINDO Bali, 29 Agustus 2023

21. Workshop Penguatan Kesekretariatan yang diwakilin oleh Wakil Sekretaris DPP APINDO Bali Jakarta, tanggal 18 September 2023

22. Event Indonesia Mining Summit 2023 di The Mulia Hotel Bali, tanggal 10 Oktober 2023

23. Event *Roadshow* Peluang Investasi IKN Grand Mercure Bali, tanggal 18 September 2023

24. Event International Tax Conference 2023 di Plumeria Ballroom, Padma Legian Resort, Kuta Bali, tanggal 19 Oktober 2023

25. Sosialisasi Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) di Atanaya Hotel, 24 Oktober 2023

26. Sosialisasi PP No.51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memenuhi undangan Dinas Tenaga Kerja ESDM Provinsi Bali di The Sakala Resort Bali, tanggal 16 November 2023

27. Kegiatan Konsultasi Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memenuhi undangan Dinas Tenaga Kerja ESDM Provinsi Bali di The Crystal Hotel Nusa Dua Bali, tanggal 16 November 2023

28. FGD (Focus Group Discussion) Monitoring dan Evaluasi Mediator Hubungan Industrial 2023 di Fontana Hotel Seminyak Bali, tanggal 22 - 24 November 2023

29. Memberikan self love dalam kegiatan Job Fair XVII Kota Denpasar si Alaya Dharma, tanggal 12 Desember 2023

30. Kegiatan APINDO Provinsi Bali kolaborasi dengan Majalah Hindu Indonesia (WARTAM) Tahun 2023.

31. Event Apiwartam Peduli Bali 2023 yang dilaksanakan tanggal 19 November - 18 Desember 2023, dibuka oleh Bapak I Nengah Nurlaba, SH (Ketua DPP APINDO Provinsi Bali) dan terdapat berbagai ragam kegiatan yang melibatkan para *members* APINDO Bali seperti Lomba *Coloring*, Donor Darah, Bakti Sosial, Memberikan Bea Siswa Kepada Anak yang kurang mampu melalui Yayasan Tatwam Asi dan terakhir yaitu *Lunchtalk / Talkshow* (Bangkit dari Masa Sulit).

33. Kegiatan Rapat Kerja Daerah DPP APINDO Bali 2023. Pembahasan permasalahan internal dan eksternal organisasi dan menutup akhir tahun di Inna Bali Heritage Hotel, tanggal 23 Desember 2023

DPP APINDO NUSA TENGGARA BARAT

Ketua	**: I Wayan Jaman Saputra**
Sekretaris	**: Drs. H. Affan Ahmad, M.Si**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 4 Kabupaten / Kota**

Kegiatan DPP APINDO Nusa Tenggara Barat yang telah diselenggarakan selama tahun 2023 :

I. Bidang Oraganisasi dan Pemberdayaan Daerah

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat Sepuluh Kabupaten/Kota dan telah terbentuk sepuluh DPK Kabupaten/Kota dan sampai sekarang yang masih aktif sebanyak Tujuh DPK Kabupaten / Kota sebagai berikut :

1. DPK Apindo Kota Bima telah melaksanakan Muskab pada tanggal 23 September 2021
2. DPK Apindo Kabupaten Bima telah melaksanakan Muskab pada tanggal 20 September 2021
3. DPK Apindo Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan Muskab pada tanggal 22 September 2021
4. DPK Apindo Kabupaten Lombok Timur (penundaan Muskab sesuai Pasal 24 Ayat 1 AD/ART)
5. DPK Apindo Kabupaten Lombok Tengah (penundaan Muskab sesuai Pasal 24 Ayat 1 AD/ART)
6. DPK Apindo Kabupaten Lombok Barat (penundaan Muskab sesuai Pasal 24 Ayat 1 AD/ART)
7. DPK Apindo Kota Mataram telah melaksanakan Muskab pada tanggal 21 September 2021

Sedangkan masih ada 3 DPK Apindo Kabupaten yang masih beku yaitu :

1. DPK Apindo Kabupaten Dompu
2. DPK Apindo Kabupaten Sumbawa
3. DPK Apindo Kabupaten Lombok Utara

Sedang diupayakan untuk pembinaan dan pembenahan kembali. Jumlah anggota DPK Apindo Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Barat sampai dengan saat ini sebanyak 400 daftar terlampir.

II. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industry UMKM bagi pengerajin dan usaha makanan ringan bekerjasama dengan DInas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Membantu pemasaran produk unggulan daerah dengan mempromosikan melalui media online bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan kepesertaan dan kepatuhan membayar kewajiban bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan.
4. Melakukan pemetaan kebutuhan pemagangan bekerjasama dengan DInas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lembaga Pelatihan Kerja.

Untuk tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi pemagangan dalam negeri sebanyak 238 peserta dengan rincian sebagai berikut :

1. Kota Mataram 40 peserta
2. Kabupaten Lombok Barat 50 peserta
3. Kabupaten Lombok Utara 19 peserta
4. Kabupaten Lombok Tengah 20 peserta
5. Kabupaten Lombok Timur 20 peserta
6. Kabupaten Sumbawa Barat 19 peserta
7. Kabupaten Sumbawa 20 peserta
8. Kota Bima 30 peserta
9. Kabupaten Bima 20 peserta

III. Bidang Ketenagakerjaan

Adapun kegiatan yang telah dilakukan :

1. Melaksanakan rapat koordinasi yang diikuti oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja bersama pengurus DPK Apindo Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Barat (secara online).
2. Melakukan sosialisasi bersama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan tentang perlindungan jaminan social Ketenaga Kerjaan.
3. Melakukan kegiatan penilaian pemberian penghargaan jaminan sosial ketenaga kerjaan (anugrah paritrana) tahun 2022.
4. Mengikuti pelaksanaan Forum Group Discation pengembangan kemitraan pelatihan pemagangan sertifikasi dan penempatan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat diikuti oleh 50 orang anggota Apindo di Hotel Aruna Senggigi.
5. Melakukan pemetaan kebutuhan pemagangan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lembaga Pelatihan Kerja dengan mengikut sertakan dunia industri.

IV. Bidang Hubungan Industrial

1. Memberikan edukasi kepada karyawan di lingkungan perusahaan untuk tetap disiplin mematuhi protocol kesehatan.
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kesahatan dan Polda Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan jumlah tenaga kerja yang telah divaksin sebanyak 1300 orang.

3. Melaksanakan program pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bekerjasama dengan OJK dengan target vaksinasi sebanyak 5000 orang.
4. Ikut aktif dalam pelaksanaan liga futsal tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat daam rangkay May Day tahun 2023 dengan tema ketupat May Day dengan sub tema meraih kemenangan dengan mengutamakan silaturahim menuju Industrial Piace.
5. Ikuit aktif bersama Stake Holder pariwisata dalam rangka ikut mengsukseskan pelaksanaan event Internasional Moto GP di kawasan Sirkuit Mandalika yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Oktober 2023.
6. Mengikuti rapat Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 dengan besaran upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebesar Rp 2.444.067 sesuai keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-721 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023.
7. Mengikuti sidang LKS Tripartit tahun 2023 dengan usulan pokok-pokok bahasan bidang LKS Tripartit provinsi Nusa Tenggara Barat masa Sidang tahun 2023 dari unsur Apindo sebagai berikut :

A. Masalah ketenaga kerjaan yang dirasakan saat sekarang yakni produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang rendah.

B. Saran dan pertimbangan :

1. Mempersiapkan SDM adalah kunci melalui pengembangan keterampilan yang dibutuhkan berdasarkan klasifikasi sector.
2. Bidang pendidikan dan pelatihan dengan modul inovatif artinya pemanfaatan tekhnologi dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
3. Menyiapkan skill untuk menghadapi era tantangan pekerjaan masa depan di tengah revolusi industry akibat digitalilasi dan otomatisasi.
4. Mendorong perbankan untuk mendukung berbagai program untuk membantu petani dan Usaha Kecil Menengah untuk memberikan pembiayaan murah melalui program tim percepatan akses Keuangan Daerah.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan dimana mestinya.

DPP APINDO NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua	**: Bobby Pitoby**
Sekretaris	**: Toni Angtariksa Dima, S.E**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 9 Kabupaten / Kota**

Kegiatan DPP APINDO Nusa Tenggara Timur yang telah diselenggarakan selama tahun 2023 :

I. Musyawarah Provinsi VI DPP APINDO NTT, tanggal 11 April 2023

2. Pelantikan DPP APINDO masa bakti 2023 - 2028, tanggal 12 April 2023

3. Orientasi pengurus dan rapat perdana

4. Musyawarah Nasional XI DPN APINDO, pada tanggal 14 - 16 April 2023

5. Pembentukan Mall Pelayanan Publik Kota Kupang

6. Penutupan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Juli 2023)

7. Pembentukan FKLPID (Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah)
   - Apindo terpilih sebagai Ketua FKLPID NTT

DPP APINDO KALIMANTAN UTARA

Ketua	: Peter Setiawan
Sekretaris	: Chandra Sugiharto, SE
Dewan Pimpinan Kab/Kota	: 4 Kabupaten / Kota

Kegiatan DPP APINDO Kalimantan Utara yang telah diselenggarakan selama tahun 2023 :

1. Apindo Bersama STMIK PPKIA Siapkan Mahasiswa Menjadi Pengusaha dalam UMKM Merdeka

- Tempat : Kantor DPP APINDO Kaltara
- Tanggal : 24 Juli 2023

Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, Peter Setiawan melakukan penandatangan nota kesepahaman bersama dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) PPKIA Tarakanita Rahmawati yang dilakukan langsung Ketua STMIK PPKIA, Endyk Noviyantono, M.Kom. Dalam kerjasama tersebut, Apindo Kaltara bersama STMIK PPKIA akan mendukung pengembangan dunia kerja melalui kegiatan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Kalimantan Utara.

2. APINDO Peduli Korban Kebakaran

- Tempat : Beringin 4, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah
- Tanggal : 11 Agustus 2023

Kebakaran yang kembali melanda kawasan pesisir di Tarakan, menuai keprihatinan dari Pengurus DPP Apindo Kaltara. Sebab, kebakaran yang terjadi di Beringin 4, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah pada Minggu 6 Agustus 2023 pukul 02.31 tersebut, menghanguskan 65 rumah dan membuat 179 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Ketua DPP Apindo Kalimantan Utara yang dipimpin langsung ketuanya, Piter Setiawan langsung bergerak bersama sejumlah pengusaha serta UMKM yang berada di bawah binaan Apindo Kaltara, memberikan bantuan dan sumbangan berupa makanan siap saji dan parsel snack untuk anak-anak

3. Kunjungan APINDO Kaltara dengan PERTAMINA Hulu Indonesia

- Tempat : PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Zona 10 Tarakan Field
- Tanggal : 25 Agustus 2023

Dalam rangka membangun sinergitas dengan stakeholder di Kaltara, Jumat 25 Agustus 2023 pengurus DPP APINDO Kaltara melakukan silaturahmi dan olahraga bersama dengan Manajemen PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Zona 10 Tarakan Field. Dalam diskusi ringan tersebut, Ketua DPP APINDO Kaltara Piter Setiawan yang disambut langsung Tarakan Field Manager Isrianto Kurniawan sama-sama bersepakat bahwa kualitas UMKM di Kalimantan Utara sangat penting untuk ditingkatkan. Untuk itu APINDO Kaltara sangat konsen dengan program APINDO UMKM MERDEKA yang mulai dijalankan September ini.

4. Apindo Peduli Korban Kebakaran Bersama Lurah Selumit Pantai

- Tempat : RT. 20 Selumit Pantai
- Tanggal : 25 Agustus 2023

DPP APINDO Kalimantan Utara yang dipimpin langsung Ketua APINDO Kaltara, Piter Setiawan kembali menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran di RT.20 Kelurahan Selumit Pantai. Penyerahan bantuan berupa ratusan paket makanan siap saji dan ratusan paket parsel untuk anak-anak tersebut secara simbolis diterima Kepala BPBD Tarakan, Yonsep.

5. APINDO Kaltara Jalin Kerjasama dengan Gepak Kuning Kaltara

- Tempat : Kantor DPP APINDO Kaltara
- Tanggal : 05 September 2023

Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, Peter Setiawan melakukan penandatangan nota kesepahaman bersama dengan GEPAK Kuning Tarakan yang dilakukan langsung Ketua GEPAK DPC Tarakan, Dedy Kamarullah. di sekretariat APINDO Kaltara, Jl. Kusuma Bangsa Tarakan. Dalam kerjasama tersebut, APINDO Kaltara bersama GEPAK akan mendukung pemberdayaan masyarakat lokal pada dunia usaha UMKM dan Industrial dan mendukung pada bidang layanan lainnya di kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

6. Apindo Jadi Narasumber di Pembekalan Yudisium STMIK PPKIA Tarakanita

- Tempat : Swissbell Hotel Tarakan
- Tanggal : 10 September 2023

Ketua APINDO Kaltara Peter Setiawan diundang sebagai narasumber di acara pembekalan calon wisudawan oleh kampus STMIK PPKIA Tarakan, Sabtu 9 September 2023 di Swissbell Hotel Tarakan. Dalam diskusi yang diikuti seratus lebih mahasiswa calon wisudawan ini, Ketua APINDO Kaltara menekankan agar setelah lulus dari dunia perkuliahan, para mahasiswa harus memiliki Mental Pengusaha, bukan mental karyawan. Menurutnya, anak muda lulusan PPKIA Tarakan memiliki bakat yang luar biasa. "Dan ingat. Dalam berbisnis harus terus berinovasi.. Kalau tidak inovasi maka bisnis bisa mati," kata Peter Setiawan.

7. APINDO dan Pengurus Bersilaturahmi ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tarakan

- Tempat : Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) tarakan
- Tanggal : 11 September 2023

Peter berharap dengan adanya sinergitas yang baik maka proses kelangsungan dunia usaha di Tarakan pasti akan tumbuh dengan baik. Sebab salah satu tugas dari Apindo adalah membantu semua dunia usaha agar perekonomian di Tarakan bertumbuh dengan sehat dan baik sehingga berdampak juga kepada pendapatan daerah. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Ketua Apindo berharap ada sosialisasi yang dilakukan oleh KSOP Tarakan kepada para pelaku dunia usaha dan pengusaha agar semua memahami izin-izin apa saja yang diperlukan dan bagaimana prosedur pengurusannya.

8. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tanjung Selor pada Tahun 2024

- Tempat : Tanjung Selor, Kalimantan Utara
- Tanggal : 17 November 2023

Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 3.361.653. Jika dibandingkan dengan UMP tahun 2023, angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 109.951 atau 3,38 persen. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan untuk UMP Kaltara tahun 2024 itu sudah ditetapkan dan surat keputusan (SK) penetapan UMP tahun 2024 itu juga sudah ditandatangani Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang.

9. Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Malinau pada Tahun 2024

- Tempat : Malinau, Kalimantan Utara
- Tanggal : 19 November 2023

Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Malinau untuk tahun 2024 telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara, nomor 188.44/K.583/2023, dengan nilai Rp.3.607.100 dari sebelumnya Rp.3.494.498,55. Langkah ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2024, berdasarkan perhitungan variabel ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu sesuai peraturan perundang-undangan

10. Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan pada Tahun 2024

- Tempat : Tarakan, Kalimantan Utara
- Tanggal : 22 November 2023

Dewan Pengupahan Kota Tarakan menyerahkan penentuan besaran Upah Minimum Kota Tarakan tahun 2023 kepada Wali Kota Tarakan dan akademisi. Pasalnya sampai berakhirnya rapat Dewan Pengupahan Kota Tarakan pada Jumat petang (24/11/2023), tidak tercapai kesepakatan antara serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Tarakan. "Karena tidak ada kesepakatan antara serikat dengan Apindo sehingga sesuai dengan tata tertib diserahkan kepada pemerintah kota," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan, Agus Sutanto, usai rapat. Pihaknya hanya merekomendasikan kepada Wali Kota bahwa besaran UMK tahun 2024 sebesar Rp 4.188.174 untuk diteruskan kepada Gubernur Kaltara untuk ditetapkan. Angka itu didasarkan pada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi serta nilai alpa. Di antara range 0,10 sampai 0,30, Pemkot Tarakan memberikan acuan di angka 0,21. Nilai ini telah mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka, kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian di Tarakan dan sebagainya. Dengan mengacu nilai alpa tersebut, maka terjadi kenaikan UMK sebesar 3,28 persen atau sebesar Rp 132.816 dari UMK tahun lalu.

11. *Focus Group Discussion* Link and Match SMK dengan Dudi Kalimantan Utara

- Tempat : Hotel Diamond
- Tanggal : 24 November 2023

Dalam diskusi tersebut mengemuka kebutuhan untuk segera mendata bidang-bidang yang dibutuhkan di industri, dan menyusun kompetensi yang dibutuhkan dan perlu dipenuhi oleh lulusan SMK di Kalimantan Utara. Pentingnya membangun karakter dan budaya kerja juga menjadi satu hal penting yang harus diperhatikan Kepala Sekolah, karena keterampilan dan sertifikat kompetensi tidak berarti jika lulusan tidak memiliki sikap dan karakter yang baik. Selain itu juga perlu strategi SMK agar menyiapkan kemampuan bahasa asing lulusan, dan menumbuhkan mental wirausaha bagi para siswanya.

12. Sosialisasi Program Deputi SDM Iptek dengan BRIN

- Tempat : Kantor DPP APINDO Tarakan
- Tanggal : 07 Desember 2023

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan perhatian publik terhadap keberadaan dan tugas fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perlu dilakukan promosi program, kegiatan, skema, dan struktur BRIN. Terlebih, BRIN diamanahi sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk manajemen talenta riset nasional. Hal itu sejalan dengan tujuan BRIN, yaitu menciptakan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia

13. Job Fair SMK Negeri 2 Tarakan

Tempat : Ruang Serba Guna SMKN 2 Tarakan
Tanggal : 11 – 12 Desember 2023

Sebanyak delapan perusahaan membuka lowongan kerja pada kegiatan Job Fair yang digelar di SMKN 2 Tarakan. Job Fair diperuntukkan bagi siswa kelas 12, alumni SMK dan SMA ini diharapkan dapat mengakomodir para pencari kerja di Kota Tarakan. Job Fair dilatarbelakangi adanya program Direktorat Kementerian bahwa sekolah memiliki tanggung jawab memfasilitasi dan mempertemukan alumni atau calon alumni dengan industri.

14. Talk Show Disabilitas

Tempat : Gedung Serbaguna Walikota Tarakan
Tanggal : 21 Desember 2023

Tidak dipungkiri, hingga saat ini masih banyak kaum disabilitas yang mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial, baik dari segi pergaulan, bisnis, maupun pekerjaan. Sehingga pemerintah dan Perkumpulan penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) terus berupaya agar kaum difabel mendapatkan hak setara seperti pada umumnya.

DPP APINDO KALIMANTAN TENGAH

Ketua	: Frans Martinus. S.E.
Sekretaris	: Teki Praseyanti
Dewan Pimpinan Kab/Kota	: 7 Kabupaten / Kota

Kegiatan DPP APINDO Kalimantan Tengah yang telah diselenggarakan selama tahun 2023 :

1. Narasumber di program TVRI Kalteng Bicara dengan topik "Bertahan Dari Resesi, Bangkit Dan Berjuang untuk Kemajuan Dunia Usaha", pada tanggal 31 Januari 2023.

2. Menjadi penilai pada kegiatan Penilaian Nominasi Paritrana Award tahun 2022, tanggal 9 Februari 2023.

3. Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Disnakertrans Provinsi Kalteng di Luwansa Hotel Palangka Raya pada tanggal 22 Februari 2023.

4. Rapat Forum Koordinasi Jejaring Pemagangan Kalimantan Tengah di Aula Disnakertrans Provinsi Kalteng di Palangka Raya pada tanggal 15 Maret 2023.

5. Rapat Koordinasi Pokja Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalteng & Informan Ahli (AI) Bersama Diskominfosantik Prov. Kalteng di Aula Diskominfosantik Prov. Kalteng Palangka Raya yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023.

6. Koordinasi dengan Polda Kalteng terkait persiapan acara Joint Analysis Bid. Sosial Budaya; May Day dan isu terkini terkait PERPPU Cipta Kerja di Sekretariat DPP APINDO Kalteng pada tanggal 3 April 2023.

7. Diskusi terkini tentang Perppu Cipta Kerja yang baru disahkan, semoga semua kondusif dalam pelaksanaan nya bersama Mabes Polri, Polda Kalteng, Disnakertrans Prov. Kalteng dan BPJS Kesehatan di Palangka Raya pada tanggal 12 April 2023.

8. Rapat Persiapan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di Aula Disnakertrans Provinsi Kalteng Palangka Raya pada tanggal 8 Mei 2023.

9. Forum Koordinasi BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Tinggi dan stakeholder lain, bersyukur atas capaian angka kepatuhan yang semakin meningkat di Hotel Bahalap Palangka Raya pada tanggal 30 Mei 2023.

10. Konsolidasi nasional APINDO se-Indonesia menjelang Musyawarah Nasional APINDO di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023.

11. Launching Permenakertrans No. 88 tahun 2023 di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2023.

12. Deklarasi "Tripartit tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja" di Jakarta, pada tanggal 1 Juni 2023.

13. Munas XI APINDO di Hotel JS Luwansa Jakarta, Ibu Shinta W. Kamdani terpilih menjadi Ketua Umum untuk lima tahun ke depan (2023-2028) mengemban tugas dan amanah besar memajukan dunia usaha dengan bendera/ panji APINDO di seluruh Indonesia. "Pengusaha Bersatu, Indonesia Maju" yang di-laksanakan pada tanggal 14 - 16 Juni 2023.

14. Dialog Serap Aspirasi Penerapan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bersama Kemenakertrans, APINDO, Serikat Pekerja dan Akademisi di Hotel Boutique Aquarius Palangka Raya, pada tanggal 26 Juli 2023.

15. Pengukuhan DPN Apindo, bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, pada tanggal 31 Juli 2023.

16. Marathon FGD Dunia Usaha dan KPK, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur ProvinsiKalimantan Tengah pada tanggal 3 - 4 Agustus 2023.

17. Diskusi pengembangan UMKM di Kalteng, di hari Gerak Bhayangkari ke-71 bersama Kapolda Kalteng dan Diriintelkam di lapangan Barigas Mapolda Kalteng Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2023.

18. Menyampaikan rencana Program UMKM Merdeka kepada Wakil Rektor III Universitas Palangka Raya, dalam rangka sinergi strategis untuk mahasiswa yang sudah dan akan memulai usaha,, di Ruang Rektorat Universitas Palangka Raya, pada tanggal 30 Agustus 2023.

19. Pada tanggal 29 September 2023, bertempat di Kampus FKIP UPR, APINDO Kalteng menandatangani PKS bersama Dekan FKIP terkait Program UMKM Merdeka yang digagas oleh APINDO, semoga menjadi awal yang baik untuk kemajuan bersama terkhusus untuk melahirkan wirausaha muda dari kalangan mahasiswa.

20. Tim Juri dari dunia usaha dalam kegiatan Kompetisi Wirausaha Muda NAPOLEON 1 St Poltekes Kemenkes Palangka Raya di Palangka Raya pada 9-10 November 2023.

21. Forum Koordinasi Pengawasan & Kepatuhan BPJS Kesehatan, Kejaksaan, Disnakertrans dan APINDO di Hotel Bahalap Palangka Raya, pada tanggal 23 November 2023.

22. Sidang Penetapan UMP dan UMK se Kalimantan Tengah di Aula Disnakertrans Provinsi Kalteng, di Palangka Raya pada tanggal 30 November 2023.

23. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2023 di Aula Bank Indonesia Perwakilan Palangka Raya pada tanggal 1 Desember 2023.

24. Lokakarya Dewan Pengupahan Nasional dengan tema "Mewujudkan Pengupahan yang Berkeadilan dan Berdaya Saing" di Prime Plaza Hotel Sanur Bali pada 13 Desember 2023.

25. Peresmian kantor baru salah satu mitra APINDO yaitu APHI Komda Kalteng di Palangka Raya pada tanggal 19 Desember 2023.

26. Penutupan pemagangan bersama FKJP Kalteng di Aula Disnakertrans Provinsi Kalteng Palangka Raya. Diharapkan lapangan kerja semakin tersedia luas, SDM kita semakin berkualitas dan siap berkarya dalam bursa kerja lokal, nasional maupun internasional, pada tanggal 19 Desember 2023.

27. Makan siang dan berdiskusi santai bersama Sekum DPN APINDO dan rekan Pengurus DPP APINDO Kalteng, dengan topik bersinergi dan kolaborasi untuk kemajuan organisasi serta konsistensi melahirkan ide dan gagasan baru dalam meningkatkan Tripartit Ketenagakerjaan di Palangka Raya pada tanggal 19 Desember 2023.

DPP APINDO KALIMANTAN TIMUR

Ketua	**: M. Slamet Brotosiswojo**
Sekretaris	**: H. Soegianto, SE**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 8 Kabupaten / Kota**

Sikap APINDO Terkait Perppu Cipta Kerja Disampaikan dalam Seminar Ketenagakerjaan

Ketua APINDO Kaltim menjadi narasumber Seminar Ketenagakerjaan, mengupas Perppu Ciptaker

Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosiswoyo menjadi salah satu narasumber pada Seminar Ketenagakerjaan yang mengupas Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pengganti UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Kegiatan itu juga menghadirkan mantan Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sahar Sinurat.

Dalam paparannya, Slamet menyebut secara umum APINDO menyatakan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 di luar dugaan. "Apindo yang sedang menunggu untuk dilibatkan pemerintah dalam pembahasan substantif perubahan UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, cukup surprise dengan terbitnya Perppu tersebut. Namun, dunia usaha dapat memahaminya untuk menjamin kepastian berusaha," katanya.

Meski begitu, APINDO dan unsur asosiasi usaha lainnya memerlukan waktu untuk memahami PERPPU 2/2022 secara komprehensif .Disebabkan dokumen PERPPU setebal lebih dari seribu halaman dengan cakupan 10 klaster. "Saat ini APINDO secara khusus mencermati substansi PERPPU untuk klaster ketenagakerjaan, tanpa mengabaikan klaster klaster lainnya." Hal tersebut mengingat klaster ketenagakerjaan yang sangat luas mendapat perhatian berbagai pihak, dan juga klaster yang menjadi fokus perhatian utama aktivitas APINDO.

Hasil kajian sementara pada klaster Ketenagakerjaan diketahui PERPPU berubah secara substansial. Formula penghitungan Upah Minimum (UM) yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu memberatkan dunia usaha mengingat UU Cipta Kerja hanya mencakup 1 (satu) variabel yaitu pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

"Pengaturan Alih Daya juga diubah yang menyebutkan bahwa Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan alih daya, yang dikhawatirkan kembali ke spirit UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan," jelasnya.

Mengenai alih daya, APINDO melihat yang diperlukan adalah terciptanya ekosistem yang sehat dan fleksibel untuk menarik investor menciptakan lapangan kerja. "Maka pembatasan alih daya justru akan membuat tujuan tersebut sulit dicapai," katanya. Sementara Formula Upah Minimum (UM) dalam PERPPU akan menyebabkan penyusutan penyerapan tenaga kerja karena UM Indonesia berpotensi menjadi yang tertinggi di ASEAN dalam 5 (lima) tahun mendatang.

"Dalam kondisi penciptaan lapangan kerja yang semakin menurun berdasar data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) di mana dalam 7 (tujuh) tahun terakhir daya serap pekerja turun tidak sampai 1/3 nya, kebijakan kenaikan UM berdasar formula PERPU akan semakin membebani dunia usaha," kata Slamet.

Proyeksi yang dilakukan APINDO dengan mengolah dari berbagai sumber menunjukkan bahwa di tahun 2025 UM di Indonesia akan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Perubahan substantif tersebut harus diletakkan dalam konteks reformasi ekonomi struktural untuk penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Dalam perspektif dunia usaha, tujuan diterbitkannya UU Cipta Kerja adalah untuk kemudahan penciptaan lapangan kerja agar masyarakat memiliki daya beli yang berkontribusi mengurangi kemiskinan. Pemerintah diharapkan menimbang dengan cermat kemampuan membayar perusahaan, secara khusus usaha padat karya serta keterbatasan ketrampilan sumber daya manusia yang masih didominasi tenaga kerja dengan keterampilan rendah.

Pembebanan biaya tenaga kerja yang melebihi kemampuan perusahaan untuk membayarnya akan melanggengkan tidak terpenuhinya ketaatan terhadap regulasi dan dapat menyebabkan dunia usaha terjebak untuk beroperasi secara informal.

APINDO Kaltim Sampaikan Masukan ke KPK

Pengurus APINDO Kaltim bersama GAPKI dan Indonesia Global Compact Network (IGCN)

Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur (DPP APINDO Kaltim) menyampaikan sejumlah pandangan kepada Direktorat Antikorupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai salah satu upaya menciptakan pencegahan korupsi. Sejumlah masukan disampaikan Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, bersama sejumlah pengurus.

Sebelumnya Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosiswoyo dan sejumlah pengurus menerima kunjungan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha yang merupakan bagian dari Tim Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), APINDO Kaltim juga bekerja sama dengan *United Nations Global Compact (UNGC), United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)* sebagai komitmen melawan korupsi di sektor berbasis lahan.

"Masukan-masukan ini kita sampaikan sebagai salah satu komitmen APINDO Kaltim dalam mendukung penyelenggaraan iklim usaha yang bersih dan bebas dari korupsi, seperti suap, gratifikasi maupun pemerasan," ujar Slamet. Pernyataan itu disampaikan Slamet usai kegiatan diskusi bersama Indonesia Global Compact Network (IGCN) sebuah organisasi di bawah badan PBB yang fokus dalam pemberantasan korupsi dan obat-obatan terlarang – United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC).

Presiden IGCN, Yaya W. Junardy menambahkan, IGCN bertujuan memobilisasi gerakan global untuk perusahaan dan pemangku kepentingan berkelanjutan dalam menciptakan dunia yang lebih baik. "UN Global Compact mendukung perusahaan untuk melakukan

bisnis secara bertanggung jawab dengan menyelaraskan strategi dan operasi bisnis melalui prinsip hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan dan antikorupsi," kata Yaya.

Selain itu IGCN juga melakukan aksi strategis untuk memajukan tujuan sosial yang lebih luas, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, dengan penekanan pada kolaborasi dan inovasi. Yaya melanjutkan ada tiga tahap dalam memerangi korupsi, pertama dari internal institusi, kemudian eksternal, dan terakhir adalah kolaborasi.

"Di internal institusi melalui evaluasi risiko, menerapkan program kepatuhan dan memberikan pelatihan kepatuhan kepada manajer. Kemudian untuk eksternal dengan membagikan kebijakan internal, pengalaman, praktik terbaik dan kisah suksesnya dengan kepentingan eksternal, lalu terakhir dengan melibatkan pesaing, penyedia, dan pemangku kepentingan lainnya melalui fasilitator netral serta inisiatif-inisiatif aksi," jelasnya.

APINDO Kaltim Tandatangani Komitmen Bersama Disnaker, KSBSI dan GAPKI

APINDO Kaltim, GAPKI Kaltim, Disnakertrans dan KSBSI komitmen bersama meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, khususnya terhadap keselamatan dan kesehatan serta kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim mendukung komitmen bersama yang dibuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Para pihak bakal menandatangani komitmen bersama meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, khususnya terhadap keselamatan dan kesehatan serta kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit. Komitmen dibuat lantaran sektor perkebunan kelapa sawit di Kaltim menyerap banyak tenaga kerja, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Komitmen bersama dibuat untuk mempertahankan upaya-upaya untuk terus melakukan praktik bisnis baik dalam mendorong produktivitas, meningkatkan daya saing pasar, menyejahterakan pekerja dan mencapai pembangunan yang setara, inklusif dan berkelanjutan.

Berikut adalah komitmen bersama yang dibuat pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan guna menciptakan kondisi kerja yang layak, aman dan sehat.
2. Mempromosikan dan mendorong penerapannya budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3)di tempat kerja.
3. Mendukung dan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja guna mencegah diskriminasi, risiko kekerasan dan pelecehan seksual.
4. Mendorong produktivitas dan daya saing sektor perkebunan kelapa sawit Kaltim yang tangguh, berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai tindak lanjut atas komitmen itu, para pihak juga sepakat akan melaksanakan sejumlah upaya, yaitu:

1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional, daerah, dan sektoral yang berlaku terkait hukum ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kesetaraan gender di tempat kerja
2. Membentuk forum dialog tripartit plus guna meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi aktivitas di antara pelaku pasar.
3. Menyusun program dan kegiatan untuk mempromosikan dan mendorong penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja dan kesetaraan gender di tempat kerja.
4. Memastikan tempat kerja telah memenuhi syarat-syarat K3 yang memadai, layak, sehat, dan aman sesuai dengan standar, bebas diskriminasi, dan risiko kekerasan dan pelecehan seksual.

Komitmen itu ditandatangani Ketua Apindo Kaltim, M Slamet Brotosiswoyo, Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, Ketua GAPKI Muhammdsjah Djafar dan Ketua KSBSI, Sulaeman Hattase.

Ketua Apindo Kaltim, Slamet Brotosiswoyo menyambut baik komitmen tersebut. "Apindo menyambut baik kesepakatan bersama antara Disnaker atas nama pemerintah daerah bersama ILO dan serikat pekerja serikat buruh ini, tentunya ini sesuatu hal yang baik di bidang ketenagakerjaan," katanya.

Menurut Slamet, Apindo Kaltim sudah memiliki dengan serikat pekerja serikat buruh, tinggal bagaimana kesepakatan dengan tripartit itu bisa dikembangkan melalui sektor atau bidang-bidang jenis sesuai peraturan. "Untuk melaksanakan kesepakatan bersama itu perlu pendalaman bersama. Tidak cukup cuma kesepakatan saja karena perlu pengawalan kesepakatan itu sendiri," imbuhnya.

Slamet menambahkan perlunya monitoring di lapangan apakah poin-poin yang tertuang sudah mulai diterapkan. "Termasuk menyangkut bagaimana pembentukan tim monitoring, bagaimana pembiayaan tim dan sebagainya," ujar Slamet lagi.

Ia mengakui komitmen ini sebagai langkah yang baik namun dalam pelaksanaannya tidak mudah. Perlu monitoring dan tim bersama agar kesepakatan ini memang ada manfaat. "Dan tentunya ini harapan kita supaya mencegah kecelakaan kerja, kedua ada kesamaan gender. Kalau tidak ada kecelakaan kerja pasti akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menghemat biaya perawatan," kata Slamet.

Slamet menambahkan penerapan K3 dalam perusahaan menimbulkan biaya. Namun apabila tidak ada kecelakaan, maka secara tidak langsung tergantikan dengan tidak adanya kecelakaan.

Dewan Pengupahan Tetapkan Kenaikan UMP Kaltim 2024 Sebesar 4,34 Persen

Rapat Dewan Pengupahan Kaltim dalam menetapkan UMP Kaltim tahun 2024.

Dewan Pengupahan Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim untuk tahun 2024. Setelah berbulan-bulan pembahasan yang diwarnai ketegangan, UMP Kaltim 2024 akhirnya dicapai dengan menetapkan kenaikan sebesar 4,34 persen. Hal ini memperlihatkan kompromi antara serikat pekerja dan unsur pelaku usaha yang telah lama berdebat mengenai besaran kenaikan UMP.

Menurut keputusan Dewan Pengupahan Kaltim, UMP Kaltim tahun 2024 akan mengalami kenaikan sebesar 4,34 persen, atau sekitar 139.068,64 rupiah dari UMP tahun sebelumnya. Dengan peningkatan ini, UMP Kaltim tahun 2024 akan mencapai angka 3.340.464,68 rupiah. Besaran UMP Kaltim 2024 disampaikan anggota Dewan Pengupahan Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, Jumat (17/11/2023).

"Dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, baik keberlanjutan dunia usaha maupun kesejahteraan pekerja, kami telah menyepakati besaran UMP Kaltim 2024," kata Slamet Brotosiswoyo yang juga ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim. Slamet mengakui, proses penetapan UMP Kaltim 2024 berjalan sangat alot. Para wakil serikat buruh/ serikat pekerja menuntut kenaikan sebesar 15 persen, mengingat kenaikan harga bahan bakar minyak serta harga pangan yang terjadi selama setahun terakhir.

Serikat pekerja menuntut kenaikan UMP sebesar 15 persen dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Di sisi lain, unsur pelaku usaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat bahwa UMP harus ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak boleh memberatkan dunia usaha.

"Kami ingin agar penentuan UMP 2024 mengacu pada aturan pemerintah yang telah mengeluarkan formula upah minimum yang mencakup 3 variabel, yaitu: inflasi, pertumbuhan ekonomi (PE) dan indeks tertentu," imbuh Slamet.

Berdasarkan rumus itu, diperoleh angka 4,34 persen. "Artinya tidak di bawah 3 persen, dan bukan di atas 5 persen," imbuh Slamet. Menurut Slamet, Apindo mencari jalan tengah dengan tetap mempertahankan keberlanjutan usaha dengan menghindari beban biaya yang berlebihan.

Setelah perundingan yang panjang dan berliku, akhirnya dicapai kata sepakat pada kenaikan UMP sebesar 4,34 persen. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi titik tengah yang memenuhi kepentingan baik para pekerja maupun pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan UMP yang telah ditetapkan dapat memberikan keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Kenaikan UMP Kaltim tahun 2024 ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kelangsungan usaha. Meskipun tidak semua pihak mungkin sepenuhnya puas, kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik di masa mendatang.

Kunjungan Dewan Pengupahan Kaltim ke Jatim dalam Rangka Studi Banding Penetapan UMK

Dewan Pengupahan Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Dewan Pengupahan Jawa Timur di Surabaya pada 24-27 Oktober 2023. Dewan Pengupahan Kaltim juga mengunjungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur dalam rangka studi banding terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK).

POTENSI INVESTASI

APINDO Seluruh Indonesia Gelar Pertemuan dengan Otorita IKN di Balikpapan, Bahas Pembangunan IKN

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) seluruh Indonesia akan menggelar pertemuan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara pada Rabu, 14 Desember 2022, di Balikpapan.

Pertemuan itu akan dihadiri Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Kementerian ATR/BPN,

Kemenko Marves, Kepala Otorita, Bambang Susantono, dan pejabat terkait.

Dari DPN APINDO akan hadir Ketua Dewan Pertimbangan, Sofyan Wanandi, Ketua Umum, Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum, Suryadi Sasmita, Shinta Kamdani, Sekretaris Umum Eddy Hussy dan Ketua Bidang Properti & Kawasan industri, Sanny Iskandar.

Ketua APINDO se-Indonesia bersama Ketua Dewan Pertimbangan Sofjan Wanandi menunjuk Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosiswoyo mengatakan, pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan ibu kota negara, serta isu terkini seputar kebijakan pemerintah tahun 2023.

"Untuk pertama kalinya Ketua DPP APINDO dari seluruh wilayah Indonesia menggelar pertemuan di Kalimantan Timur. Tujuan utamanya ingin mendengar secara langsung kebijakan pembangunan IKN tahun depan," kata Slamet Brotosiswoyo. Tak menutup kemungkinan, kata Slamet, pertemuan itu juga akan dimanfaatkan APINDO untuk memperdalam informasi terkait rencana pemerintah melakukan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Kembali Slamet mengatakan, sebelum menggelar pertemuan dengan Otorita IKN, pada hari Rabu (14/12/2022), para pengurus APINDO akan mengunjungi Titik Nol IKN. Sementara dalam surat undangan yang dilayangkan Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara, pertemuan itu akan dimanfaatkan untuk menggelar Pra Konsultasi Publik Revisi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Sekretaris Otorita IKN (OIKN), Achmad Jaka Santos Adiwijaya dalam undangan yang dikirim ke Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjelaskan, revisi UU IKN diusulkan pemerintah lantaran menemukan hambatan regulasi eksisting. Yang secara signifikan diperkirakan akan membuat OIKN sulit melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (3P) secara agile, terutama terkait dengan mekanisme birokrasi.

"Menjelang pelaksanaan pembangunan besar-besaran di Ibu Kota Nusantara pada awal tahun 2023, OIKN menemukan hambatan regulasi eksisting yang secara signifikan diperkirakan akan membuat OIKN sulit untuk melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (3P) secara agile, terutama terkait dengan mekanisme birokrasi," tulis Achmad Jaka Santos Adiwijaya.

Proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dan rancangan peraturan pemerintah tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal, bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, yang telah disusun secara intens untuk menjawab kesulitan OIKN dalam melaksanakan 3P, berimplikasi pada urgensi untuk melakukan perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Pada tanggal 23 November 2022 pada rapat dengan Badan Legislatif, DPR dan Pemerintah cq. Menteri Hukum dan HAM telah menyepakati Perubahan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara masuk dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Tahun 2024.

"Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 dibutuhkan dengan tujuan agar Pemerintahan Daerah Khusus IKN dan pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN dapat diselenggarakan oleh Otorita IKN secara optimal," kata Achmad Jaka.

Ia menambahkan, optimalisasi peran OIKN dilakukan melalui pengaturan mengenai kewenangan khusus, pendanaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan, pembiayaan, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN.

Perubahan regulasi UU tentang IKN diharapkan dapat memberikan penguatan kepada OIKN untuk mengakselerasi pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk IKN dan Perincian Rencana Induk IKN.

Pada UU No. 3/2022 Pasal 24 disebutkan bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ("PP No. 17/2022").

Pada Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan adapun skema pendanaan pada dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara terdiri dari skema pendanaan yang berasal dari pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan ADP, penggunaan skema KPBU IKN dan keikutsertaan pihak lain.

Pengelolaan tata ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU IKN dan Perpres 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional 1KN (RTR KSN IKN) menjadi pedoman yang sangat penting dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara sejalan dengan Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk.

Sebagai tindak lanjut RTR KSN IKN, sedang disusun Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara ("RDTR IKN") dan sampai dengan saat ini masih dalam proses konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan. Pengaturan mengenai RDTR IKN merupakan prasyarat penting sebelum dimulainya kegiatan investasi/usaha di IKN. Mengingat RDTR IKN merupakan dokumen rujukan utama untuk pemberian konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("KKPR") bagi kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara. Penetapan RDTR IKN nantinya diharapkan dapat lebih ramah investasi baik bagi investor dalam dan luar negeri; mampu mengitegrasikan perencanaan fisik dengan ekonomi dan juga pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Visi Ibu Kota Negara. RDTR 1KN akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Akhmad Jaka mengatakan, kegiatan Prakonsultasi Publik Revisi UU No.3 Tahun 2022 Tentang IKN dan Rancangan RDTR IKN bertujuan memberikan pemahaman kepada calon investor mengenai UU Nomor 3 Tahun 2022 dan penguatan posisi OIKN & RDTR dalam kaitannya dengan aspek sustainability dan ekonomi, guna memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. (*)

Kunjungi Sekretariat APINDO, Manajemen BNI Samarinda Tawarkan Skema Khusus Pembiayaan Proyek IKN

Pemimpin Cabang BNI Kantor Cabang Samarinda, Komang Arya Wira Kusuma Atmaja dan pengurus APINDO Kaltim

Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – BNI '46 Kantor Cabang Samarinda mengunjungi Sekretariat DPP Apindo Kaltim di Jalan Asnawie Arbain Balikpapan untuk berdiskusi sekaligus bertukar pikiran dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemimpin Cabang BNI Kantor Cabang Samarinda, Komang Arya Wira Kusuma Atmaja didampingi RM Business Banking BNI KC Samarinda, Ana Fitria dan Staff Marketing, Arief Prabowo Susilo.

Kedatangan manajemen BNI 46 Samarinda disambut Ketua DPP APINDO Kaltim, Slamet Brotosiswoyo didampingi Bendahara, Herjhon Song Hadinata, dan para pengurus antara lain, Arif Purwoko Doeror, Rivai Sudirman, Seven John, Faisal, dan lain-lain. Dalam pertemuan itu, Arya Wira mengatakan, BNI mendukung para pengusaha lokal melalui dukungan pembiayaan dengan skema khusus. Terutama bagi kontraktor maupun sub konraktor yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

'Salah satu skema khusus yang ada saat ini yaitu BNI Direct. BNI direct adalah layanan internet banking dari BNI untuk nasabah non perorangan. Layanan ini dihadirkan untuk mempermudah transaksi dan pengelolaan keuangan (cash management) pelaku bisnis dan perusahaan,". Fitur-fitur andalan BNIDirect yang paling banyak diberdayakan antara lain Virtual Account, Autocollection, eTax (MPN G3), Utility Payment, Transfer Management (incl. Payroll), Liquidity Management, Trade Finance, dan Financial Supply Chain Management. Fitur-fitur tersebut adalah fitur yang membantu pengguna dalam aktivitas collection. Pengguna bisa melakukan seluruh jenis pembayaran untuk perusahaan menjadi lebih mudah.

Misalnya saja, Liquidity Management yang telah disebutkan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengaturan keuangan cash flow perusahaan lebih mudah karena bisa dikerjakan dengan menggunakan fitur cash pooling, range balance, cash distribution dan lainnya.

Karena banyaknya fitur kemudahan yang ada di BNI Direct, maka secara garis besar fitur tersebut terbagi menjadi dua. Pertama adalah fitur transaksi dan fitur financial reporting. Ia menjelaskan untuk fitur reporting biasanya digunakan nasabah yang tidak aktif transaksi karena fitur di BNI direct digunakan untuk mencetak rekening koran, mutasi, dan laporan keuangan lainnya yang bisa dilihat secara online.

Berkaitan dengan pembangunan IKN, BNI 46 telah membangun outlet di Kecamatan Sepaku, serta memberdayakan masyarakat dengan menjadi agen BNI. Ketua APINDO Kaltim, Slamet Brotosiswoyo menyambut baik penawaran BNI Kaltim yang memberikan kemudahan dalam mendukung pengusaha lokal. Khususnya dalam memperoleh pendanaan proyek. Ia berharap terjalin kerja sama yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha lokal sehingga mampu menjadi pemain utama dalam proyek nasional yang ada di daerah.

Senergi Apindo Kaltim - BTN - Indosat, Dukung Pembangunan IKN

APINDO Kalimantan Timur bersama Bank BTN dan PT Indosat Tbk akan menggelar temu bisnis pekan ini. Pertemuan tersebut bertujuan membuka peluang kerja sama antara pengusaha-pengusaha di Kalimantan Timur dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara. Rencana ini terungkap dalam pertemuan antara pengurus APINDO Kaltim, dengan pimpinan BTN Balikpapan, Jumat, 21 Juli 2023. Sebelumnya, APINDO Kaltim juga menerima kunjungan pimpinan Indosat Balikpapan.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua APINDO Kaltim

Slamet Brotosiswoyo, Wakil Ketua, Abriantinus, Bendahara Herjhon Song Hadinata. Sementara dari BTN Balikpapan dipimpin Branch Manager, Rachman Suhendri. "Ini merupakan salah satu tugas APINDO dalam menjembatani kepentingan para pengusaha agar bisa bersinergi dalam membangun bisnis," kata Slamet Brotosiswoyo.

Pengurus APINDO Kaltim menggelar pertemuan dengan pimpinan BTN Balikpapan dan Indosat

Menurut Slamet, kegiatan temu bisnis akan dilaksanakan pekan ini di Kantor Cabang Utama BTN Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Baru. Setidaknya 40 pengusaha akan hadir dalam pertemuan itu yang berasal dari berbagai sektor. Mulai perhotelan, perkebunan, infrastruktur, properti, dan lain sebagainya. "Tetapi kita juga akan libatkan IWAPI yang selama ini konsen di sektor UMKM," imbuh Slamet.

Sementara Branch Manager BTN Balikpapan Rachman Suhendri menyambut baik rencana itu. Apalagi menurut Rachman, semakin banyak pengusaha dari luar daerah yang sudah tertarik berinvestasi dan mencari partner lokal untuk berbisnis di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. "Kami sangat menyambut baik rencana pertemuan ini dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dalam mengembangkan bisnis di Kota Balikpapan," imbuhnya.

Rachman menyebut pertemuan itu akan menjadi peluang bagi BTN untuk mengenalkan produk dan layanan jasa perbankan yang dimilikinya. "Selama ini BTN identik dengan KPR, dan itu tidak salah. Namun sesungguhnya ada banyak layanan perbankan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk UMKM," jelasnya. BTN, kata Rachman merupakan salah satu bank BUMN yang menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai cukup besar.

DPP APINDO KALIMANTAN SELATAN

Ketua	**: Dr. Supriadi, S.Pd, MM**
Sekretaris	**: Novi Irawati, SH**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 9 Kabupaten / Kota**

Sepanjang tahun 2023 DPP APINDO Kalimantan Selatan (Kalsel) telah melakukan berbagai macam kegiatan dalam fungsi dan kelembagaan dan hubungan kemitraan dengan perusahaan dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun beberapa kegiatan yg dapat kami laporkan sebagai kegiatan APINDO Kalimantan Selatan selama Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penganugerahan **"Paritrana Award"** bersama DPP APINDO Kalsel dilaksanakan di Hotel Rattan In Banjarmasin, pada bulan Maret 2023

2. DPP APINDO bersama Disnaker Prov Kalsel dalam rangka Bimtek pengisian WLKP dalam Jaringan, yang dilaksankan pada bulan April 2023

3. DPP APINDO Bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker Provinsi Kalsel dalam rangka mensingkronkan data anggota DPP APINDO Kalsel.

4. Kantor Sekretariat DPP APINDO Kalimantan Selatan : Jln. Jalan Perdagangan Ruku HKSN Blok D Kav 7 Banjar Utara Banjarmasin Kalimantan Selatan, kode pos 70125. Email : kalsel.apindo@gmail.com

5. Silaturahmi, Rapat Pengurus DPP Apindo Kalsel, di Hotel Harper Jalan S. Parman, Banjarmasin

6. Kegiatan Mayday Bersama DPP APINDO Kalsel Tahun 2023

   Kompetisi Futsal, APINDO Bersama Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, KSBSI, KSPSI,dan FSPMI Kalsel

   Peringatan Mayday DPP APINDO Kalsel bersama Gubernur Kalsel, Disnakertrans, dan Aliansi Serikat Pekerja / Serikat Buruh, KSBSI, KSPSI dan FSPMI Kalsel

   Dimeriahkan dengan Bazar / Pasar Murah, yang diselenggarakan oleh, Disnaker, APINDO, Serikat Buruh, Bulog, Koperasi dan diikuti pesertanya dari UMKM Binaan Apindo Kalsel

7. Acara Mayday (Potong Tumpeng) Bersama Sekda Prov. Kalsel, Kapolda, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, KSBSI, KSPSI dan FSPMI Kalsel, bertempat di Kantor KSBSI

8. Ketua DPP APINDO Kalsel DR. Supriadi, S.Pd, MM menghadiri undangan DPN bersama TIM 10 persiapan Munas Apindo 2023

9. Menghadiri Acara Munas APINDO yangg ke-XI di Jakarta dilaksanakan Bulan Juni 2023

10. Menghadiri Pelantikan Ketua DPN Terpilih, di-hadiri oleh Ketua DPP APINDO Kalsel

11. Ketua DPP DR. Supriadi, S.PD, MM menjadi pembicara "Urgensi Perencanaan Tenaga Kerja Mendukung Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga Kerja di Perusahaan" yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023 bertempat di Swissbell Hotel Banjarmasin.

12. Presentasi ketua DPP DR. Supriadi S.Pd., MM pada Kesbanglinmas Kalsel dalam rangka antisifasi demo buruh dalam kenaikan UMP kalsel, 30 Agustus 2023

13. "Coffee Morning" bersama Pengurus DPP APINDO Kalsel, 20 Agustus 2023

14. Rapat Bersama Tim dari Kapolda Kalsel dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Kolaborasi Sinergitas Antara DPP APINDO Kalsel dan Kapolda Prov. Kalsel, 25 Agustus 2023

15. Pertemuan Pengurus, Panitia Pelaksana persiapan Expo dan Seminar APINDO 2023, bertempat di Café Wakaka, di Jalan A.Yani KM. 05 Banjarmasin, Kalsel

16. Kunjungan Kerja DPP APINDO Kalsel dalam rangka Silaturahmi dengan Direktur Utama Bank Kalsel yang baru dilantik, Bapak Fachrudin..

17. Jumpa Pers Ketua DPP Apindo dalam Rangka Persiapan Expo 2023

18. Member Gathering dan Seminar Nasional, yang dilaksankan DPP APINDO Kalsel Tanggal 31 Agustus 2023, di Swiss Bell Hotel Banjarmasin

19. Ketua DPP APINDO Kalsel DR. Supriadi, S.PD. MM bersama ketua DPN APINDO Ibu Shinta W. Kamdani membuka APINDO Expo UMKM 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus - 4 September 2023

20. Menghadiri acara wokshop "Rencana Strategis Apindo untukPeningkatan Keanggotaan dan Layanan Serta penguatan Jaringan Kelembagaan Antar DPN, DPP,DPK dan Asosiasi Sektoral" yang diselenggarakan oleh DPN APINDO dan ILO, di Jakarta 18 - 19 September 2023

21. Menghadiri Undangan Rapat Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, yang dilaksanakan Bulan November 2023 bertempat di Kantor Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan

22. Kegiatan Rapat Tripartit 2023, Bertempat di Kantor Disnakertrans Prov Kalimantan Selaan

23. Studi Banding / Kunjungan Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan ke Dewan Pengupahan Nasional Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang dilaksankan di Jakarta, di Hotel Holiday Iin pada tanggal 25 - 27 Oktober 2023.

24. Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan, Penetapan UMP 2023

25. Menghadiri Kegiatan Lokakarya yang dilaksankan di Bali pada tanggal 10 - 12 Desember 2023, dengan Tema "Mewujudkan Pengupahan yang berkeadilan dan Berdaya Saing"

26. Silaturahmi Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel Bersama Disnakertrans, APINDO, Serikat Pekerja, yg dilaksankan pada Tanggal 27 Desember 2023.

DPP APINDO SULAWESI UTARA

Ketua	**: Nicho Lieke, MBA**
Sekretaris	**: Ferry Wowor**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 15 Kabupaten / Kota**

Berikut ini kami laporkan pokok-pokok kegiatan DPP APINDO Sulawesi Utara yang dilaksanakan tahun 2023 :

1. Kegiatan *Talkshow realisasi APBN 2022 sulut* yang dilaksanakan pada Senin, 9 Januari 2023 Pukul 10.00 WITA s.d. Selesai, Tempat Cafe Pumorow Manado. Kegiatan Bersama Kakanwil Bea Cukai, Kepala perwakilan BI Sulut, APINDO Sulut, Kanwil Pajak, Kanwil KPKNL, OJK SULUT, ISEI Sulut, Diklat, Pemprov Sulut, KADIN Sulut, Komunitas Ekspor, dll

2. Kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), Kementerian Investasi/BKPM RI yang melakukan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan memberikan penjelasan secara komprehensif dan rinci terkait dengan kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB DPMPTSP se-Provinsi Sulawesi Utara. APINDO Sulut menjadi salah satu juri yang dipilih (5 April 2023).

3. Kerjasama ILO dan Disnaker Provinsi sulut untuk membentuk Dewan Keselamatan dan kesehatan kerja (DK3). APINDO diundang dan Membahas strategi dan langkah2 memperkuat Kapasitas DK3 meningkatkan hak pekerja. kegiatan pd hari Rabu 31 Mei 2023 pkl. 09.00 di Swissbell Hotel Manado

4. Dengan Kemenkumham Kanwil Sulut utk APINDO sulut, kegiatan sosialisasi kebijakan pemilik manfaat pada hari Selasa 23/5/2023 jam 9 pagi.

5. APINDO SULUT hadir pada Penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) APINDO tahun 2023, tanggal 14-15 Juni 2023 di Jakarta. di Hotel JS Luwansa Jakarta

6. Penanda tanganan dan penyerahan MOU program UMKM Merdeka, APINDO Sulut dengan Rektor Universitas Nusantara Manado bpk Teddy Manueke. 13 Juli 2032

7. APINDO SULUT menggelar Kegiatan Ngopi Bareng bersama Kakanwil Ditjen Bea Cukai Sulbagtara dan tim Kanwil BC, PT. JJM Tbk dan para Jurnalis sulut, terkait Perijinan, cukai dan kepabeanan. Selasa, 25 Juli 2023

8. Dengan KPK RI, menggelar Rapat koordinasi terkait permasalahan SIUP Minol distributor. Rabu 12 Juli 2023, di kantor DMPTSP Provinsi Sulut pkl. 14.00 wita. Apindo Sulut, Kadis PTSP Sulut, Kadisperindag Sulut, Karo Hukum pemprov sulut.

9. Apindo Sulut memfasilitasi Kunjungan tim Chemonics dari Amerika dan DPN APINDO dari Jakarta di sulawesi utara, menyiapkan 4 UMKM untuk kunjungan ke kantor APINDO untuk tanya jawab tentang perijinan, dll Adapun 4 UMKM dimaksud adalah, PIAMA (Pia' Manado), Catherine Food & Dessert Tomohon, MomMiyuki, dan LienS food Manado. Tim Chemonics dalam penyusunan proposal untuk selanjutnya kedepan melalui APINDO Sulut akan membantu permodalan UMKM di Sulut dengan dana dari Chemonics, Kamis 27 Juli 2023.

10. Apindo sulut ikut serta Event North Sulawesi Investment Forum 2023 di hotel grand kawanua Manado, mulai Pkl 14.00 wita. APINDO ikut serta dalam pameran dihadiri dua Wakil Menteri dan Gubernur Sulut, 8 - 9 Agustus 2023.

11. Apindo Sulut mengikuti kegiatan Bersama PHRI Sulut, kegiatan dari DPD Forum lembaga pelatihan Vokasi Indonesia Sulut, acara Afternoon Tea bersama Dr. Hongjoo Hahm konsultan ILO dalam rangka "Sulut menuju Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif" Sabtu 19 Agustus 2023, jam 14:00 - selesai, di The Gade Jl. Piere Tendean Boulevard (depan Mantos 1)

12. Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) menggelar Leadership Training bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Utara. Kegiatan yang diikuti pejabat administrator Kemenkeu Provinsi Sulawesi Utara ini berlangsung di Gedung Keuangan Negara (GKN), Selasa (24/10/2023). Ketua Apindo Sulut, Nicho Lieke, menjadi pembicara dalam pertemuan ini. Sebagai pengusaha dan praktisi, Nicho Lieke membagikan banyak hal terkait leadership, kepemimpinan jitu, efektif dan efisien. Salah satu hal penting yang dibagikan ialah seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan cepat dan tepat. Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara, Erwin Situmorang, mengungkapkan bincang eksekutif digelar untuk meningkatkan kapasitas pejabat administrator, diikuti oleh pejabat eselon III, para pengambil keputusan di unit vertikal masing-masing.

13. Festival Tuna. Apindo Sulut Bersama Kanwil Bea Cukai Sulbagtara dan beberapa mitra lainnya mensupport kegiatan Festival Tuna yang diikuti oleh puluhan UMKM di Sulut, dilaksanakan di lapangan parkir mega mall manado di Kawasan megamas manado 29 Oktober 2023.

14. APINDO Sulut masuk dalam tim dewan pengupahan Sulut untuk pembahasan dan penetapan UMP Sulut 2024. 21 November 2023.

15. APINDO dan pengurus menghadiri dan membahas Terkait Kunjungan kerja komisi IX DPR RI di provinsi Sulawesi Utara, Jumat 8 Desember 2023, Pkl. 15.30 wita di Kantor Gubernur Sulut.

DPP APINDO SULAWESI SELATAN

Ketua	**: Suhardi**
Sekretaris	**: Yusran IB Hernald**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 23 Kabupaten / Kota**

Berikut ini kami laporkan pokok-pokok kegiatan DPP APINDO Sulawesi Selatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 :

1. APINDO peduli

Selama Januari-Februari 2023 Sulawesi Selatan mengalami banjir besar. Hampir seluruh Wilayah Sulsel terendam dan longsor dimana-mana. Bahkan bulan Februari 2023, tercatat Kota Makassar terjadi banjir terbesar selama 20 tahun terakhir. DPP APINDO Sulsel melalui APINDO Sulsel Peduli tergerak membantu korban bekerjasama dengan Bupati Maros dan Dandim 1408/BS Makassar. Sebagian bantuan juga disalurkan kepada RT/RW di Makassar.

2. Dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indonesia

Pada tanggal 31 Januari 2023, DPP APINDO Sulsel dan Kalla Group mengadakan event terbesar untuk 300 Pengusaha di Sulawesi Selatan dengan menghadirkan Bapak Jusuf Kalla sebagai pemateri tunggal. Acara yang diadakan di Wisma Kalla dengan mengusung tema : Dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indonesia. APINDO juga menggandeng dua Organisasi Pengusaha yaitu Kadin Sulsel dan HIPMI Sulsel. Suatu bentuk Kolaborasi dan harmonisasi tiga organisasi besar Pengusaha di Sulawesi Selatan. Kekompakan nyata dalam beraktifitas memajukan Pengusaha. Bapak Jusuf Kalla selama hampir 3 (tiga) jam berbicara tentang perjalanan menjadi Pengusaha dan Penguasa. Lika-liku usaha, ekonomi dan perpolitikan. Menjadi masukan berharga untuk generasi pengusaha dan memacu dan memicu Pengusaha bangkit dan melahirkan Pengusaha baru di Sulawesi Selatan.

3. Amaliah Ramadhan DPP APINDO Sulawesi Selatan

Sejak 1 April 2023 hingga 16 April 2023, DPP APINDO Sulawesi Selatan mengadakan Amaliah Ramadhan. Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kodam XIV/Hasanuddin, pelaksanaan Amaliah Ramadhan diisi dengan kegiatan Amal, memajukan UMKM dan sinergi dengan BUMN dan Perusahaan Swasta anggota APINDO serta organisasi kemasyarakatan.

Tercatat Bank Indonesia / BRI / BNI / PLN / Pertamina/Pelindo / Semen Tonasa /Bank Sulselbar/ Bulog/Telkom / DPRD / PSMTI / Perguruan Tinggi /Asosiasi Jasa Boga /Kodam XIV Hasanuddin/ Lantamal VI Makassar dll turut berpartisipasi baik mengirimkan UMKM binaan maupun langsung membuka *stand*.

Acara juga diisi Paket Amal APINDO sebanyak 1000 paket / berbuka puasa setiap hari dengan panti sebanyak 1500 anak panti / Lomba keagamaan dan Pelatihan.

4. 3rd CEO Business Forum 2023

Pada tanggal 8 Juni 2023, untuk ketiga kalinya Forum diskusi para CEO ini digelar persembahan kolaborasi DPP APINDO Sulsel, CELEBES Media Group dan tuan rumah GALESONG Group.

Kegiatan "3rd CEO Business Forum 2023" dengan Tema : Mendorong Pertumbuhan melalui Ekonomi Digital, Sub tema : Potensi Ekonomi Digital bagi Kebangkitan Ekonomi Sulsel. Kegiatan menghadirkan pembicara dari Pimpinan Bank Indonesia, Pimpinan Bank Mandiri dan Komut PTPN IX dan diikuti lebih dari 50 Pengusaha di Sulawesi Selatan.

Era Digitalisasi yang begitu cepat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal tersebut menjadi topik utama dalam kegiatan kali ini Dalam gelaran acara bertajuk *"Driving Through Growth Digital Economy"* ini, fokus membahas bagaimana ekonomi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan.

Dengan adanya program CEO Business Forum ini, kita dapat mengetahui bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lajunya percepatan era digitalisasi,Apindo berharap agar pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan tidak hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun di era digitalisasi ini, karena percepatan nya yang begitu laju, membuat kita tak boleh terlambat.

Ketua Apindo Sulsel, Suhardi pun menyampaikan bahwa acara CEO Business Forum ini, diharapkan tidak hanya menjadi ajang diskusi, tapi juga sebagai ajang eksekusi bisnis.

"Acara ini diharapkan tidak hanya jadi diskusi bisnis, tapi kedepannya bisa jadi ajang eksekusi bisnis, sehingga kita bersama-sama bisa memajukan ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan khususnya diera digitalisasi ini," ungkap Suhardi.

5. Millenials & Campus Festival

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Selatan melibatkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milenial dalam Light of Festival atau Festival Lampu di Lapangan Hasanuddin Makassar. Kegiatan yang digelar APINDO Sulsel bekerja sama dengan Kodam XIV/Hasanuddin selama 8 Juni-8 Juli 2023 itu, menghadirkan diikuti 60 gerai UMKM milenial.

Ketua APINDO Sulsel Suhardi di Makassar, Jumat, mengatakan pelibatan UMKM milenial dalam kegiatan itu penting untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan sebagai wadah regenerasi. Dipiihnya UMKM milenial sebagai salah satu UMKM yang sedang marak di kalangan anak muda dan tentu menjadi penggerak ekonomi.Peserta kegiatan antusias sebab lebih dari 100 pendaftar ingin mengikuti festival ini, namun setelah dilakukan kurasi hanya 60 UMKM milenial terpilih ikut Festival Lampu. "Kami selalu mengikutsertakan UMKM dalam setiap kegiatan Apindo Sulsel," kata Suhardi.

Target Apindo mendorong jiwa kewirausahaan di kalangan anak muda maupun kampus sebagai alternatif selain menjadi profesional. Ia mengatakan jiwa anak muda yang kreatif perlu diberikan wadah guna menjadi pengusaha sukses ke depan.

6. RAKERKONPROV dan Peresmian Kantor Baru DPP APINDO Sulawesi Selatan

Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel resmikan gedung baru yang berlokasi di Jalan Cendrawasih No. 128 (depan ex Stadion Mattoanging) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (20/7/2023). Gedung baru Apindo terdiri atas empat lantai. Lantai dasar untuk pengembangan bisnis UMKM dan Biz Cafe sebagai tempat pertemuan bisnis dan lantai 1 untuk Sentra UMKM dan oleh-oleh Sulsel.

Sekretariat APINDO Sulsel/Lembaga Pelatihan/ Podcast berada di lantai 3. Adapun lantai 4 dimanfaatkan sebagai Rumah Pintar APINDO Sulsel/Pusat pengembangan IT dan digital Marketing. Gedung baru Apindo Sulsel diresmikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO Shinta W. Kamdani, bersama Gubernur Sulsel yang diwakili Sekda Andi Darmawan Bintang, dan Pangdam XIV/ Hasanuddin Totok Imam Santoso. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Makassar Moh Ramadhan Pomanto, Ketua DPRD Sulsel A. Ina Kartika Sari, dan pimpinan organisasi BUMN maupun

swasta. Perwakilan Kapolda, Kajati, Pangkoopsud, Danlantamal dll.

Pemprov Sulsel mengapresiasi hadirnya gedung Baru Apindo Sulsel.Dengan adanya gedung baru maka Apindo bisa dengan leluasa melahirkan ide dan program kerja.

Sebagai Asosiasi Profesi, lanjutnya, APINDO harus menjadi organisasi yang mandiri."Ini momentum untuk menyusun program yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat khususnya terkait dengan lapangan pekerjaan. Program ini juga nantinya bisa memberi manfaat tidak hanya untuk Apikdo, tetapi juga kepada Sulawesi Selatan," jelas Andi Darmawan Bintang.

Pemprov Sulsel berharap dengan semangat kebersamaan dan Sinergitas antara Apindo, Perbankan dan BUMN bisa semakin berkompeten dan profesional bersinergi dengan pemprov Sulsel serta pihak-pihak terkait untuk dapat memajukan peran serta organisasi, khususnya terkait proses pembukaan lapangan kerja.

Peresmian gedung baru dirangkaikan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) yang diikuti 24 DPK yang ada di Apindo Sulsel.Hadir Ketua dan Sekretaris DPK Apindo Sulsel.Rakerkonprov menghasilkan Program kerja 2023-2024.

Hadir pula sebagai narasumber mitra Pemprov, Perbankan, Pegadaian dlm acara Dialog Ekonomi dan Investasi utk memperkuat posisi dunia usaha di era kolaborasi dlm pembangunan nasional khususnya di daerah Sulawesi Selatan.

Tema Kegiatan : "Sinergi Kolaborasi Pengusaha, Perbankan dan BUMN demi Kemajuan Ekonomi Sulawesi Selatan". Dengan sub tema : Peran Pengusaha Lokal untuk Ekonomi Bangkit. Sebagai rangkaian, disi beberapa kegiatan antara lain:

- Pameran UKM dari beberapa Kabupaten kota se Sulsel
- APINDO Sulsel MoU dgn BTN dlm pembuatan kartu anggota yg dpt berfungsi ATM
- APINDO Sulsel MoU bersama Pegadaian utk penyaluran KUR tanpa Agunan terkhusus kpd UMKM binaan APINDO.

7. Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan dan Penentuan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024

Gubernur Sulawesi Selatan akhirnya menetapkan UMP Sulsel Tahun 2024 pada tanggal 21 Nopember 2024. Berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan Sulsel sebelumnya, unsur pengusaha meminta kenaikan 1,45 persen atau sama dengan Rp 3,434.298 sesuai PP 51 tahun 2023. Sedangkan unsur buruh meminta kenaikan 7,14 persen atau sama dengan Rp3.626.844. Ada kenaikan Rp 241.699.353, jika dibandingkan dengan UMP Sulsel 2023.

Setelah melalui proses pemufakatan melalui Unsur Pengusaha yang diwakili Ketua APINDO Sulsel dan Unsur Serikat Pekerja yang diwakili beberapa Ketua Serikat Pekerja dan Unsur Pemerintah diwakili Kadisnaker Sulsel, maka Gubernur Sulsel menetapkan SK 1671/12 tahun 2023 21.11.23 tanggal 21 November 2023 tentang penetapan UMP Sulsel 2024. Ada beberapa poin penegasan dalam SK untuk UMP itu ditetapkan Rp. 3.434.298 atau ada kenaikan 1,40 persen. Sesuai pengajuan APINDO Sulsel.

Penetapan UMP Sulsel ini diwarnai Demo Serikat Buruh selama 2 (dua) hari namun berakhir damai dengan hasil saling pengertian antara Pengusaha yang diwakili APINDO Sulsel dan Serikat Pekerja Sulawesi Selatan.

8. Leadership Development Program (MLD)

Bulan Nopember 2023, Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Sulawesi Selatan mengadakan 2 (dua) perhelatan, yang pertama dan terbesar di wilayah Timur Indonesia yang dipusatkan di Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Event yang pertama kali diadakan oleh DPP APINDO adalah Makassar Leadership Development Program (MLD) adalah sebuah program pengembangan dan pelatihan tentang Leadership (kepemimpinan) yang bekerja sama dengan IELLN-Inno Change, dan ACT–ESQ Group yang disponsori oleh ADB (Asian Development Bank) guna melatih para Leader dan calon Leader dari organisasi dan perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan agar mereka memiliki soft skill dan mindset yang semakin bertumbuh agar dapat bersaing di era VUCA (Volatile, Uncertaint, Complex and Ambigous).

Pelatihan di laksanakan selama 3 (tiga) hari penuh di gedung Wisma Kalla yang diikuti oleh 30 orang peserta dengan hasil yang memuaskan karena peserta merasa sangat antusias dan merasakan banyak manfaat akan adanya pelatihan leadership ini, dan berharap pelatihan ini dapat dilakukan secara berkala setiap tahunnya.

9. Makassar Leadership Summit (MLS) 2023

Event besar dan pertama kali juga tentang Leadership adalah Makassar Leadership Summit 2023 (MLS) yang diselenggarakan DPP APINDO Sulsel pada tanggal 27-28 Nopember 2023.

Acara ini dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, yang mana APINDO bekerja sama dengan PMSM (Persatuan Manajemen Sumberdaya Manusia) dan GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) yang dipimpin Baso Alim Bahri yang juga sebagai salah seorang wakil ketua APINDO Sulawesi Selatan. Pada acara besar ini DPP APINDO berhasil menghadirkan para pemimpin nasional dan pengusaha nasional seperti bapak Jusuf Kalla pimpinan Kalla Group, Tanri Abeng dan 20 pemimpin perusahaan lainnya serta Ketua DPN APINDO Ibu Shinta W. Kamdani, Pemilik Sintesa Group.

Para pemimpin nasional dan perusahaan ini memberikan materi tentang berbagai hal yang memberikan wawasan dan strategi dalam membangun usaha di dunia yang sedang berubah dengan pesatnya. Bapak Jusuf Kalla memberikan ilmu *decision making for leader* atau pengambilan keputusan yang perlu diambil oleh para pemimpin masa depan Indonesia serta Ibu Shinta W. Kamdani memberikan *insight* tentang *woman in leadership* bahwa setiap pemimpin tidak harus seorang lelaki namun sebuah usaha atau organisasi bisa juga dipimpin dan dikembangkan oleh seorang wanita. Makassar Leadership Summit ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah dan para peserta merasakan banyak manfaat dan inspirasi yang dapat diambil dalam event terbesar ini yang pertama kalinya diadakan di luar pulau Jawa khususnya di Indonesia Timur.

Semua kegiatan DPP APINDO ini dapat terlaksana dengan adanya inovasi DPP APINDO yang terus bekerja dan berupaya dalam membangun perekonomian negeri dengan mengadakan kegiatan yang produktif demi peningkatan ilmu dan pendidikan terutama kepada para anggota APINDO dan masyarakat pada umumnya sehingga APINDO Sulawesi Selatan dapat menjadi salah satu role model dalam menjalankan visi dan misi DPN APINDO dalam mewujudkan iklim usaha kondusif dengan kegiatan yang produktif dan harmonis antara para pemilik usaha, pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

10. Sentra UMKM dan Pusat Ole-Ole Sulawesi Selatan

Makassar adalah kota yang kaya akan budaya dan memiliki banyak produk oleh oleh khas Makassar yang dihasilkan oleh UMKM lokal, namun seringkali UMKM kesulitan untuk memperluas jangkauan pasar untuk memasarkan produk mereka secara efektif, oleh karena itu oleh – oleh khas Bugis Makassar harus lebih dikenal oleh masyarakat luas karena memiliki banyak macam dan jenisnya sehingga potensi kuliner atau kerajinan yang

beragam bias menjadi magnet bagi wisatawan local dan mancanegara.

SENTRA UMKM APINDO sebagai solusi yang telah dirancang khusus untuk menyatukan seluruh pelaku UMKM Sulsel dalam satu gedung pusat oleh oleh TERBESAR, TERLENGKAP dan TERMURAH di Makassar

Dengan luas area 500 m^2 yang terdiri dari 2 (dua) lantai dilokasi yang strategis di area pusat bisnis dan berhadapan langsung dengan lapangan sepak bola Makassar International Stadium.

Area Lantai 1, menampilkan Produk UMKM binaan; Pertamina, Pelindo, PLN, Semen Tonasa, PT.Vale Indonesia, Grup Astra, Bank Sulselbar, Bank CIMB Niaga, Biz Café. **Area Lantai 2**, menampilkan Produk Kerajinan binaan DEKRANASDA se-Sulsel dan UMKM binaan Apindo Sulsel. **Area Lantai 3**, dilengkapi ruang pelatihan UMKM dengan kapasitas 75 peserta. **Area Depan**, dilengkapi dengan ruang ATM Centre

Produk UMKM terlebih dahulu di Kurasi mutu produk, kemasan, perijinan (PIRT, BPOM, Halal) Ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan Bapak Drs. Suhardi, M.Si didampingi Wakil Ketua membidangi MICE Bapak Achmadi Kamaruddin dalam rapat persiapan *Soft Opening* yang dihadiri oleh BUMN, Perbankan, Dekranasda se-Sulawesi Selatan, pelaku usaha UMKM untuk tetap menjaga kualitas produk, kemasan yang menarik serta harga lebih murah.

DPP APINDO GORONTALO

Ketua	**: Dra. Hj. Marhani Usman, SH**
Sekretaris	**: Yanuar Velberg, SE**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 6 Kabupaten / Kota**

Berikut ini kami kegiatan penting DPP APINDO Gorontalo yang dilaksanakan selama tahun 2023 :

1. Musyawarah Provinsi DPP APINDO Gorontalo Maret Tahun 2023

2. Berpartisipasi Aktif pada Dialog *May Day Fiesta 2023* bersama Serikat Pekerja dan Bapak Walikota Gorontalo

3. Berpartisipasi Aktif pada Pekan *Job Fair 2023* bersama Disnaker Provinsi Gorontalo yang di selenggarakan di Universitas Negeri Gorontalo Pembukaan oleh Ibu Menaker RI

4. Menghadiri Pengukuhan Pengurus DPN APINDO Juli 2023 di Jakarta

5. Mengikuti *Indonesia Digital Sumit* di selenggarakan oleh DPN 28 November 2023 sebagai peserta

6. Menghadiri Dialog APINDO "Road Map Perekonomian Indonesia 2024 - 2029" di Jakarta

7. Dialog DPP APINDO bersama dengan Bapak KAPOLDA Gorontalo

8. Rapat Pleno Penetapan UMP 2024

9. Focus Group Discussion : Antisipasi Dampak Penyesuaian Harga BBM di Provinsi Gorontalo

10. Dialog TRIPARTIT

DPP APINDO SULAWESI BARAT

Ketua	**: Andri Prayoga Singkarru, M.Sc.**
Sekretaris	**: H. Arman Salimin, M.Pd**
Dewan Pimpinan Kab/Kota	**: 6 Kabupaten / Kota**

Berikut ini kami laporkan pokok-pokok kegiatan DPP APINDO Sulawesi Selatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 :

1. Ketua APINDO Sulbar dengan Kelompok Tani Bawang dan Cabai

2. Ketua APINDO Memberikan Arahan Kepada Kelompok Tani Bawang dan Cabai

3. Diskusi Ketua APINDO Sulbar dengan Kelompok UMKM

4. Rapat Tim 9 Paritrana Awards BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulbar

5. Tim 9 Tes Wawancara Kepala Daerah Pemerintah Kota dalam Ajang Paritrana Awards Ketenagakerjaan Provinsi Sulbar

6. Rapat Tatib Dewan Pengupahan 2023

7. Rapat Pertemuan Penetapan UMP Sulawesi Barat

8. Rapat Dengan BPJS Ketenagakerjaan Sulbar Terkait Koordinasi Mengenai Kepesertaan Diseluruh Perusahaan yang Ada di Provinsi Sulawesi Barat

9. Rapat Penetapan UMP 2024 Provinsi Sulawesi Barat

10. Penandatanganan Berita Acara Penetapan UMP 2024 Sulawesi Barat

11. Diskusi dengan Ketua DPP APINDO Sulbar Terkait Hasil Penetapan UMP 2024 dan Kondisi Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat

Terkait dengan aktivitas Dewan Pengupahan APINDO Sulawesi Barat, para Anggota Dewan Pengupahan APINDO Sulawesi Barat, melakukan negosiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam dewan pengupahan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) agar para investor dari luar tertarik melakukan investasi baik di sektor industri, maupun jasa sehingga usaha dapat tumbuh dengan cepat di provinsi ini dan dapat merekrut tenaga kerja lokal dan dapat mengurangi angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat.

Pada tanggal 13 November 2023 Dewan Pengupahan APINDO Sulawesi Barat untuk menyatukan persepsi dalam rangka rapat penentuan UMP Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat bersama anggota Dewan Pengupahan lainnya. Dan kami telah menyepakati untuk mengundang beberapa perusahaan–perusahaan yang ada di Sulbar untuk memberikan masukan terkait UMP tahun 2023. Namun tidak sempat terlaksanakan karena waktu masing-masing perusahaan disibukkan oleh kesibukan masing-masing, sementara rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Barat akan segera dilaksanakan.

Pada tanggal 16 November 2023, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat mengundang seluruh Dewan Pengupahan untuk rapat membahas terkait penetapan UMP Tahun 2023. Dalam rapat tersebut terjadi kesepakatan antara APINDO dan Serikat Buruh bahwa dalam Penetapan UMP 2024 didasari Peraturan Pemerintah NO. 51 Tentang pengupahan, serta Rumusan Dewan Pengupahan menggunakan Formulasi PP 51 Sehingga UMP Sulbar 2024 naik dari Rp. 2.871.795 menjadi Rp. 2.914.958 atau naik 1,5 persen, jika dirupiahkan ada kenaikan Rp. 43.163.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan bervariasi mulai dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan sampai perkebunan. Provinsi ini memiliki lahan sawah beririgasi teknis seluas 11.366 ha, sawah beririgasi setengah teknis 2.813 ha, sawah beririgasi nonteknis atau sederhana seluas 15.254 ha, dan lahan sawah tadah hujan seluas 26.012 ha, total saluran irigasi mencapai 29.433 km.

Potensi sumberdaya alam itu belum termasuk lahan palawija seluas 11.441 ha dan lahan hortikultura serta sayur-mayur seluas 5.220.363 ha. Dengan luas lahan tersebut, provinsi ini menghasilkan produksi padi sejumlah 253.885 ton yang dipanen di atas areal seluas 59.766 ha atau rata-rata 4,25 ton per ha, palawija sebanyak 85.851 ton, hortikultura dan sayur-mayur sebanyak 683.965 ton.

Di sektor hutannya 1.120.583 ha atau 67% luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat, mempunyai hutan lindung seluas 700.020 ha, hutan terbatas 341.904 ha dan hutan tetap 78.659 ha. Hutan-hutan inilah menghasilkan 51.306 ton kayu dan 2.927 ton rotan dan damar.

Sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi ini menghasilkan 18.456 ton ikan pada 2005, terdiri atas 37.720,4 ton perikanan laut dan 4.364 ton perikanan darat, terdiri atas 4.184,71 ton tambak air payau, 9,15 ton ikan kolam, 4,7 ton ikan sawah, dan 153,3 ton ikan rawa, Pemerintah setempat mencatat bahwa perikanan laut sebanyak 60.116 ton/tahun. Areal budidaya rumput lautnya seluas 20.337 ha dann areal budidaya tambak seluas 13.662 ha. Kegiatan perikanan ini didukung oleh 17.616 kepala keluarga atau 7,5% dari total penduduk di provinsi itu.

Di sektor peternakan, pada 2005 ternak besarnya terdiri atas 75.301 ekor sapi, 12.421 ekor kerbau dan 8.285 ekor kuda. Sementara ternak kecilnya terdiri atas 179.530 ekor kambing dan 102.866 ekor babi. Populasi itik berjumlah 1.661.893 ekor, ayam ras sebanyak 178.958 ekor dan ayam kampung mencapai 4.033.262 ekor, Produksi peternakan meningkat pada 2006, mencakup 88.511 ekor sapi, 15.456 ekor kerbau, 10.789 ekor kuda, 243.235 ekor kambing dan 122.948 ekor babi. Populasi unggas juga bertambah, mencakup ayam kampung 4.891,449 ekor, ayam potong sebanyak 447.795 ekor, ayam petelur sebanyak 180.651 ekor dan itik sebanyak 1.716.252 ekor.

Lahan perkebunan seluas 342.917 ha, terbagi dalam perkebunan rakyat seluas 278.014 ha dan perkebunan besar swasta seluas 64.903 ha, Komoditas unggulan di sektor perkebunan adalah kakao dengan luas lahan 116.425 ha menghasilkan 102.976 ton, diikuti jambu mete dengan luas lahan 635 ha menghasilkan 144 ton, kelapa dalam dengan luas lahan 54.180 ha menghasilkan 52.259 ton, kelapa sawit dengan luas lahan 14.890 ha menghasilkan 261.004 ton, kelapa hibrida dengan luas lahan 5.226 ha menghasilkan 6.000 ton dan kopi robusta dengan luas lahan 18.835 ha menghasilkan 7.065 ton.

Di sektor pertambangan dan energi, potensi sumberdaya alamnya meliputi batu bara dengan potensi 322.142.102 ton. Kedua potensi ini terdapat di Kabupaten Mamuju. Potensi bijih besi sebesar 88.819 ton terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, potensi tembaga 50.000 ton, zeng dan mangan 15.000 ton. Semua potensi ini terdapat di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju. Potensi pasir kuarsa sangat besar, sebanyak 3.534.411 ton dan zeolit di Kabupaten Mamasa dengan potensi sebesar 17.057.600 ton, kaolin di Kabupaten Polewali Mandar dengan potensi sebesar 570.937 ton, batu gamping sebesar 3.864.430 ton di Kabupaten Majene serta potensi marmer dengan potensi sebesar 570.937 ton. Setelah di eksplorasi, potensi minyak dan gas bumi terdapat di Kabupaten Pasangkayu, Blok Surumana dan Blok Kurna, BudangBudong, dan Karama.

Terkait dengan keorganisasian Provinsi Sulawesi Barat DPK telah terbentuk di enam Kabupaten, dan semoga koordinasi DPK dan DPP berjalan dengan baik dan seluruh agenda-agenda organisasi dunia usaha dapat terkomunikasikan dari DPK sampai ketingkat DPN. Jumlah Anggota DPP: 23, Jumlah anggota DPK: 93 (Kab. Pasangkayu: 18, Kab. Mamuju Tengah: 18, Kab. Mamasa: 15, Kab. Mamuju: 14, Kab. Polman: 14, Kab. Majene: 14). Sementara itu jumlah DPK APINDO Sulbar terdapat 6 DPK.

Sebagai penutup Laporan Kegiatan, DPP APINDO Provinsi Sulawesi Barat, akan terus melakukan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dengan menggali seluruh potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Provinsi Sulawesi Barat juga merupakan salah satu daerah penyanggah ekonomi Ibukota Negara yang baru, olehnya kedepan DPP APINDO Sulbar akan mendorong para investor untuk dapat berinvestasi di Provinsi Sulawesi Barat.

DPP APINDO SULAWESI TENGGARA

Ketua	: Ir. Abu Sarif Bafadal, MM
Sekretaris	: H. A. Mahaseng Mustafa, SE, MM
Dewan Pimpinan Kab/Kota	: 13 Kabupaten / Kota

Kegiatan DPP APINDO Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan selama tahun 2023 :

Bulan Januari :

1. Rapat Konsolidasi terkait penyempurnaan Kepengurusan hasil Musprov IV APINDO Sultra.
2. Melakukan sosialisasi terkait Surat DPN APINDO Nomor : 019/DPN/1.4/2B/I/23 tentang Rekruitmen Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari Apindo.

Bulan Februari :

1. Sosialisasi atas keluarnya SK DPN Apindo Nomor : 048/SK-DPN/1.2/2B/II/23, tanggal 16 Februari 2023, tentang Struktur, Komposisi dan Personalia DPP APINDO Sultra tahun 2022 - 2027.

Bulan Maret :

1. Rapat pengurus lengkap dengan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar APINDO Sultra, terkait perkenalan Pengurus Baru dan Pembahasan Rekomendasi kegiatan Musprov IV, tanggal 16 Maret 2023.

Bulan April :

1. 3 April 2023, Rapat I Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit, yang membahas isu isu strategis dan aktual terkait hubungan Industial, serta persiapan pelaksanaan Hari Buruh *(may day)* yang akan mengadakan Liga Futsal antara Serikat Buruh/ Pekerja.
2. 14 April 2023, 16 Maret 2023. Liga Futsal Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam Rangka Memperingati Hari Buruh *(may day)* APINDO Sultra turut Berpartisipasi dalam rangka kesuksesan Kegiatan ini.
3. 16 April 2023, Dalam Rangka Pelaksanaan Ibadah Bulan Suci Ramadhan dan untuk mempererat Silaturahmi, DPP APINDO Mengadakan Buka Puasa Bersama Pengurus dan Anggota Masyarakat lainnya.

Bulan Mei :

1. 2 Mei 2023, mengikuti Rapat dengan DPN APINDO (secara Daring) tentang Pendaftaran Calon Hakim AdHoc PHI 2023.
2. 20 Mei 2023, Menghadiri Undangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Kendari terkait Rapat Kordinasi FKLPID (Forum Komunikasi lembaga Pelatihan dan Industri Daerah) di Kendari.
3. 31 Mei 2023, Menghadiri Undangan DPN Apindo terkait Konsolidasi Pelaksanaan Munas dan Pertemuan DPP dan DPN APINDO serta Silaturahmi dengan Menteri Tenaga Kerja RI, di Jakarta.

Bulan Juni :

1. 8 Juni 2023, Rapat DPP APINDO Sultra tentang Persiapan keikut sertaan dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) APINDO IX di Jakarta.
2. 14 - 15 Juni 2023, Menghadiri Kegiatan Musyawarah Nasional IX APINDO sebagai Peserta dan Peninjau di Jakarta.
3. 30 Juni 2023, menghadiri Undangan DPN (secara Daring) tentang Sosialisasi Masukan Revisi PP No. 35 tahun 2021.

Bulan Juli :

1. 31 Juli 2023, menghadiri Pengukuhan Kepengurusan DPN APINDO Masa Bakti 2023 - 2028 hasil Munas IX, bersama Presiden RI, Bapak Joko Widodo di Jakarta.

Bulan Agustus :

1. 2 Agustus 2023, menghadiri Focus Discussion Group (FGD) Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, atas Undangan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara.
2. 9 Agustus 2023, Menghadiri Rapat I Dewan Pengupahan Provinsi (Deperprov) Sultra di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara, Membahas dan Menganalisa Acuan Penetapan yang akan menjadi Dasar Penetapan UMP tahun 2024 yang akan datang.

Bulan September :

1. 20 September 2023, menjadi Pembicara/Pemateri dalam Bimtek Perencanaan Tenaga Kerja Mikro tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI, di Hotrel Claro Kendari.
2. 22 September 2023, Rapat Pengurus DPP Apindo terkait tentang sosialisasi Hasil Munas, Pembentukan DPK, dan lain lain, serta sekaligus mengikuti Zoom Meeting Rapat Kordinasi tentang Pengupahan bersama DPN Apindo.
3. 26 September 2023, Rapat Kordinasi Pencegahan Korupsi antara DPP APINDO Sultra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Dalam Membangun Kolaborasi serta Sinergitas pencegahan prilaku Koruptif di Dunia Usaha Secara Umum, DI Kantor DPP Apindo Sultra.

4. 27 September 2023, Menghadiri Ramah Tamah Penganugrahan Tokoh Sultra, dalam Rangka Hari Ulang Tahun "Kendari Pos' di Hotrel Claro Kendari.

Bulan Oktober :

1. 16 Oktober 2023, bersama Kadis Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara, Menghadiri Penyerahan Bantuan Sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada Masyarakat terdampat sekitar Pabrik, oleh PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Bulan November :

1. 8 November 2023, Mengikuti Pelatihan Kader Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang diselenggaran oleh Dirtektur Kelembagaan dan Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Dirjen HI dan Jamsostek, di Jakarta.
2. 16 November 2023, Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi (Deperprov) Sulawesi Tenggara, terkait Penetapan UMP tahun 2024 untuk direkomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara di hotel Plaza inn Kendari.
3. 22-24 November 2023, mengikuti Focus Discussion Group (FGD) Monitoring dan Evaluasi yang diselenggarakan oleh Dirjen Pembinaan HI dan Jamsostek di Denpasar, Bali
4. 27 November 2023, Menghadiri Acara Puncak Pelayanan KB dalam rangka Pencanangan Gerai Yansus, KB Perusahaan dan Peringatan Hari Ibu ke 95 tahun 2023 (secara Daring).
5. 28 November 2023, Sidang II Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit, membahas berbagai situasi terkini imbas dari Penetapan UMP 2024, serta beberapa permasalahan Hubungan Industrial yang terjadi di Sulawesi Tenggara.
6. 29 November 2023, menghadiri Pameran Tenaga Kerja (Job Fair) 2023 yang dilenggarakan oleh Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara, yang dihadiri pula oleh Bapak PJ. Gubernur Sultra Komjen (purn) Andap Budi Revianto di Atrium Lippo Plaza, Kendari.

Bulan Desember :

1. 7 - 9 Desember 2023, mengikuti sosialisasi Penerapan Hubungan Industrial Pancasila yang diselenggarakan oleh Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Dirjen HI dan Jamsostek, di Jakarta.
2. 10 - 12 Desember 2023, mengikuti Lokakarya Kebijakan Pengupahan Nasional, dalam rangka menwujudkan pengupahan yang berkeadilan dan berdaya saing, yang dilaksanakan oleh Dirjen HI dan Jamsostek, di Denpasar, Bali.

Dokumentasi

Rapat perkenalan pengurus baru hasil Musprov IV APINDO Sultra, di Kendari 16 Maret 2023

Rapat I LKS Tripartit, dalam rangka Mayday, dan isu lain tentang Tenaga Kerja, 3 April 2023

Pelaksanaan Liga Futsal Provinsi Sultra dalam rangka Hari Buruh (May Day) 2023 di Kendari, 14 - 18 April 2023

Rapat persiapan kepesertaan APINDO Sultra dalam Munas APINDO IX, 8 Juni 2023 di Kendari

Silaturahmi DPN, DPD dengan
Menteri Tenaga Kerja RI, 31 Mei 2023 di Jakarta

Kegiatan Musyawarah Nasional APINDO IX,
tanggal 1 - 15 Juni di Jakarta

Rapat I Dewan Pengupahan Provinsi, 9 Agustus 2023, di Kantor Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara

Pembicara/Pemateri dalam Bimtek Perencanaan TK Mikro 2023, Badan Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja RI, 20 September 2023, di Hotel Claro Kendari

Rapat kordinasi pencegahan korupsi antara DPP APINDO Sultra dengan KPK RI dalam membangun kolaborasi dan sinergitas pencegahan korupsi di dunia usaha,
26 September 2023 di Kendari

Menghadiri penyerahan bantuan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat terdampak sekitar pabrik niket PT VDNI Morosi - Konawe, 16 Oktober 2023 di Kendari

Pelatihan kader dan sosialisasi penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI, 8 November dan 7 - 9 Desembar di Jakarta

Sidang II LKS Triparti, 28 November 2023 di Kendari

Informasi Potensi Investasi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sumber daya alamnya yang melimpah untuk penghidupan masyarakat, juga dapat memiliki peluang investasi di berbagai sektor.

Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumber peluang investasi di Sulawesi Tenggara meliputi Pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta pertambangan.

Potensi tersebut tersebar di wilayah daratan seluas 38.140 kilometer persegi dan perairan seluas 114.879 kilometer persegi. Sekitar 2,7 juta penduduknya tinggal di 15 kabupaten dan dua kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ada berbagai komoditas dari sektor pertambangan tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara, baik yang telah dieksplorasi secara penuh maupun yang belum dimanfaatkan. Pulau Buton adalah wilayah yang paling terkenal sebagai penghasil aspal terbesar di Sulawesi Tenggara. Diperkirakan 662 juta ton timbunan aspal curah berada di Kabupaten Buton dan Buton Utara.

Sulawesi Tenggara juga memiliki pasokan bijih nikel yang sangat besar, sekitar 97,4 miliar ton, yang tersebar di Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe, dan Bombana (Pulau Kabaena). Beberapa kegunaan bijih nikel antara lain sebagai bahan pembuatan koin, rangka otomotif, dan baterai isi ulang untuk kendaraan bermotor listrik (KBL). Seiring dengan tujuan pemerintah dalam meningkatkan produksi dan penggunaan KBL, kebutuhan nikel diperkirakan juga akan meningkat.

Salah satu pabrik pengelolaan nikel di Sulawesi Tenggara

Meski aspal dan bijih nikel telah dieksplorasi secara luas, salah satu komoditas yang kurang dimanfaatkan di kawasan ini adalah emas. Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan memiliki 1.125 juta ton emas yang saat ini sedang dieksplorasi para peneliti di sekitar Kabupaten Bombana dan sekitarnya.

Permintaan emas tetap tinggi karena kegunaannya sangat beragam. Salah satu contohnya, di industri elektronik, emas digunakan sebagai konduktor produk elektronik. Di sektor konstruksi, emas memantulkan radiasi sinar matahari di dalam kaca.

Komoditas potensial lainnya antara lain pasir kuarsa (lima miliar ton), marmer (206 miliar meter kubik), tanah liat (884 miliar meter kubik), oniks (547 ribu meter kubik), kapur (1,6 triliun meter kubik), mangan (enam ribu hektar), pasir besi, fosfat, kromit, dan magnesit.

Selain sektor pertambangan, pemerintah provinsi juga unggul dalam pengelolaan alam. Keunggulan ini membantu penduduk menuai manfaat maksimal di sektor pertanian, pariwisata, kehutanan, dan energi. Hasil pangan di sektor pertanian antara lain padi, ubi kayu, ubi jalar, jagung, sagu, kacang tanah, dan kedelai.

Alam dan budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan internasional di sektor pariwisata. Beberapa destinasi wisata yang terkenal antara lain segitiga karang di Kepulauan Wakatobi, gua Liangkobori dan Meleura, air terjun Wawonii, Pulau Bokori di Kota dan Masjid Al-Alam di Kota Kendari, Kawasan Wisata Toronipa dan Tapulaga di Kabupaten Konawe, dan beberapa wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara.

Keindahan Pulau Bokori menjadi salah satu destinasi Wisata di Sulawesi Tenggara bagi para wisatawan.

“Untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah tengah mengembangkan konsep pariwisata terpadu seperti yang sedang berjalan di kawasan pantai Toronipa, Kabupaten Konawe. Saat rampung, pantai ini akan terhubung dengan destinasi wisata lain di Sulawesi Tenggara,”

Dari sektor energi, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumber energi panas bumi yang terletak di Lainea dan Mangolo. Berdasarkan data Kementerian Investasi/ BKPM, selama triwulan III 2021, realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Sulawesi Tenggara masing-masing mencapai 354,4 juta dollar AS dan Rp1.779,0 miliar.

Pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Beberapa langkah yang sudah diambil untuk mewujudkannya adalah pembangunan, rekonstruksi, dan pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan. Pemerintah provinsi berencana mengembangkan Bandara Halu Oleo menjadi bandara internasional.

Selain itu, pemerintah juga berfokus meningkatkan jumlah proyek investasi di sektor pertambangan. Pemerintah mengusulkan beberapa kawasan ekonomi baru sebagai kawasan strategis nasional yang akan mendukung tujuan investasi, salah satunya Routa di Kabupaten Konawe yang saat ini sedang dalam proses pengembangan konsep kawasan industri terpadu.

“Routa memiliki potensi yang melimpah di sektor pertambangan (nikel, kapur, oniks) dan energi (pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi).

Saat ini, terdapat dua perusahaan besar yang beroperasi di Morosi, Kabupaten Konawe, adalah PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Keduanya memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

DPP APINDO PAPUA

Ketua	: Ir. Tulus Sianipar
Sekretaris	: Adi Patonding
Dewan Pimpinan Kab/Kota	: 1 Kabupaten / Kota

Kegiatan DPP APINDO Papua yang dilaksanakan selama tahun 2023 :

1. APINDO beserta organisasi lain (SP Papua, SPSI, SBNI) turut berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembahasan penetapan upah minum Daerah Provinsi Papua. APINDO telah melakukan kegiatan rapat bersama Pemerintah daerah dalam kegiatan rapat / sidang dewan pengupahan penetapan UMP 2024, tanggal 20 November 2023.

   Merujuk pada PP nomor 51 Tahun 2023, sidang penetapan upah UMP Papua 2024 naik sebesar 4,13% dari UMP 2023 sbesar Rp. 4.024.270,-. Hasil penetapan UMP 2024 telah di sepakati dan di tuangkan dalam surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/398/Tahun 2023, tentang Upah Minimum Provinsi Papua tahun 2024.

2. APINDO aktif turut berperan hadir dalam setiap kegiatan lain yang diadakan oleh pelaku dunia usaha di tanah papua. Dalam suatu kesempatan Apindo di undang hadir oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Papua dalam Acara Rakercap GAPKI Cabang Papua tanggal 20 Desember 2023. Yang bertemakan "GAPKI hadir mewukjudkan sawit yang berkelanjutan untuk Papua maju".

   Jumlah pengusaha lokal sawit yang ada di papua baru berjumlah 20 perusahaan, dan yang tergabung dalam organisasi GAPKI Cabang Papua baru 9 anggota Perusahaan. Jika dihitung-hitung dari luas hutan yang ada di papua terhadap luas lahan perkebunan kelapa sawit di Papua hanya sebesar kisaran di bawah 1% dari jumlah luas hutan papua. Ini berarti masih sangat terbuka luas lahan bagi infestor untuk berinfestasi di dunia usaha kelapa sawit khususnya di tanah Papua. Hal ini sempat di sampaikan oleh Ibu Susana Wanggay, Assisten 2 Bidang Ekonomi dan Kesejahtraan Rakyat.

   Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa pemerintah daerah siap memfasilitasi dan menyambut gembira apabila ada pengusaha/infestor yang ingin bekerja menjalin kerja sama bersama masyarakat lokal dalam dalam pengembangan dunia usaha kelapa sawit di papua, sebab usaha ini di pandang padat karya yang menyerap banyak tenaga

kerja dengan demikian pengangguran berkurang dan kesejahtraan ekonomi masyarakat meningkat.

Selain kelapa sawit, letak geografis papua yang berhadapan langsung dengan lautan pasifik dengan kadar garam yang tinggi dan kaya akan oksigen, pinggiran pantai khususnya Kabupaten Mamberamo sangat bagus dan potensial untuk bisnis pengembangan budidaya ikan kerapuh.

3. APINDO Papua turut hadir dalam undangan kegiatan Kemenaker RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 10 s/d 12 2023 di Bali, yang dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Papua. Penyeleggaraan lokakarya kebijakan Pengupahan Nasional dengan tema "Mewujudkan Pengupahan yang berkeadilan dan berdaya saing".

Rapat pertemuan kegiatan rutin DPP APINDO Papua, pembahasan agenda kerja tahunan

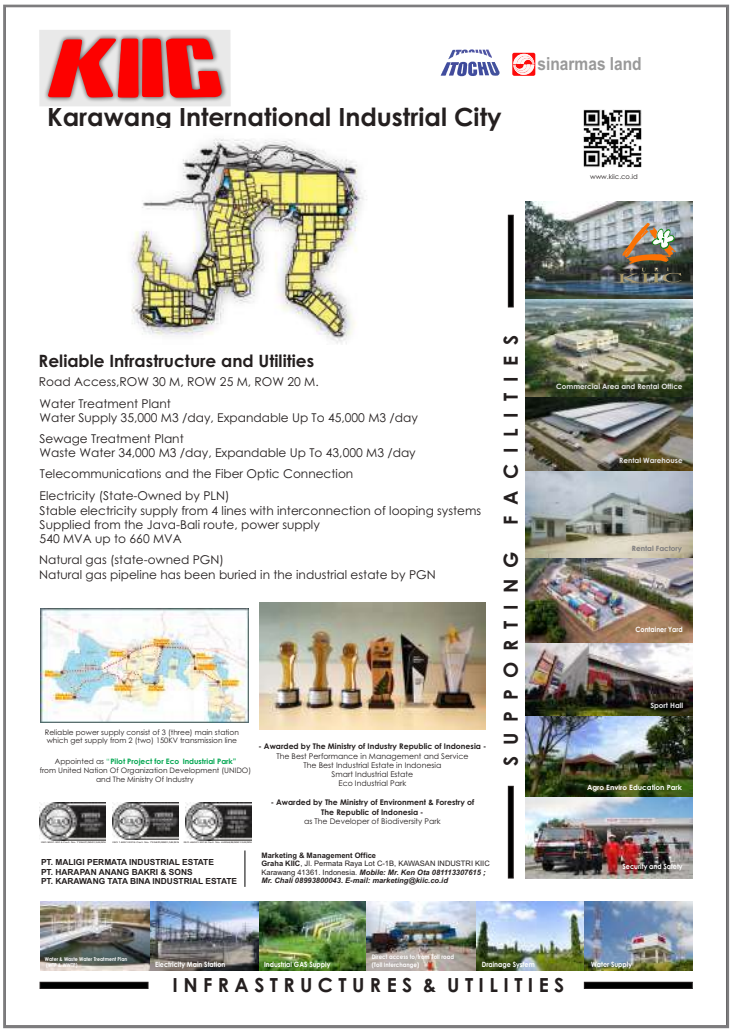

APINDO

ASTRA

satu Indonesia
Semangat Astra Terpadu Untuk Indonesia

Untuk hari ini dan masa depan **Indonesia**

67 Tahun ASTRA

Asosiasi Pengusaha Indonesia

Laporan Tahunan 2023

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Gedung Permata Kuningan Lt. 10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur, Setiabudi, Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 83780824 (hunting) - Fax : (62-21) 83780823, 83780746
Email : sekretariat@apindo.or.id - Website : www.apindo.or.id